



KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PETA PROSES BISNIS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Peta Proses Bisnis di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat per Tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 845);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PETA PROSES
BISNIS PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis di Kementerian Koordinator
Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Peta Proses Bisnis Kemenko PM sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Kemenko PM digunakan sebagai acuan
dalam tata laksana pelaksanaan kegiatan sebagaimana tugas
dan fungsi di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ABDUL MUHAJMIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Persidangan



Niken Ariati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PADA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

DAFTAR ISI

BAB I..... 7

PENDAHULUAN..... 7

 A. Latar Belakang..... 7

 B. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup.....7

 C. Prinsip-Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis..... 8

BAB II..... 9

PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 9

 A. Visi dan Misi.....9

 B. Tujuan dan Sasaran Strategis..... 9

 C. Tugas dan Fungsi..... 10

BAB III..... 11

PETA PROSES BISNIS.....11

 A. Daftar/Matriks Peta Proses Bisnis..... 11

 1. Proses Utama..... 11

 2. Proses Pendukung.....16

 B. Level 0 - Peta Sub Proses Bisnis Utama..... 21

 1. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.....21

 i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.....22

 a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat.....23

 b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat.....25

 c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi... 28

 d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.4 Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.....31

 e) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.5 Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran..... 34

 ii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial.....37

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelindungan dan Bantuan Sosial.....	37
b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial.....	40
c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan Sosial.....	43
d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.4. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan di Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan.....	46
e) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.5. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial.....	49
iii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu.....	52
a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	52
b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.....	55
c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu.....	58
d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3.4. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan.....	61
2. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan, Pengelolaan dan Penanganan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat..	64
i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran.....	65
a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.1. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat...	66
b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat.....	68
c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.3. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Koperasi.....	70
d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.4. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.....	72
e) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.5. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran.....	74
ii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial.....	76
a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.1. Pengendalian Kebijakan di Bidang Pelindungan dan Bantuan Sosial.....	76
b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.2. Pengendalian Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial.....	78
c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.3. Pengendalian Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial.....	80

d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.4. Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan...	82
e) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.5. Pengendalian Kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial.....	84
iii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu.....	86
a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3.1. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	86
b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3.2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.....	88
c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3.3. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu.....	90
d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3.4. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan.....	92
C. Level 0 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung.....	94
1. bLevel 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3. Manajemen Kinerja dan Kerjasama.....	94
i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1. Manajemen Kinerja dan Kerja Sama.....	95
a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1.1. Perencanaan	96
b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1.2. Kerja Sama...	99
c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1.3. Reformasi dan Birokrasi.....	101
d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1.4. Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan.....	102
2. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4. Hukum, Organisasi dan Persidangan.....	103
i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1. Hukum, Organisasi dan Persidangan.....	104
a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1.1. Perencanaan Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.....	105
b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1.2. Advokasi Hukum.....	106
c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1.3. Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.....	107
d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1.4. Dokumentasi Produk Hukum.....	108
ii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.2. Organisasi.....	109
a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.2.1. Tata Laksana dan Pengembangan Organisasi.....	109
iii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.3. Persidangan.....	111
a) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.3.1. Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan.....	111
b) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.3.2. Risalah dan Dokumentasi Persidangan.....	112
3. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5. Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi.....	113
i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.1. Komunikasi, Pengelolaan Data dan Informasi.....	114
a) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.1.1. Pelayanan Informasi Publik.....	115
b) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.1.2. Pelayanan Kehumasan dan Diseminasi Data dan Informasi.....	116
ii. Level 2 . . .	

ii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.2. Pengelolaan Data dan Informasi.....	118
a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.2.1. Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.....	118
b) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.2.2. Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi.....	120
c) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.2.3. Pengembangan, Pemeliharaan, Pengamanan Infrastruktur IT, Sistem Jaringan, dan Layanan Teknis.....	121
4. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6. Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.....	122
i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.1. Rumah Tangga....	123
a) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.1.1. Urusan Dalam..	124
ii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.2. Tata Usaha dan Protokol.....	125
a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.2.1. Tata Usaha Pimpinan.....	125
b) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.2.2. Protokol.....	127
iii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.3. Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia.....	128
a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.3.1. Manajemen Keuangan.....	128
b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.3.2. Manajemen Sumber Daya Manusia.....	130
5. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7. Tata Usaha.....	135
i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7.1 Tata Usaha Kedeputian dan Inspektorat.....	136
a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7.1.1. Tata Usaha Deputi.....	137
b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7.1.2. Tata Usaha Inspektorat.....	139
6. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8 Pengawasan.....	142
i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pengawasan Internal.....	143
a) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1.1. Perencanaan Pengawasan.....	144
c) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1.2. Pelaksanaan Pengawasan.....	145
d) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1.3. Pelaporan Pengawasan Internal.....	146
D. Peta Relasi.....	147
BAB IV.....	148
PENUTUP.....	148

PETA PROSES BISNIS PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan fokus terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas pembangunan nasional. Sebagai kementerian yang baru dibentuk dalam Kabinet Merah Putih, Kemenko PM memiliki mandat utama untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat. Kemenko PM memegang dua mandat strategis dari Presiden untuk memimpin upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Pertama, sesuai Inpres No. 4/2025, kami melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mengintegrasikan data sosial ekonomi nasional sebagai rujukan utama penetapan sasaran program. Kedua, melalui Inpres No. 8/2025, kami secara aktif mengoordinasikan K/L untuk menjamin ketepatan sasaran dan keterpaduan program di lapangan. Struktur organisasi kementerian ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Permenko PM) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang menjadi landasan formal dalam pembentukan unit-unit kerja di dalamnya. Namun, struktur organisasi tersebut belum sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional secara optimal tanpa adanya dokumen pendukung yang jelas dan terperinci, seperti Peta Proses Bisnis.

Peta Proses Bisnis menjadi elemen esensial untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PM. Peta Proses Bisnis berfungsi sebagai alat untuk memetakan alur kerja, tanggung jawab, dan interaksi antar unit dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Dengan peta ini, Kemenko PM dapat mengidentifikasi potensi duplikasi pekerjaan, memperbaiki proses yang tidak efisien, dan memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan strategisnya.

Urgensi penyusunan Peta Proses Bisnis semakin meningkat mengingat Kemenko PM masih berada dalam tahap awal pembentukannya. Sebagai kementerian yang mengemban peran koordinatif, Kemenko PM harus mampu bekerja secara sinergis dengan kementerian/lembaga lain serta berbagai pemangku kepentingan. Tanpa adanya Peta Proses Bisnis yang memandu proses internal dan mekanisme kerja, risiko ketidakefektifan koordinasi dan hambatan komunikasi dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Peta Proses Bisnis ini akan menjadi landasan utama untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara sistematis dan terukur.

B. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Penyusunan peta proses bisnis dimaksudkan agar setiap unit kerja di lingkungan Kemenko PM memiliki proses bisnis dan prosedur baku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Adanya peta proses bisnis diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dan optimal kepada pengguna layanan serta para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Kemenko PM.

Ruang lingkup penyusunan proses bisnis mencakup seluruh aktivitas proses kegiatan di setiap unit kerja yang berisi hubungan antar unit kerja baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk pencapaian kinerja yang ditetapkan, terdiri dari:

1. Peta Proses Bisnis pada proses utama, yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi koordinatif Kemenko PM; dan
2. Peta Proses Bisnis pada proses pendukung, yang berfungsi memastikan kelancaran pelaksanaan proses utama.

C. Prinsip-Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis

1. Definitif, yakni memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, yakni mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit kerja yang ada dalam ruang lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Visi dan Misi

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” merupakan visi Indonesia emas tahun 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, Presiden menuangkannya ke dalam 8 misi yaitu Asta Cita. Misi Asta Cita tersebut yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Dalam kerangka RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, Kemenko PM mendapatkan peran sebagai pilar transformasi sosial dan ekonomi yaitu ditugaskan mengampu Prioritas Nasional 3 (PN3) serta Prioritas Nasional 6 (PN6), di samping mendukung prioritas nasional lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemenko PM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kemenko PM. Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga selaras dengan upaya mewujudkan Asta Cita terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi Kemenko PM
Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.
2. Misi Kemenko PM
Untuk Mewujudkan Visi tersebut, Misi Kemenko PM sebagai berikut:
 - Meningkatkan kualitas sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran secara inklusif dan berkelanjutan;
 - Meningkatkan kualitas sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan;
 - Meningkatkan kualitas sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu secara inklusif dan berkelanjutan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dari penyusunan peta proses bisnis untuk mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.

Sasaran . . .

Sasaran Strategis pada penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Kemenko PM, yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas.

C. Tugas dan Fungsi

Kemenko PM mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kemenko PM menyelenggarakan fungsi:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
6. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet;
7. Penyelesaian permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
10. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

BAB III
PETA PROSES BISNIS

Peta proses bisnis merupakan gambaran menyeluruh mengenai alur kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna menghasilkan output serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Peta ini memuat rangkaian aktivitas yang saling terkait dan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PM guna mendukung pencapaian output, sasaran strategis, serta tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Peta proses bisnis menggambarkan alur proses bisnis Kemenko PM dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai output dan target kinerja yang ditetapkan. Peta proses bisnis menggambarkan aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan di lingkungan Kemenko PM dalam pencapaian output yang ditetapkan dengan harapan sasaran strategis dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam penyusunan peta proses bisnis menggambarkan alur Proses Inti (Utama) dan Proses Pendukung. Proses Inti (Utama) merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Kemenko PM;
2. Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kemenko PM dalam mencapai visi, misi, dan strategi Kemenko PM;
3. Dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Proses Pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan Proses Inti (Utama) berjalan dengan baik dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pengguna internal di lingkungan Kemenko PM; dan
2. Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti (utama) di lingkungan Kemenko PM.

Peta proses bisnis Kemenko PM meliputi:

1. Daftar/Matriks Peta Proses Bisnis;
2. Peta Proses bisnis level 0 sejumlah 1 peta proses;
3. Peta Sub-Proses bisnis level 1 sejumlah 8 peta proses;
4. Peta Sub-Proses bisnis level 2 sejumlah 27 peta proses; dan
5. Peta Sub-Proses bisnis level 3 sejumlah 128 peta proses.

Peta proses bisnis menggambarkan masing-masing proses utama dan proses pendukung. Jumlah level masing-masing peta proses tersebut disesuaikan dengan kompleksitas aktivitasnya.

A. Daftar/Matriks Peta Proses Bisnis

1. Proses Utama

Kode/Level				Proses Bisnis
0	1	2	3	
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1.	1.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran		
1.	1.	1.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat	
1.	1.	1.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	1.	1.	2.	Identifikasi Masalah

Kode/Level . . .

Kode/Level				Proses Bisnis
0	1	2	3	
1.	1.	1.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	1.	1.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	1.	1.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
1.	1.	2.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat	
1.	1.	2.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	1.	2.	2.	Identifikasi Masalah
1.	1.	2.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	1.	2.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	1.	2.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
1.	1.	3.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi	
1.	1.	3.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	1.	3.	2.	Identifikasi Masalah
1.	1.	3.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	1.	3.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	1.	3.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
1.	1.	4.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	
1.	1.	4.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	1.	4.	2.	Identifikasi Masalah
1.	1.	4.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	1.	4.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	1.	4.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
1.	1.	5.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran	
1.	1.	5.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	1.	5.	2.	Identifikasi Masalah
1.	1.	5.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	1.	5.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	1.	5.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
1.	2.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial		
1.	2.	1.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan	

Kode/Level				Proses Bisnis
0	1	2	3	
				Kebijakan di Bidang Pelindungan dan Bantuan Sosial
1.	1.	1.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	1.	1.	2.	Identifikasi Masalah
1.	1.	1.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	1.	1.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	1.	1.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
1.	2.	2.		Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial
1.	2.	2.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	2.	2.	2.	Identifikasi Masalah
1.	2.	2.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	2.	2.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	2.	2.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
1.	2.	3.		Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial
1.	2.	3.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	2.	3.	2.	Identifikasi Masalah
1.	2.	3.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	2.	3.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	2.	3.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
1.	2.	4.		Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan
1.	2.	4.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	2.	4.	2.	Identifikasi Masalah
1.	2.	4.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	2.	4.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	2.	4.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
1.	2.	5.		Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial
1.	2.	5.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	2.	5.	2.	Identifikasi Masalah
1.	2.	5.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	2.	5.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	2.	5.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Kode/Level				Proses Bisnis
0	1	2	3	
1.	3.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu		
1.	3.	1.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1.	3.	1.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	3.	1.	2.	Identifikasi Masalah
1.	3.	1.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	3.	1.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	3.	1.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
1.	3.	2.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal	
1.	3.	2.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	3.	2.	2.	Identifikasi Masalah
1.	3.	2.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	3.	2.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	3.	2.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
1.	3.	3.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu	
1.	3.	3.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	3.	3.	2.	Identifikasi Masalah
1.	3.	3.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	3.	3.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	3.	3.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
1.	3.	4.	Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan	
1.	3.	4.	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan
1.	3.	4.	2.	Identifikasi Masalah
1.	3.	4.	3.	Sinkronisasi Koordinasi
1.	3.	4.	4.	Pelaksanaan Kebijakan
1.	3.	4.	5.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
2.	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2.	1.	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran		
2.	1.	1.	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat	
2.	1.	1.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Kode/Level				Proses Bisnis
0	1	2	3	
2.	1.	1.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	1.	2.		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat
2.	1.	2.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	1.	2.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	1.	3.		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Koperasi
2.	1.	3.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	1.	3.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	1.	4.		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan
2.	1.	4.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	1.	4.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	1.	5.		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
2.	1.	5.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	1.	5.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	2.			Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
2.	2.	1.		Pengendalian Kebijakan di Bidang Pelindungan dan Bantuan Sosial
2.	2.	1.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	2.	1.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	2.	2.		Pengendalian Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial
2.	2.	2.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	2.	2.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	2.	3.		Pengendalian Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial
2.	2.	3.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	2.	3.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	2.	4.		Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan
2.	2.	4.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Kode/Level . . .

Kode/Level				Proses Bisnis
0	1	2	3	
2.	2.	4.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	2.	5.		Pengendalian Kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial
2.	2.	5.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	2.	5.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	3.			Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu
2.	3.	1.		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.	3.	1.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	3.	1.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	3.	2.		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal
2.	3.	2.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	3.	2.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	3.	3.		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu
2.	3.	3.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	3.	3.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	3.	4.		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan
2.	1.	4.	1.	Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.	1.	4.	2.	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

2. Proses Pendukung

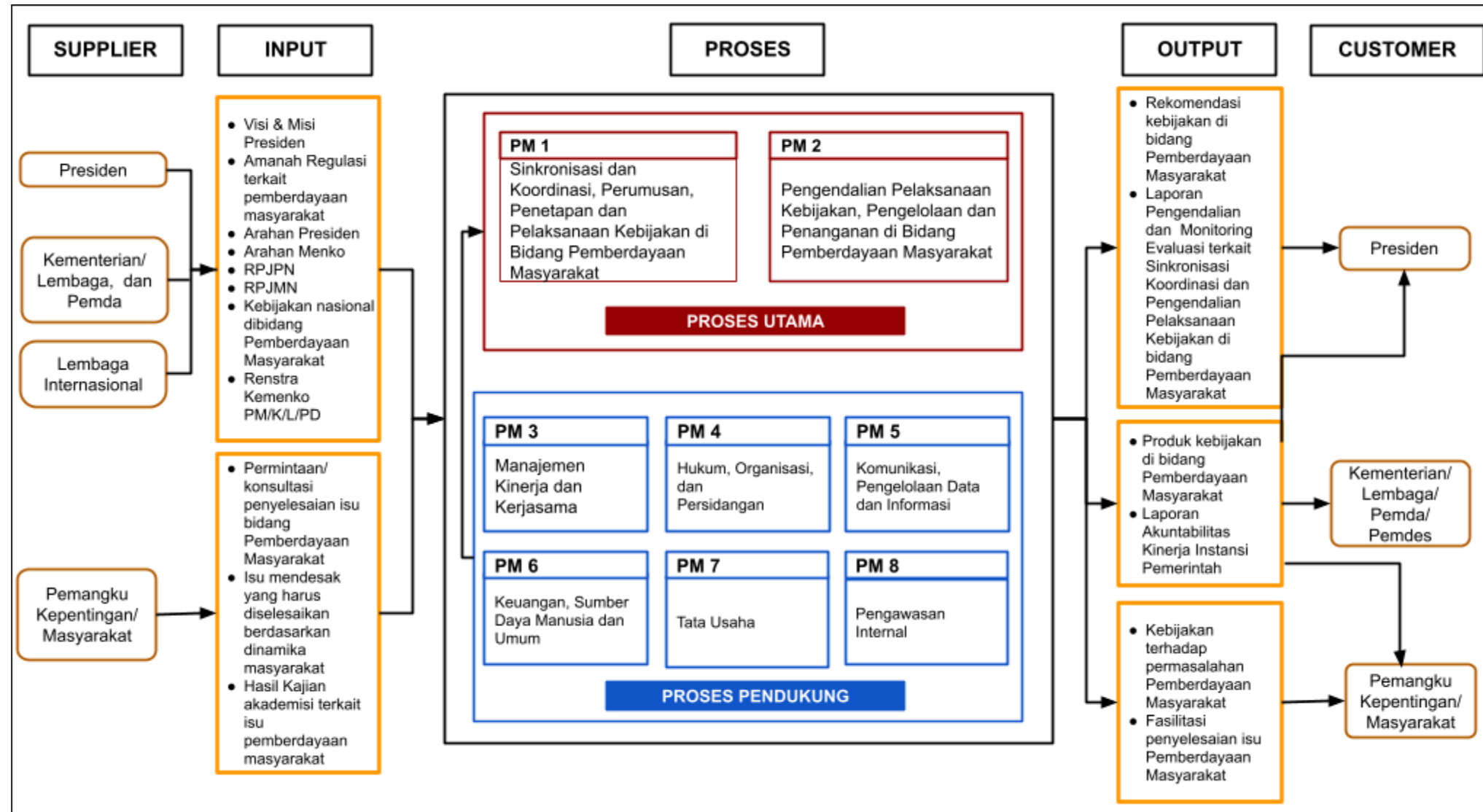
Kode/Level				Proses Bisnis
0	1	2	3	
3.				Manajemen Kinerja dan Kerja sama
3.	1.			Manajemen Kinerja
3.	1.	1.		Perencanaan
3.	1.	1.	1.	Pengelolaan Perencanaan Strategis
3.	1.	1.	2.	Pengelolaan Program Kerja
3.	1.	1.	3.	Pengelolaan Perencanaan Anggaran

Kode/Level				Proses Bisnis
0	1	2	3	
3.	1.	2.	Kerja Sama	
3.	1.	2.	1.	Kerja Sama Antar Organisasi Di Dalam Negeri
3.	1.	2.	2.	Kerja Sama Antar Organisasi Di Luar Negeri
3.	1.	3.	Reformasi Birokrasi	
3.	1.	4.	Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan	
4.	Hukum, Organisasi, dan Persidangan			
4.	1.	Hukum		
4.	1.	1.	Perencanaan Peraturan Pembentukan Perundang-undangan	
4.	1.	2.	Advokasi Hukum	
4.	1.	3.	Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	
4.	1.	4.	Dokumentasi Produk Hukum	
4.	2.	Organisasi		
4.	2.	1.	Tata Laksana dan Pengembangan Organisasi	
4.	2.	1.	1.	Penataan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja
4.	2.	1.	2.	Penyusunan Instrumen Dasar Pengelolaan Jabatan
4.	3.	Persidangan		
4.	3.	1.	Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan	
4.	3.	2.	Risalah dan Dokumentasi Persidangan	
5.	Komunikasi, Pengelolaan Data dan Informasi			
5.	1.	Pengelolaan Komunikasi		
5.	1.	1.	Pelayanan Informasi Publik	
5.	1.	2.	Pelayanan Kehumasan dan Diseminasi Data dan Informasi	
5.	1.	3.	Perpustakaan	
5.	2.	Pengelolaan Data dan Informasi		
5.	2.	1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	
5.	2.	1.	1.	Pengelolaan Data
5.	2.	1.	2.	Pengelolaan Sistem Informasi
5.	2.	2.	Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi	
5.	2.	3.	Pengembangan, Pemeliharaan, Pengamanan Infrastruktur IT, Sistem Jaringan, dan Layanan Teknis	
6.	Keuangan, SDM dan Umum			
6.	1.	Rumah Tangga dan Pengadaan		
6.	1.	1.	Urusan Dalam	

Kode/Level				Proses Bisnis
0	1	2	3	
6.	2.	Tata Usaha dan Protokol.		
6.	2.	1.	Tata Usaha Pimpinan	
6.	2.	1.	1.	Tata Usaha Menteri Koordinator
6.	2.	1.	2.	Tata Usaha Sekretaris Kemenko dan Staf Ahli
6.	2.	2.	Protokol	
6.	3.	Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia		
6.	3.	1.	Manajemen Keuangan	
6.	3.	1.	1.	Pelaksanaan Anggaran
6.	3.	1.	2.	Penyusunan Laporan Keuangan
6.	3.	2.	Manajemen Sumber Daya Manusia	
6.	3.	2.	1.	Perencanaan SDM
6.	3.	2.	2.	Pengadaan: Rekrutmen dan Seleksi
6.	3.	2.	3.	Penatausahaan Administrasi Kepegawaian
6.	3.	2.	4.	Pemberian Gaji dan Tunjangan
6.	3.	2.	5.	Pelindungan dan Jaminan
6.	3.	2.	6.	Pengembangan Kompetensi
6.	3.	2.	7.	Pengembangan Karir
6.	3.	2.	8.	Penilaian Kinerja, Penghargaan, dan Penegakan Disiplin
6.	3.	2.	9.	Pemberhentian
7.	Tata Usaha			
7.	1.	Tata Usaha Kedeputian dan Inspektorat		
7.	1.	1.	Tata Usaha Deputi	
7.	1.	1.	1.	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran
7.	1.	1.	2.	Penyelarasan Rencana Kerja Dan Anggaran
7.	1.	1.	3.	Pengelolaan Ketatausahaan
7.	1.	2.	Tata Usaha Inspektorat	
7.	1.	2.	1.	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran
7.	1.	2.	2.	Penyelarasan Rencana Kerja Dan Anggaran
7.	1.	2.	3.	Pengelolaan Ketatausahaan
7.	1.	2.	4.	Koordinasi, Fasilitasi, dan Pelaksanaan RB
7.	1.	2.	5.	Pembuatan Laporan
8.	Pengawasan Internal			
8.	1.	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pengawasan Internal		

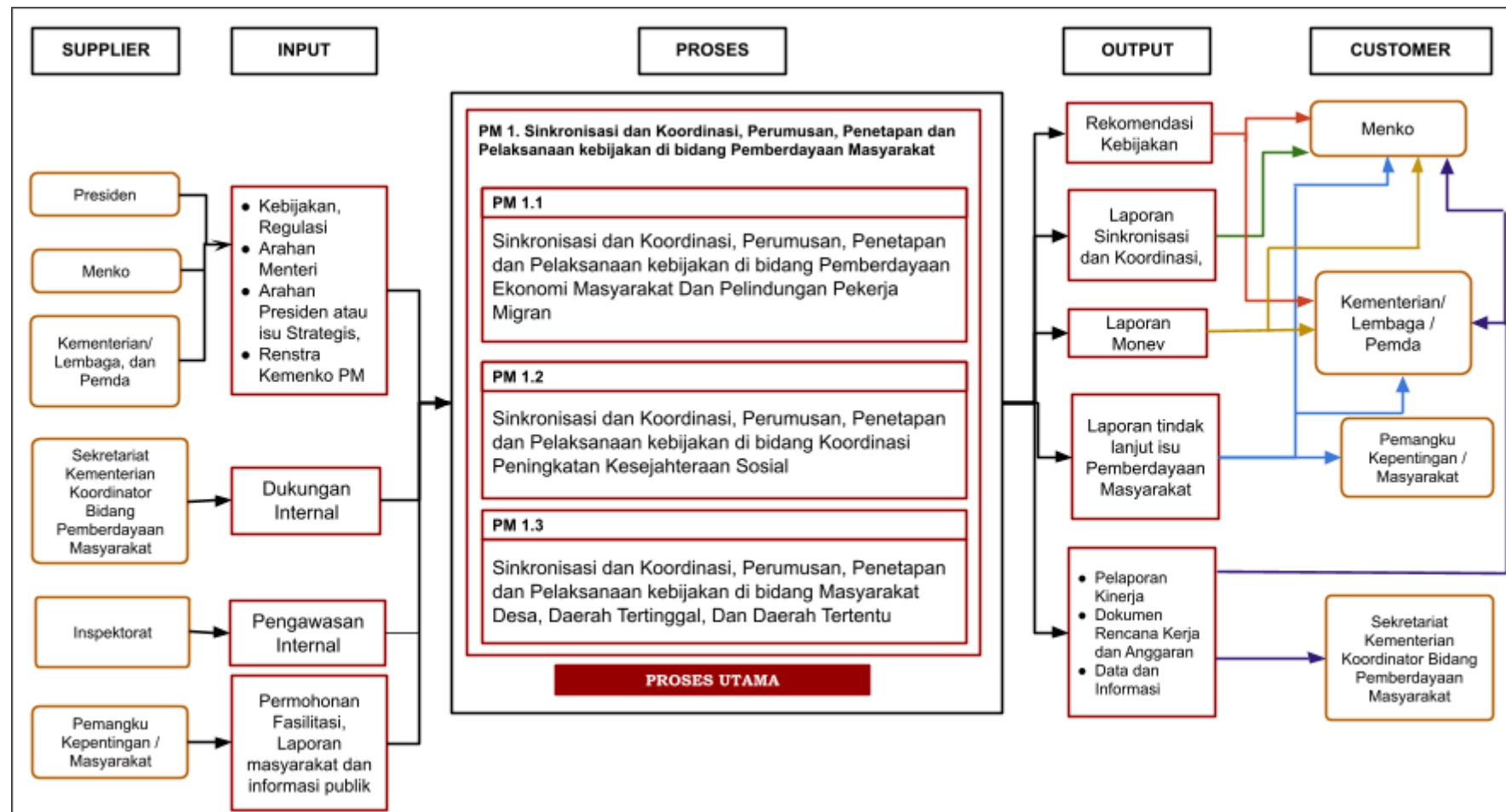
Kode/Level . . .

Kode/Level				Proses Bisnis
0	1	2	3	
8.	1.	1.	Perencanaan Pengawasan Internal	
8.	1.	2.	Pelaksanaan Pengawasan Internal	
8.	1.	3.	Pelaporan Pengawasan Internal	



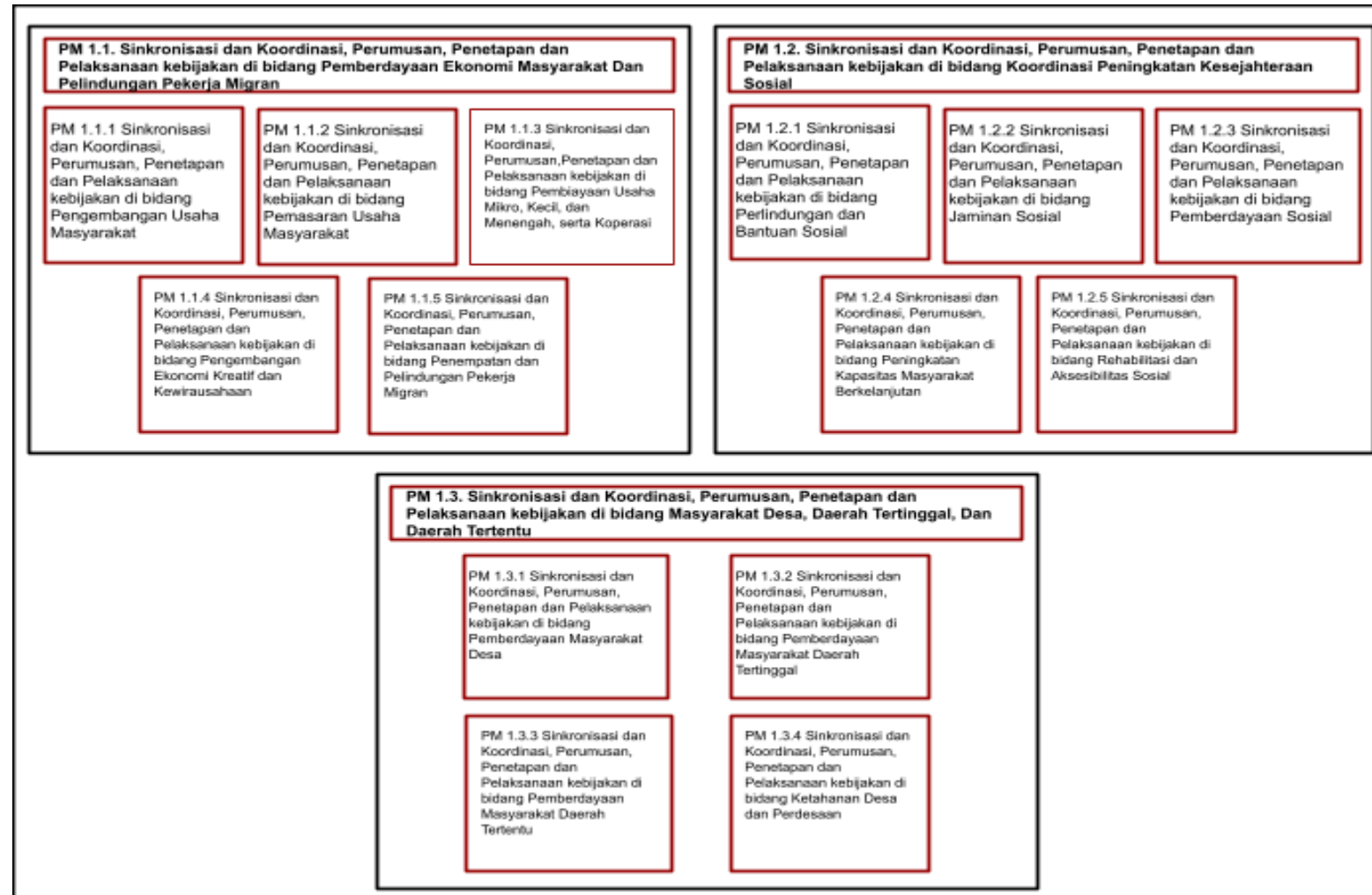
B. Level 0 - Peta Sub Proses Bisnis Utama

1. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat



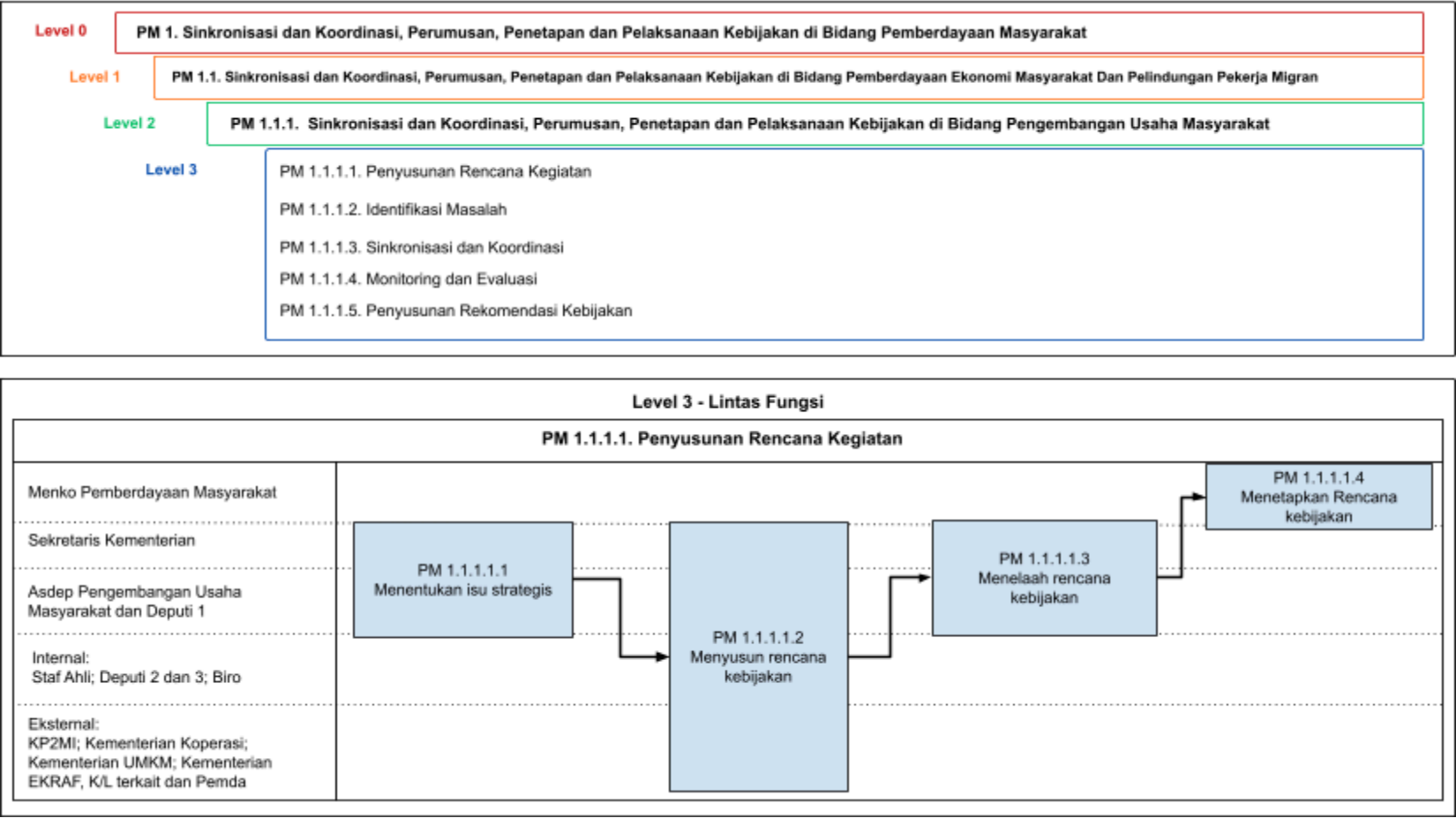
i. Level 2 . . .

i. **Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat**

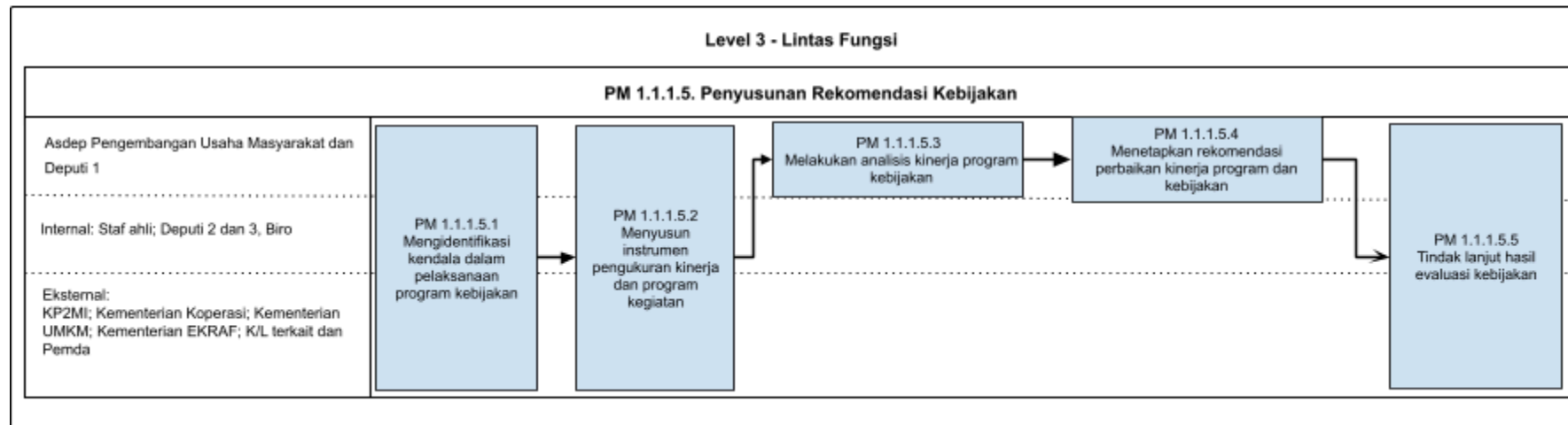
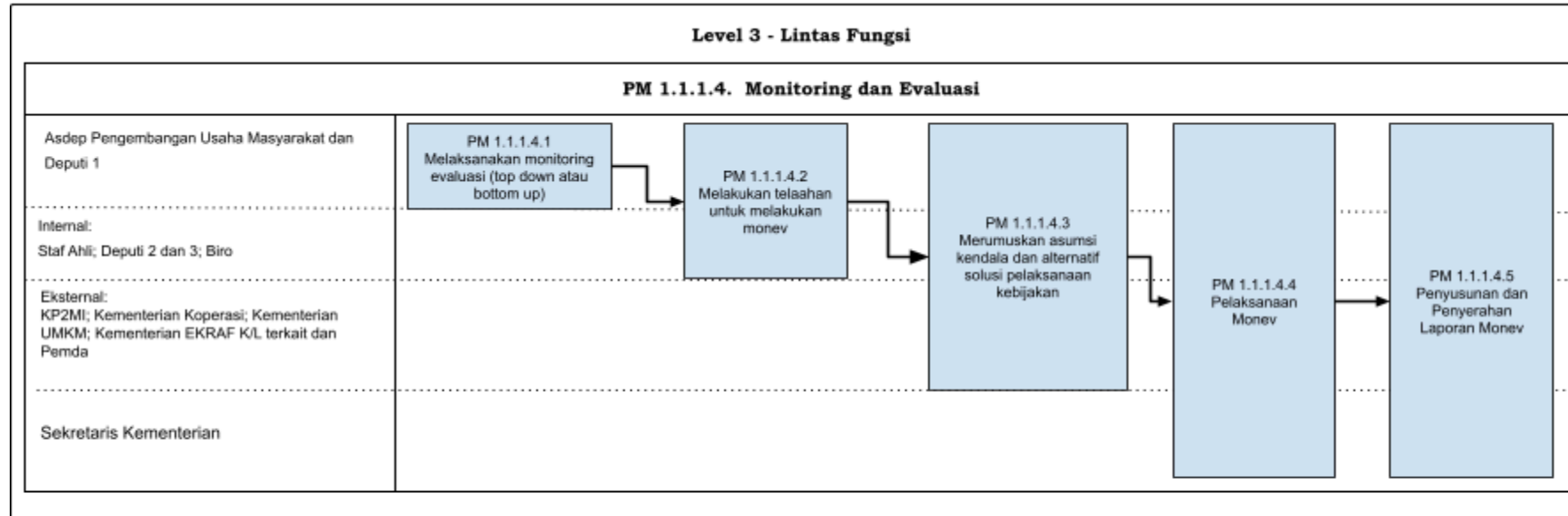


a) Level 3 . . .

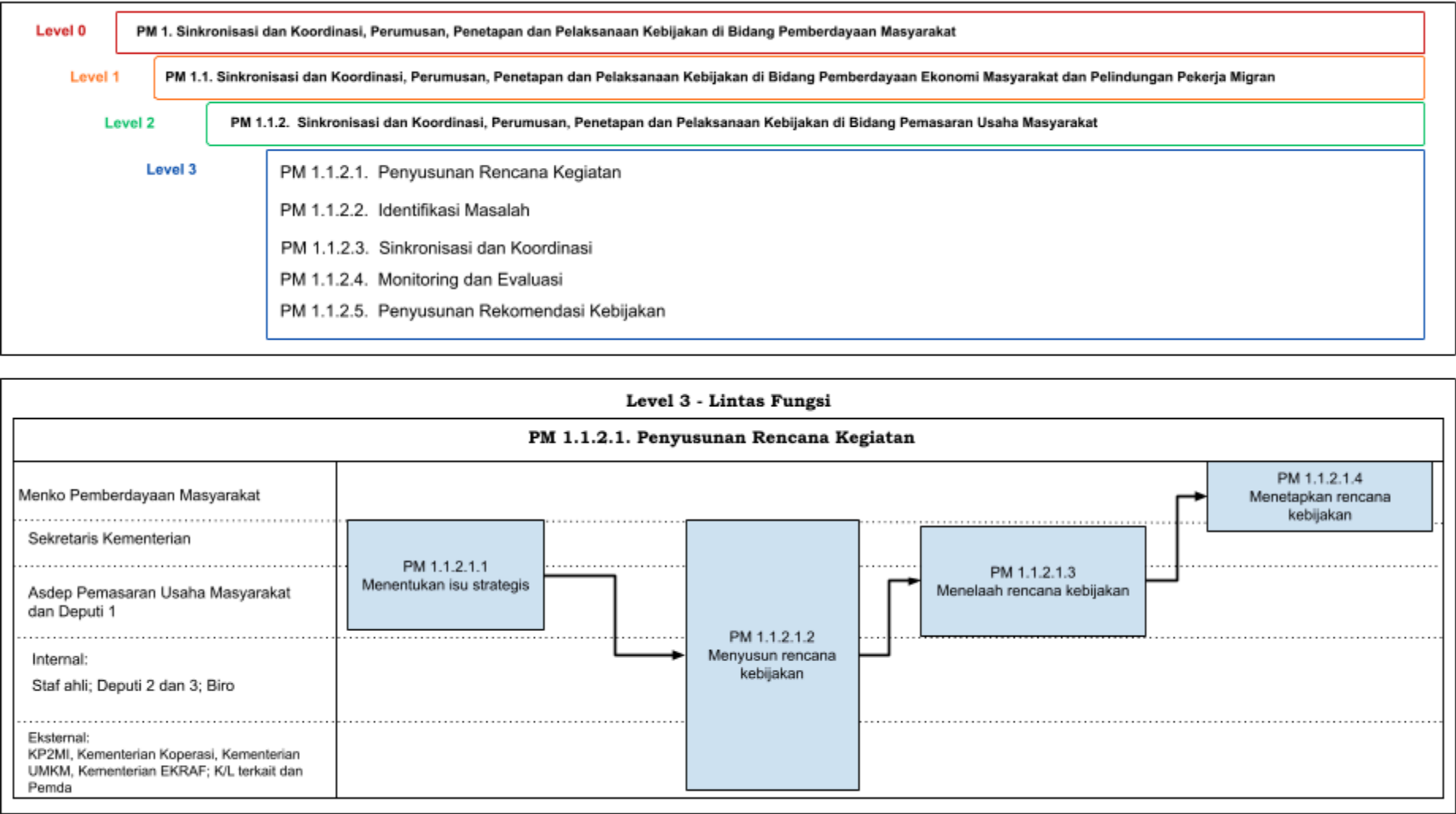
a) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat**



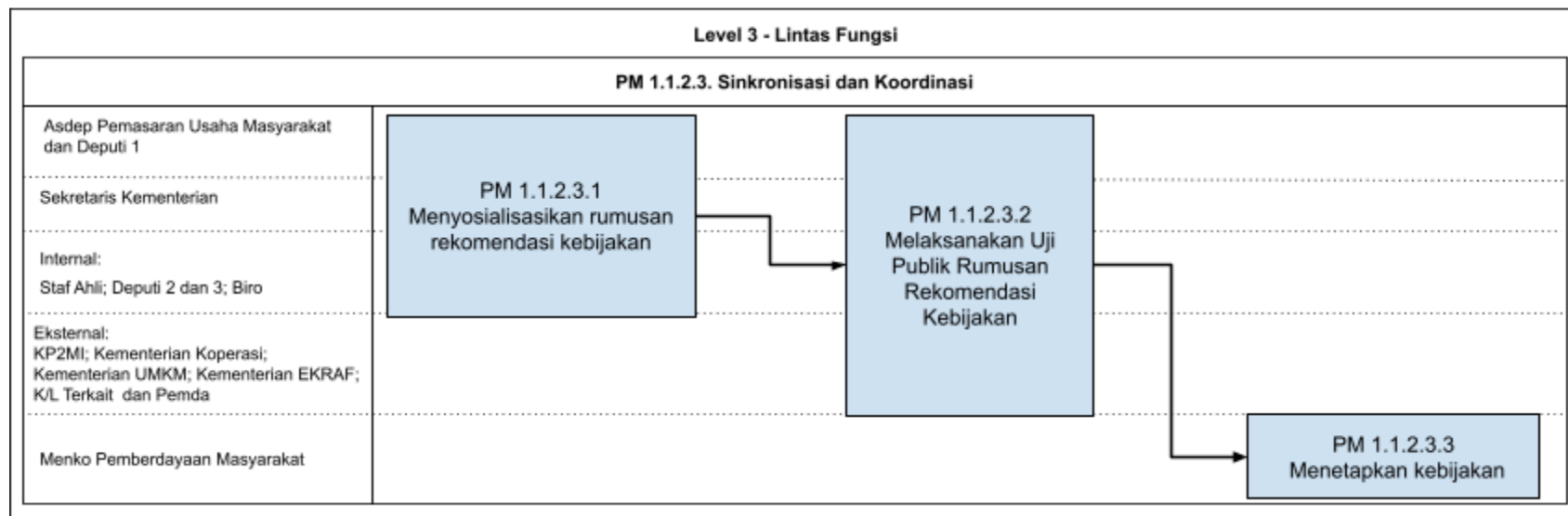
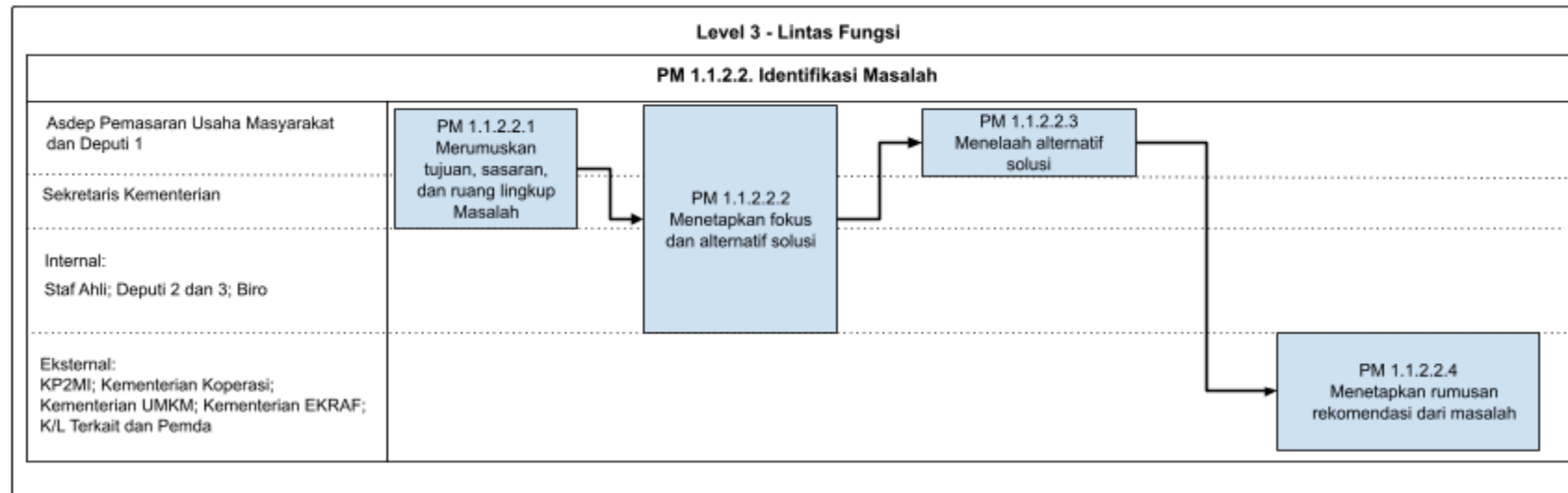
Level 3 . . .



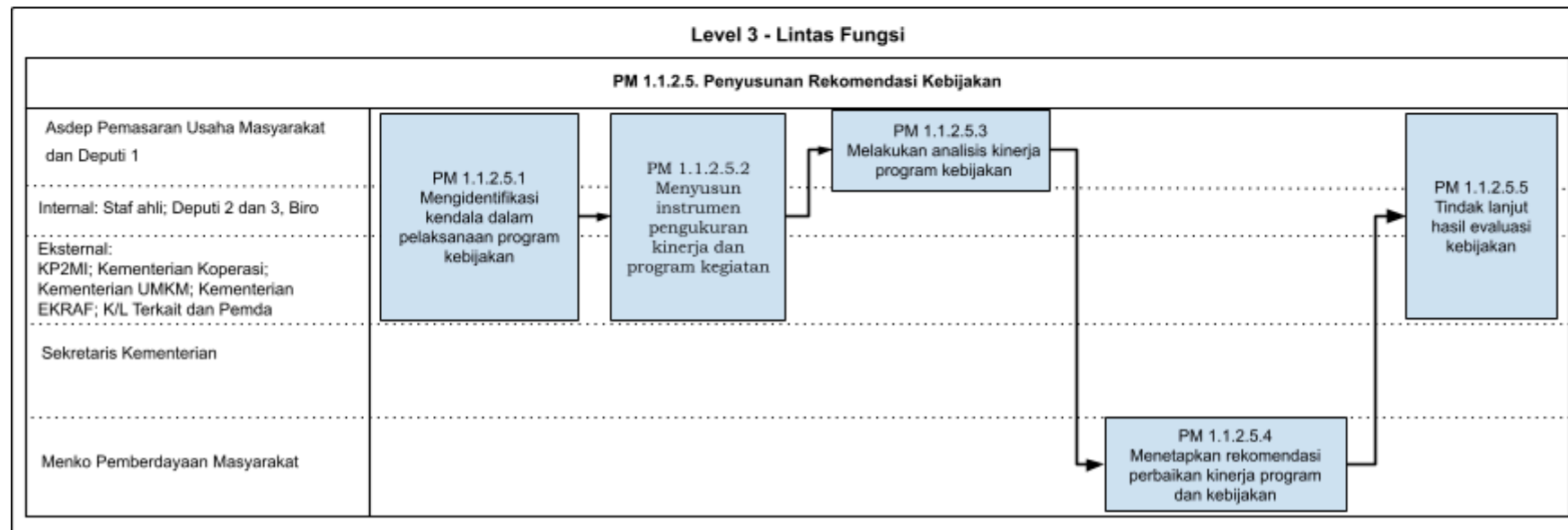
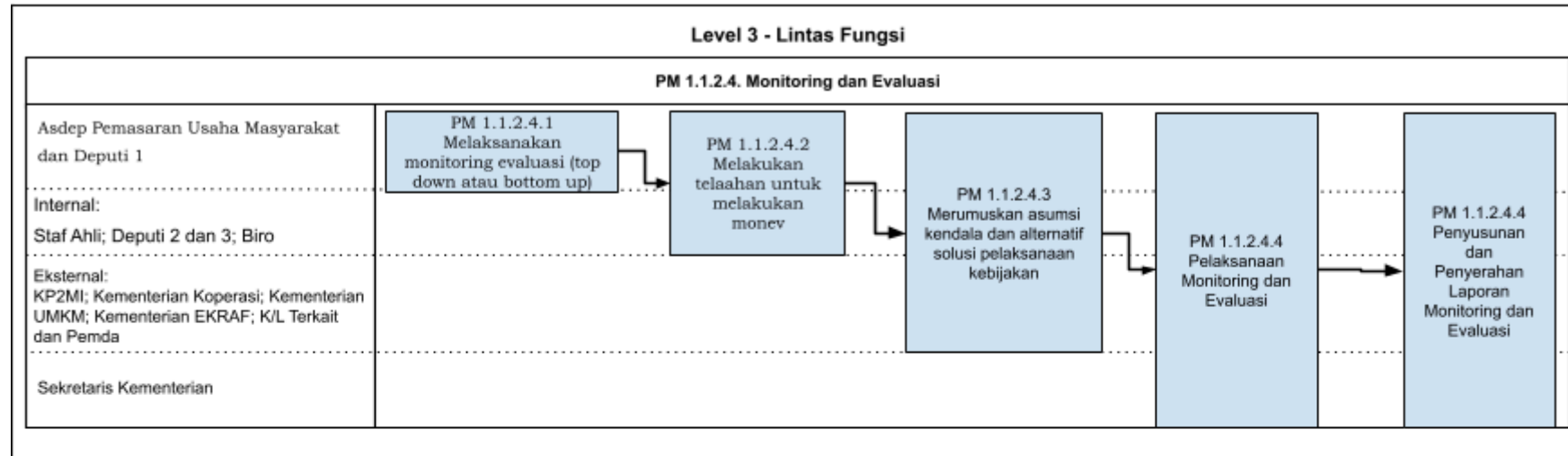
b) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat**



Level 3 . . .

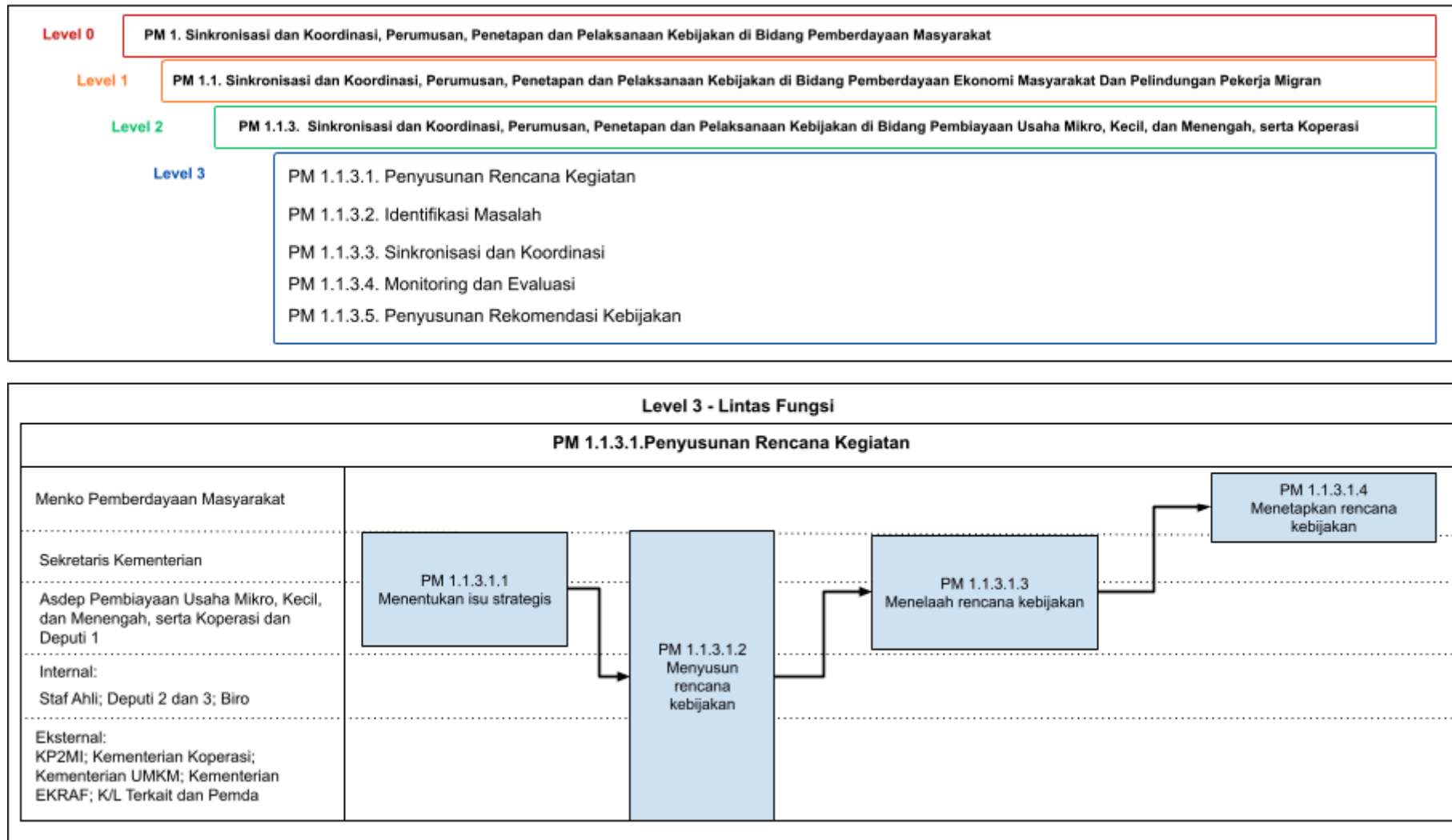


Level 3 . . .

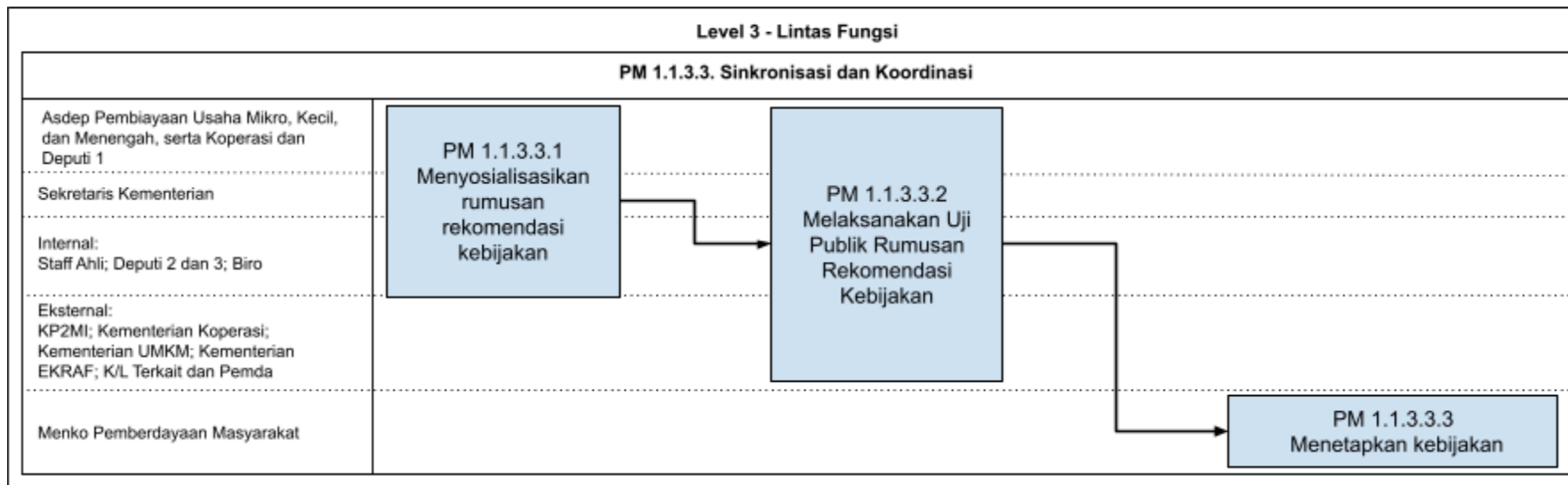
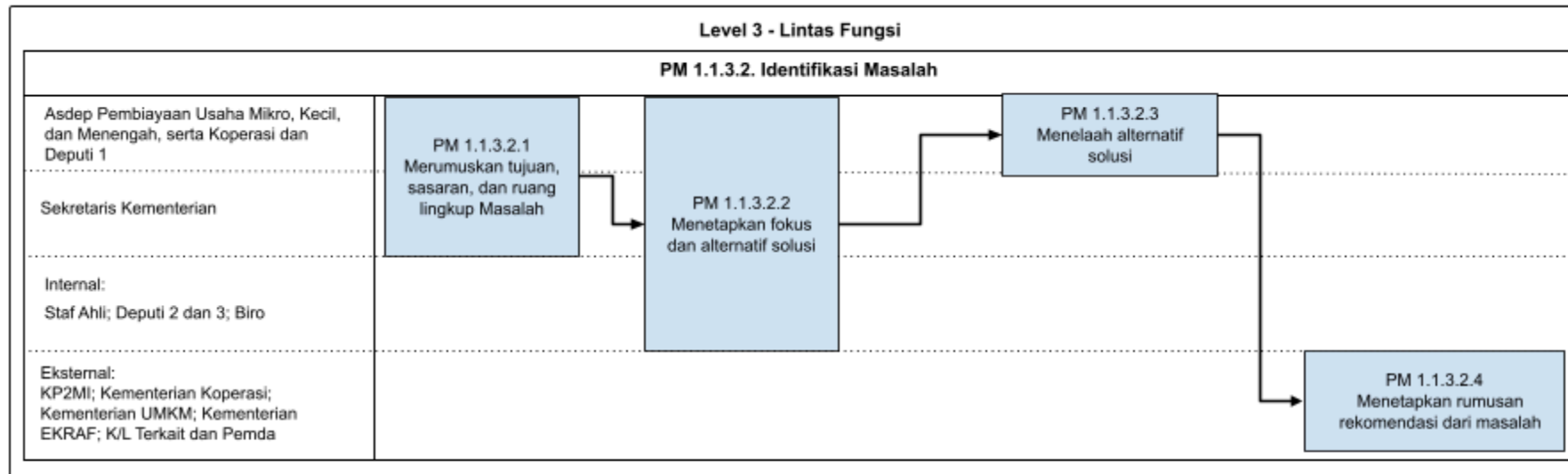


Level 3 . . .

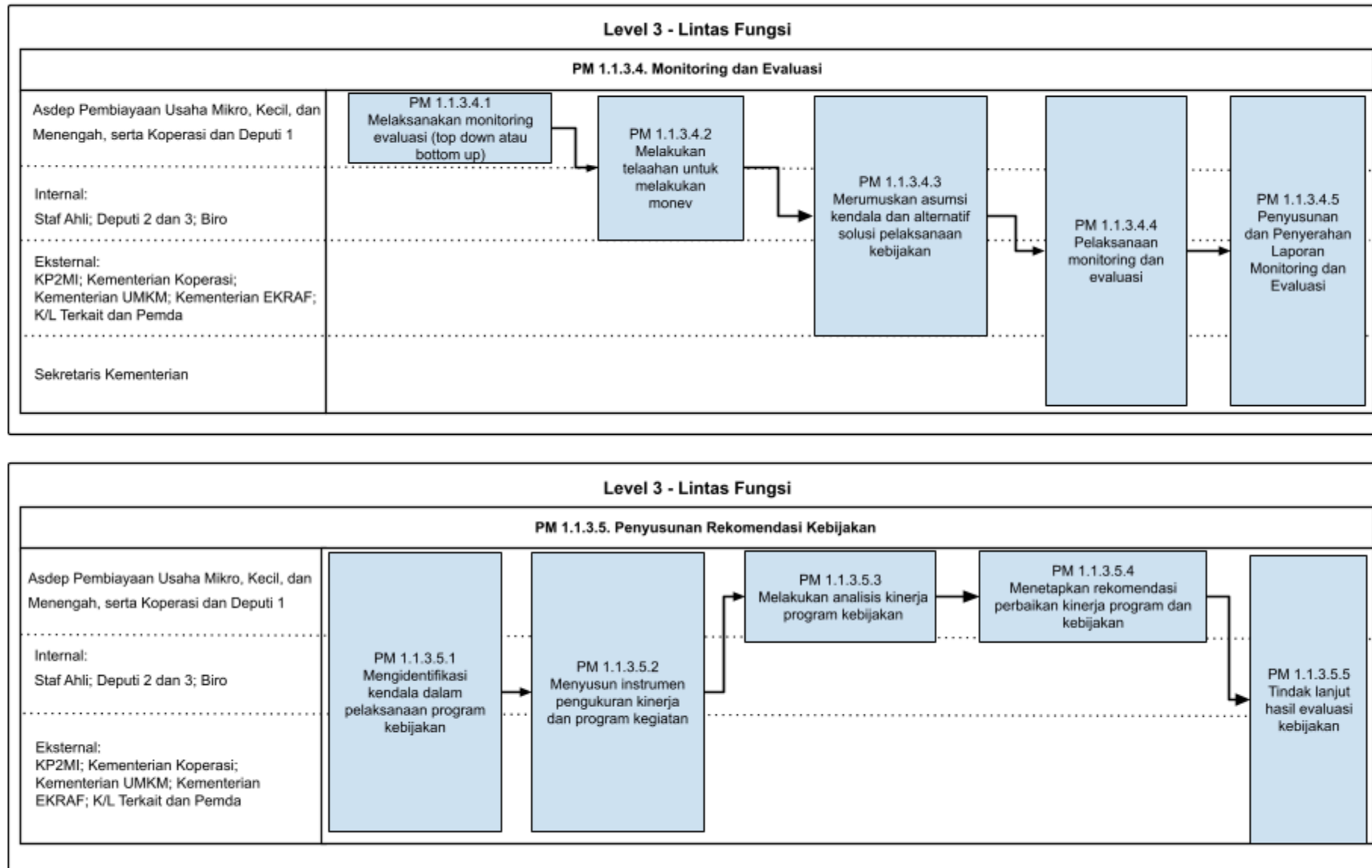
c) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi**



Level 3 . . .

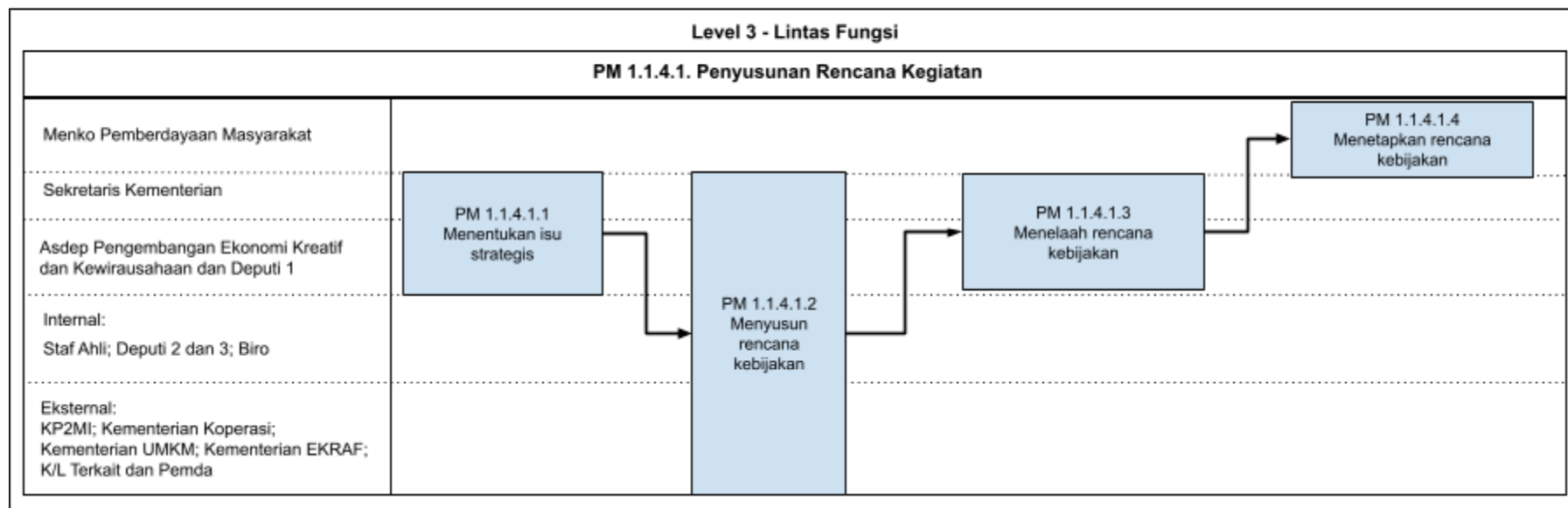
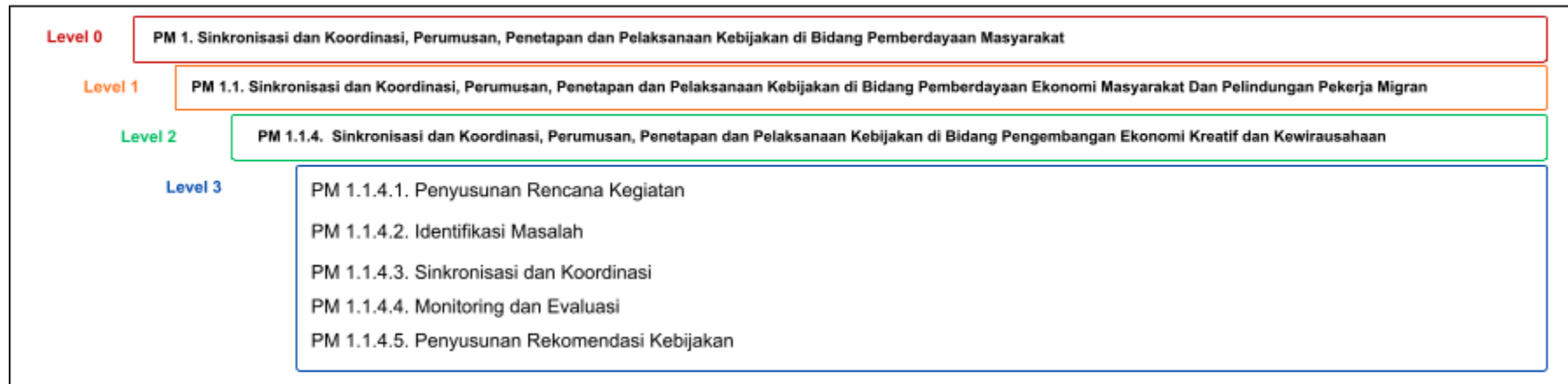


Level 3 . . .

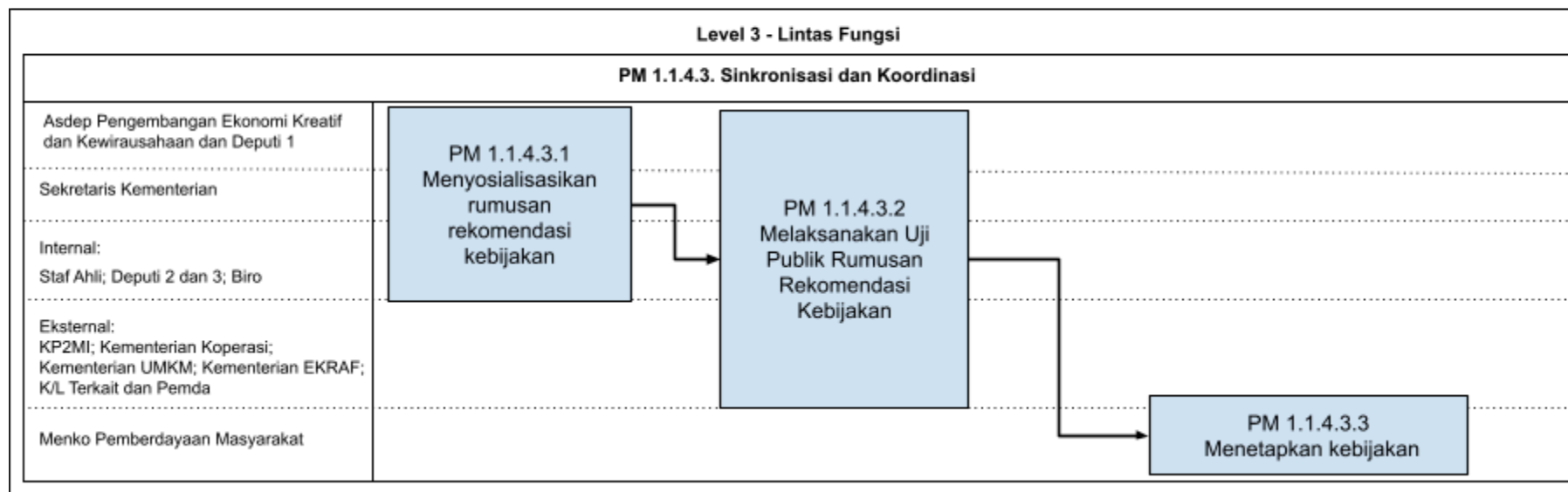
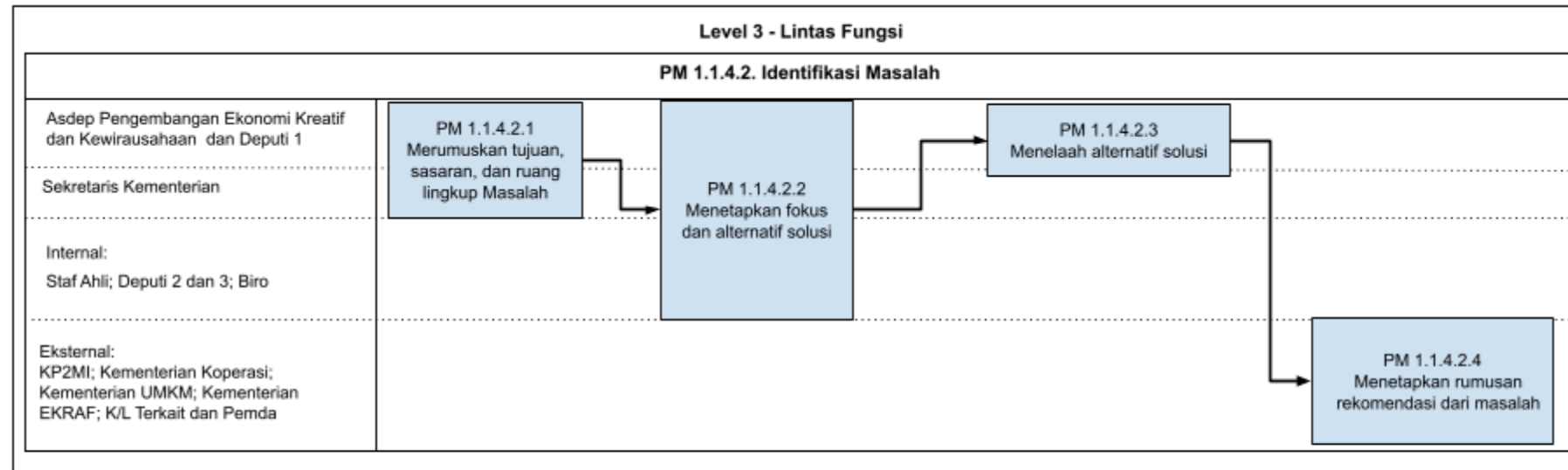


Level 3 . . .

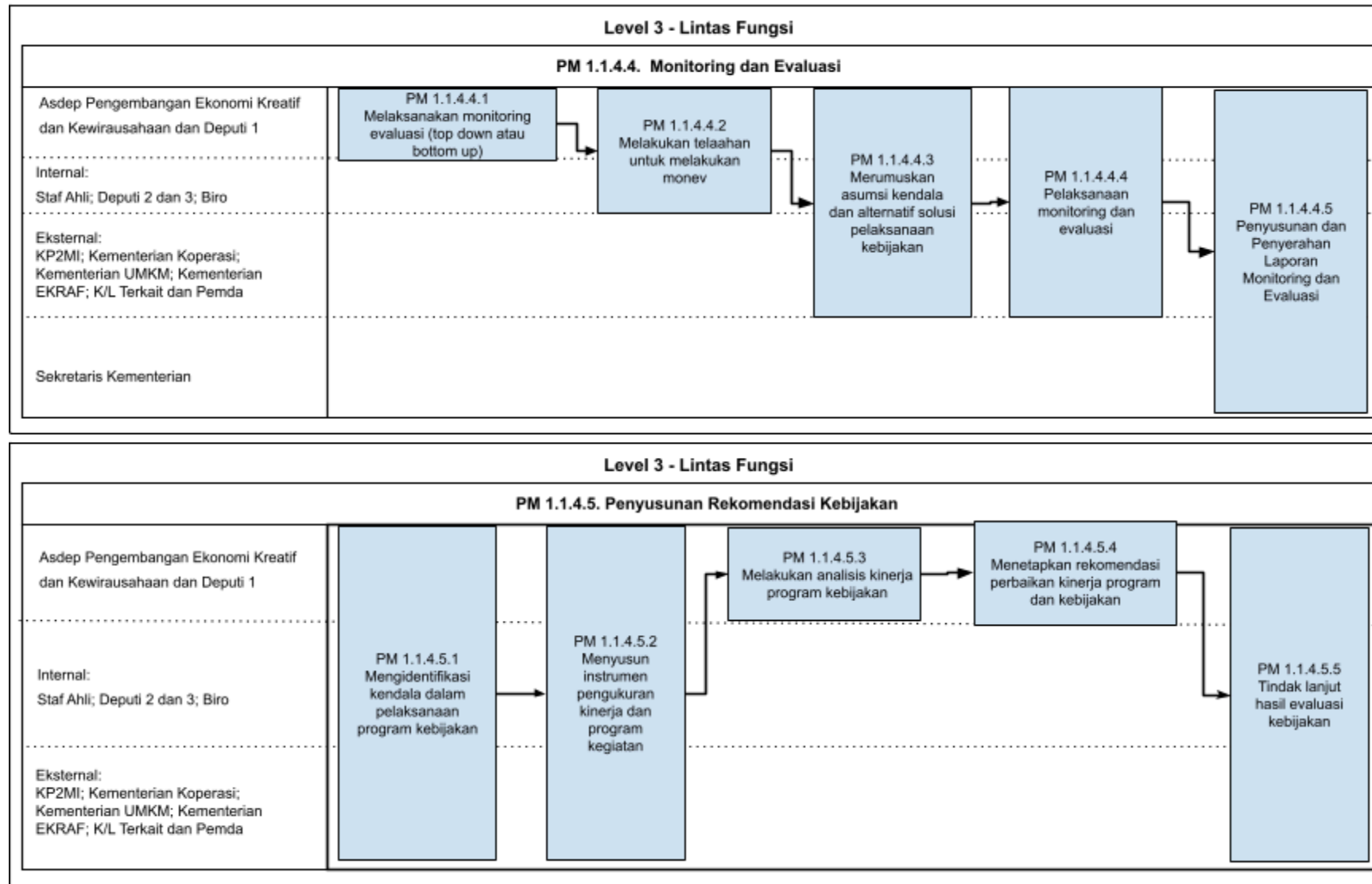
d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.4 Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan



Level 3 . . .

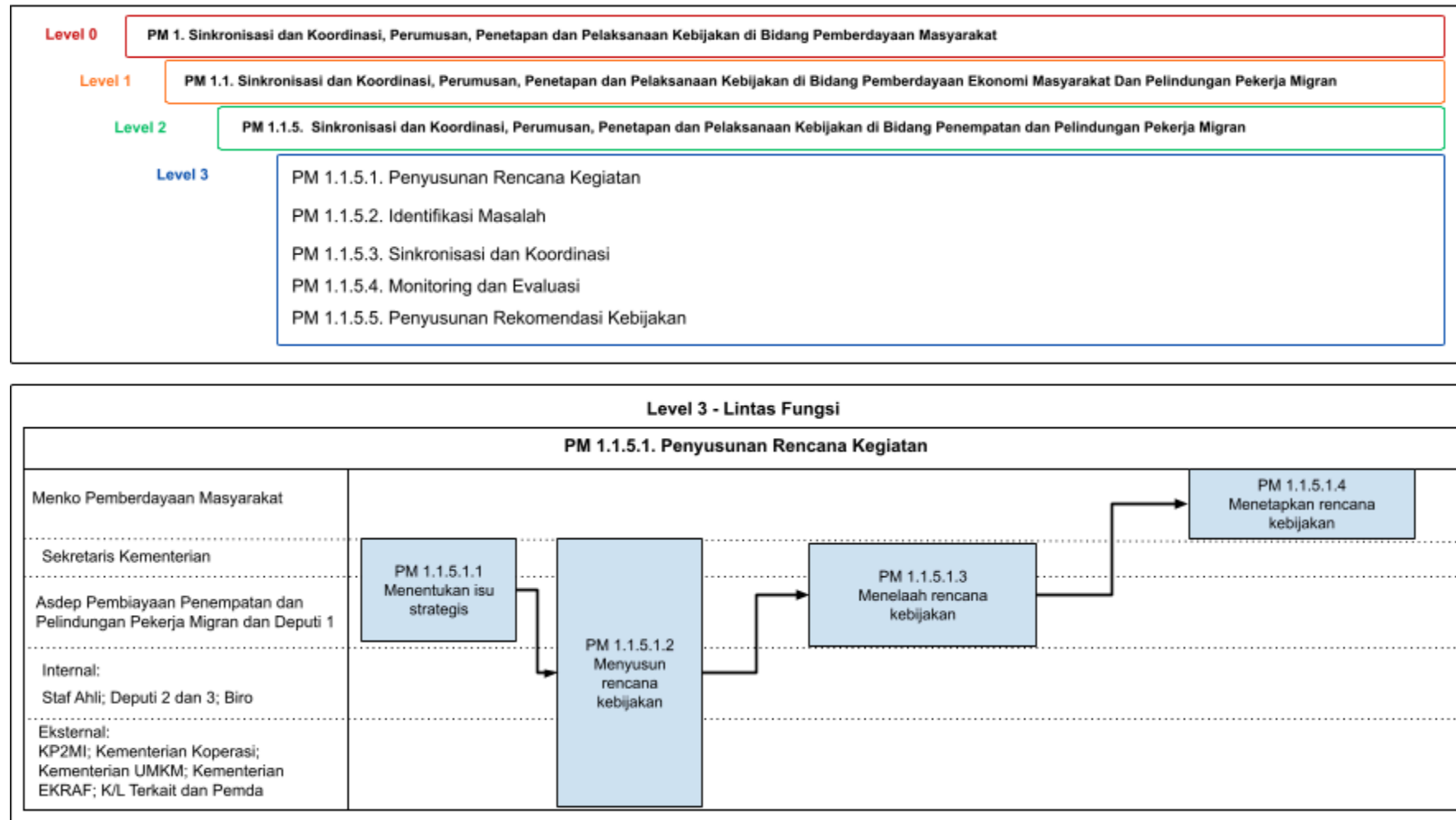


Level 3 . . .

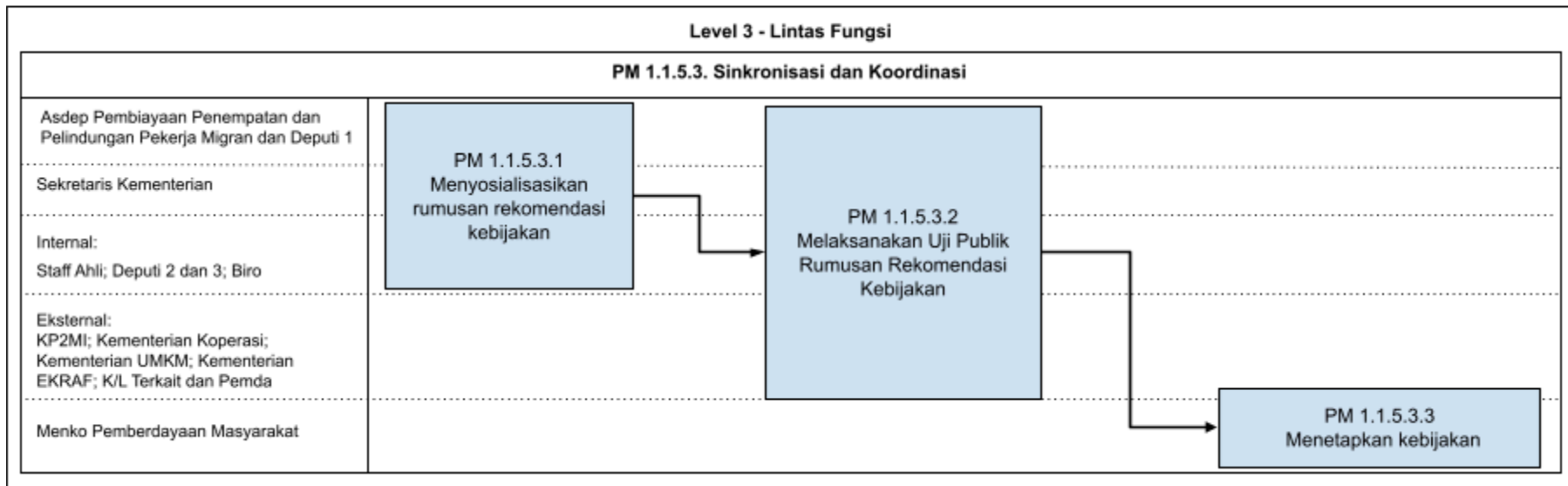
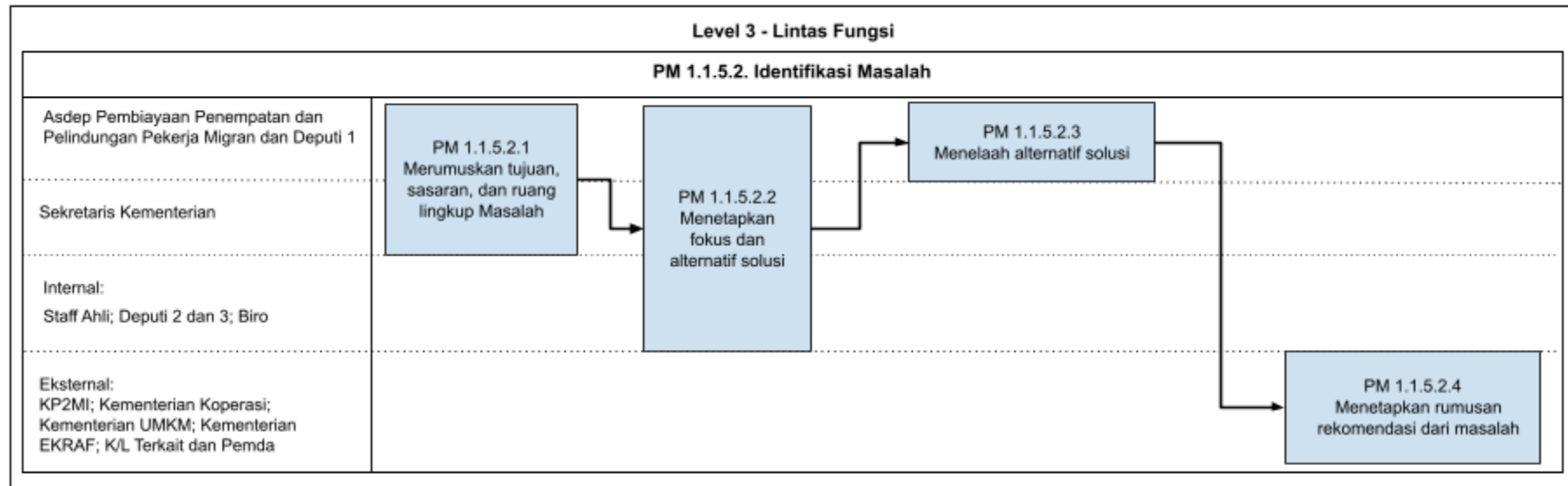


e) Level 3 . . .

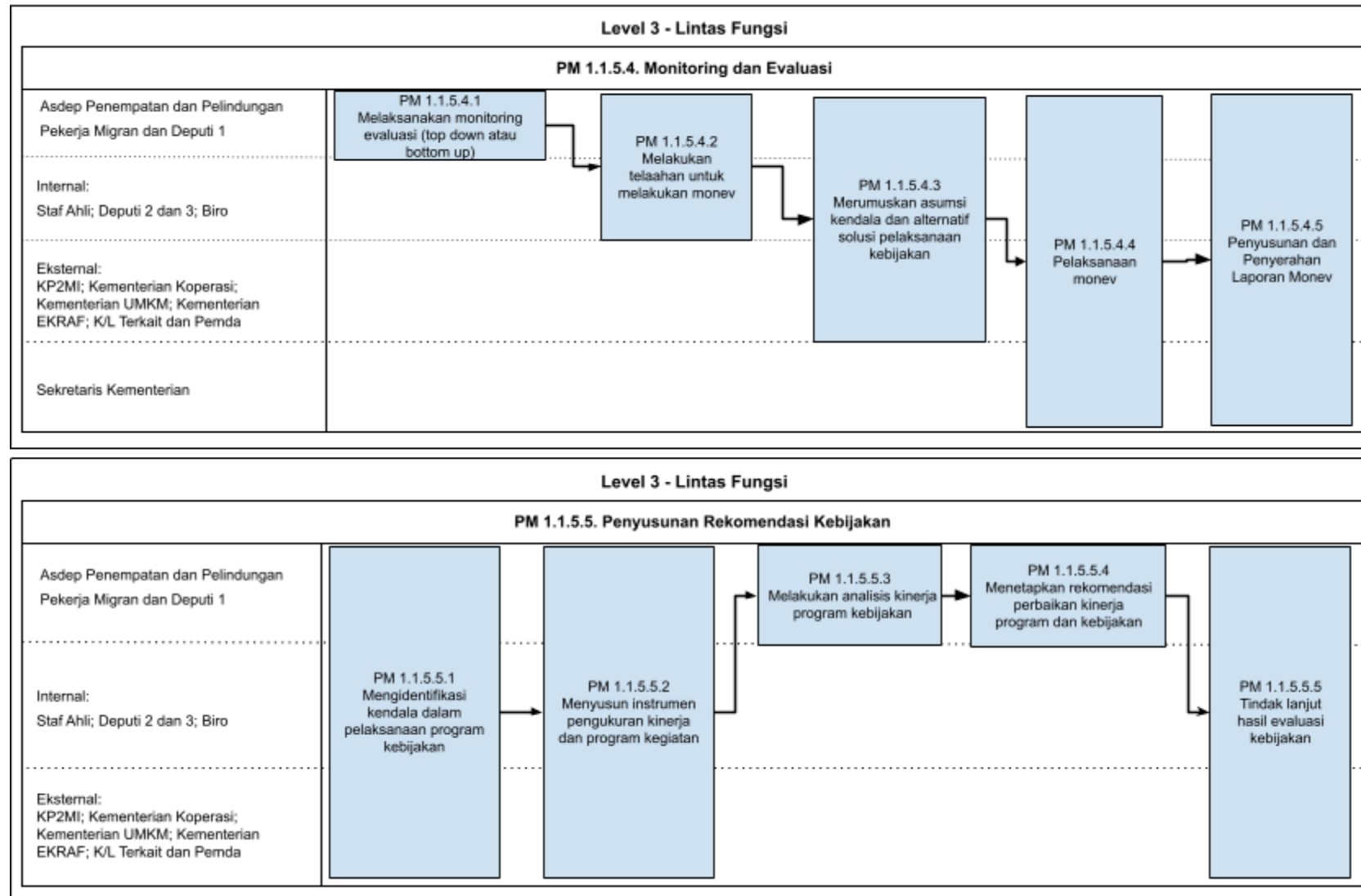
e) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.5 Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran**



Level 3 . . .



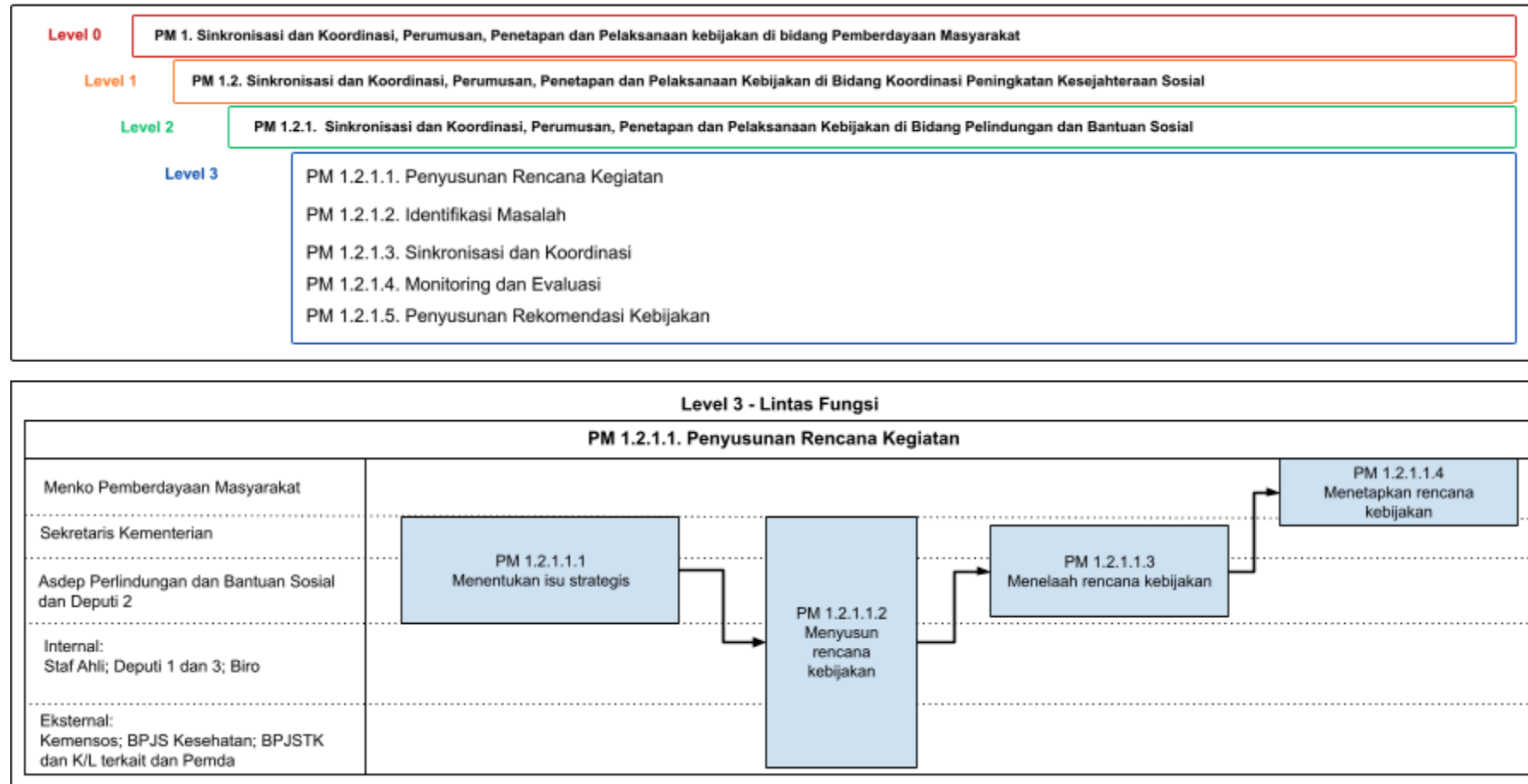
Level 3 . . .



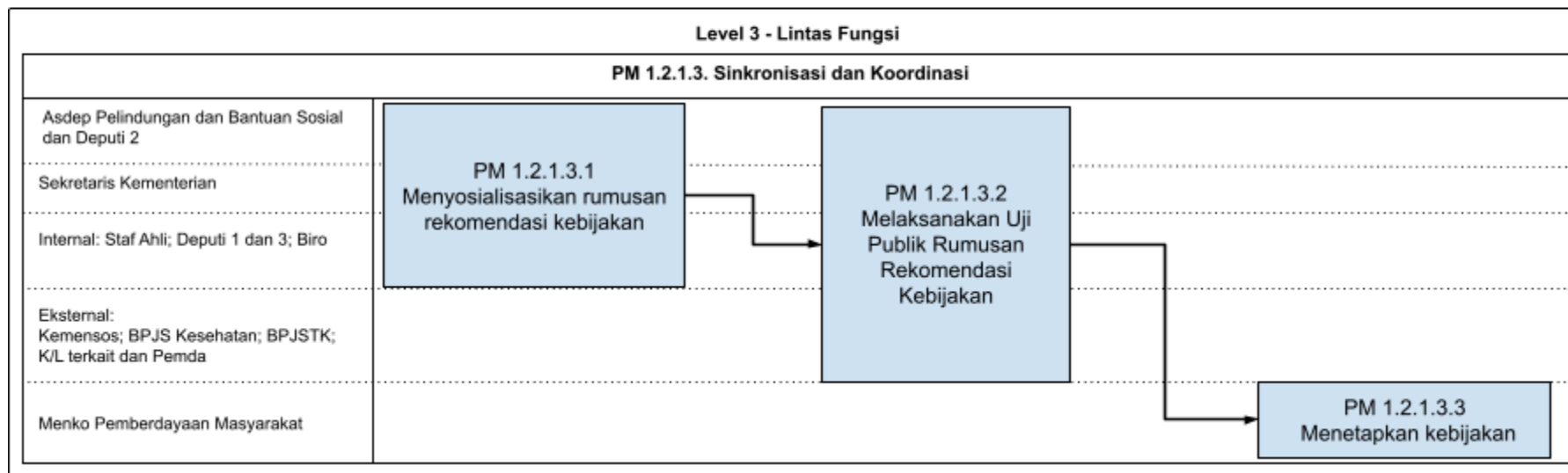
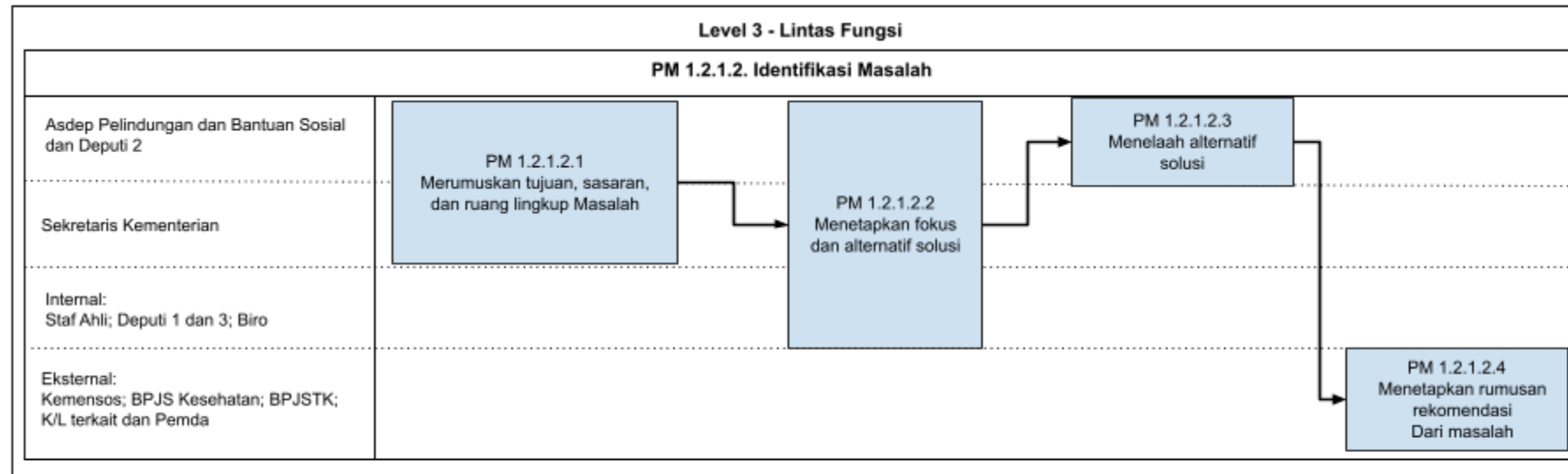
Level 3 . . .

ii. **Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

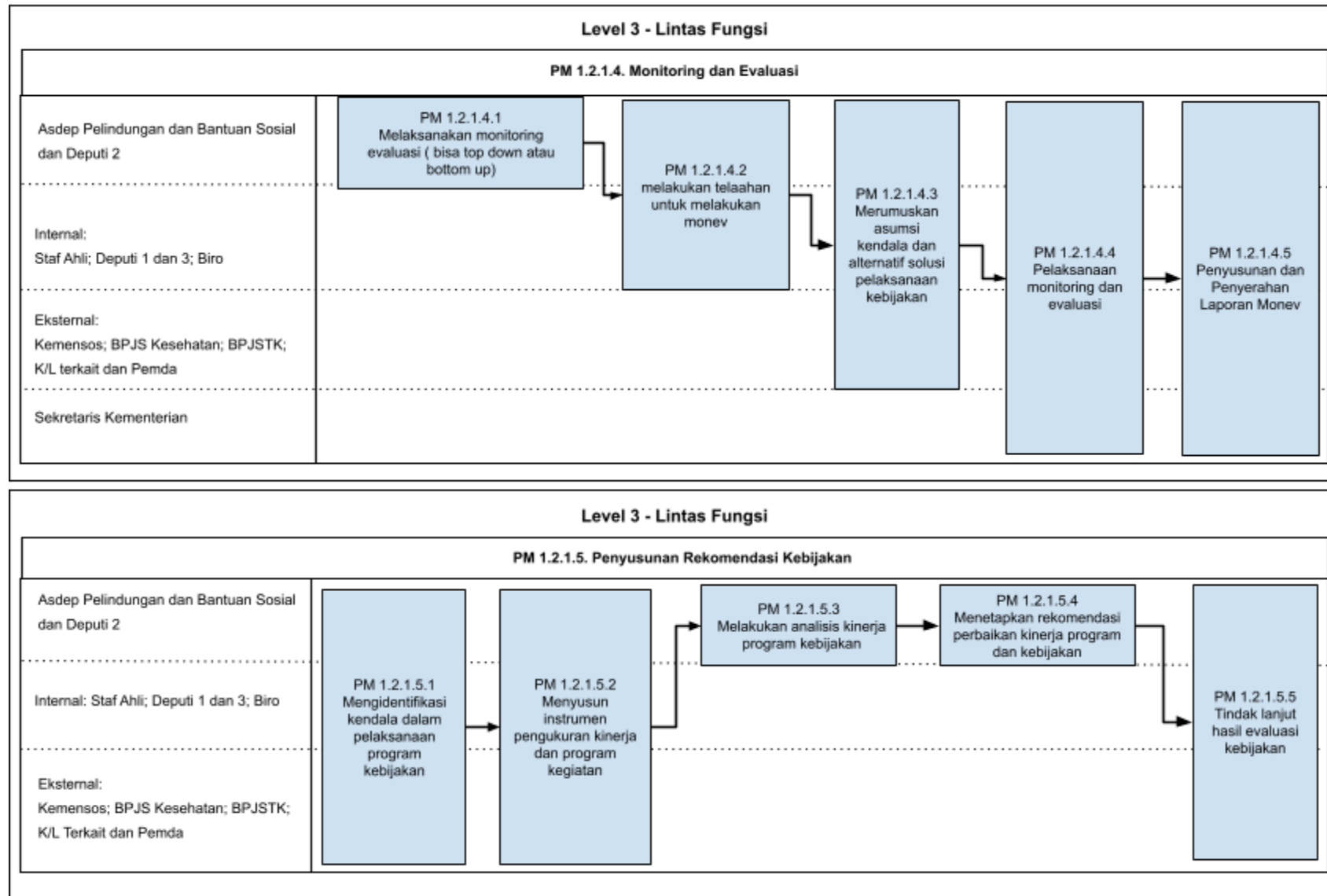
a) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelindungan dan Bantuan Sosial**



Level 3 . . .

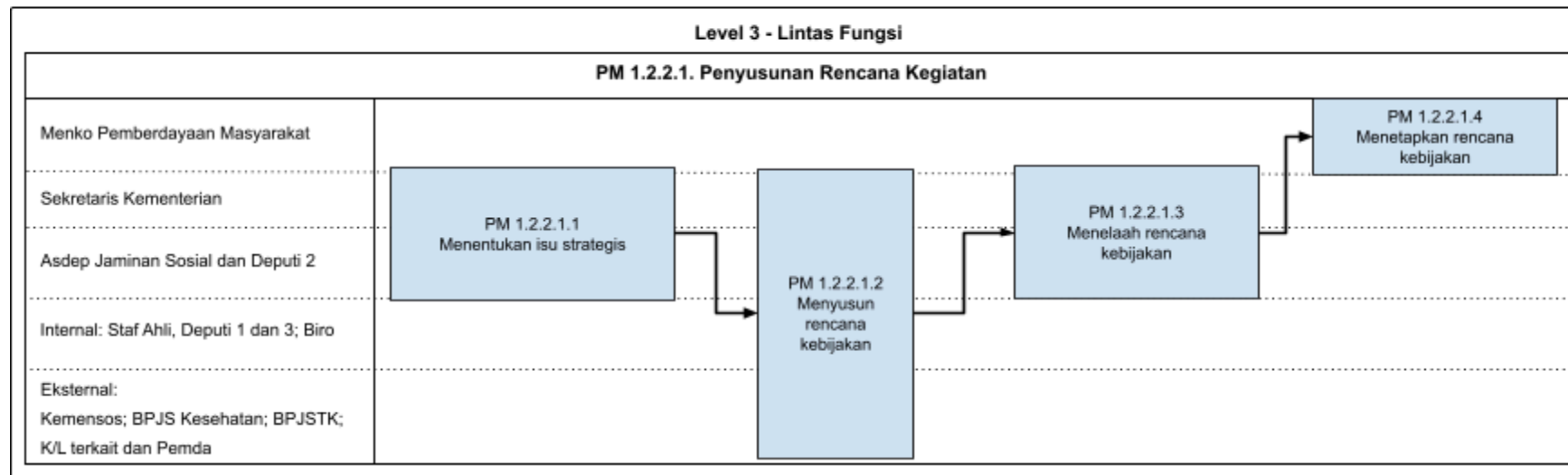
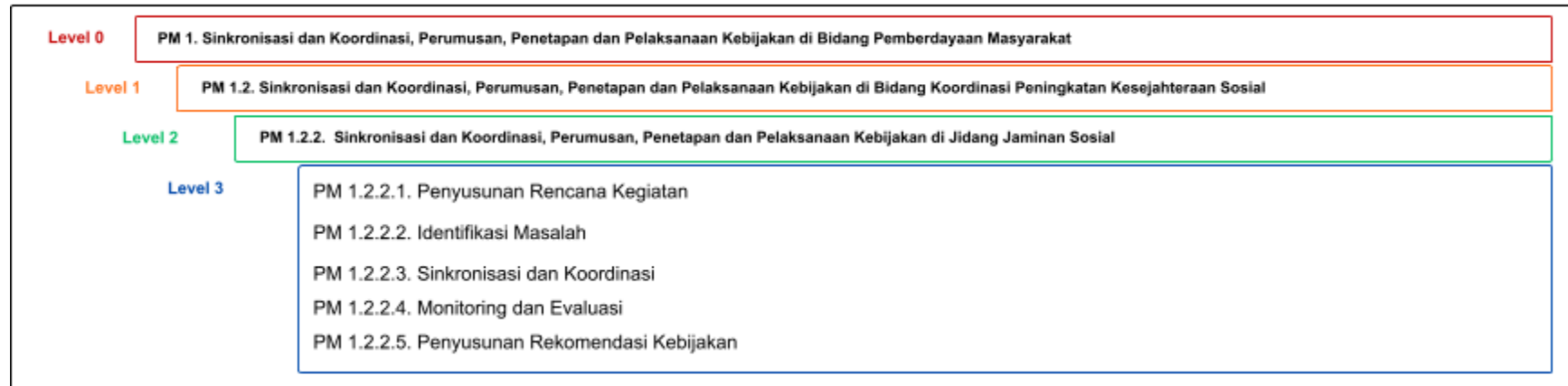


Level 3 . . .

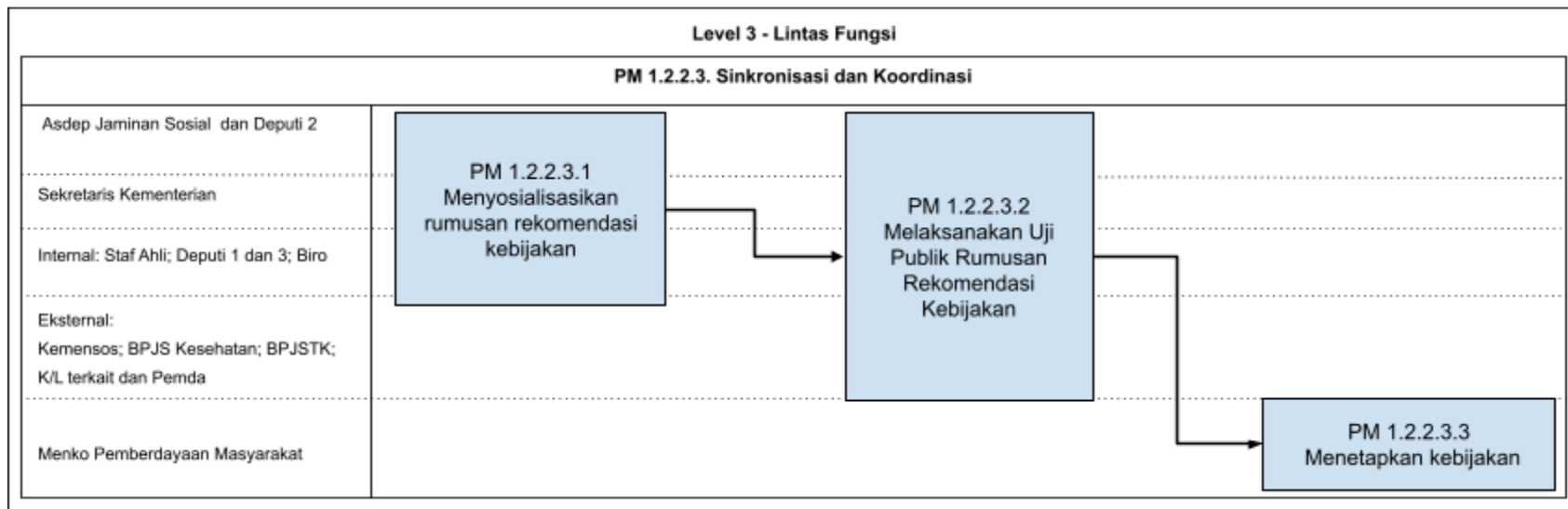
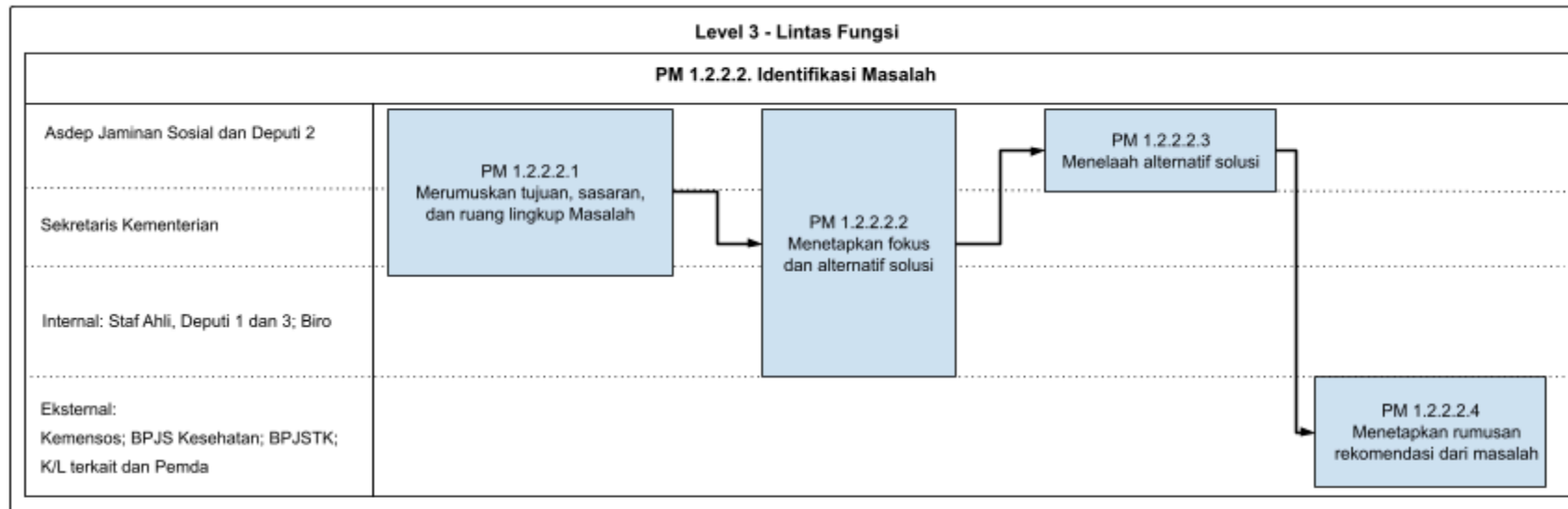


Level 3 . . .

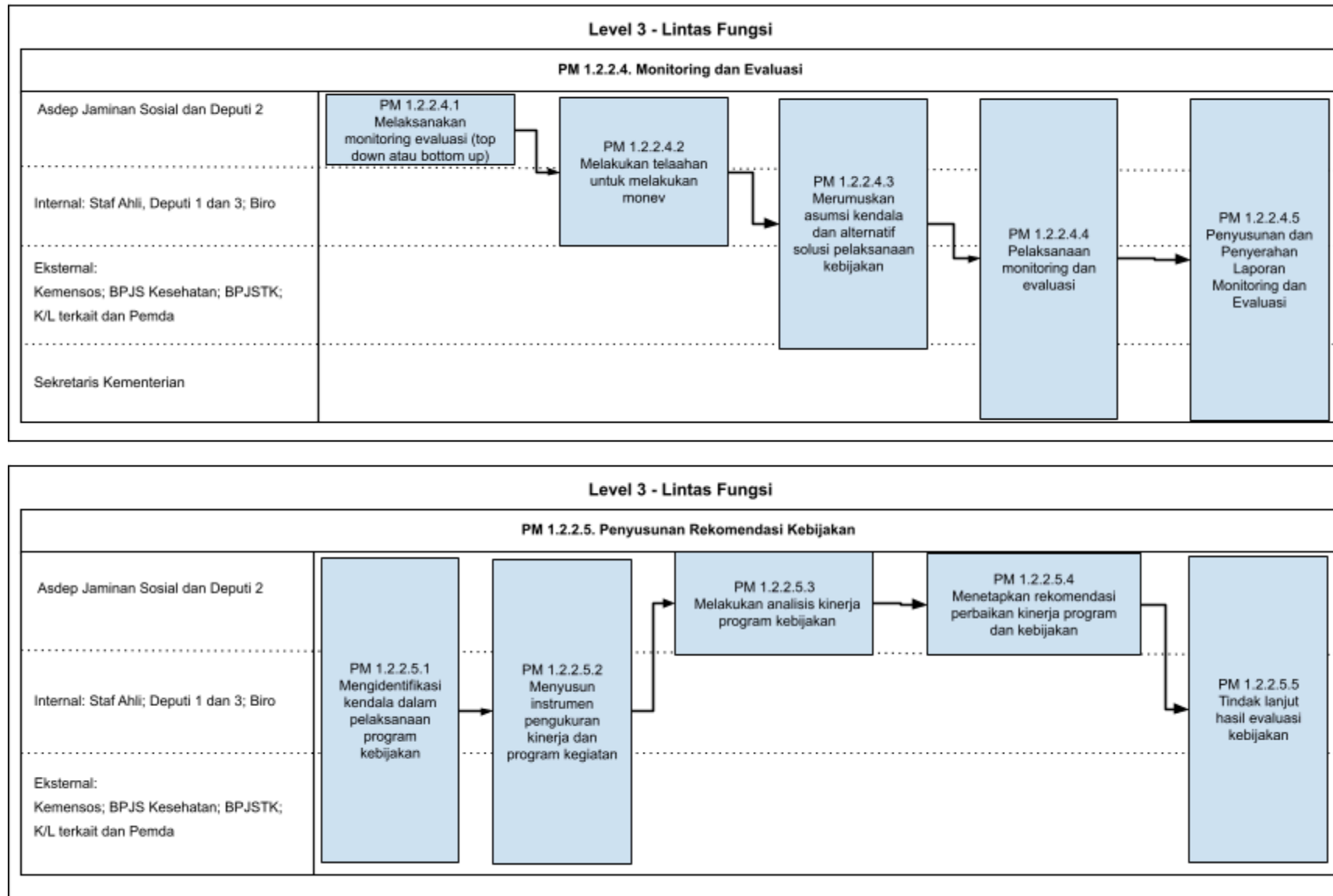
b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial



Level 3 . . .

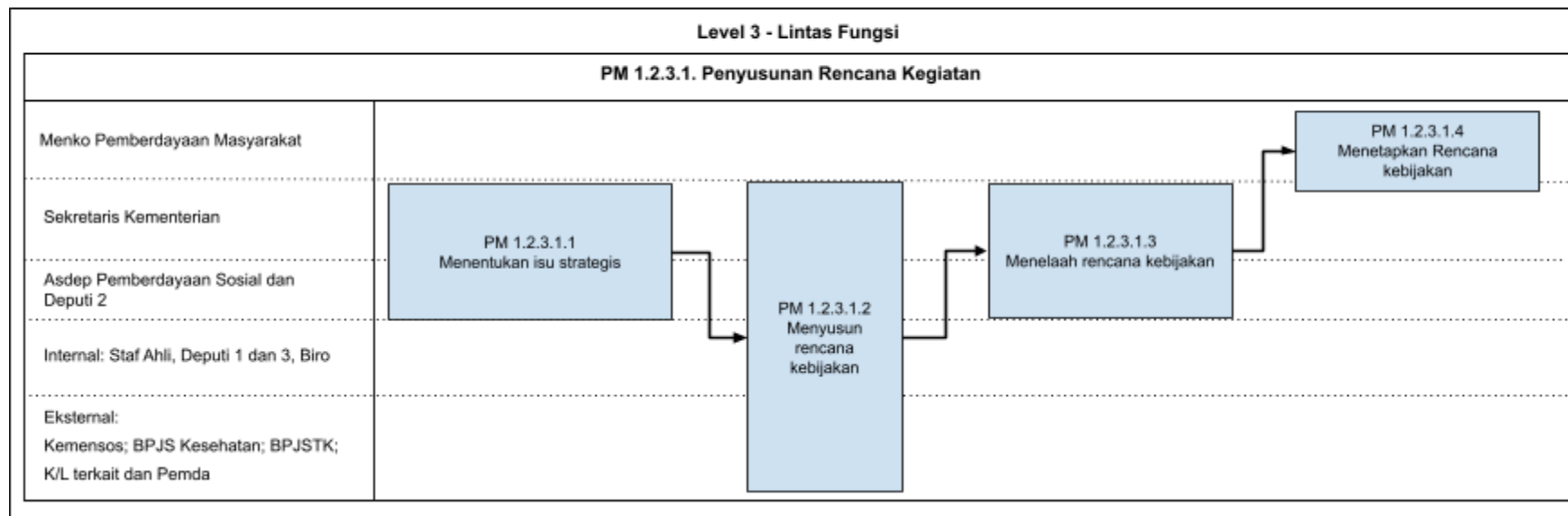
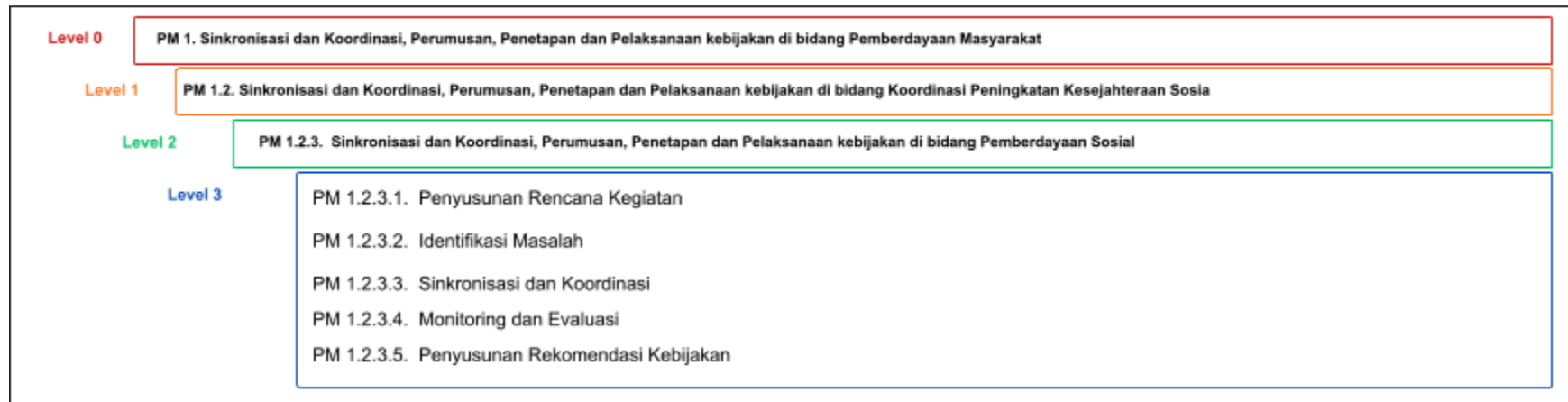


Level 3 . . .

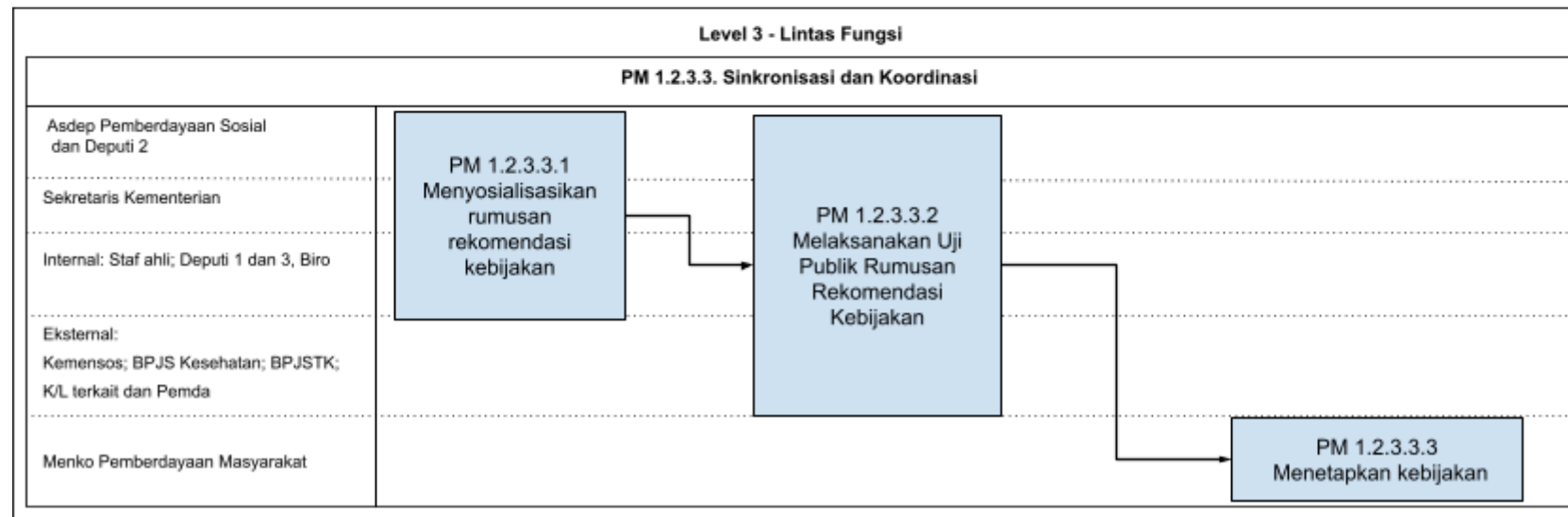
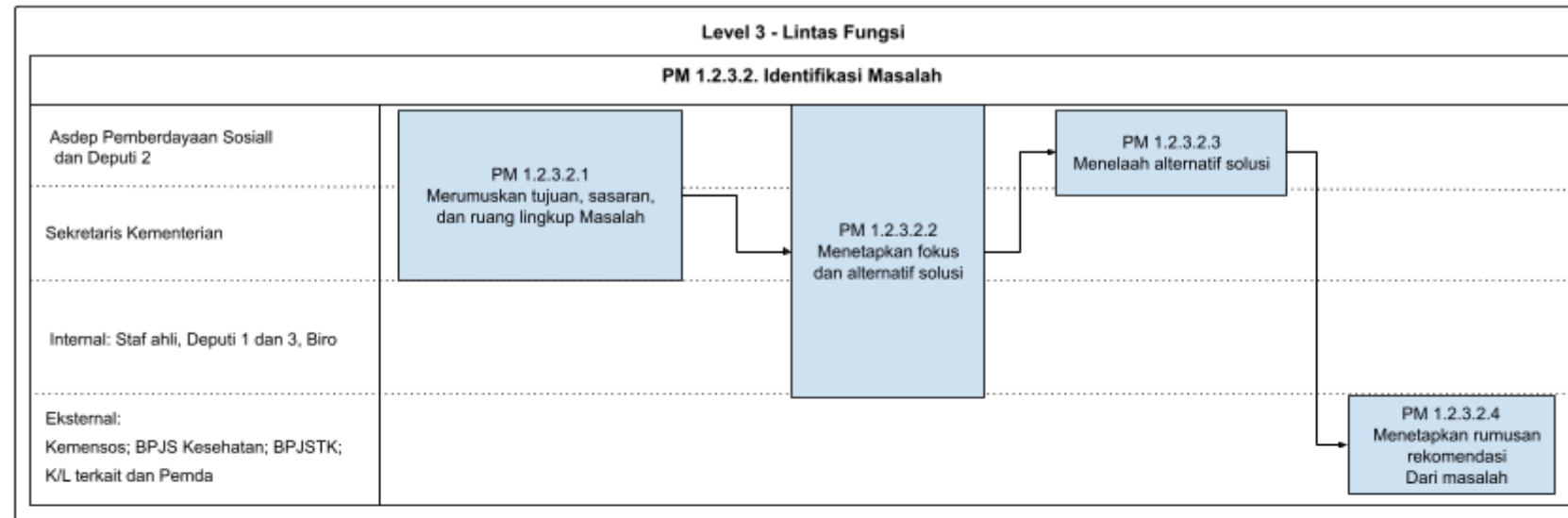


Level 3 . . .

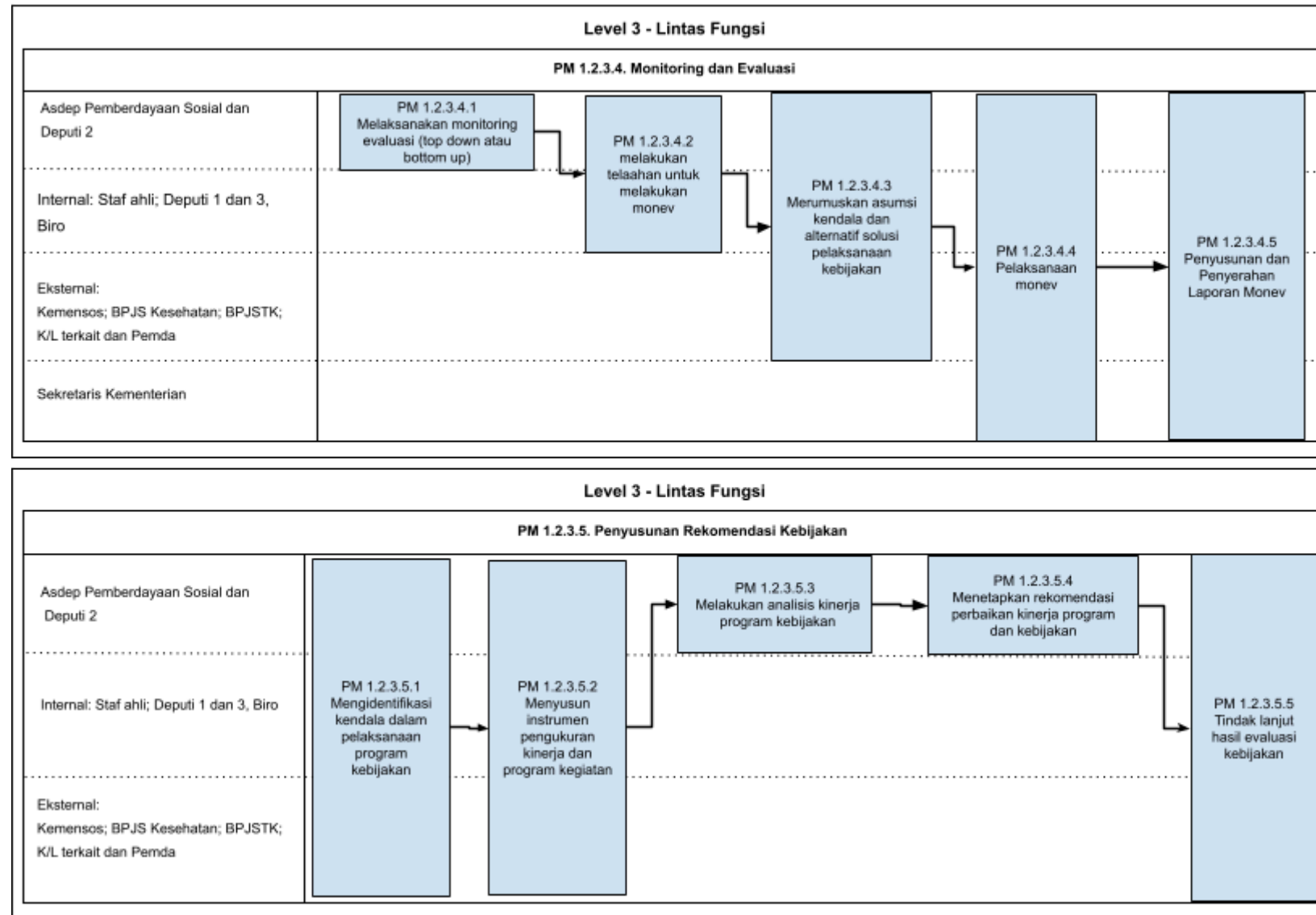
c) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan Sosial**



Level 3 . . .

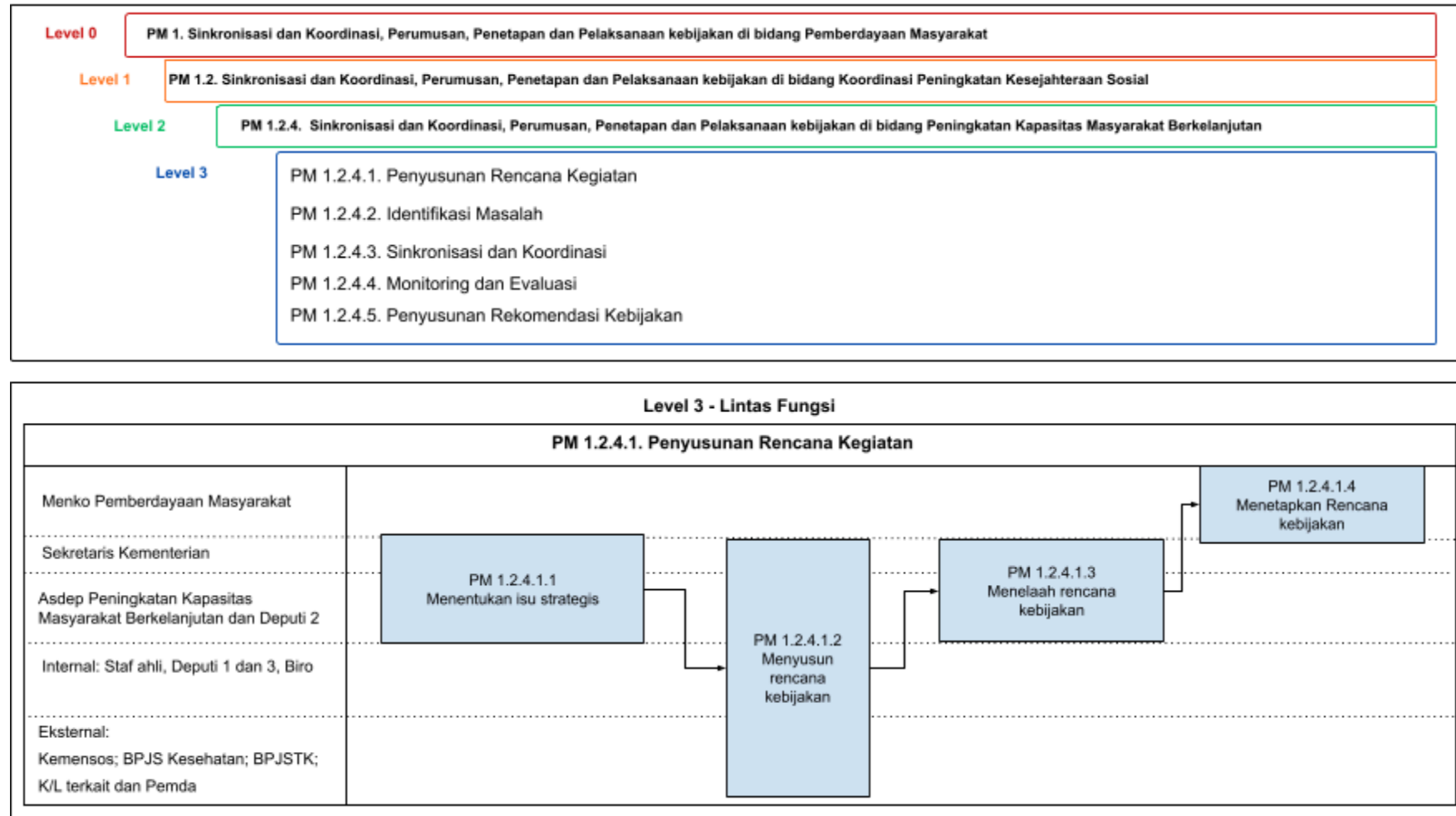


Level 3 . . .

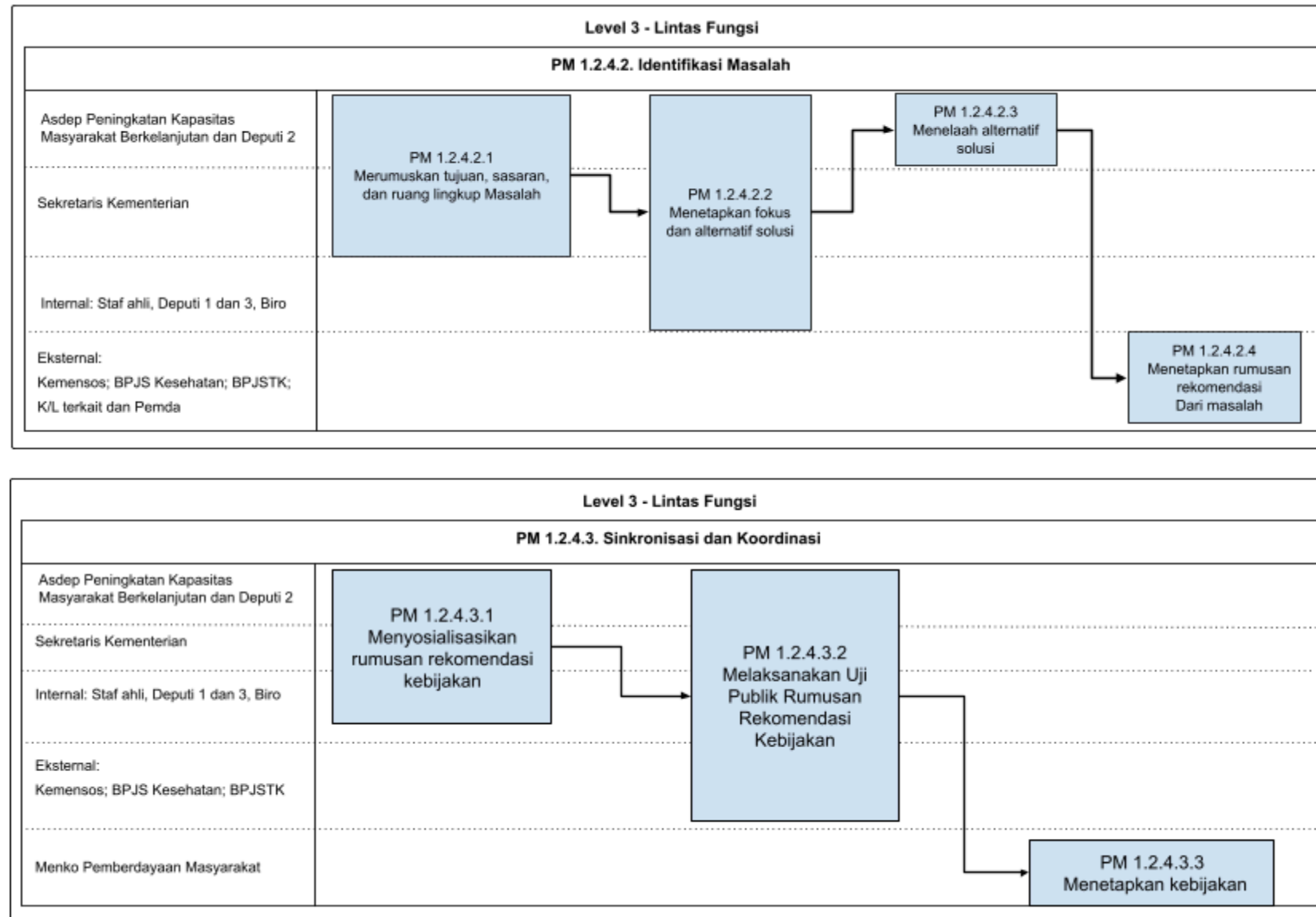


Level 3 . . .

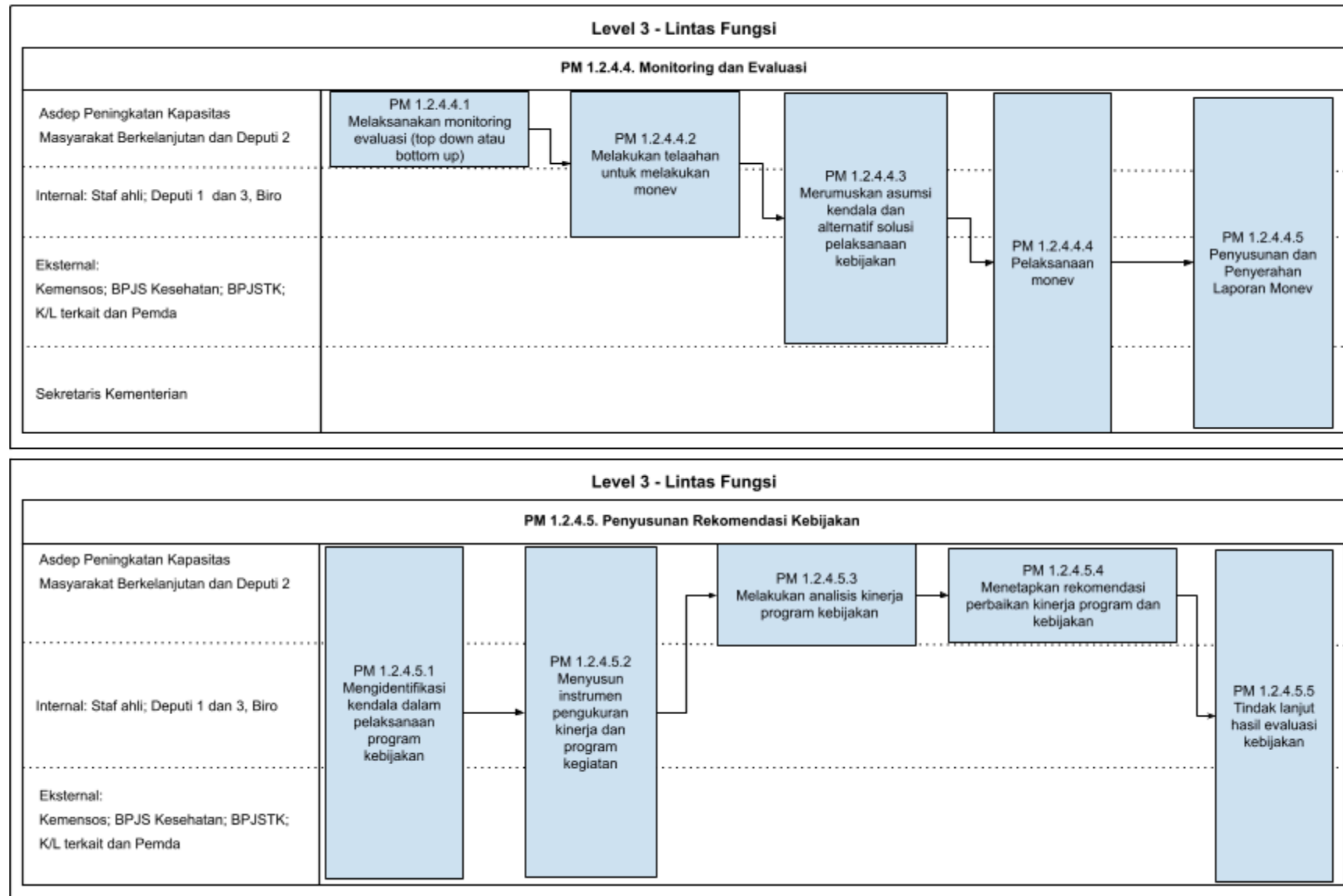
d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.4. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan di Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan



Level 3 . . .

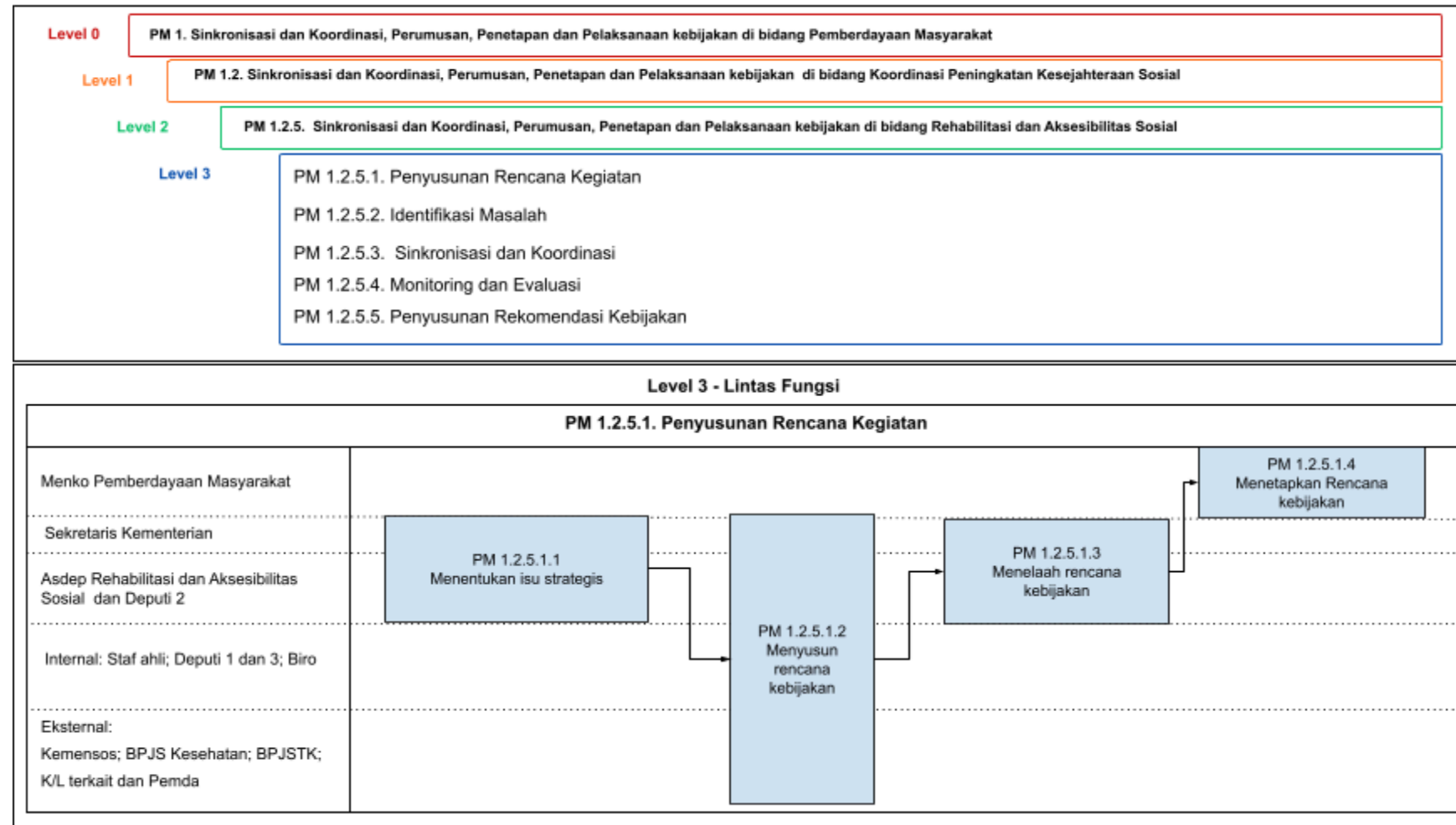


Level 3 . . .

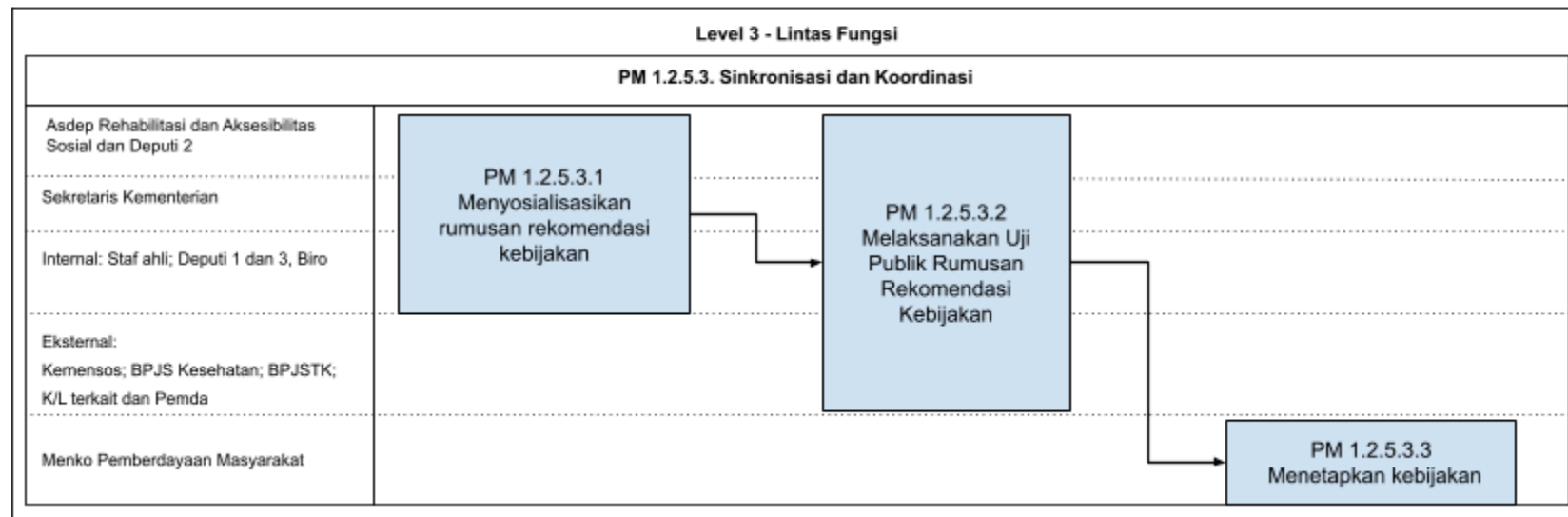
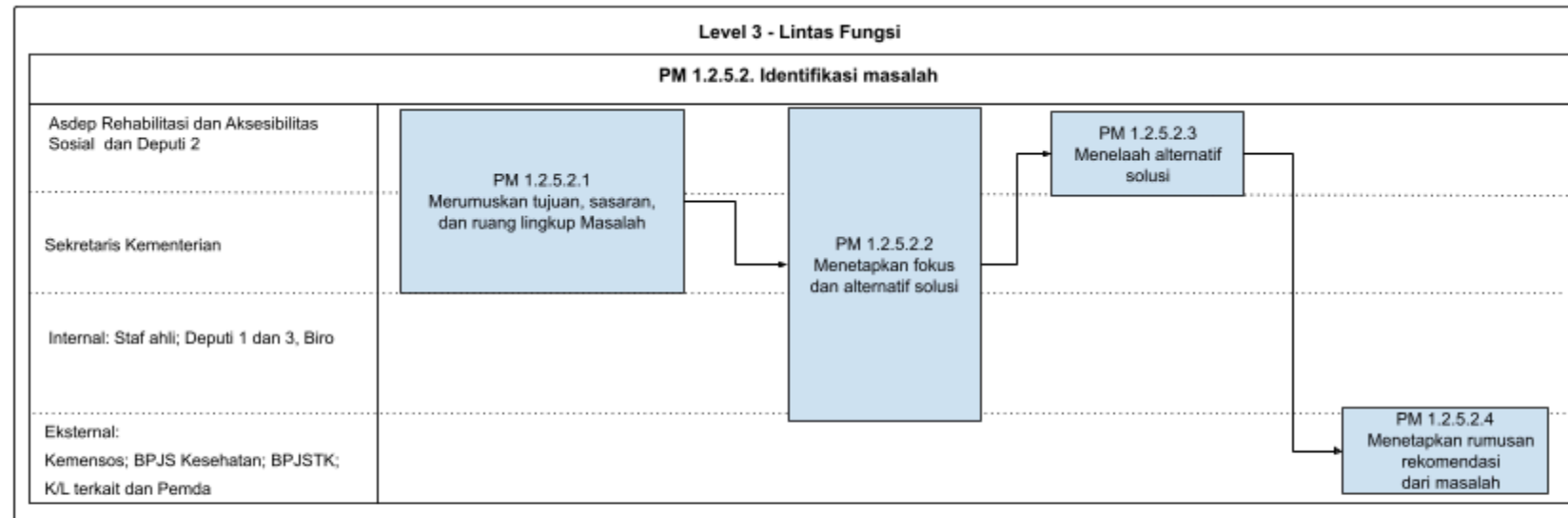


e) Level 3 . . .

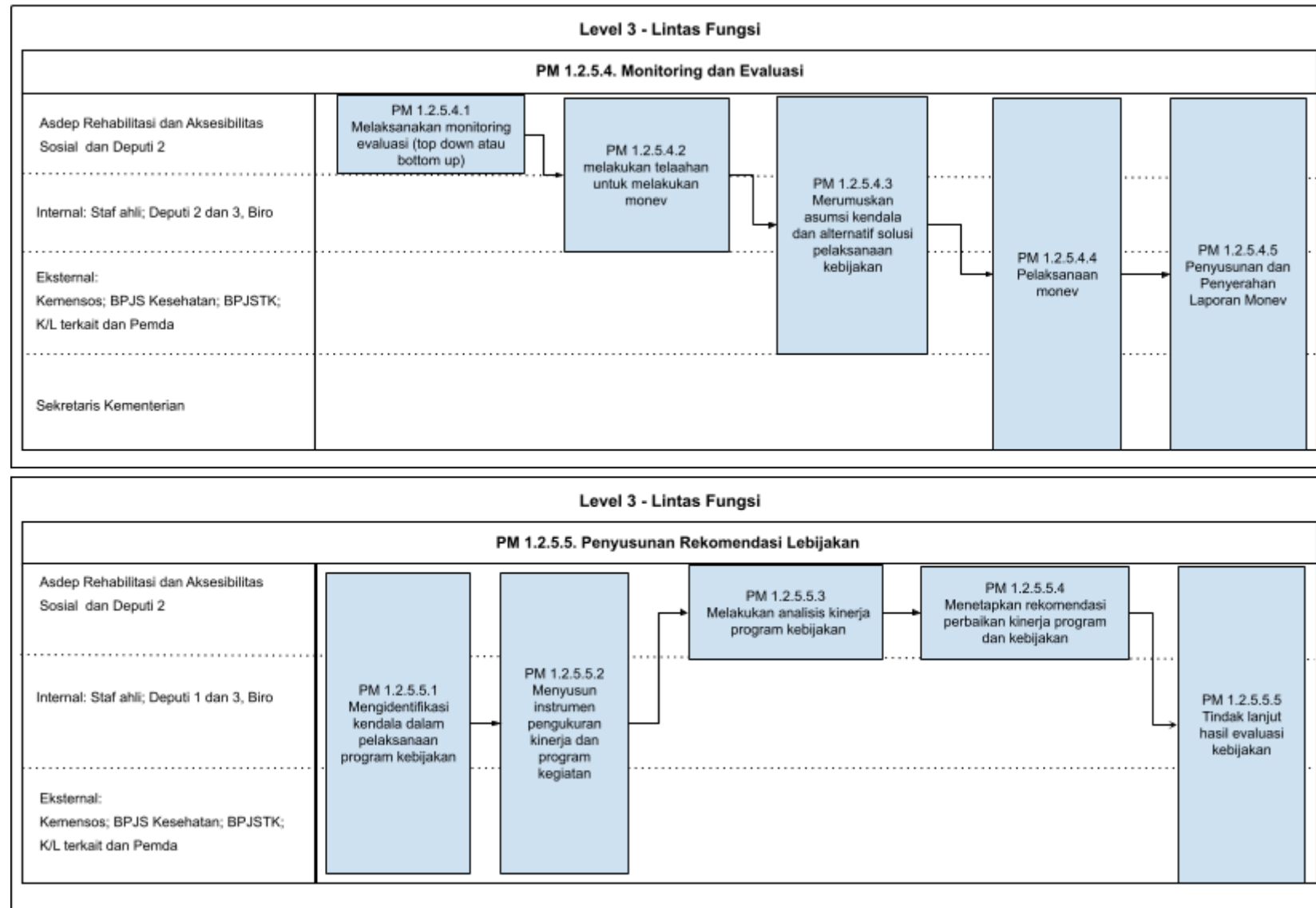
e) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.5. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial**



Level 3 . . .



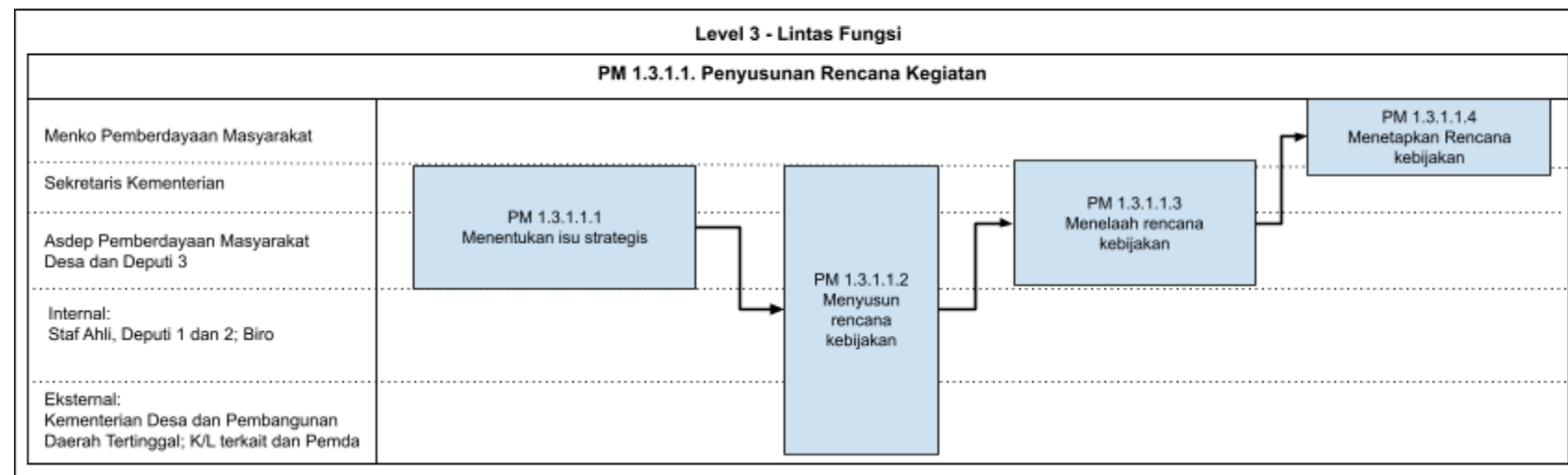
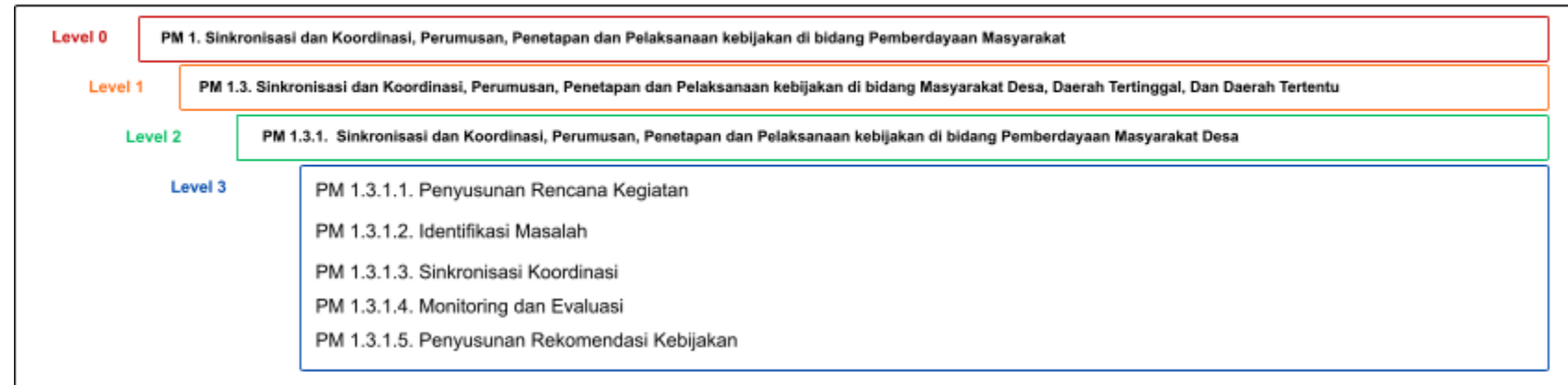
Level 3 . . .



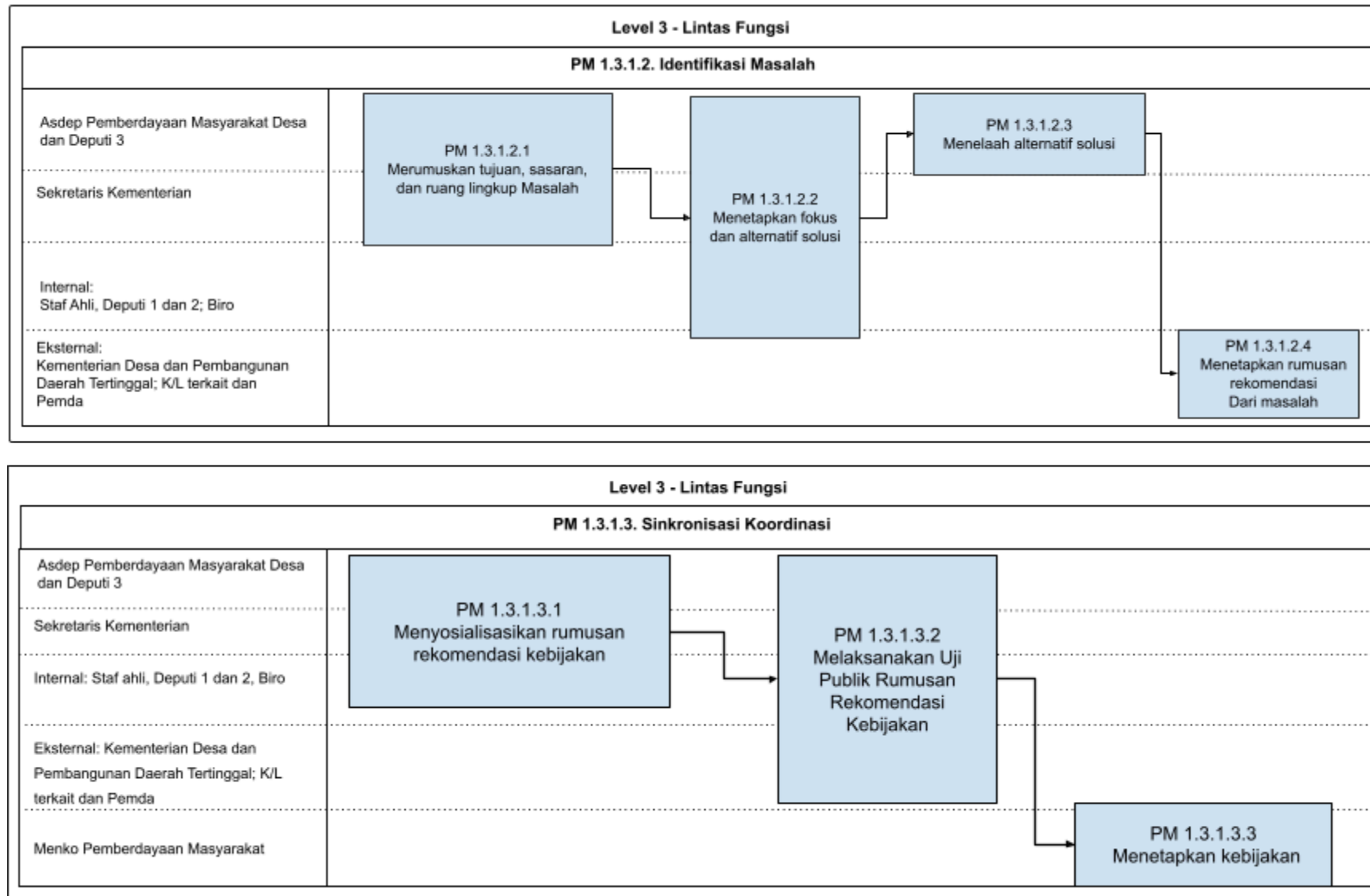
iii. Level 2 . . .

iii. **Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu**

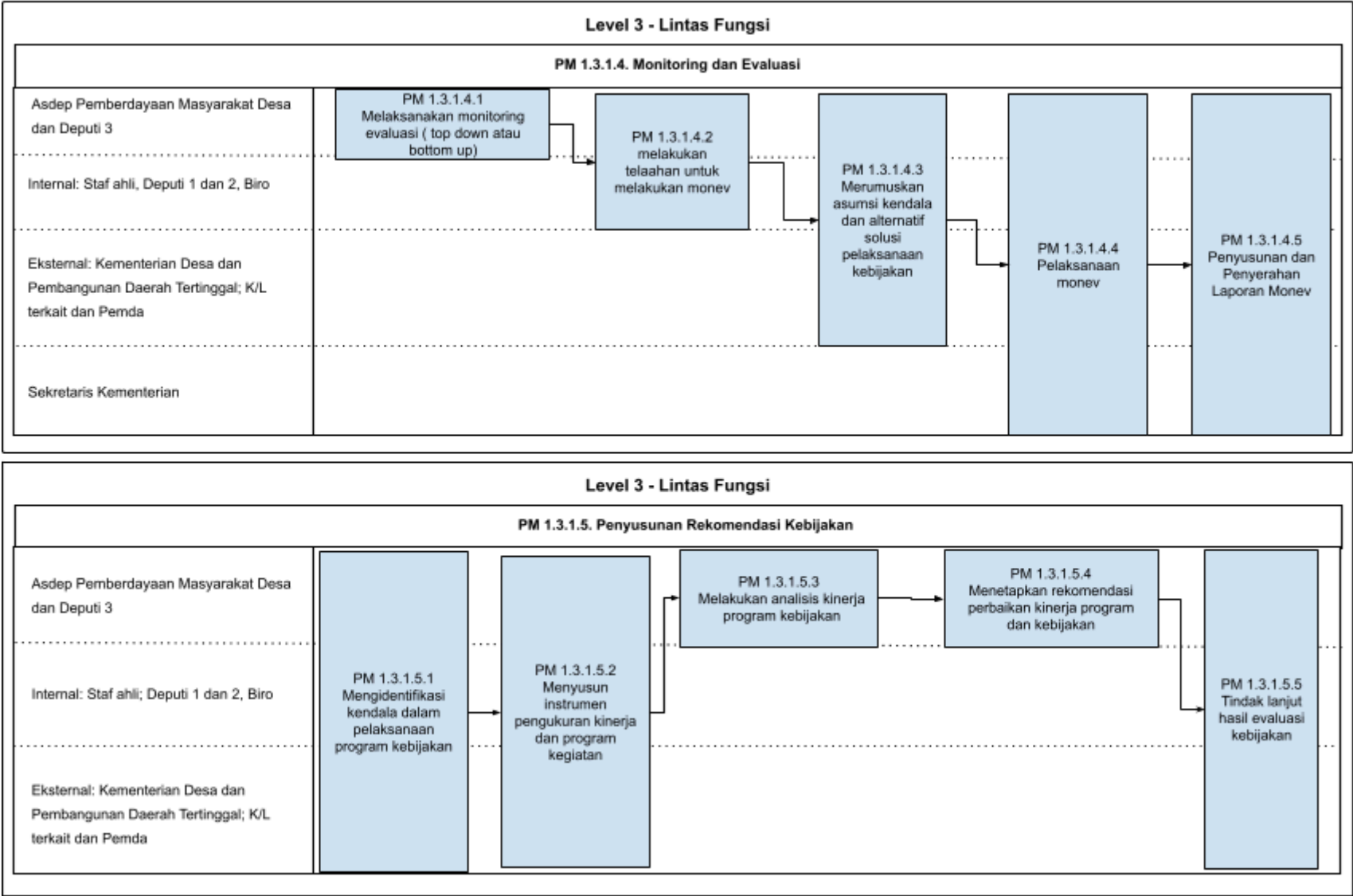
a) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**



Level 3 . . .

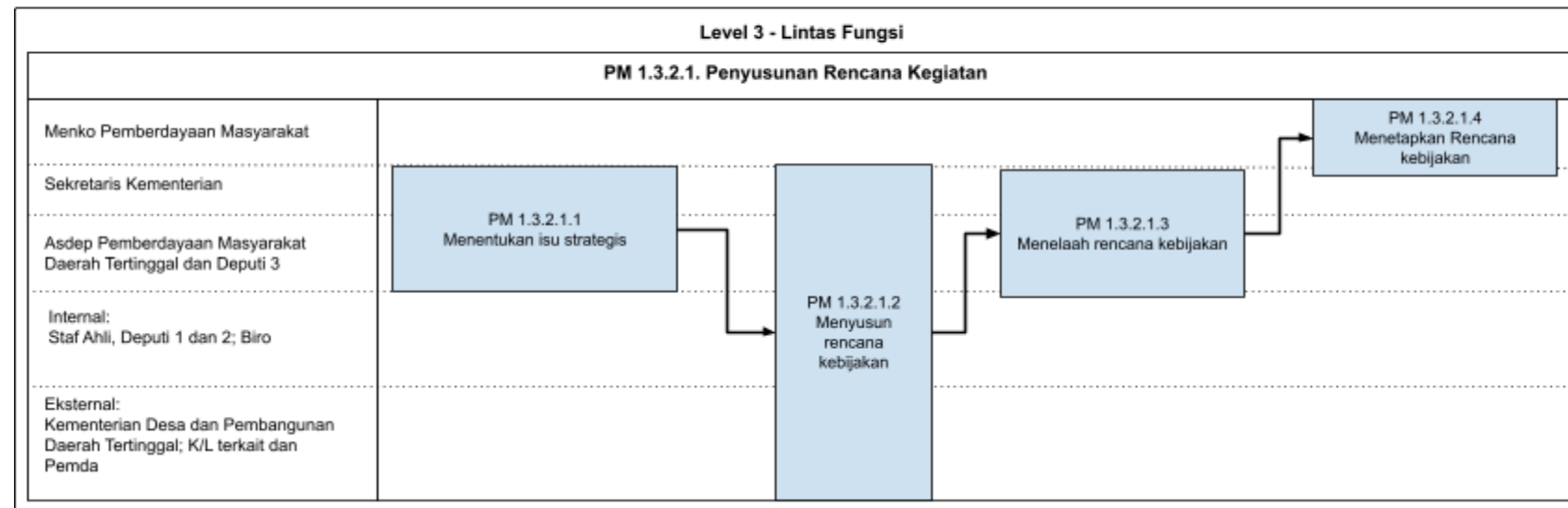
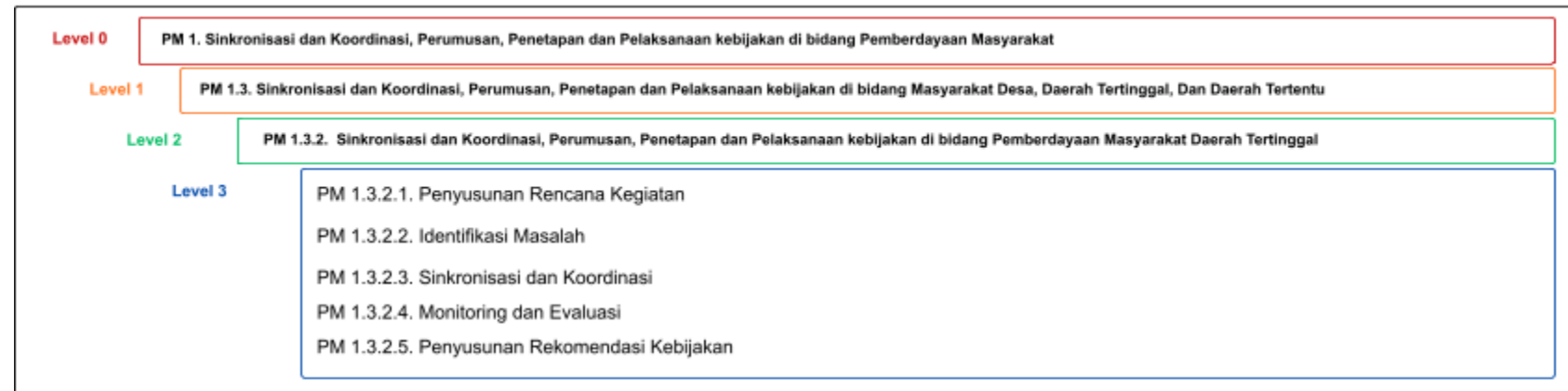


Level 3 . . .

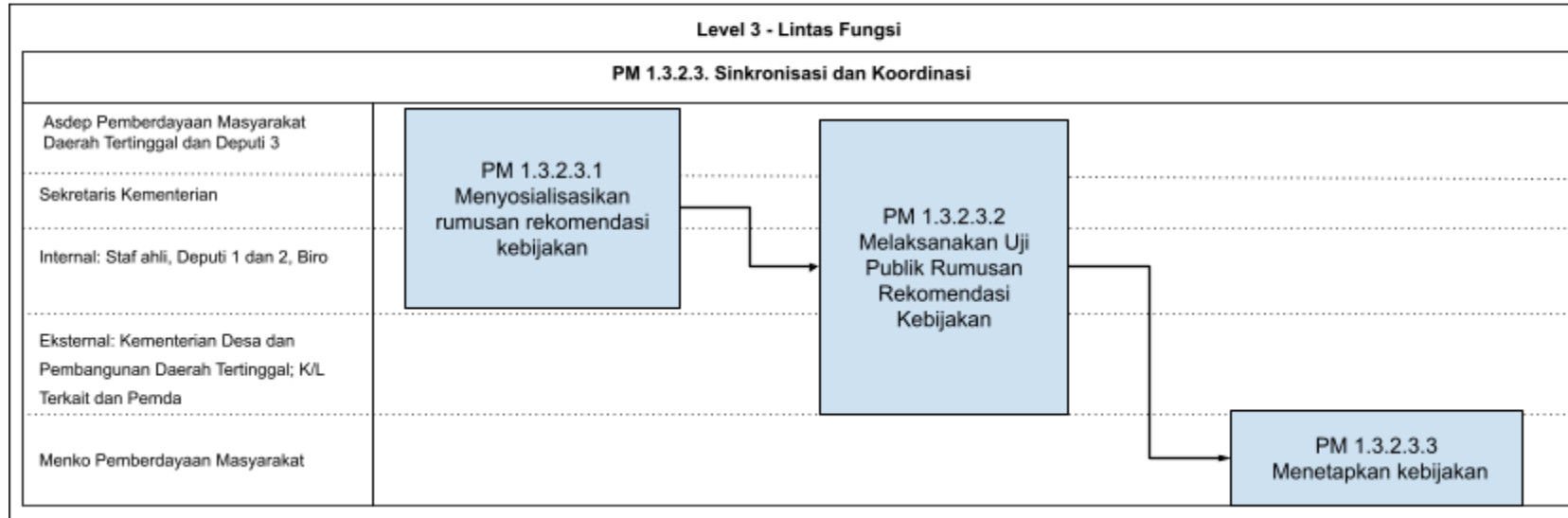
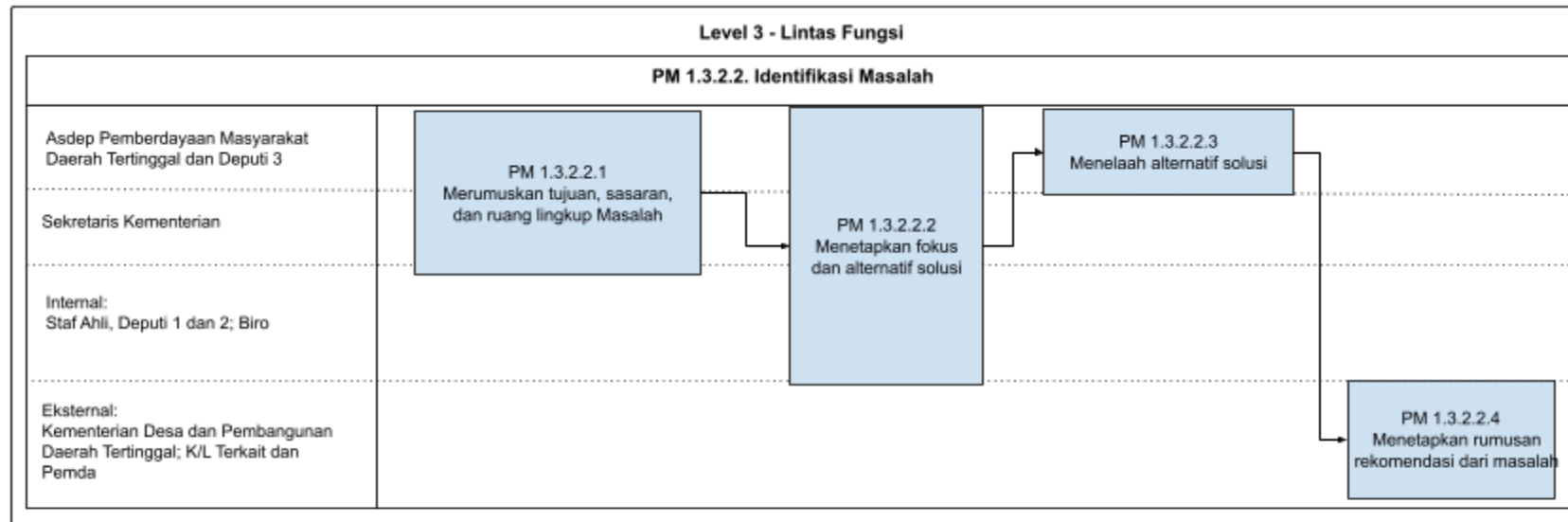


b) Level 3 . . .

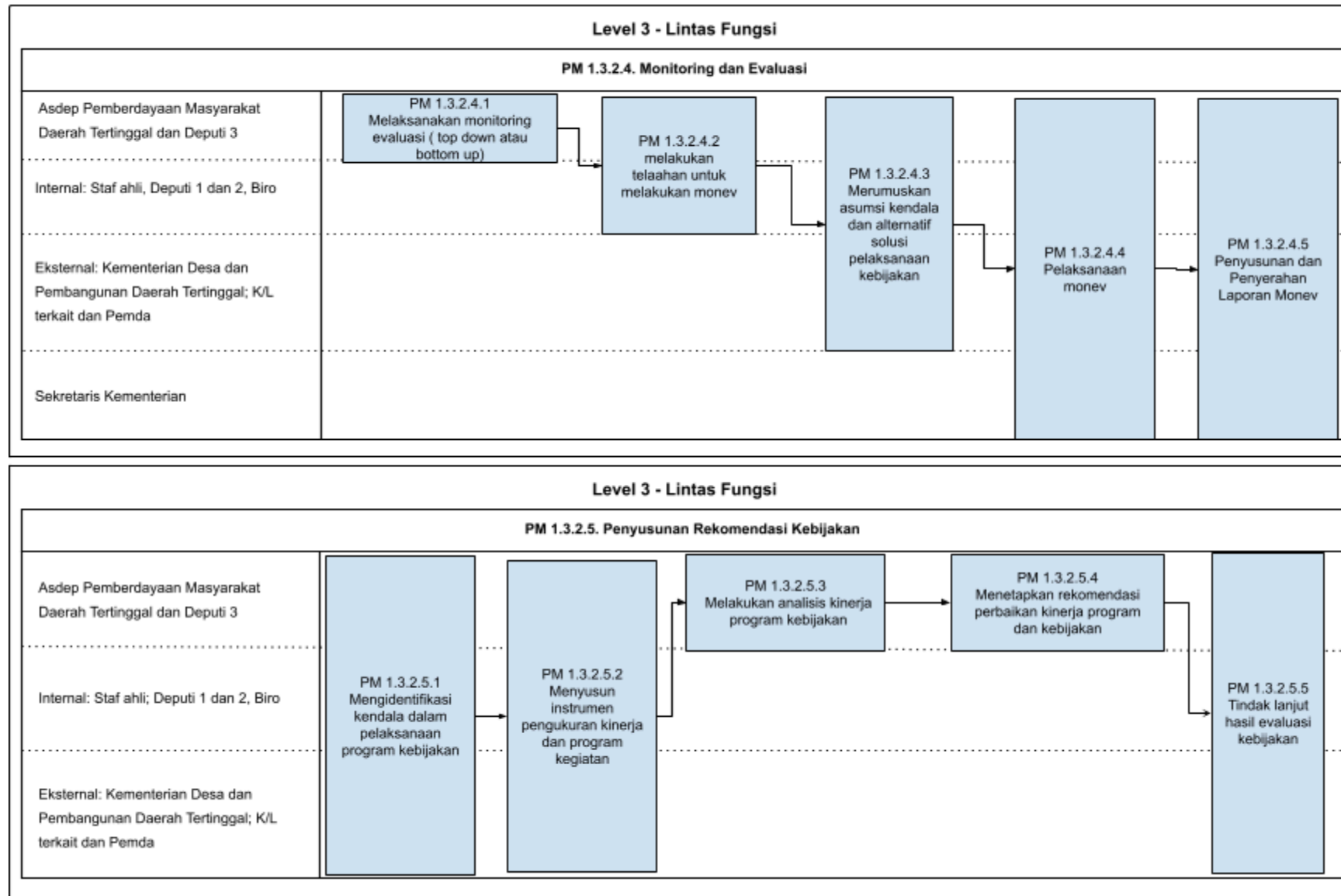
b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal



Level 3 . . .

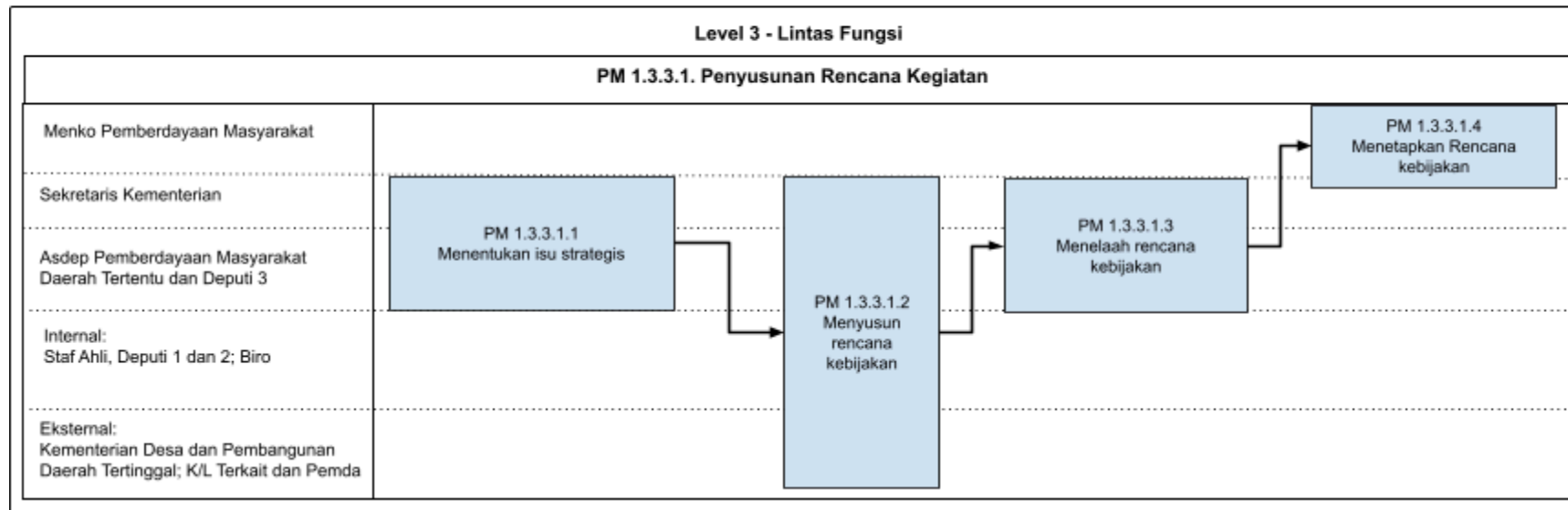
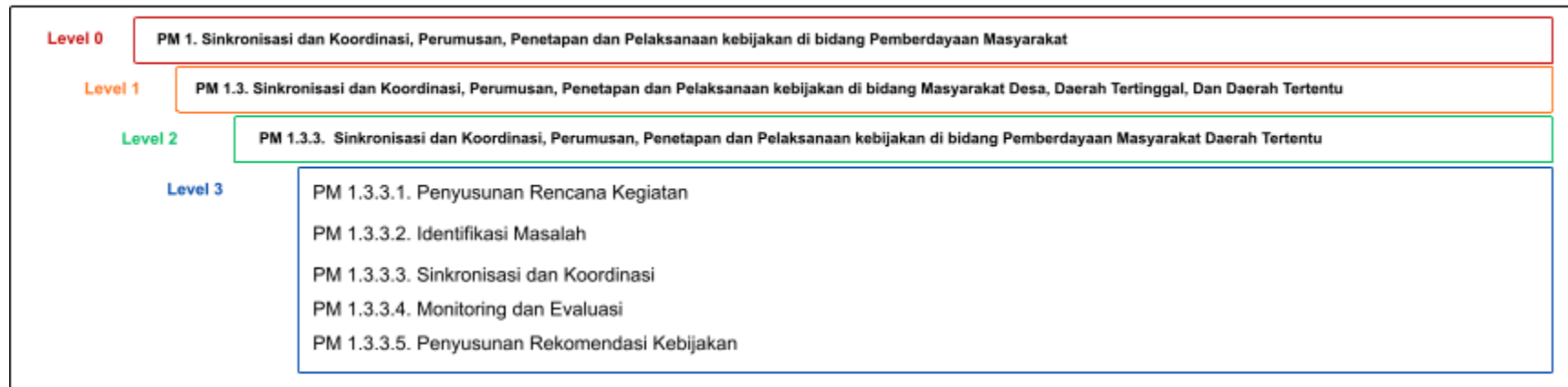


Level 3 . . .

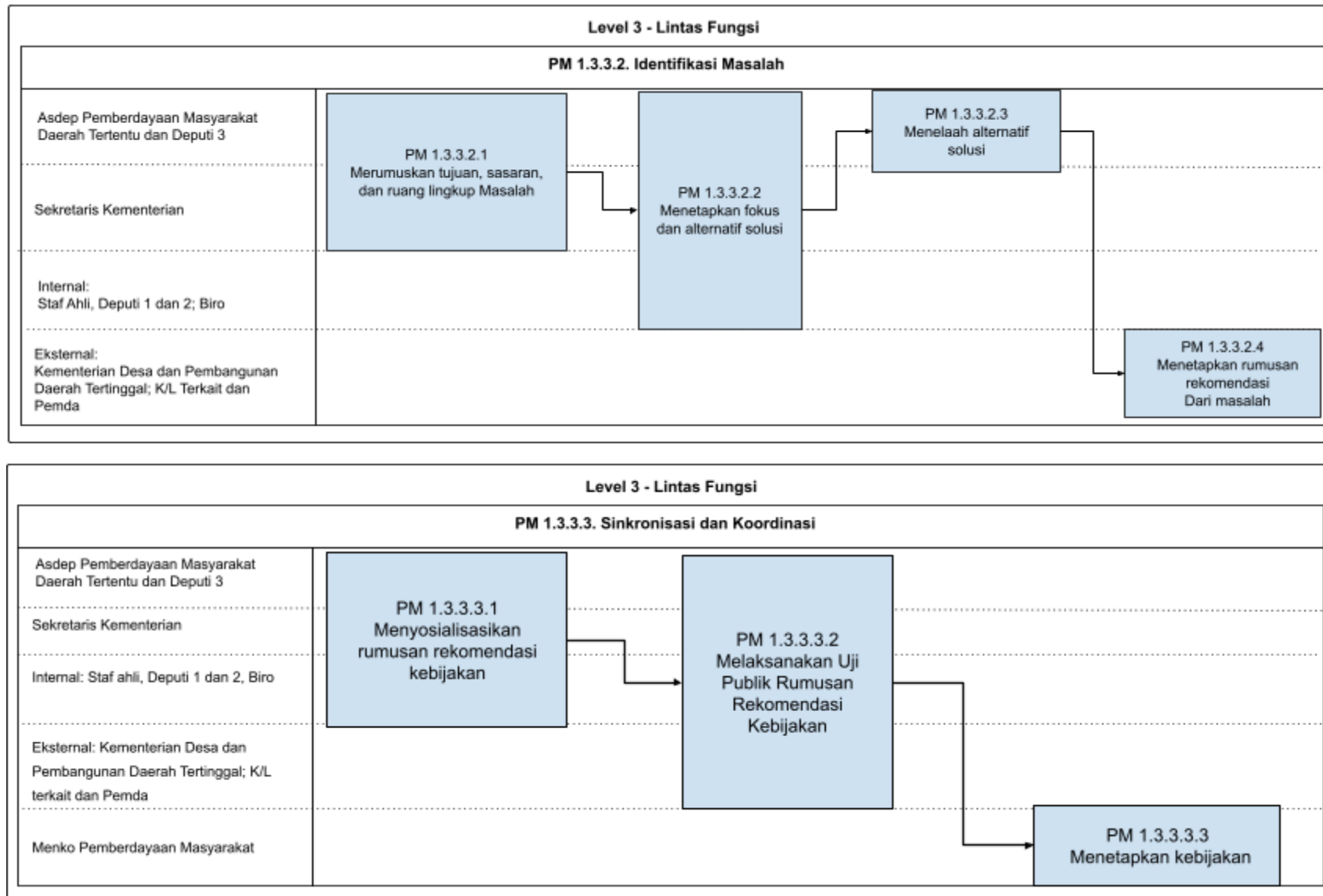


c) Level 3 . . .

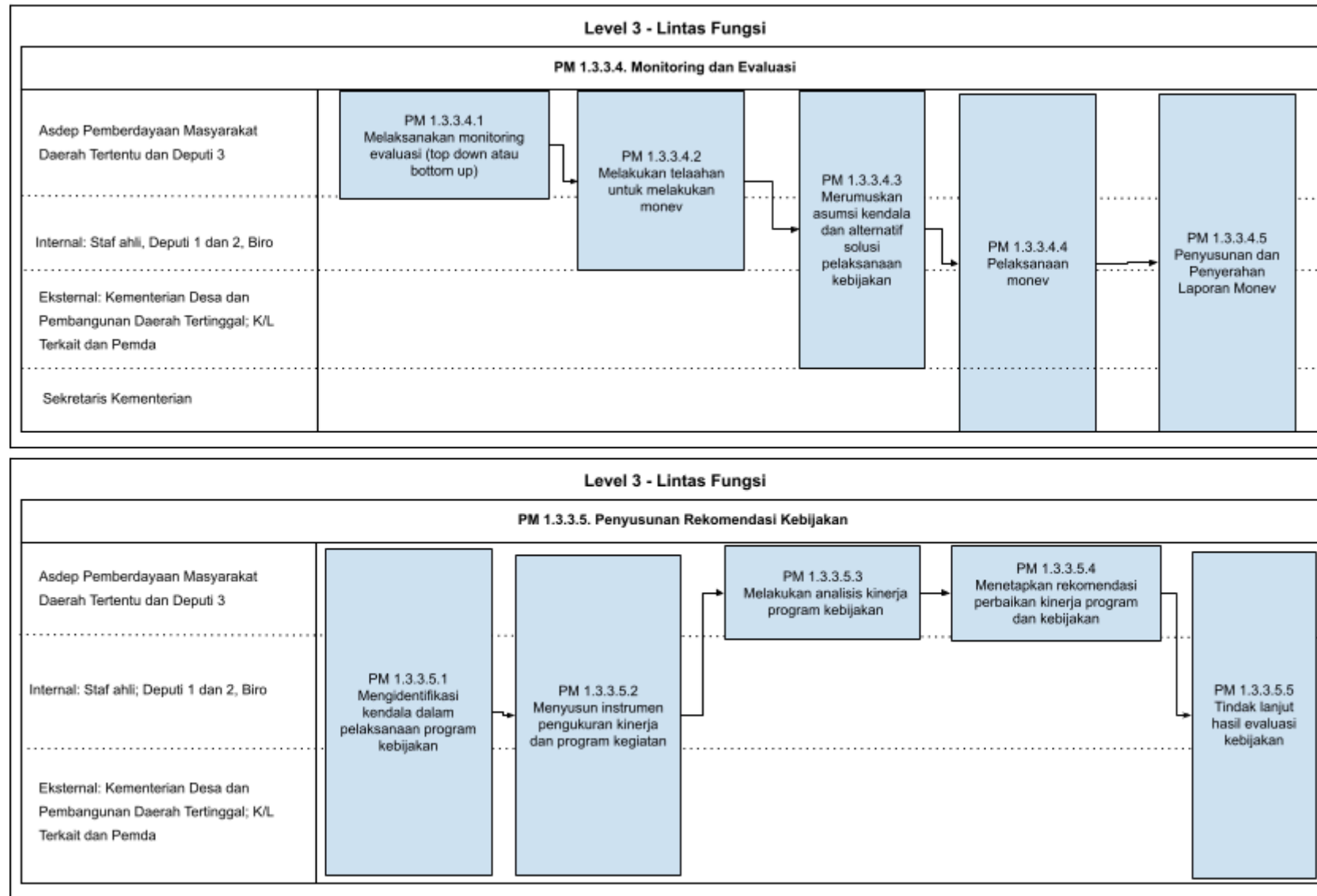
c) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu**



Level 3 . . .

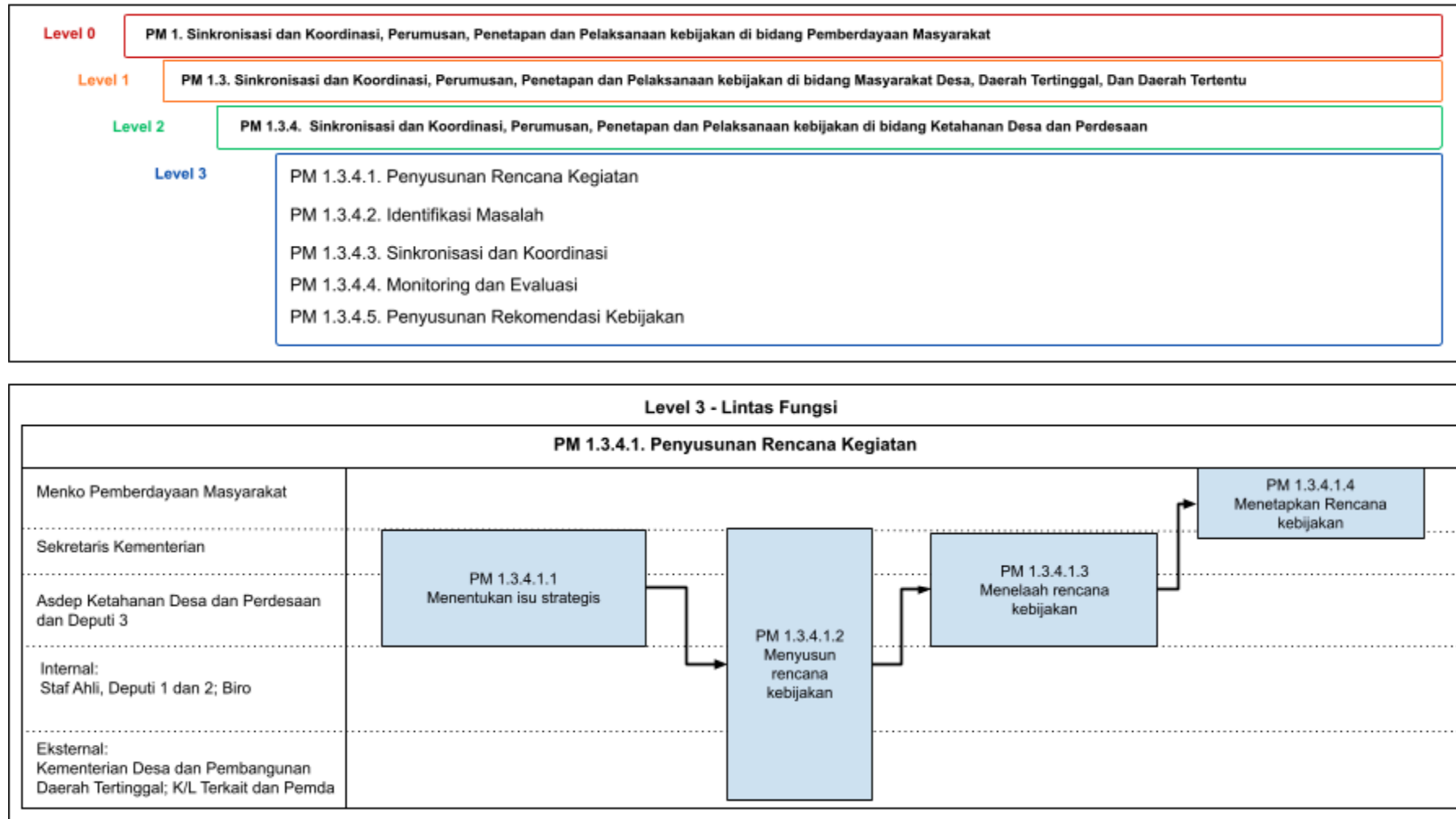


Level 3 . . .

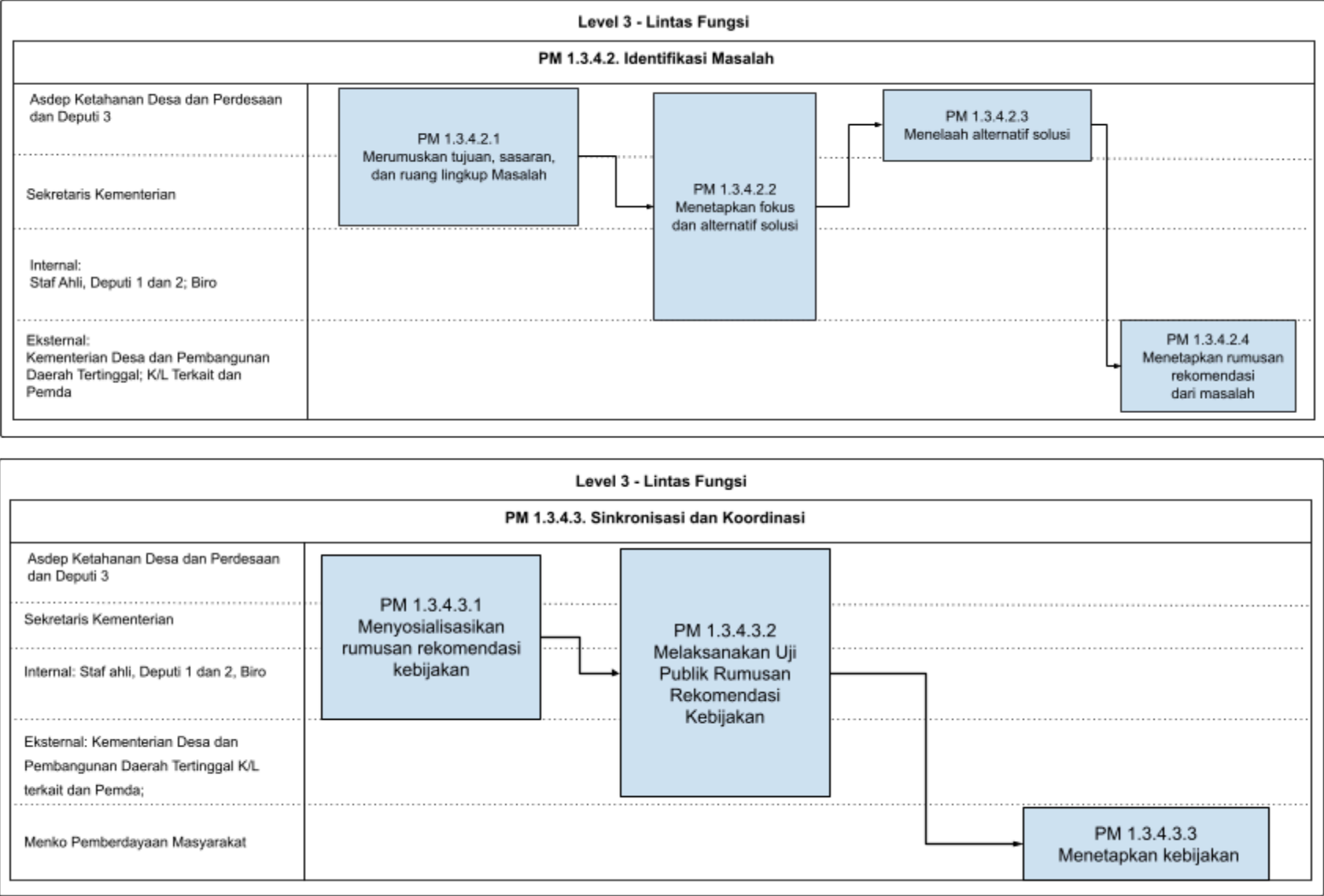


Level 3 . . .

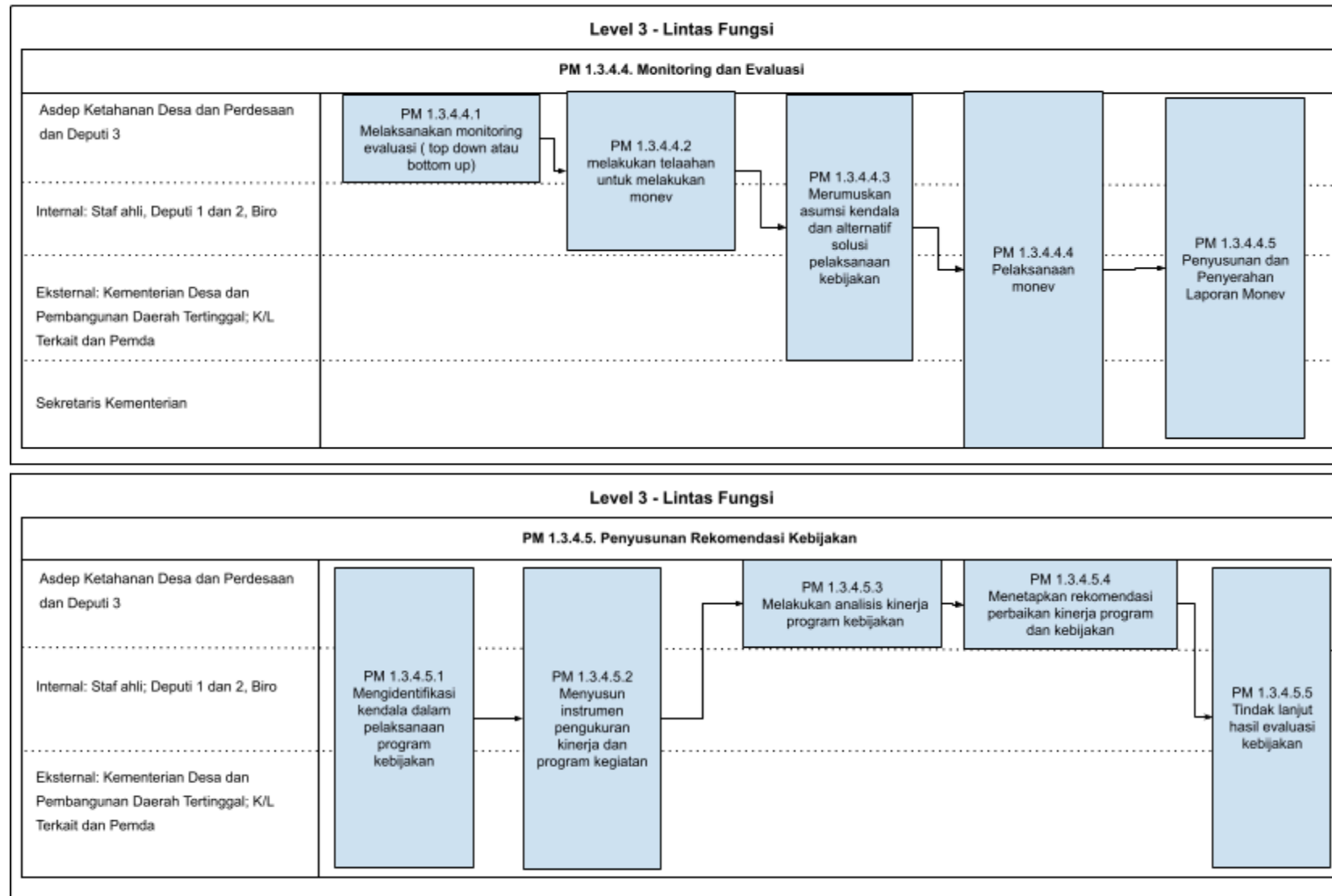
d) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3.4. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan**



Level 3 . . .

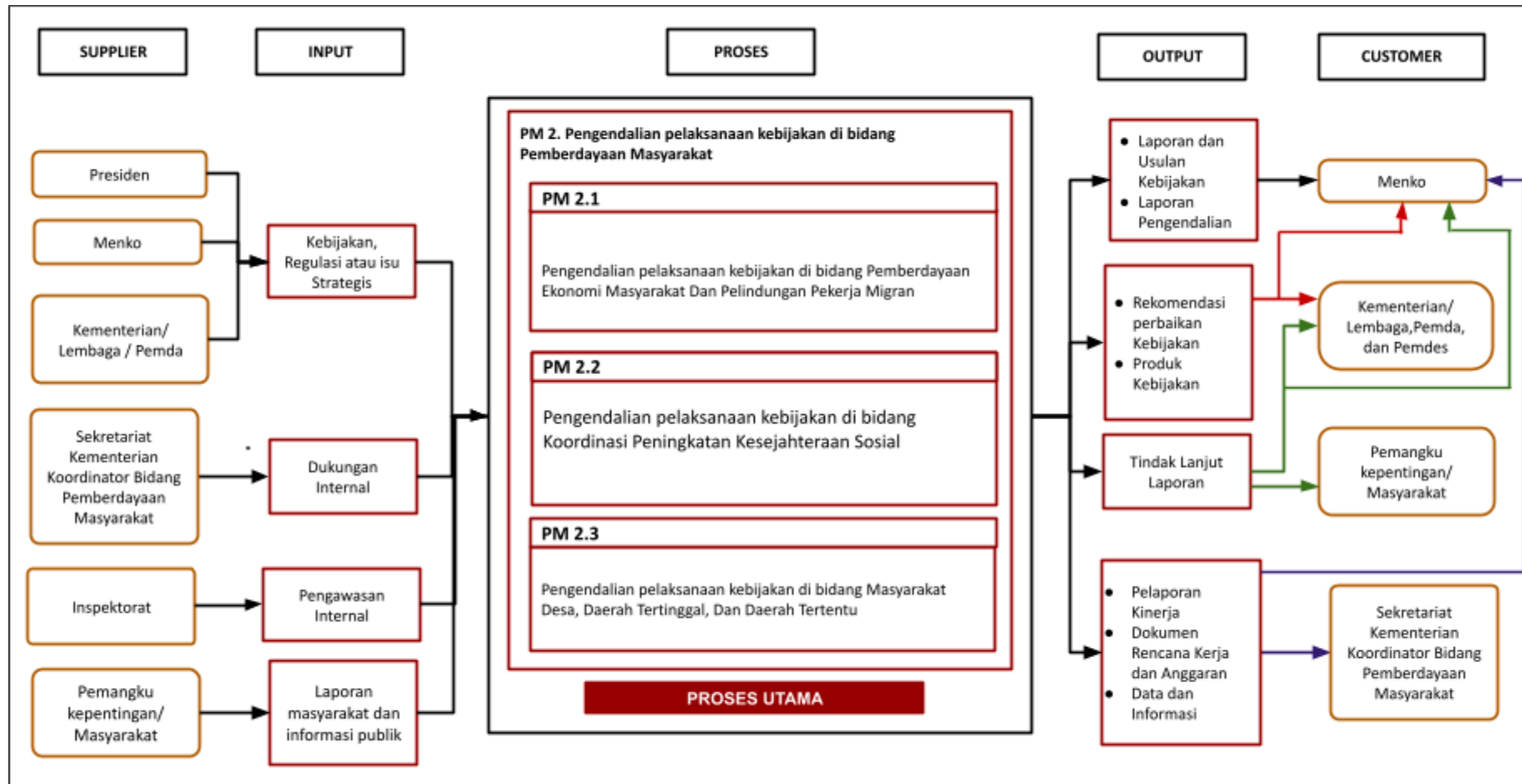


Level 3 . . .



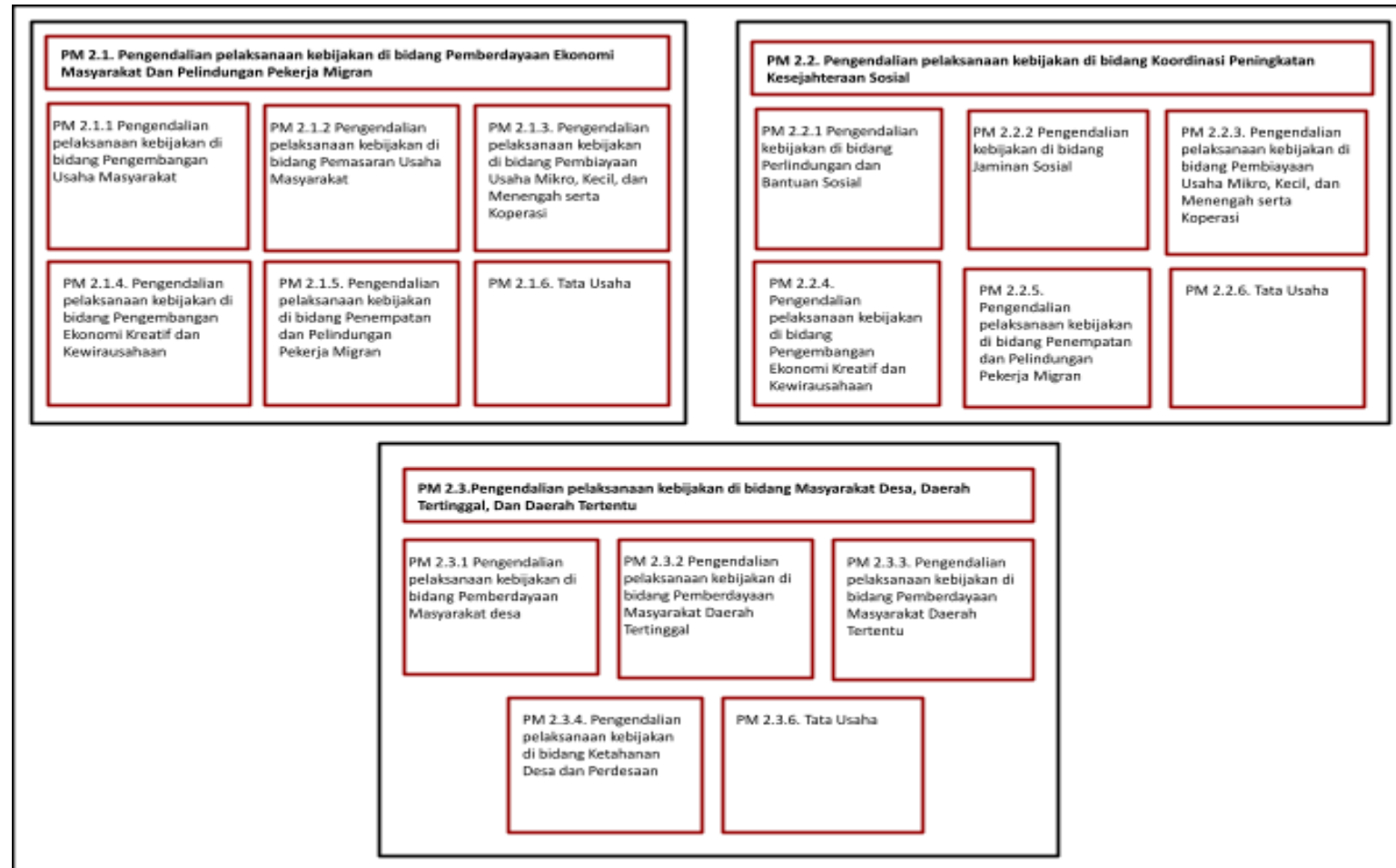
2. Level 1 . . .

2. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan, Pengelolaan dan Penanganan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat



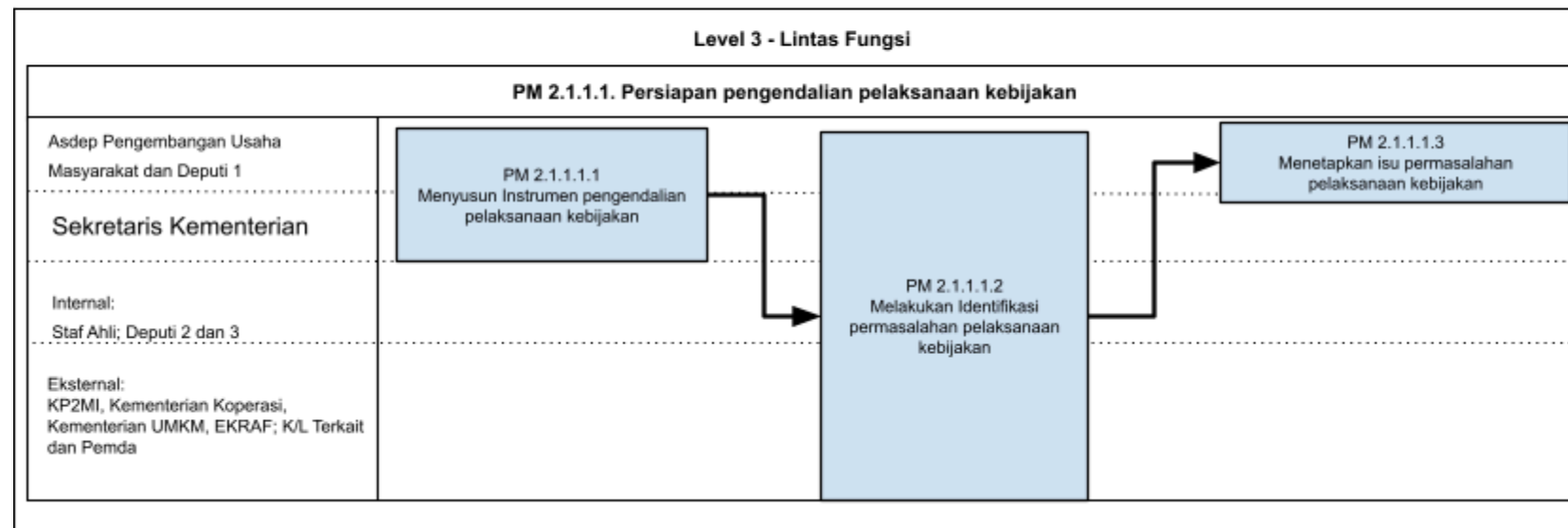
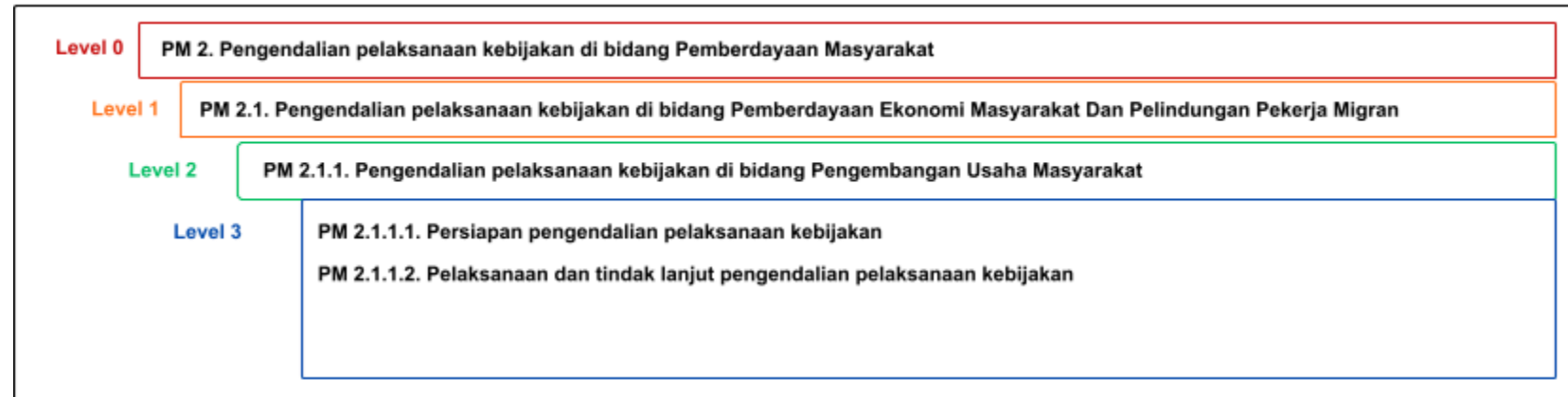
i. Level 2 . . .

i. **Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran**

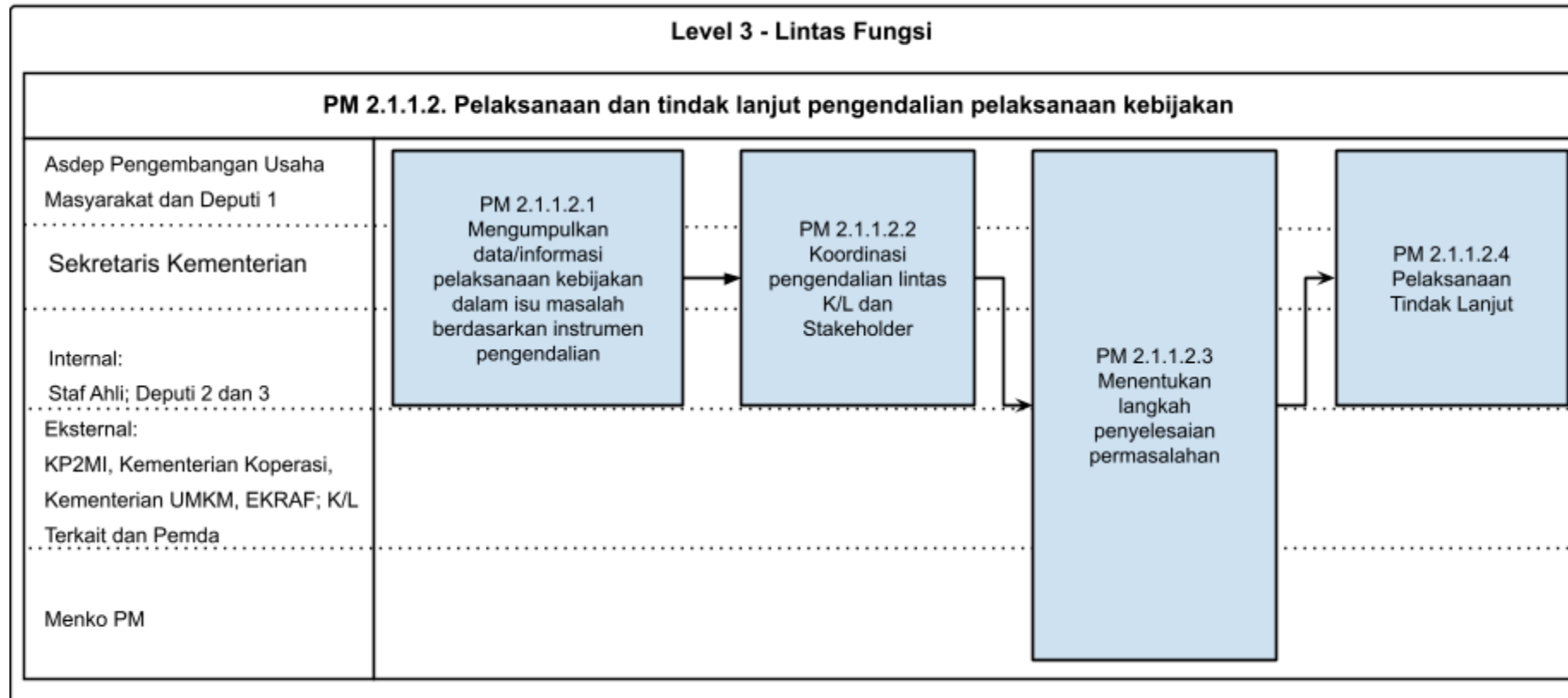


a) **Level 3. . .**

a) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.1. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat**

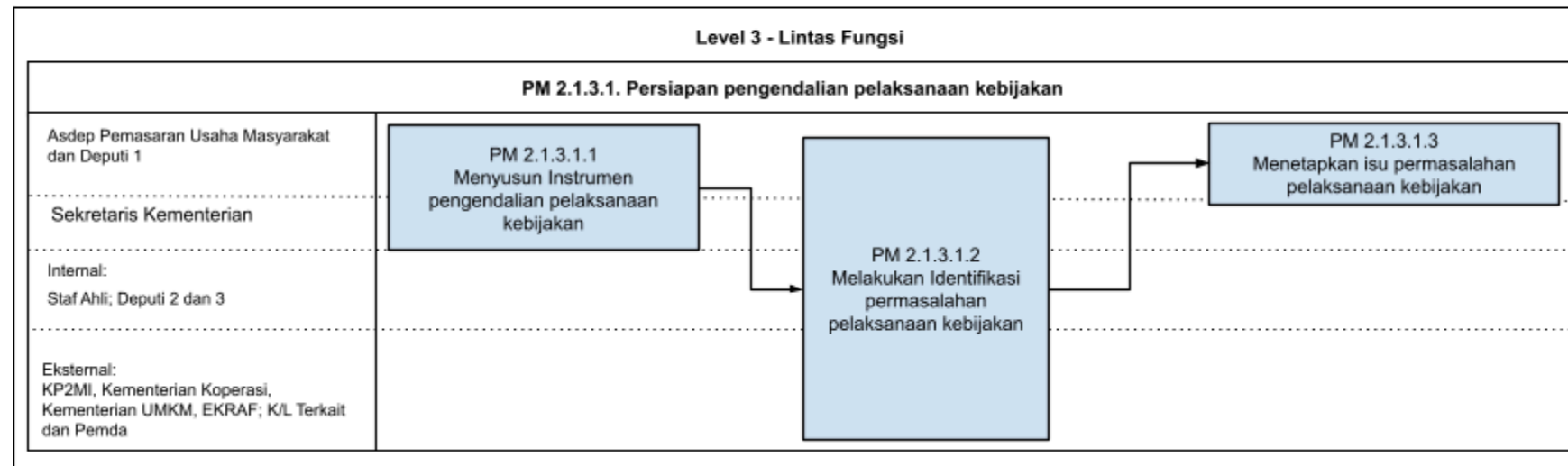
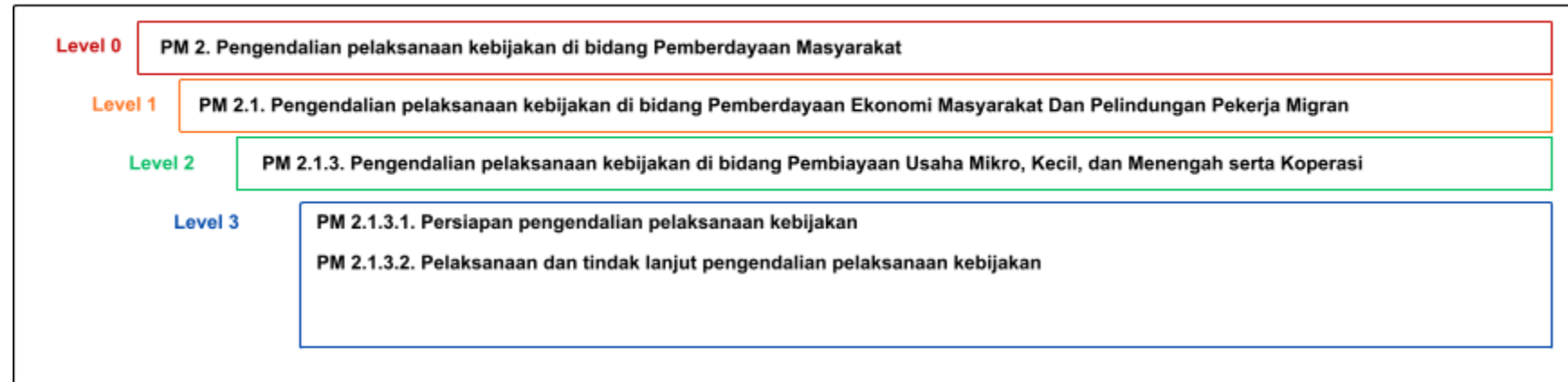


Level 3 . . .

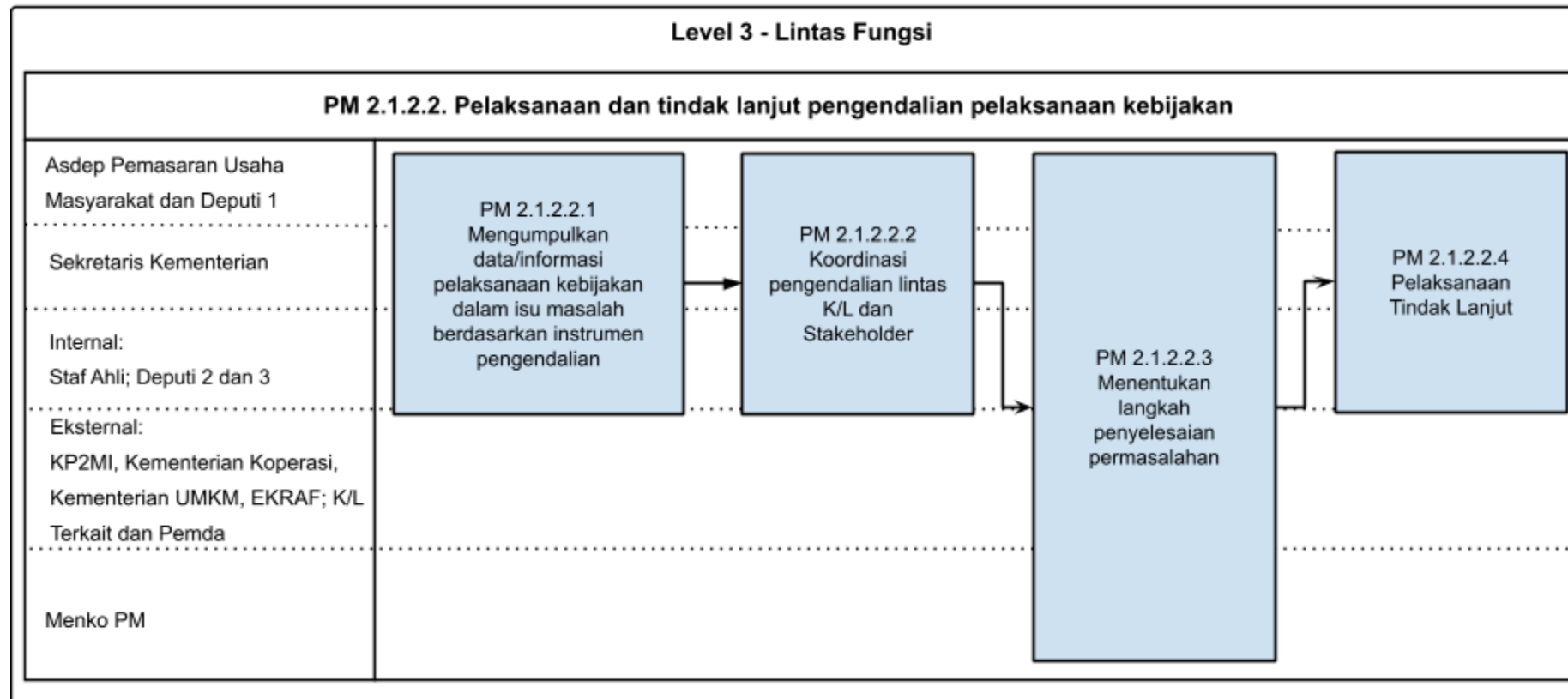


b) Level 3 . . .

b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat

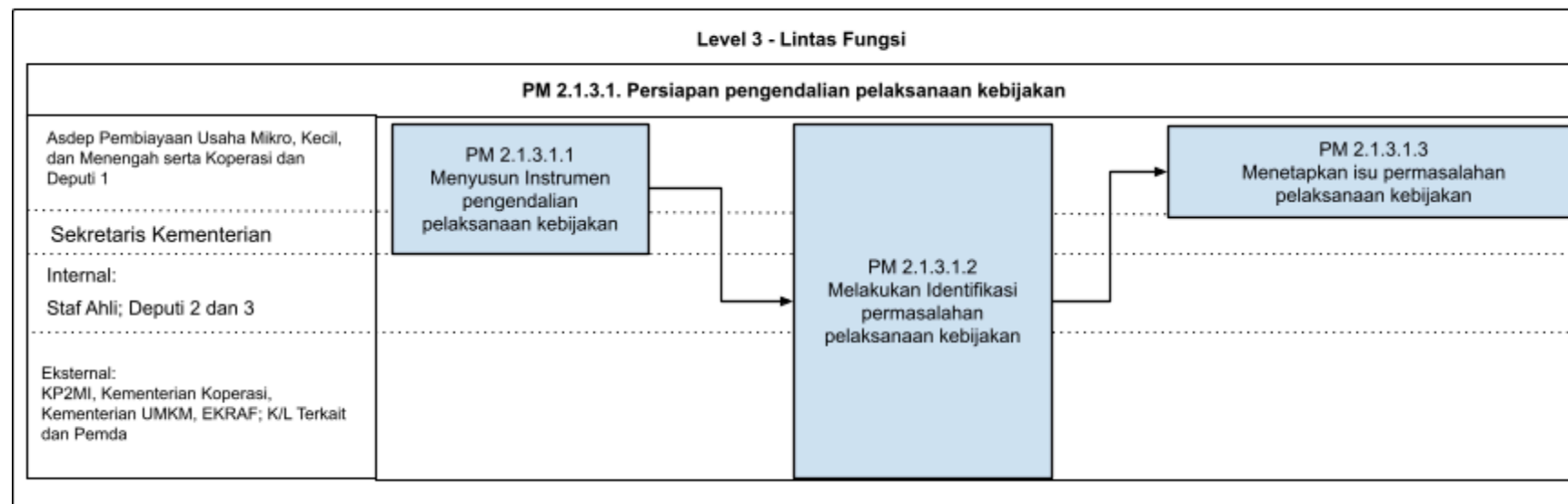
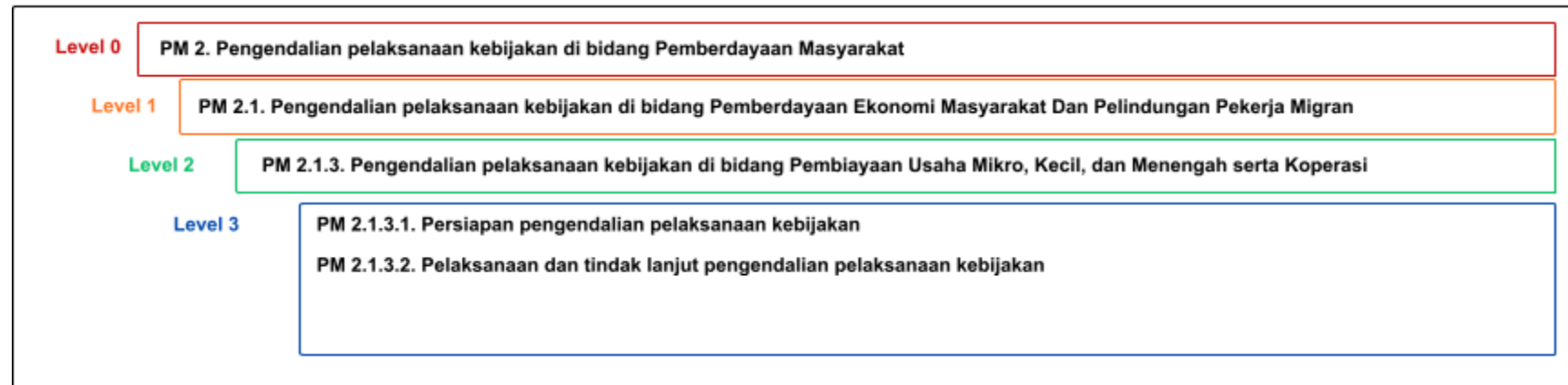


Level 3 . . .

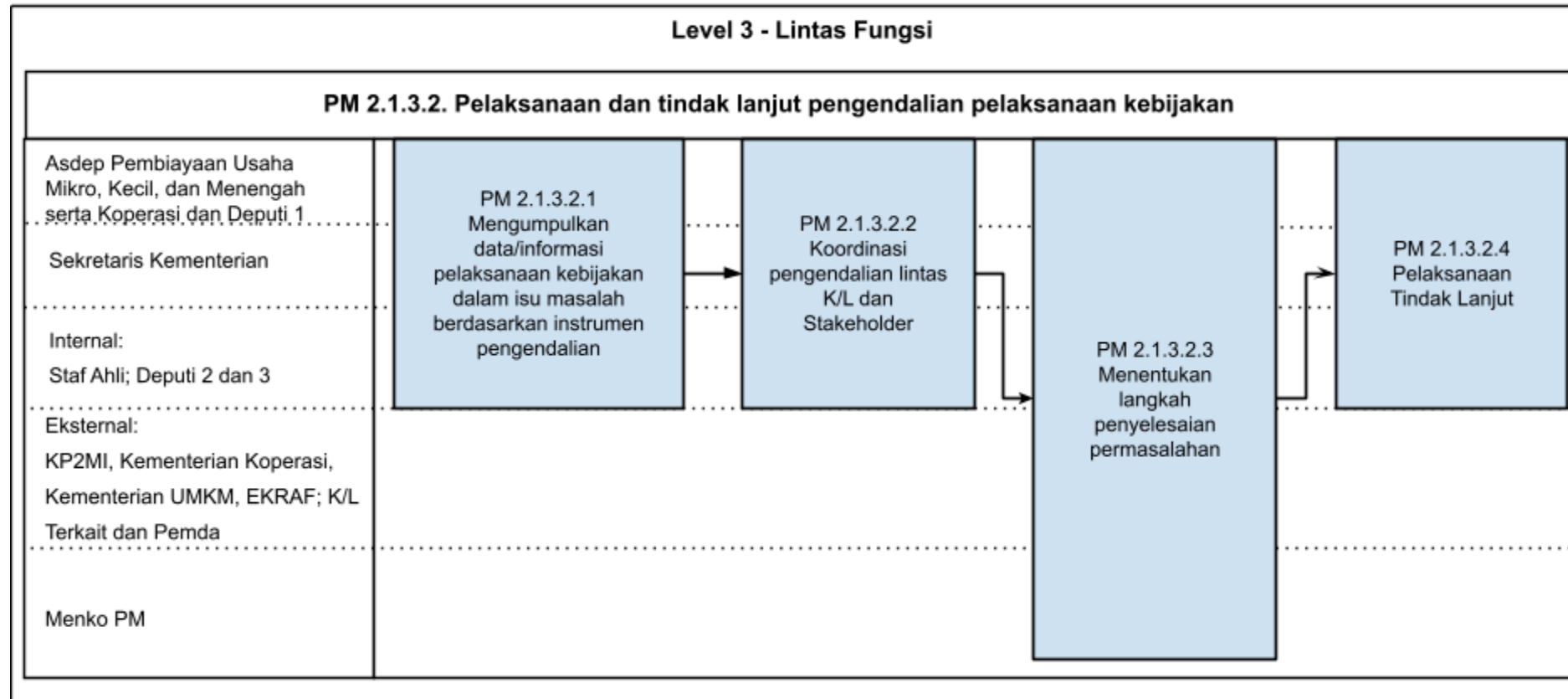


c) Level 3 . . .

c) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.3. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Koperasi**

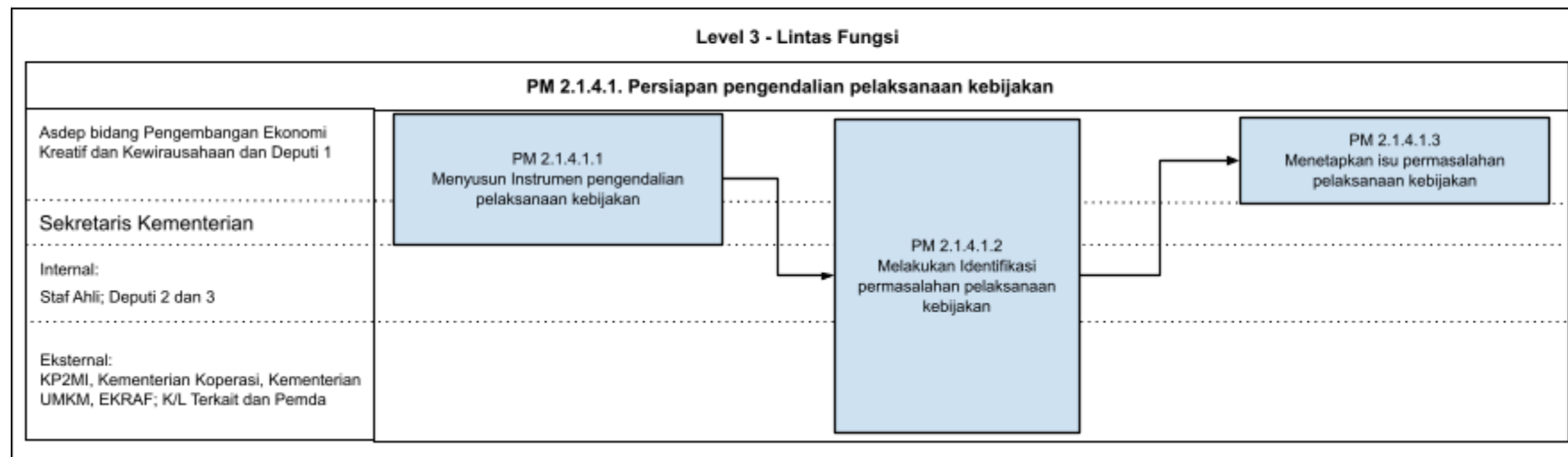
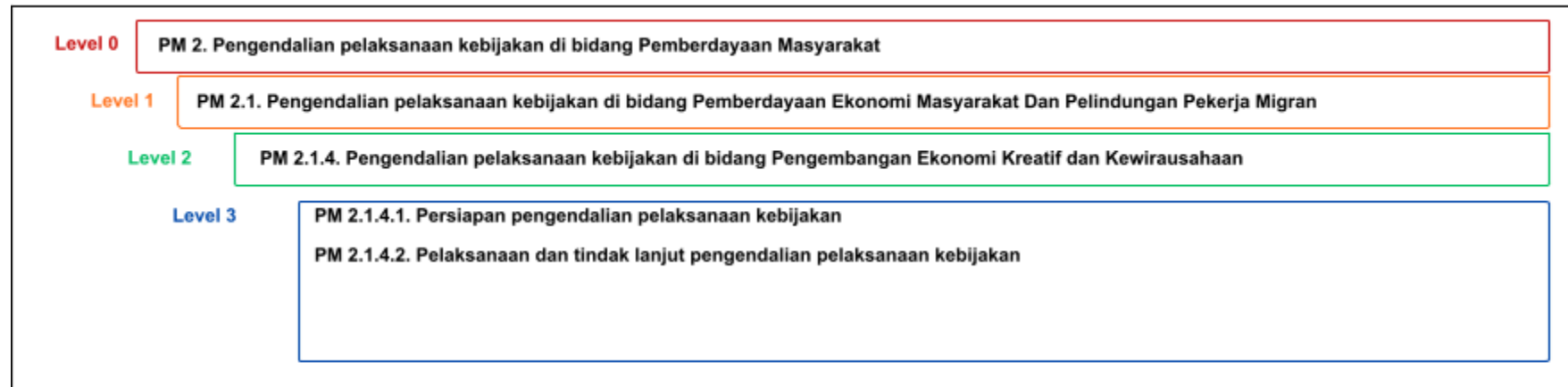


Level 3 . . .

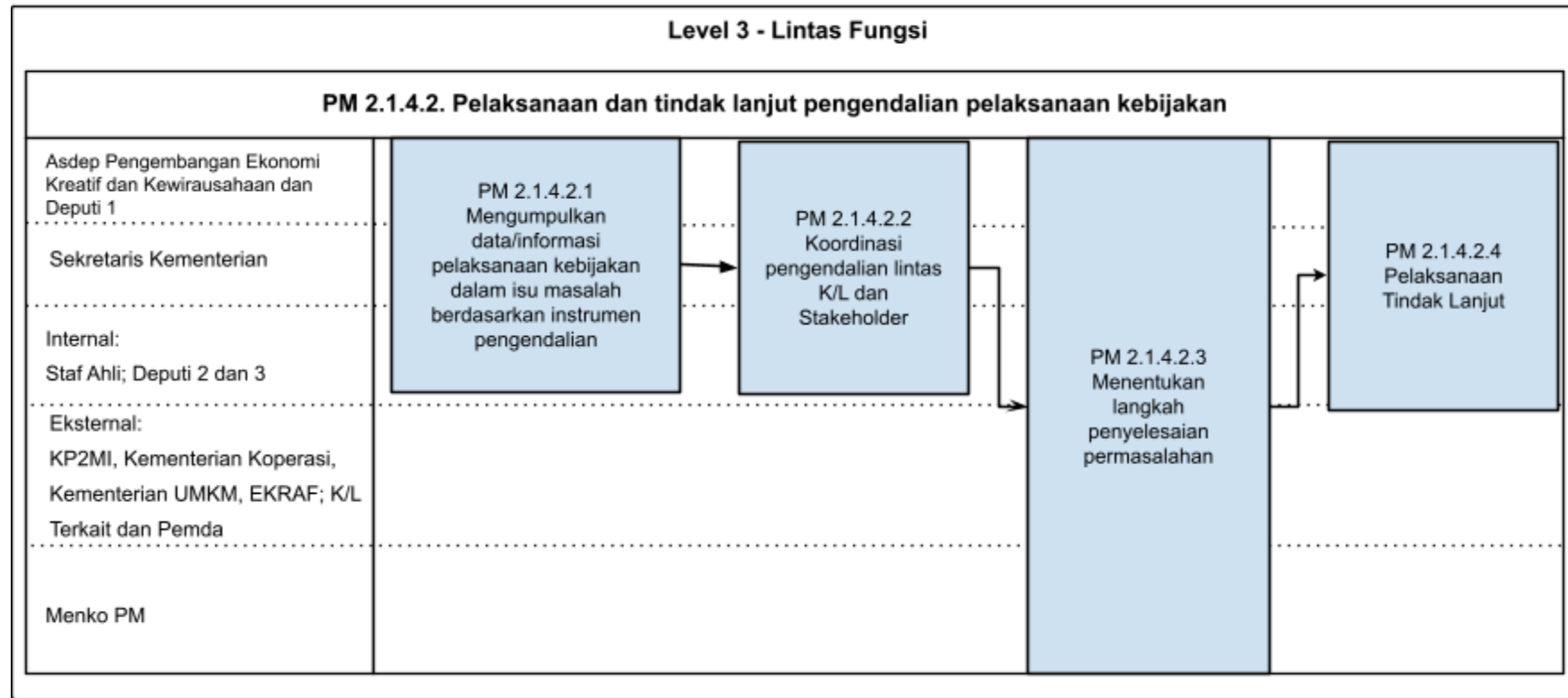


d) Level 3 . . .

d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.4 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan

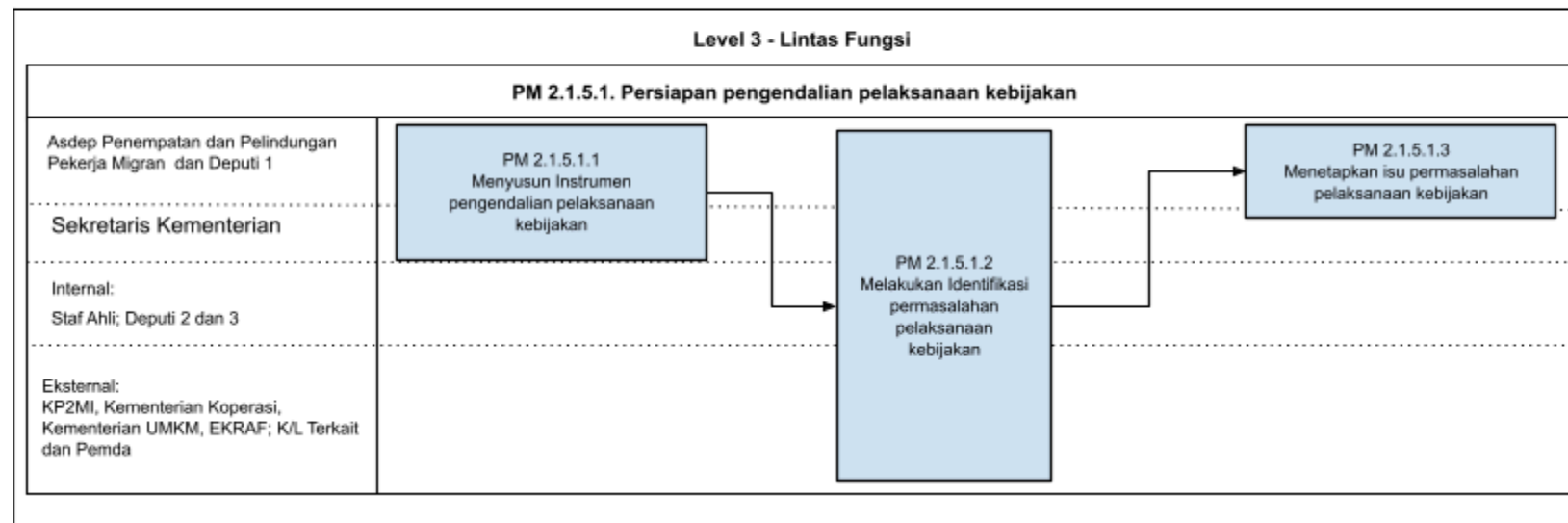
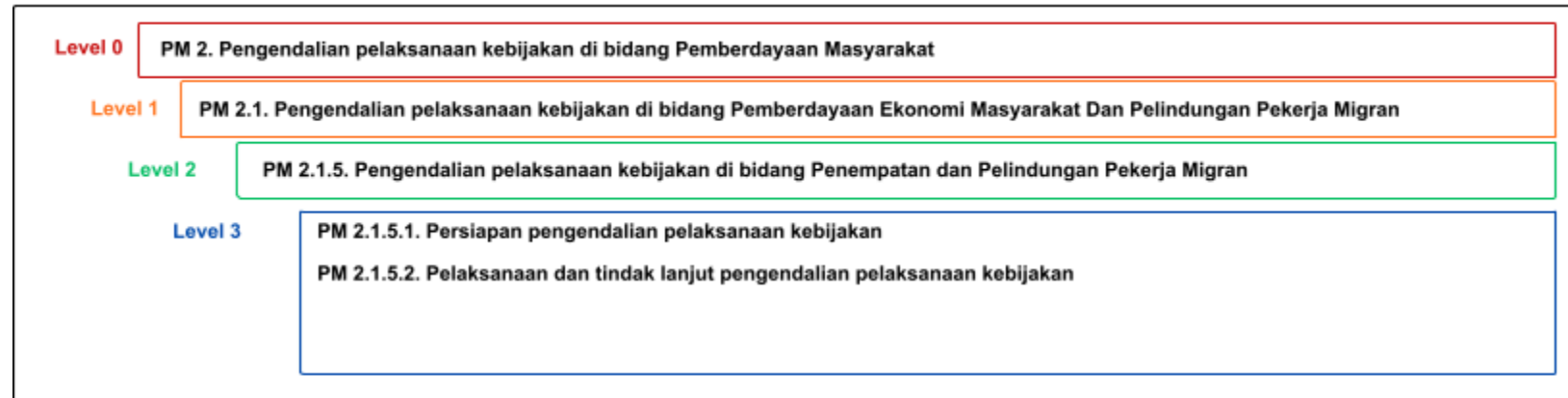


Level 3 . . .

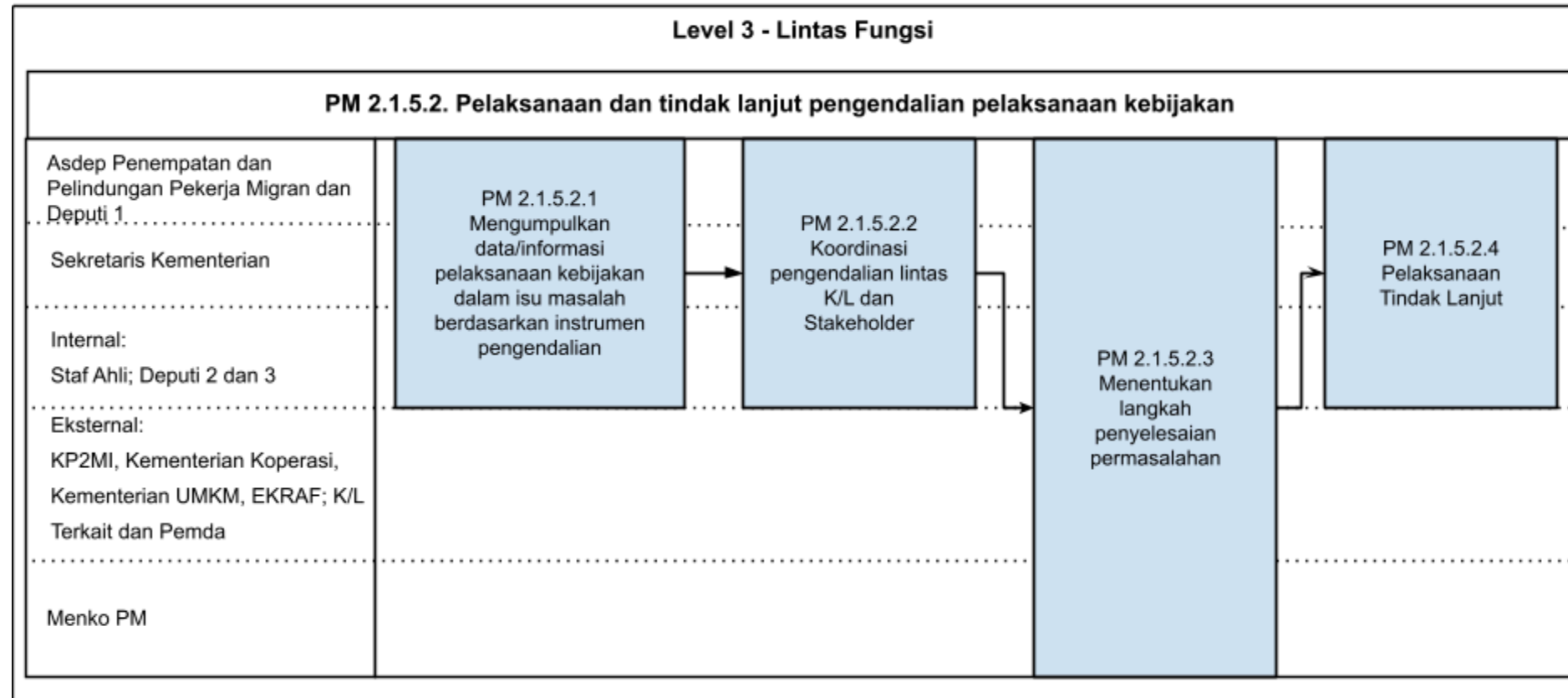


e) Level . . .

e) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.5 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran

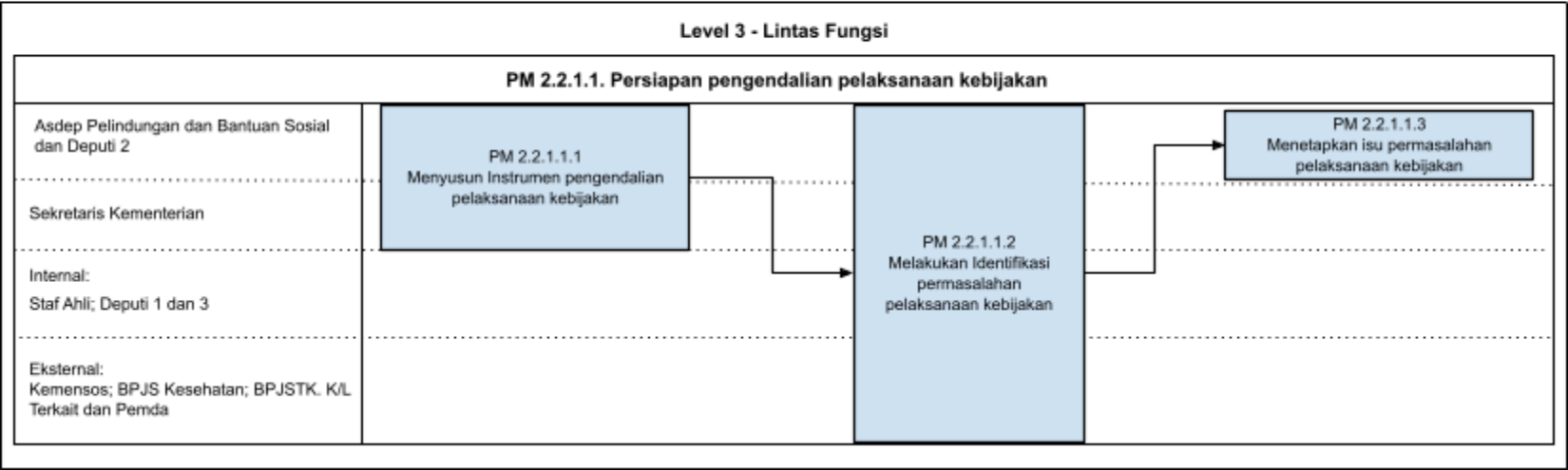
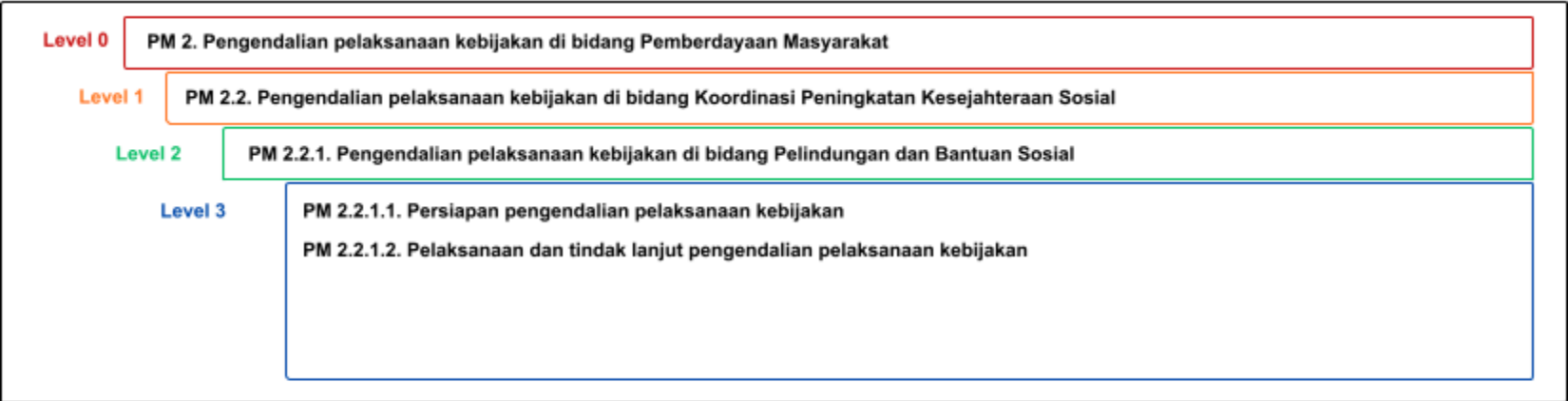


Level 3 . . .

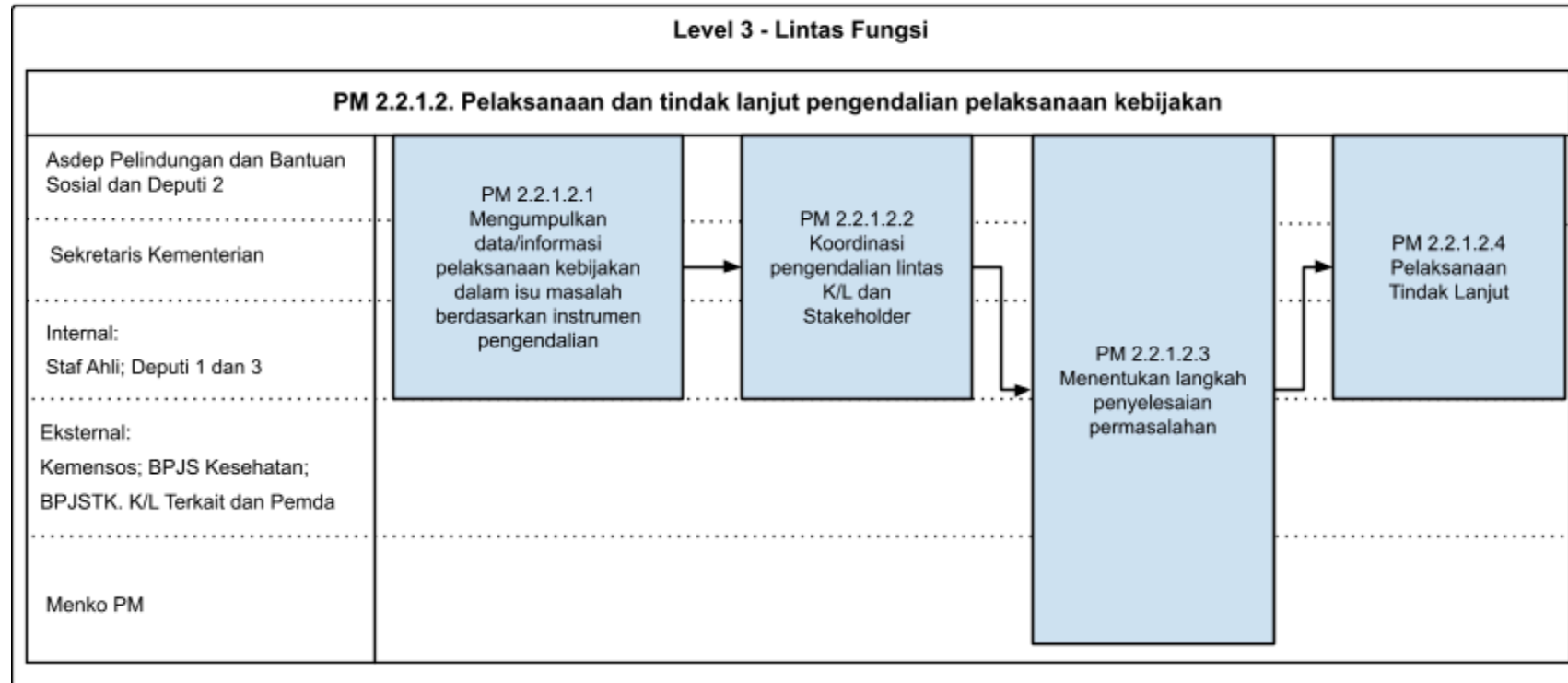


ii. Level 2 . . .

- ii. **Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial**
- a) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.1. Pengendalian Kebijakan di Bidang Pelindungan dan Bantuan Sosial**

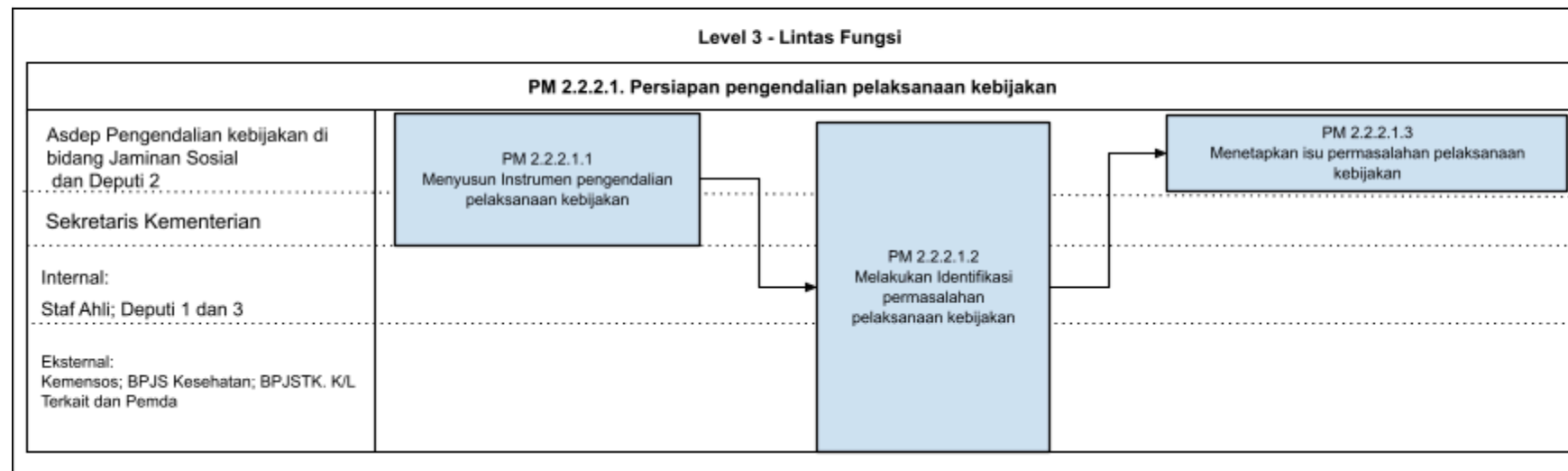
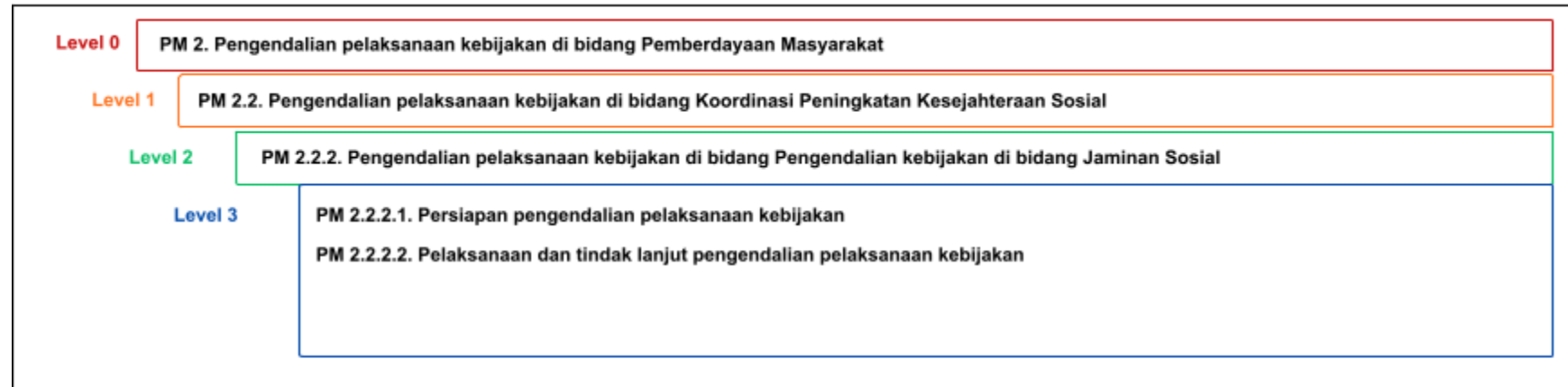


Level 3 . . .

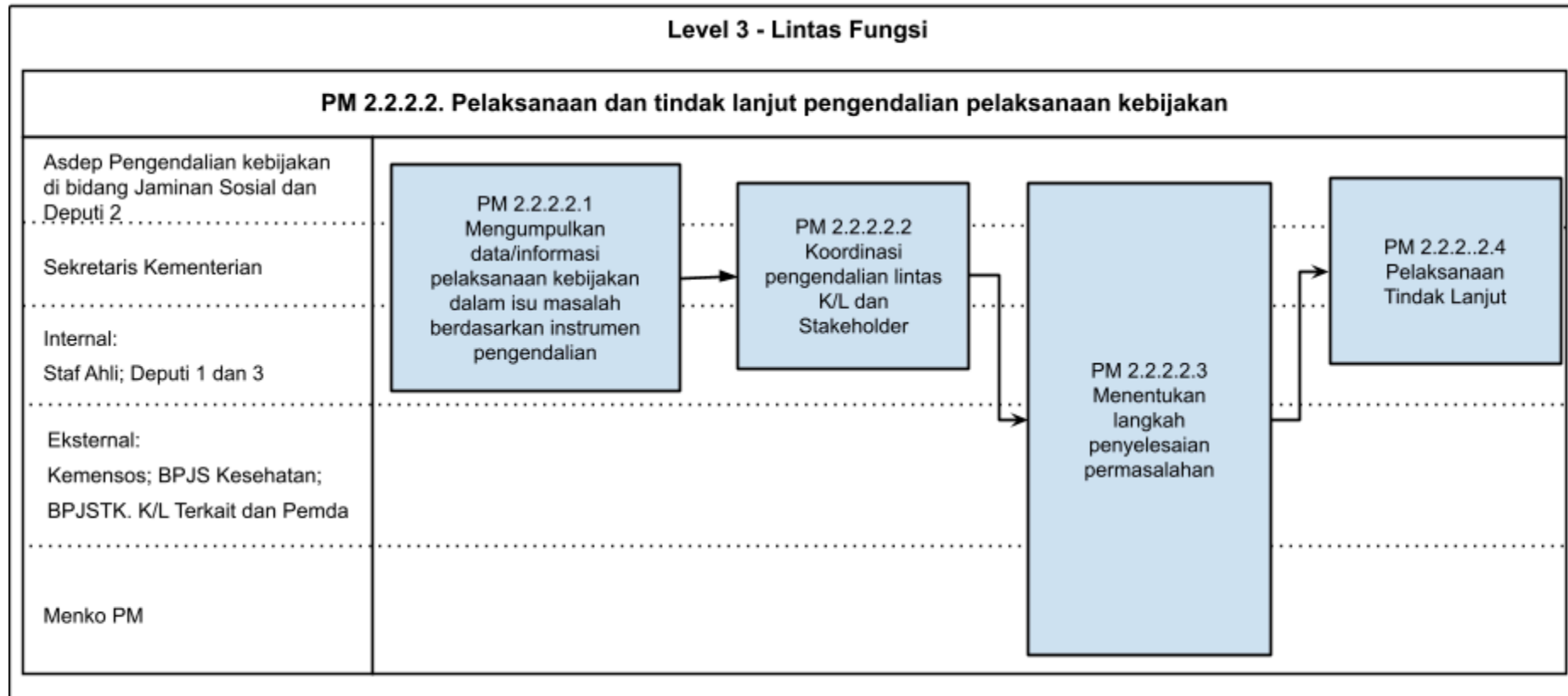


b) Level 3 . . .

b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.2. Pengendalian Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial

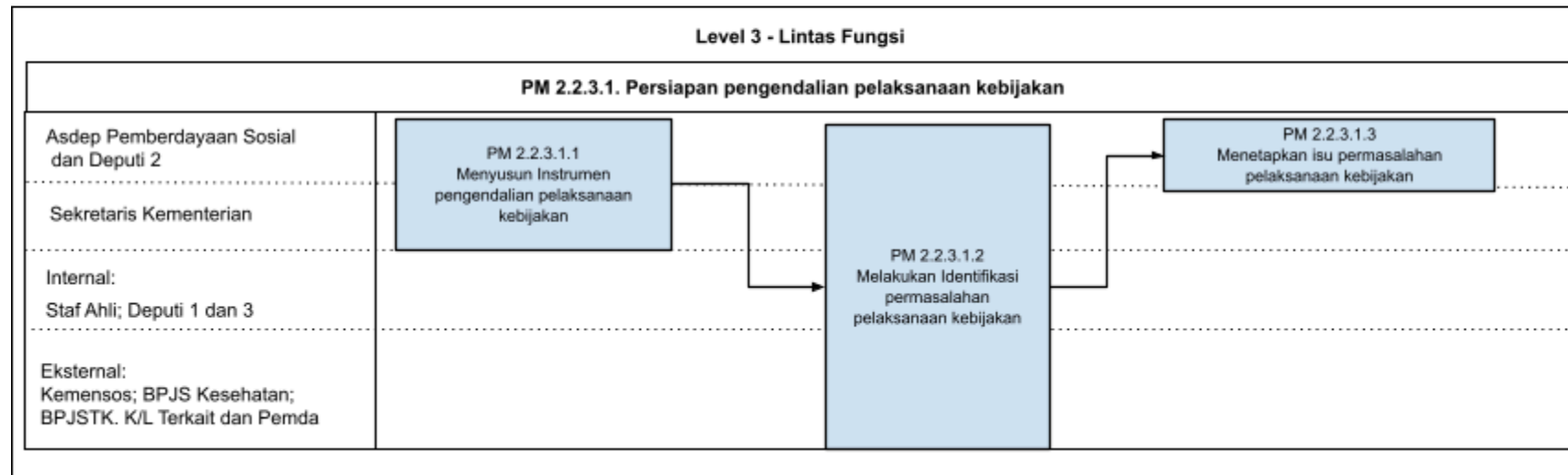
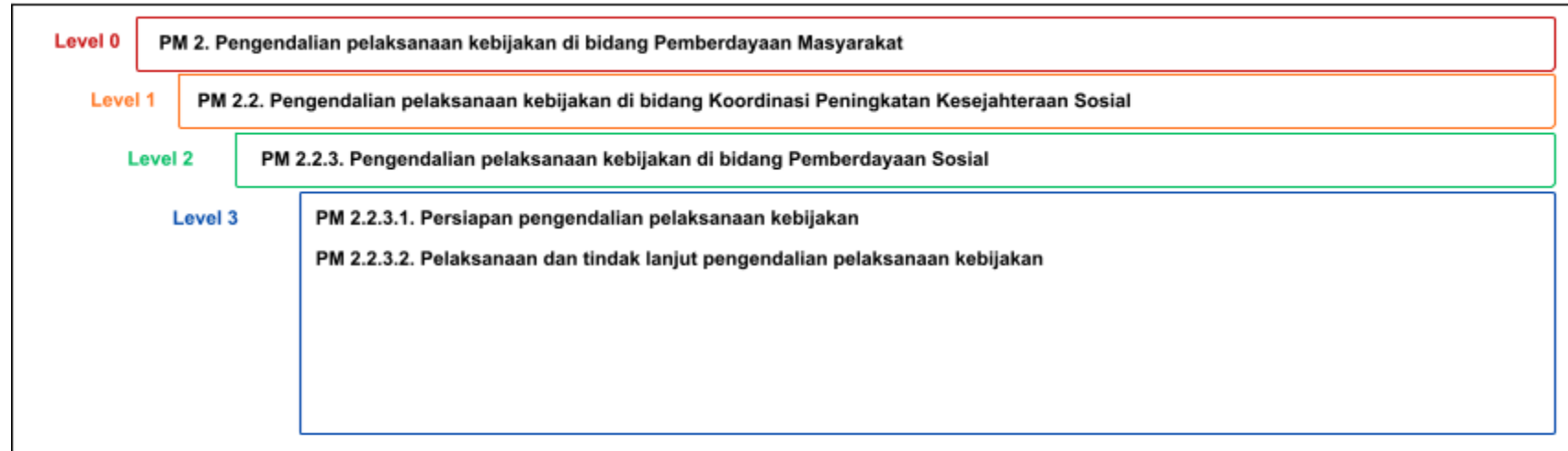


Level 3 . . .

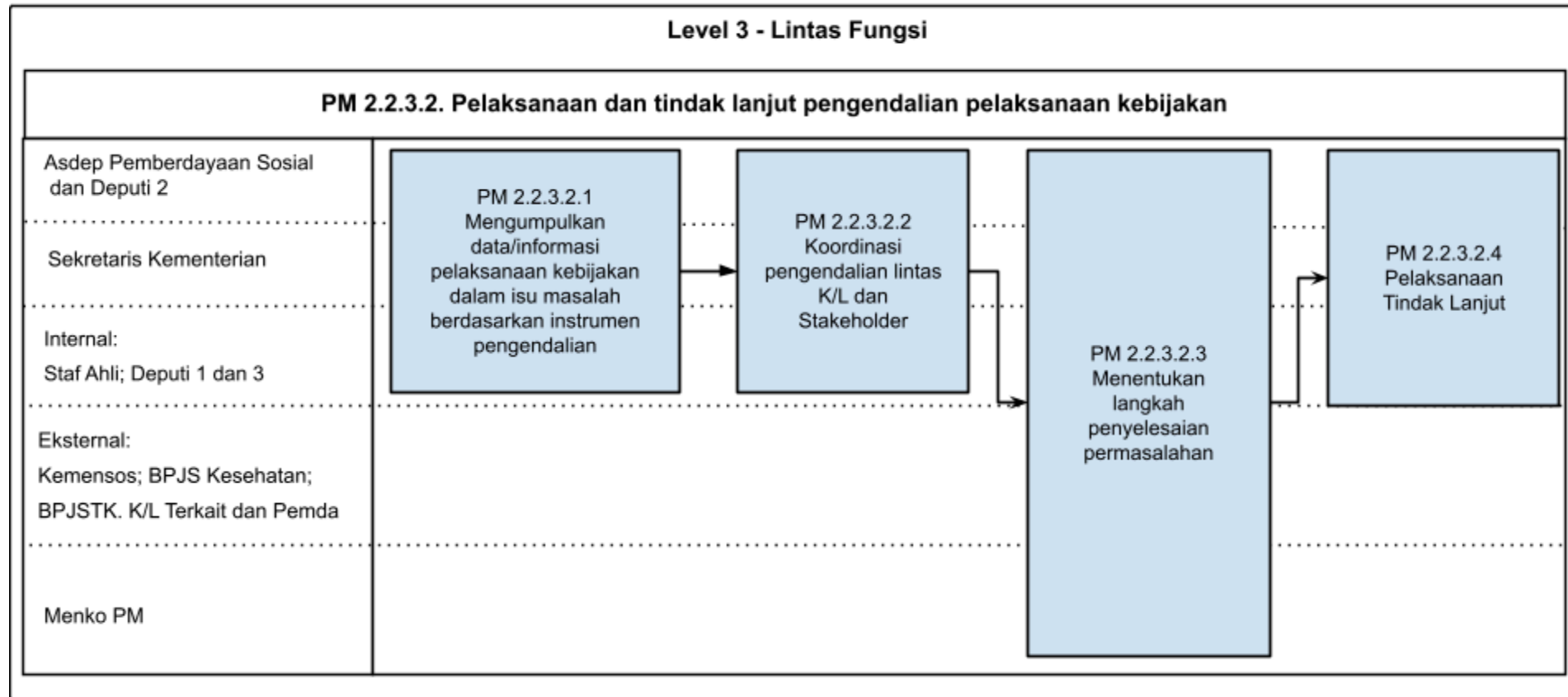


c) Level 3 . . .

c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.3. Pengendalian Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial

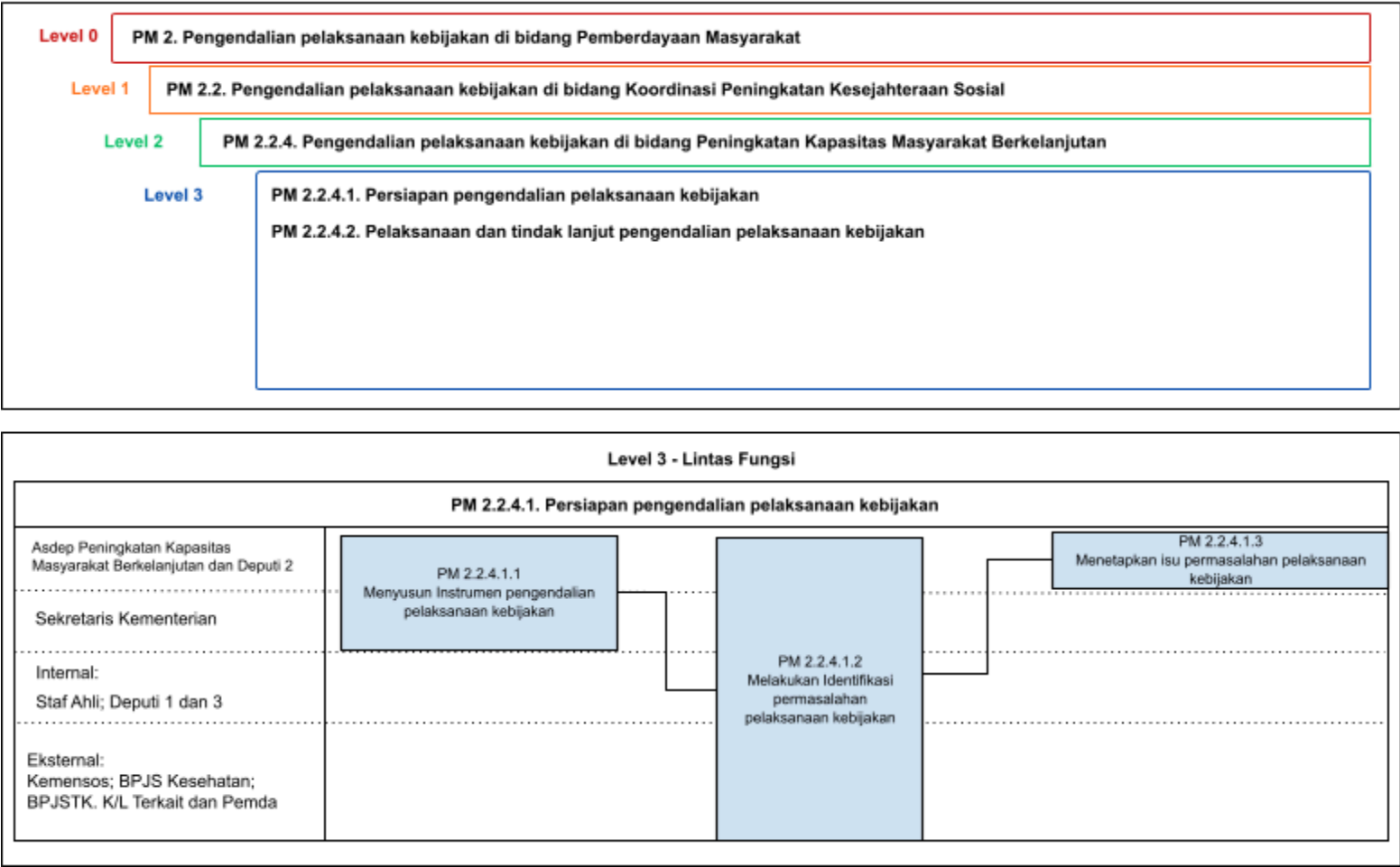


Level 3 . . .

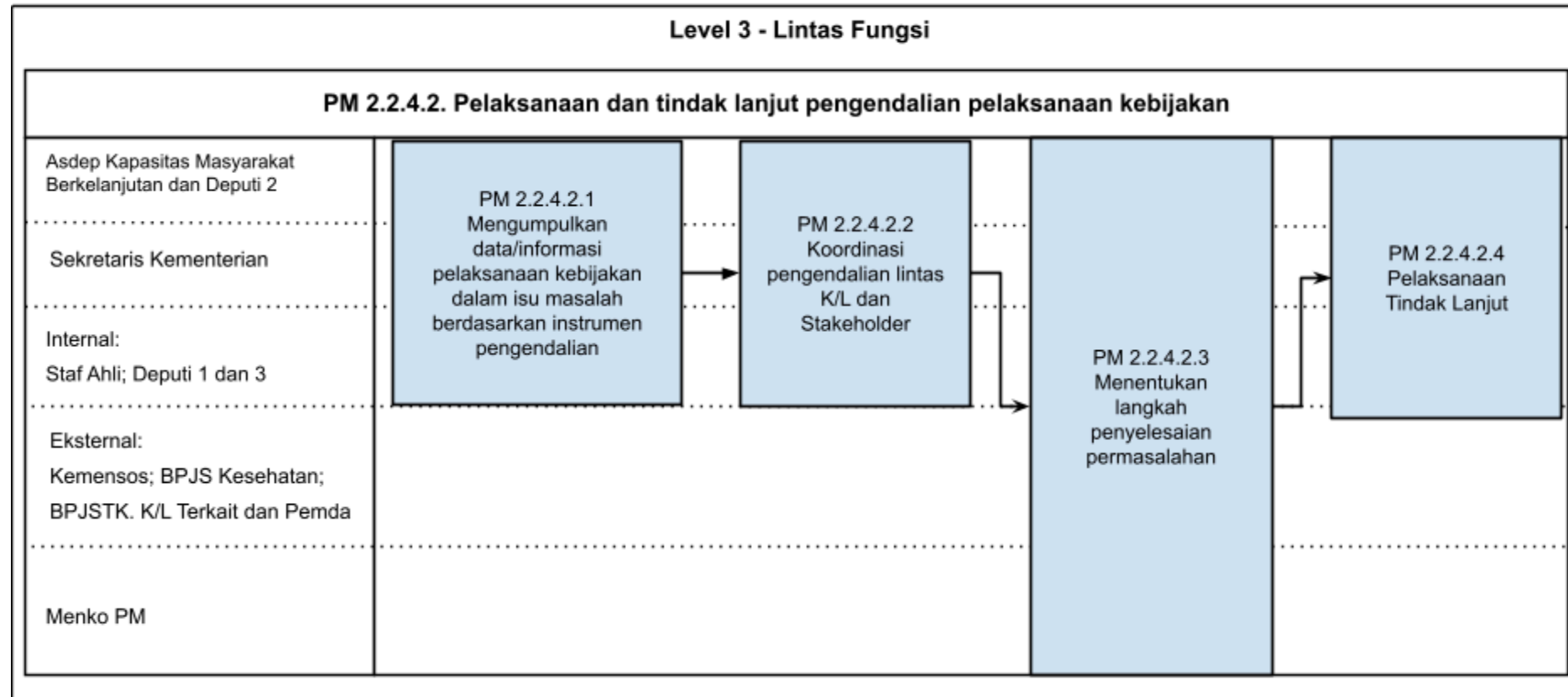


Level 3 . . .

d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.4. Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan

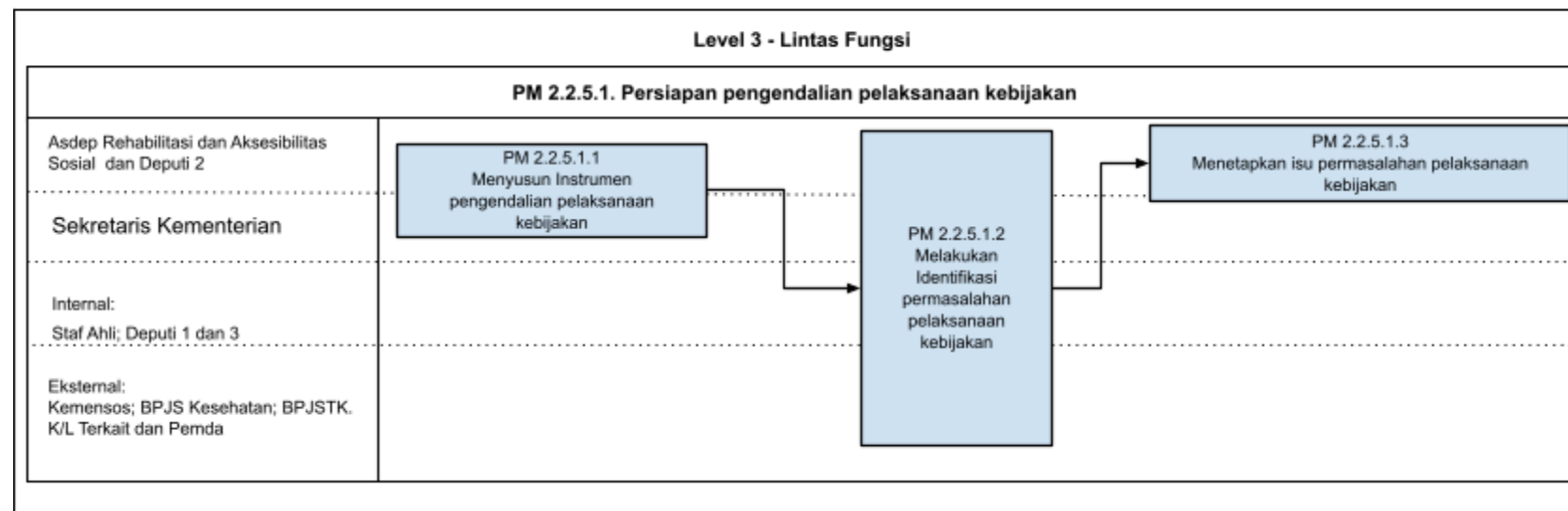
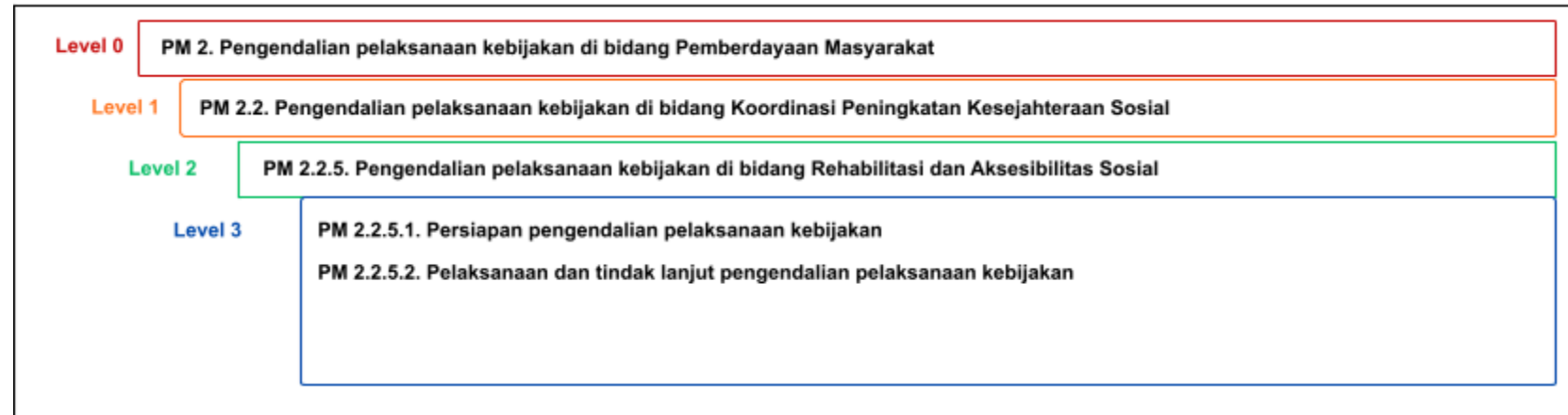


Level 3 . . .

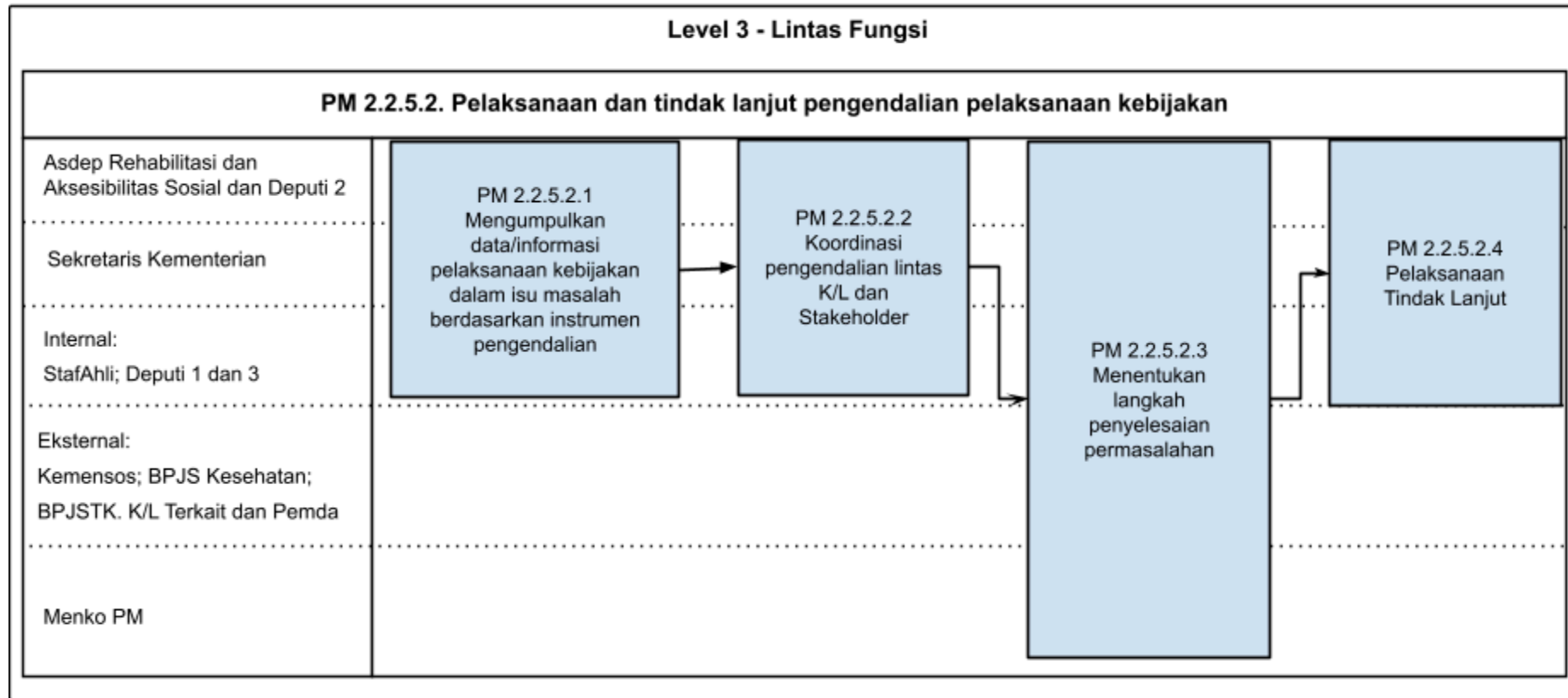


e) Level 3 . . .

e) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.5. Pengendalian Kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial



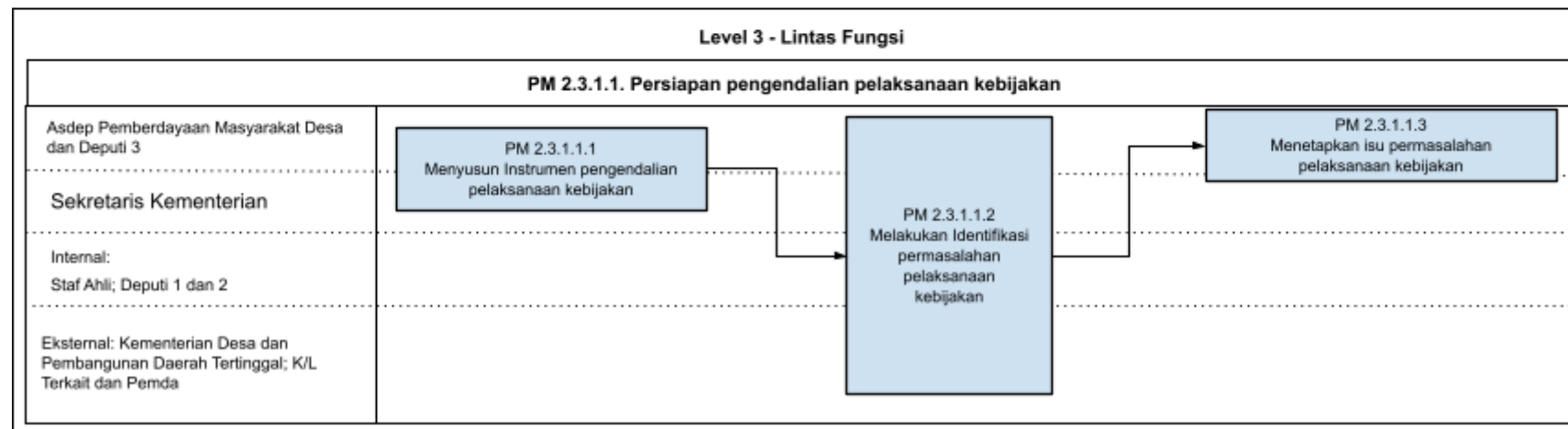
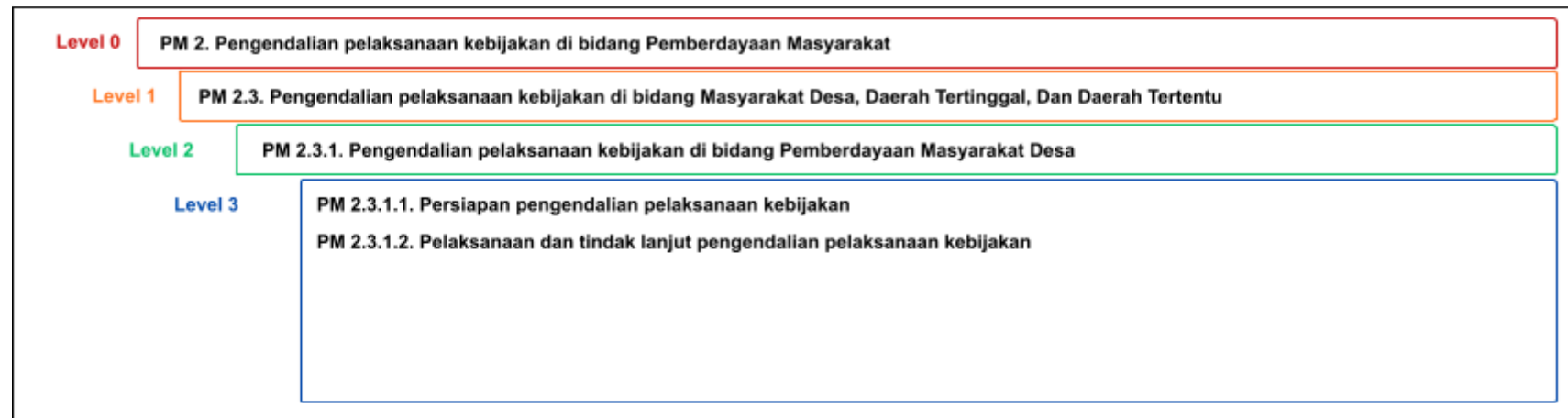
Level 3 . . .



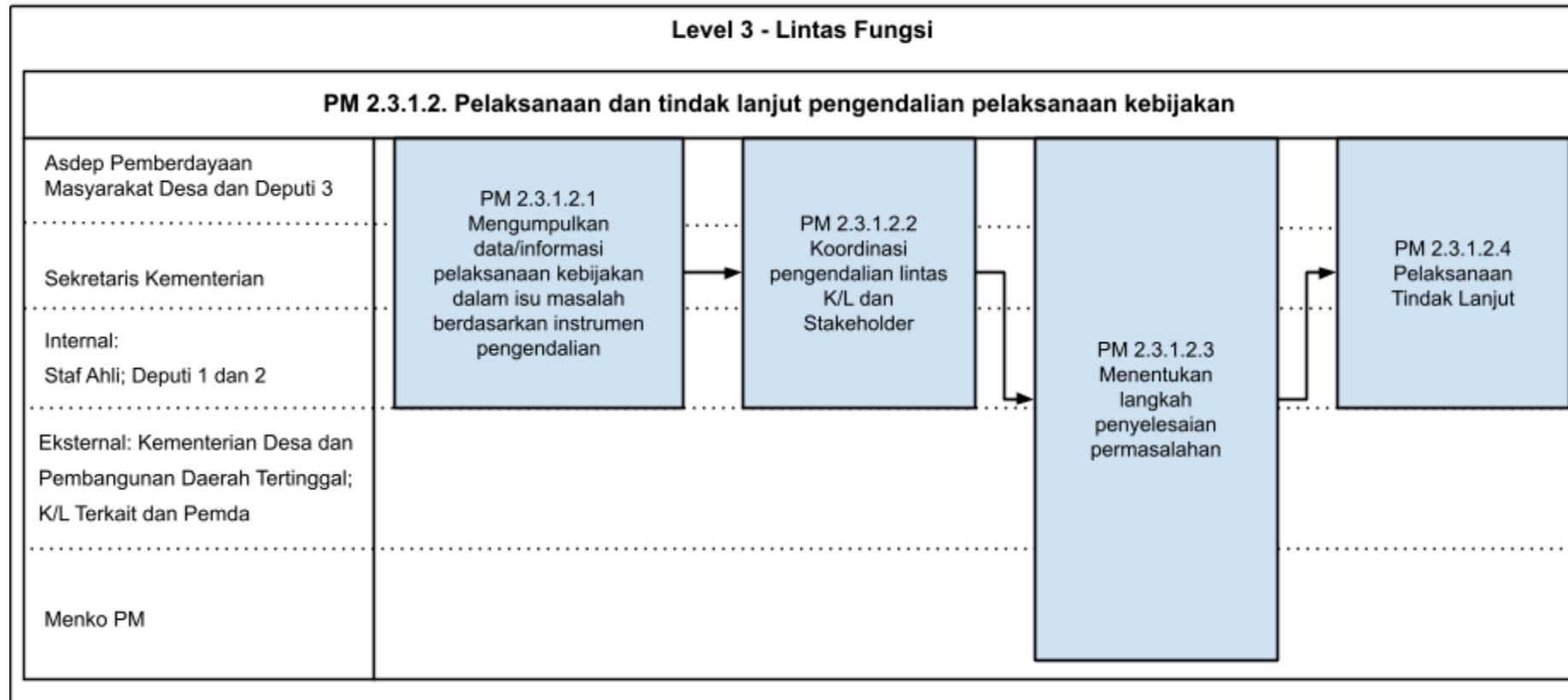
iii. Level 2 . . .

iii. **Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu**

a) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3.1. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

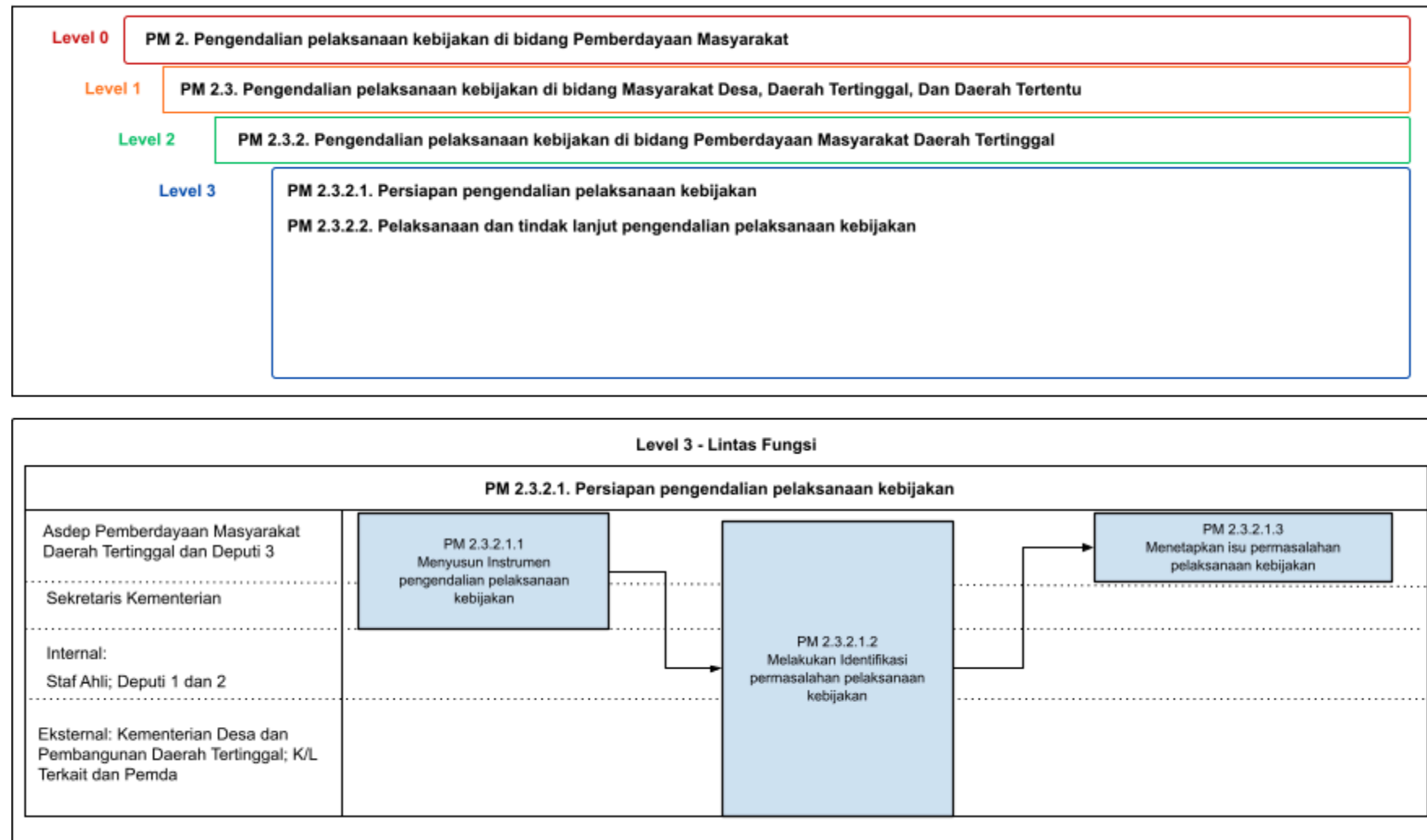


Level 3 . . .

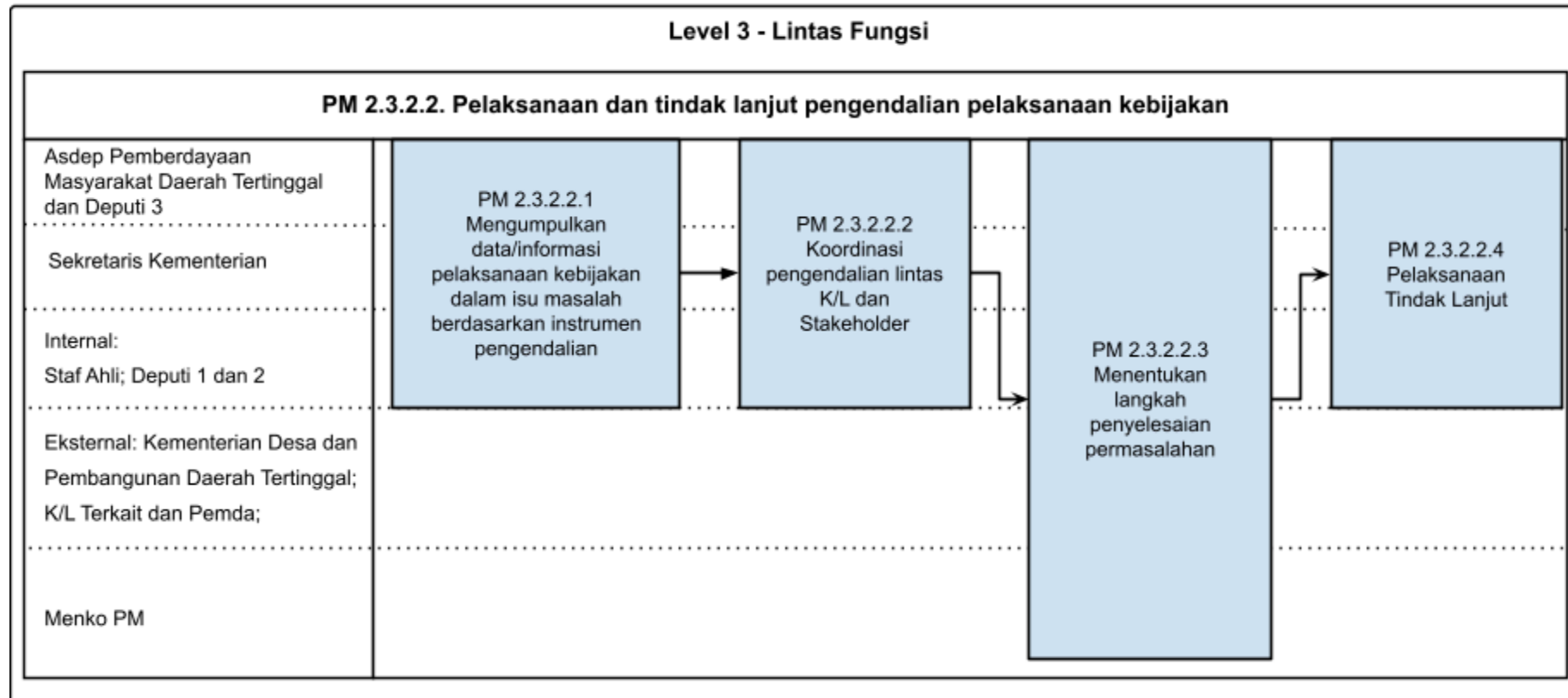


b) Level 3 . . .

b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3.2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal

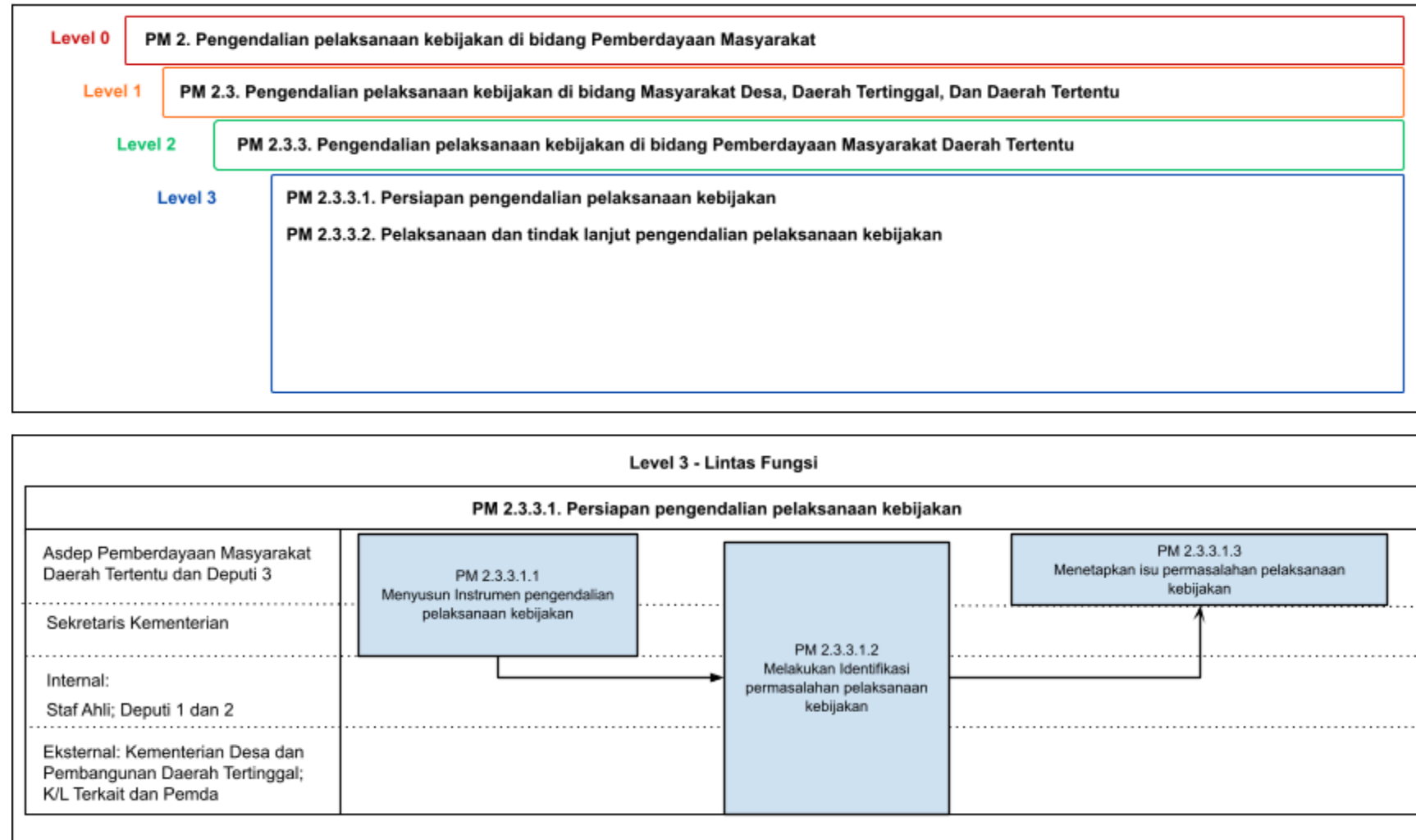


Level 3 . . .

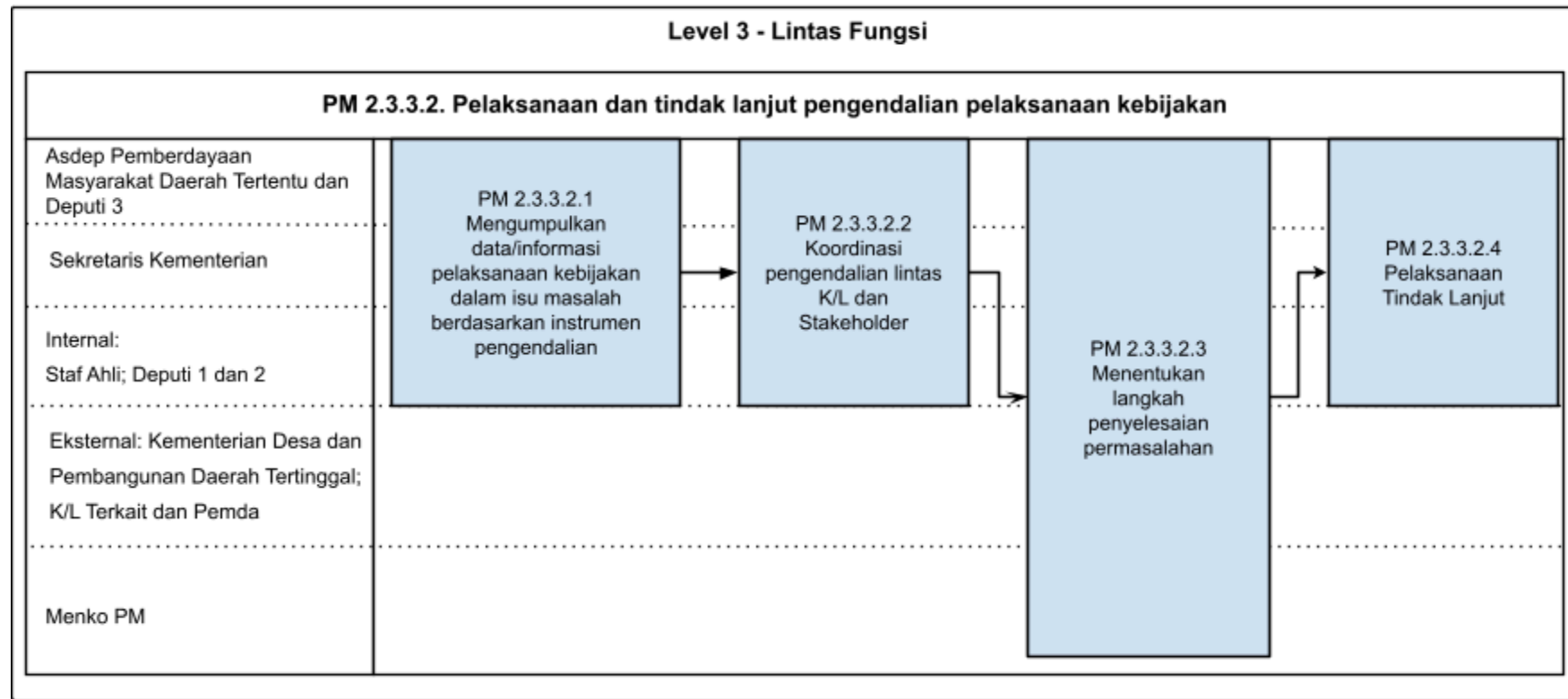


Level 3 . . .

c) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3.3. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu**

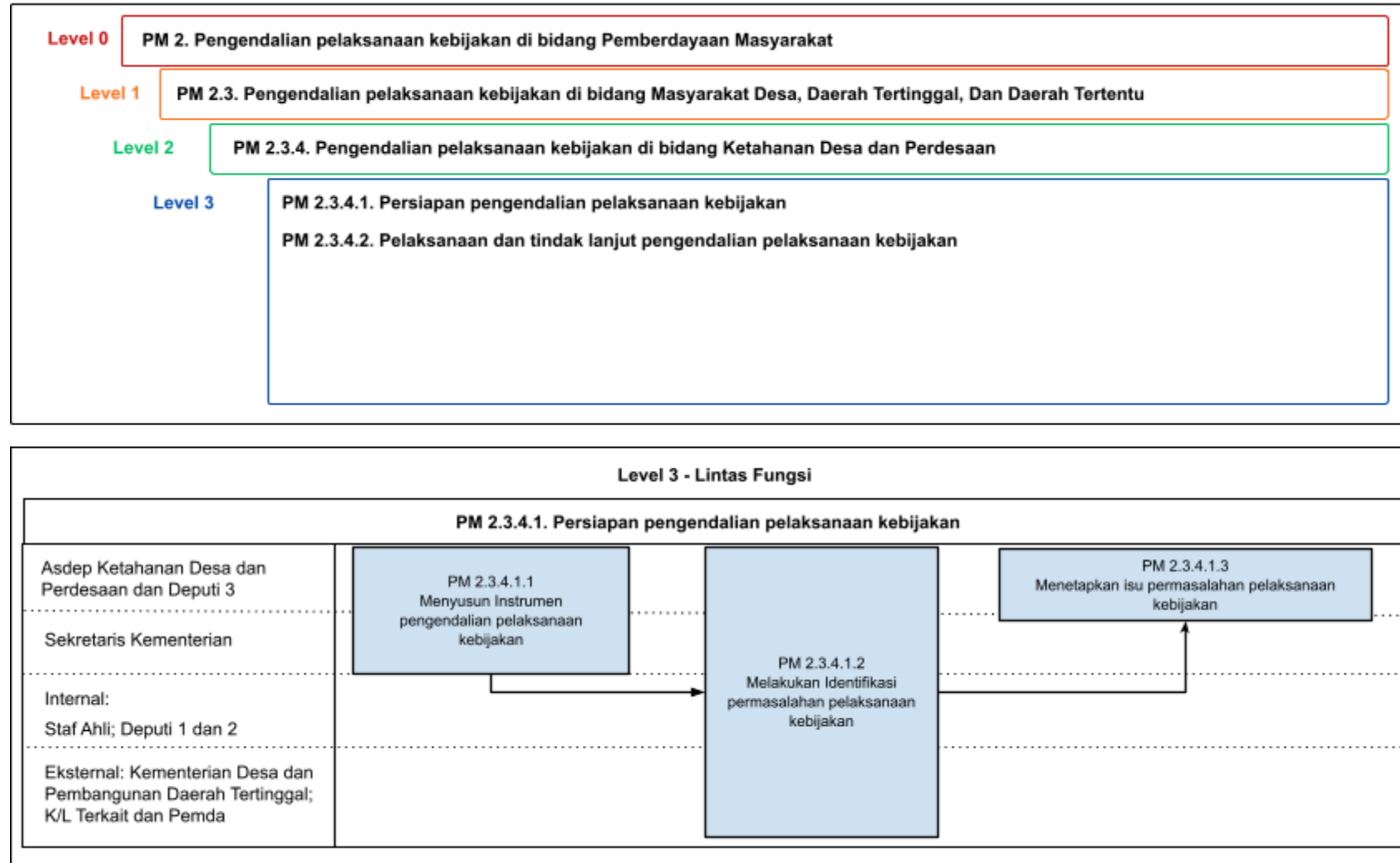


Level 3 . . .

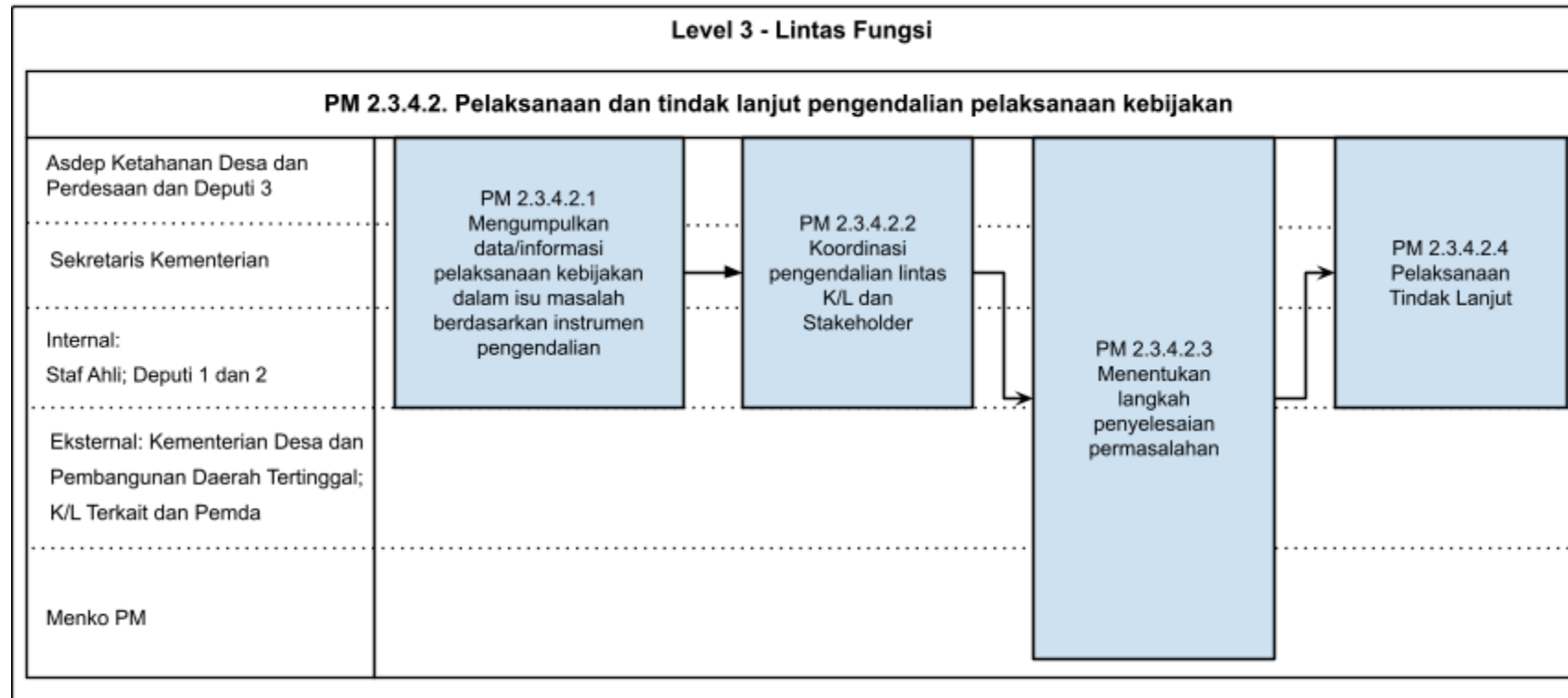


Level 3 . . .

d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3.4. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan



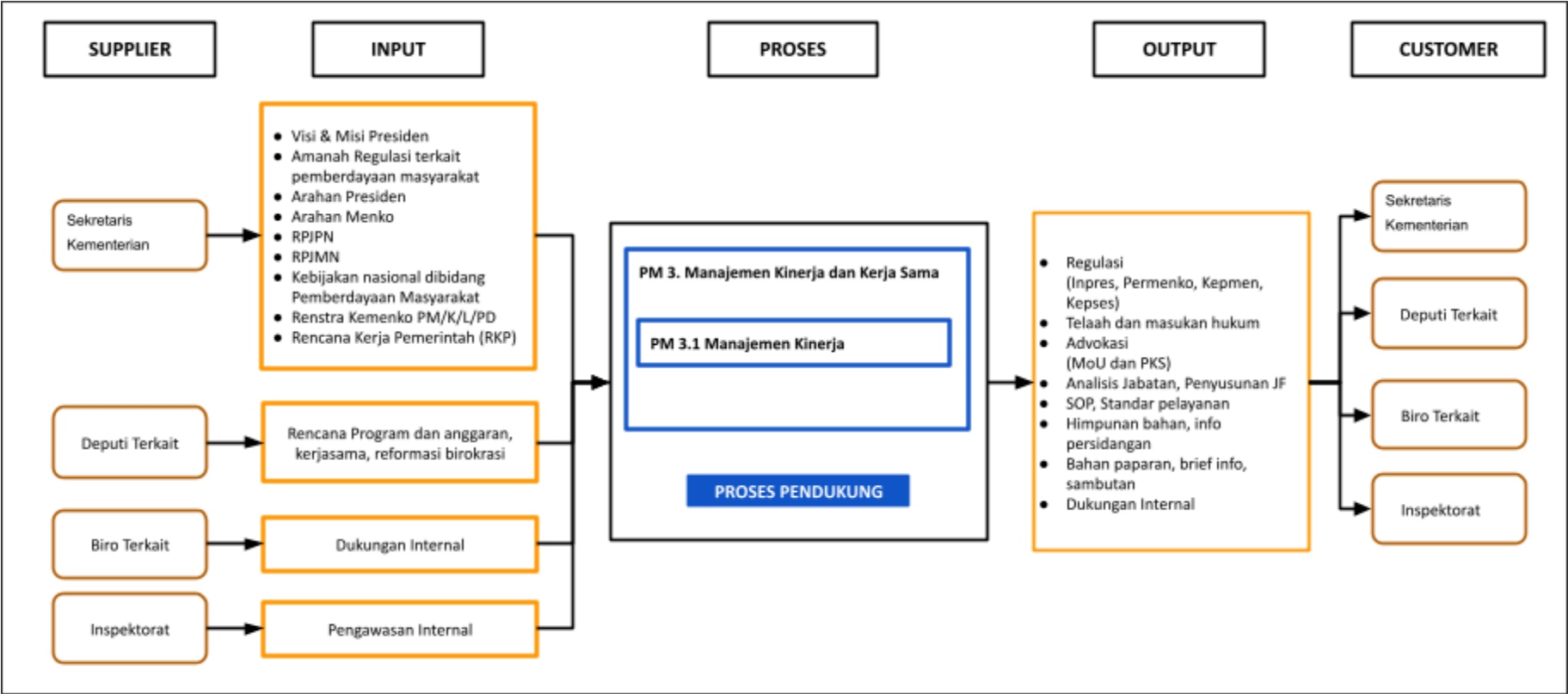
Level 3 . . .



C. Level 0 . . .

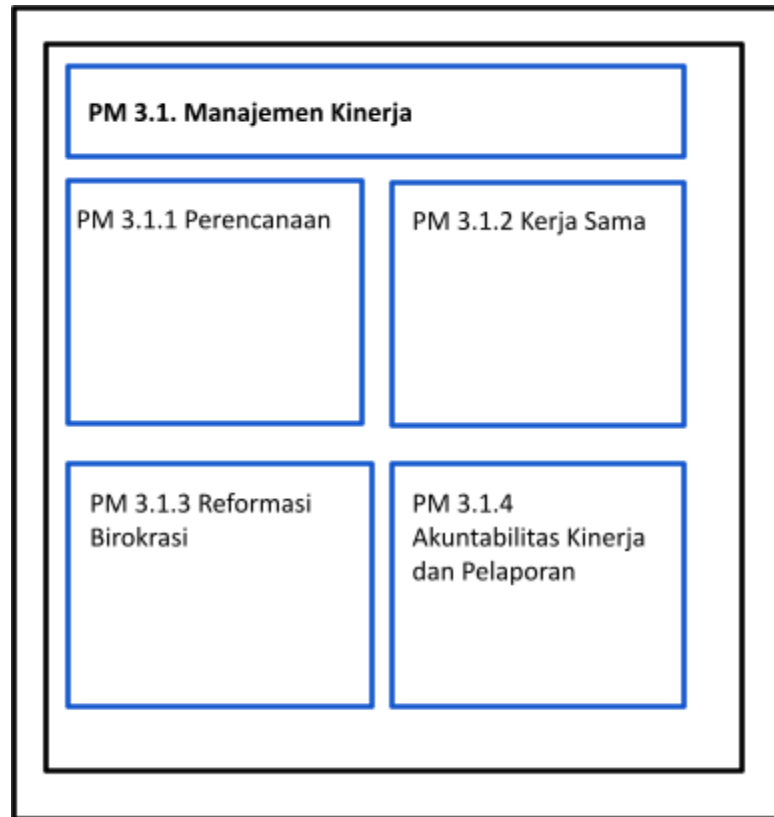
C. Level 0 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung

1. bLevel 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3. Manajemen Kinerja dan Kerjasama



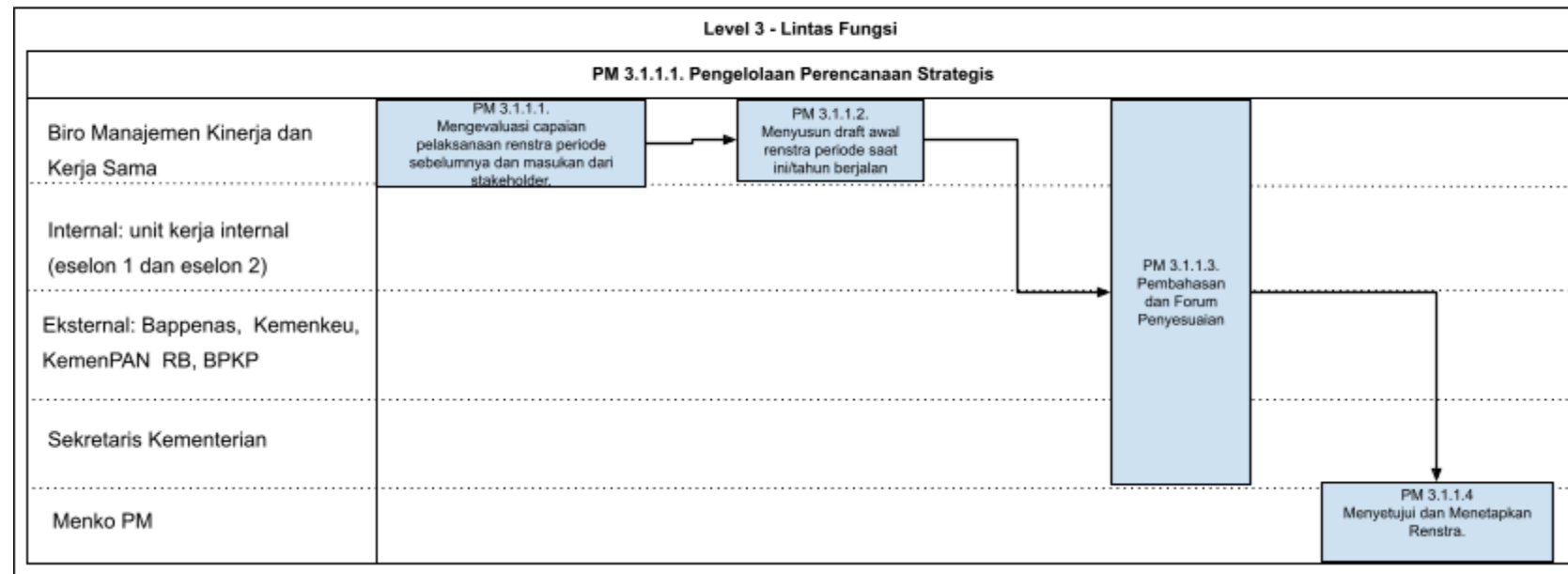
i. Level 2 . . .

i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1. Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

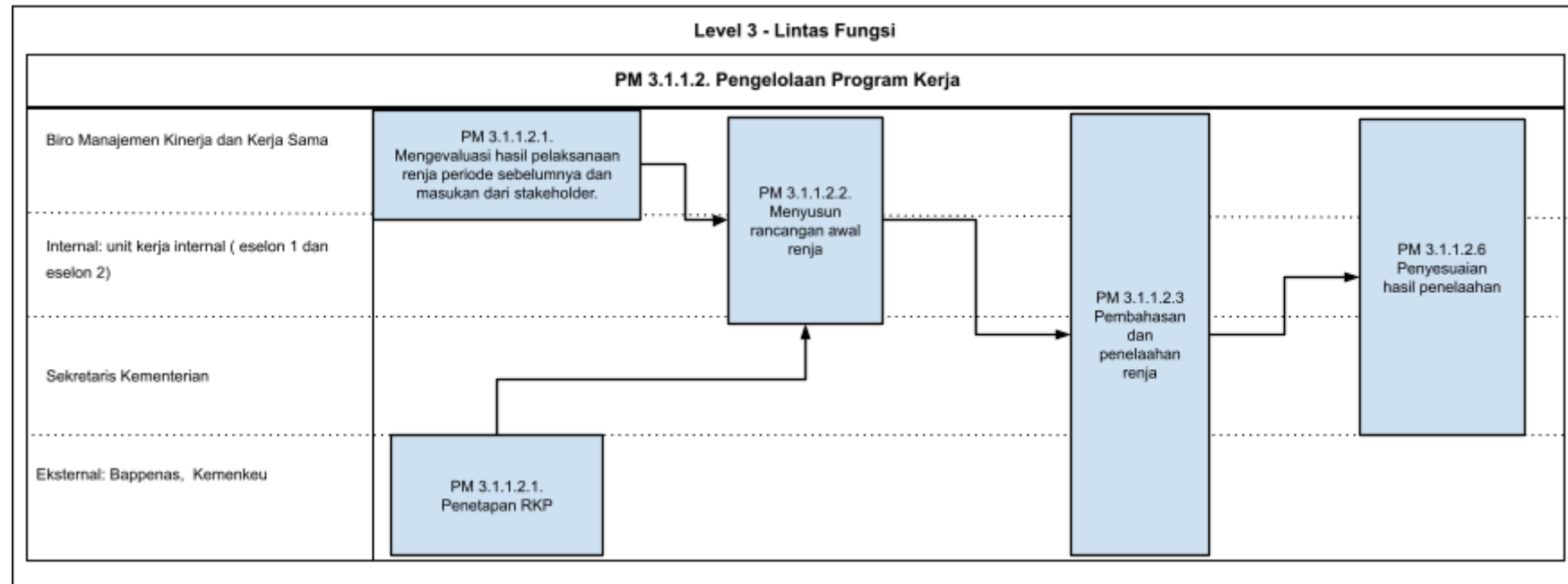


a) Level 3 . . .

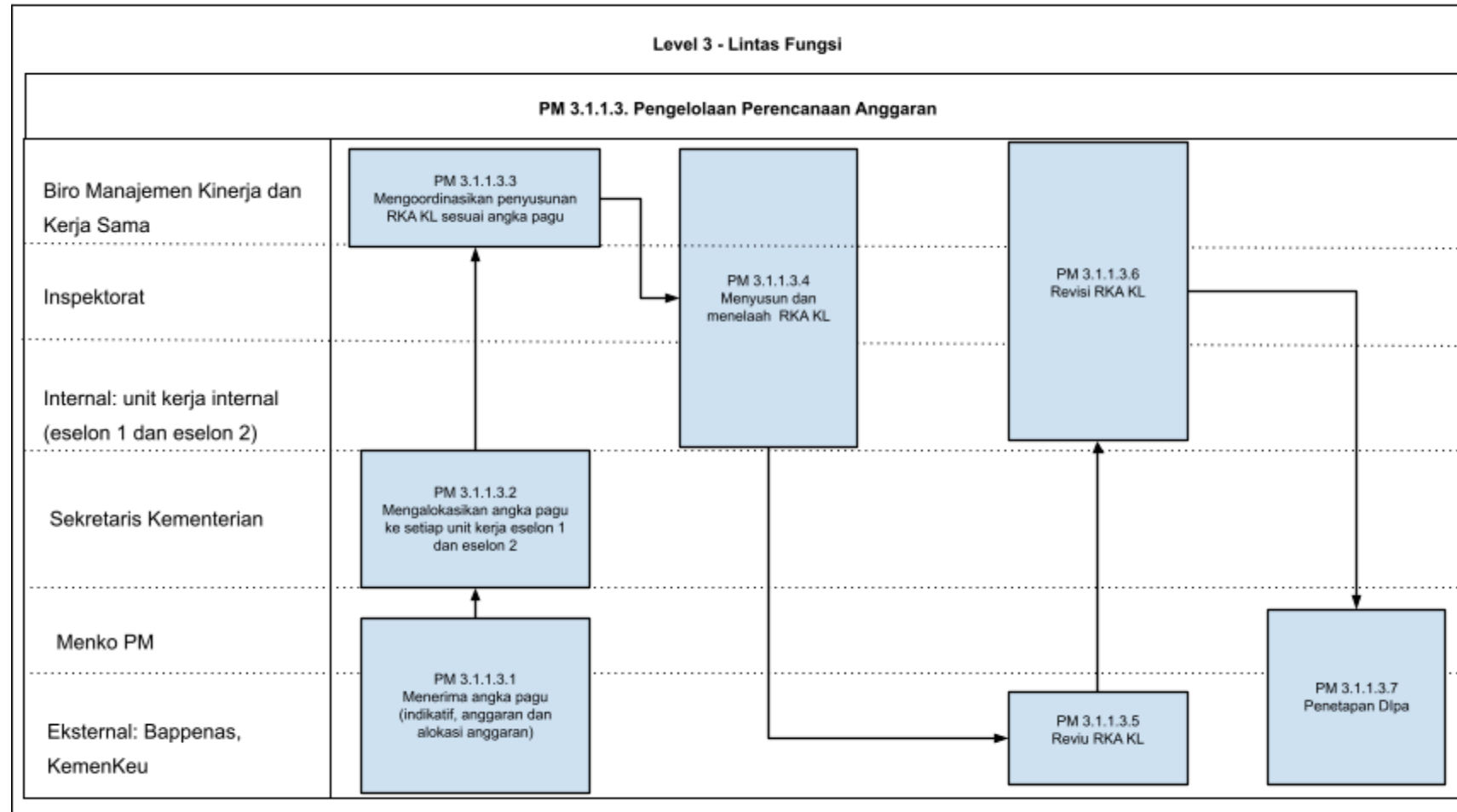
a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1.1. Perencanaan



Level 3 . . .

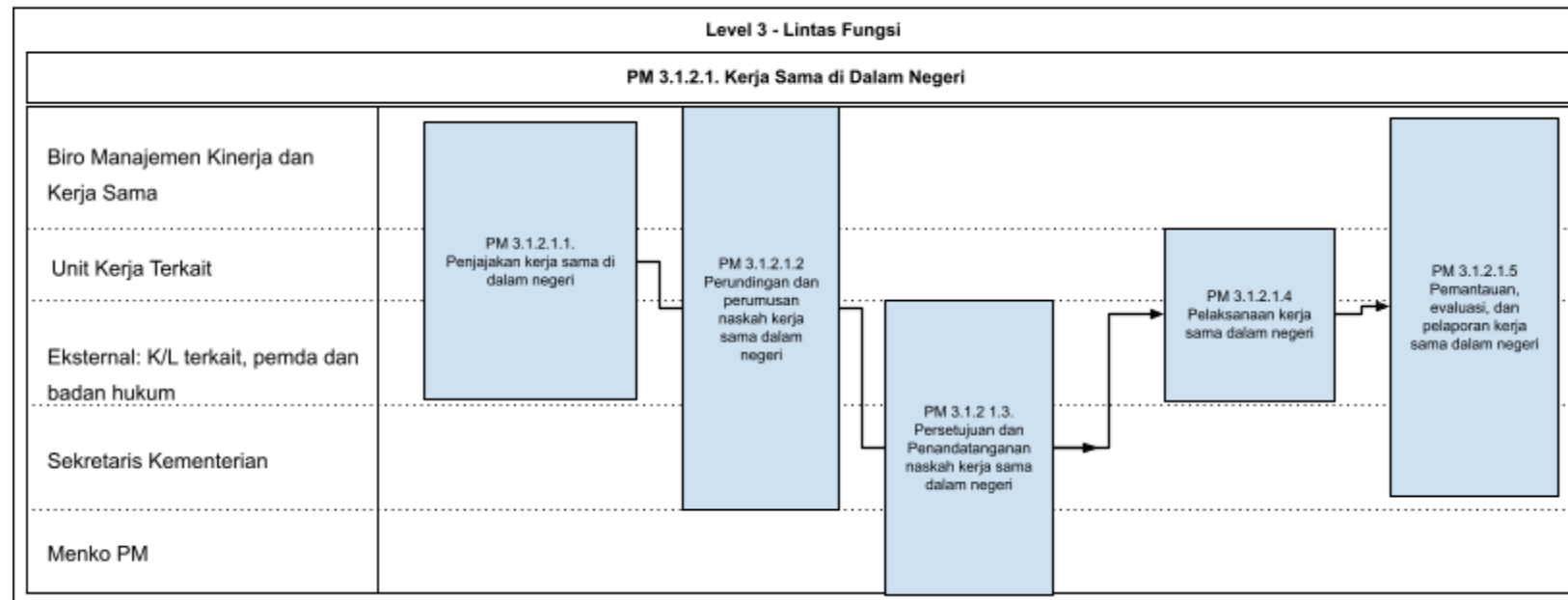


Level 3 . . .

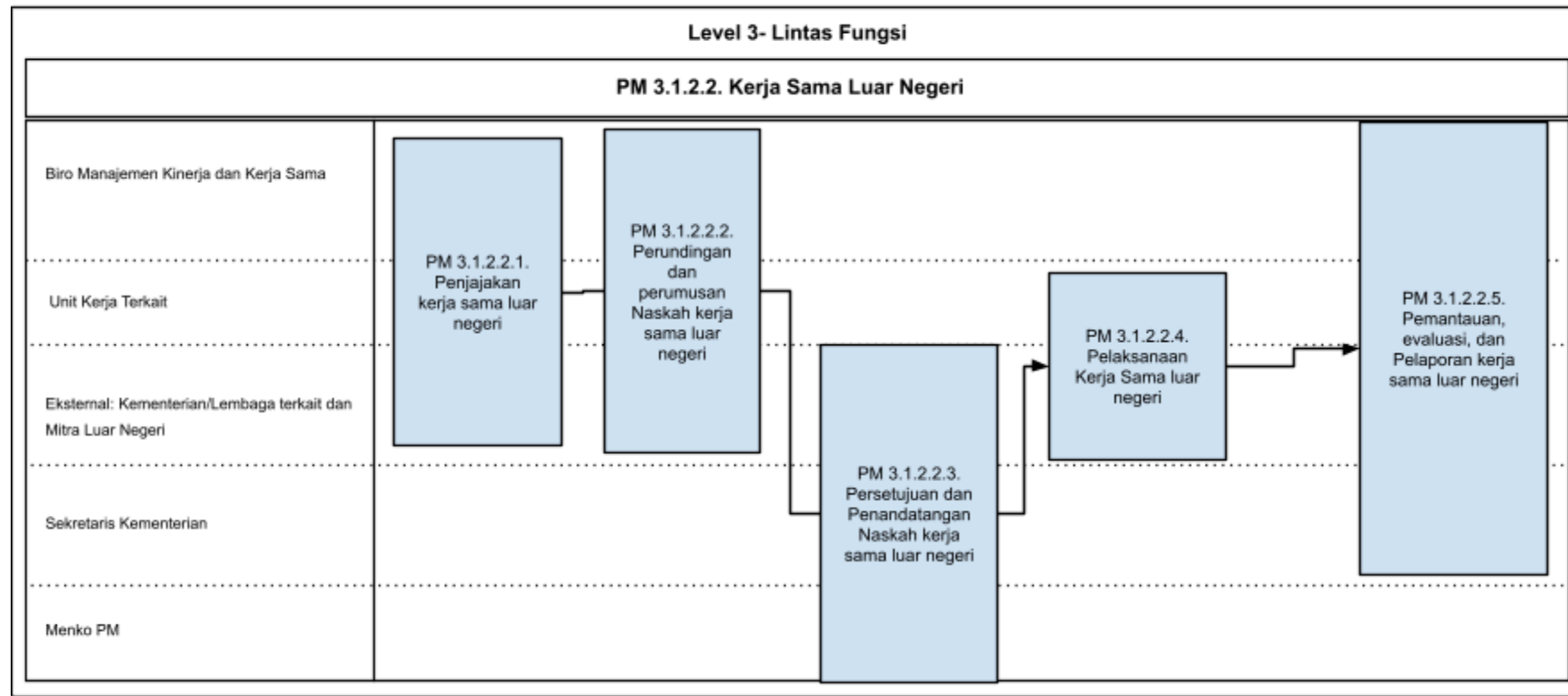


b) Level 3 . . .

b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1.2. Kerja Sama

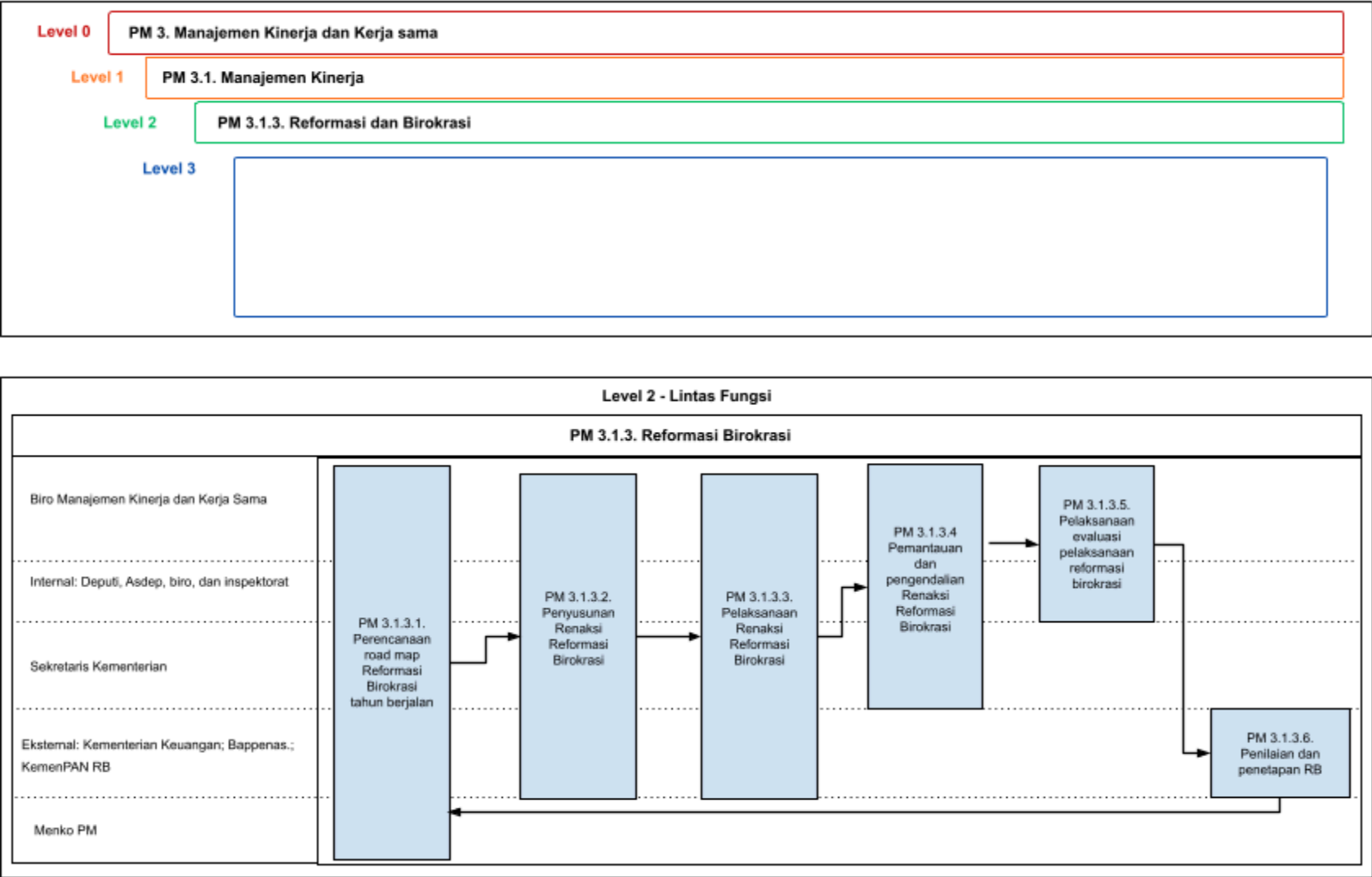


Level 3 . . .



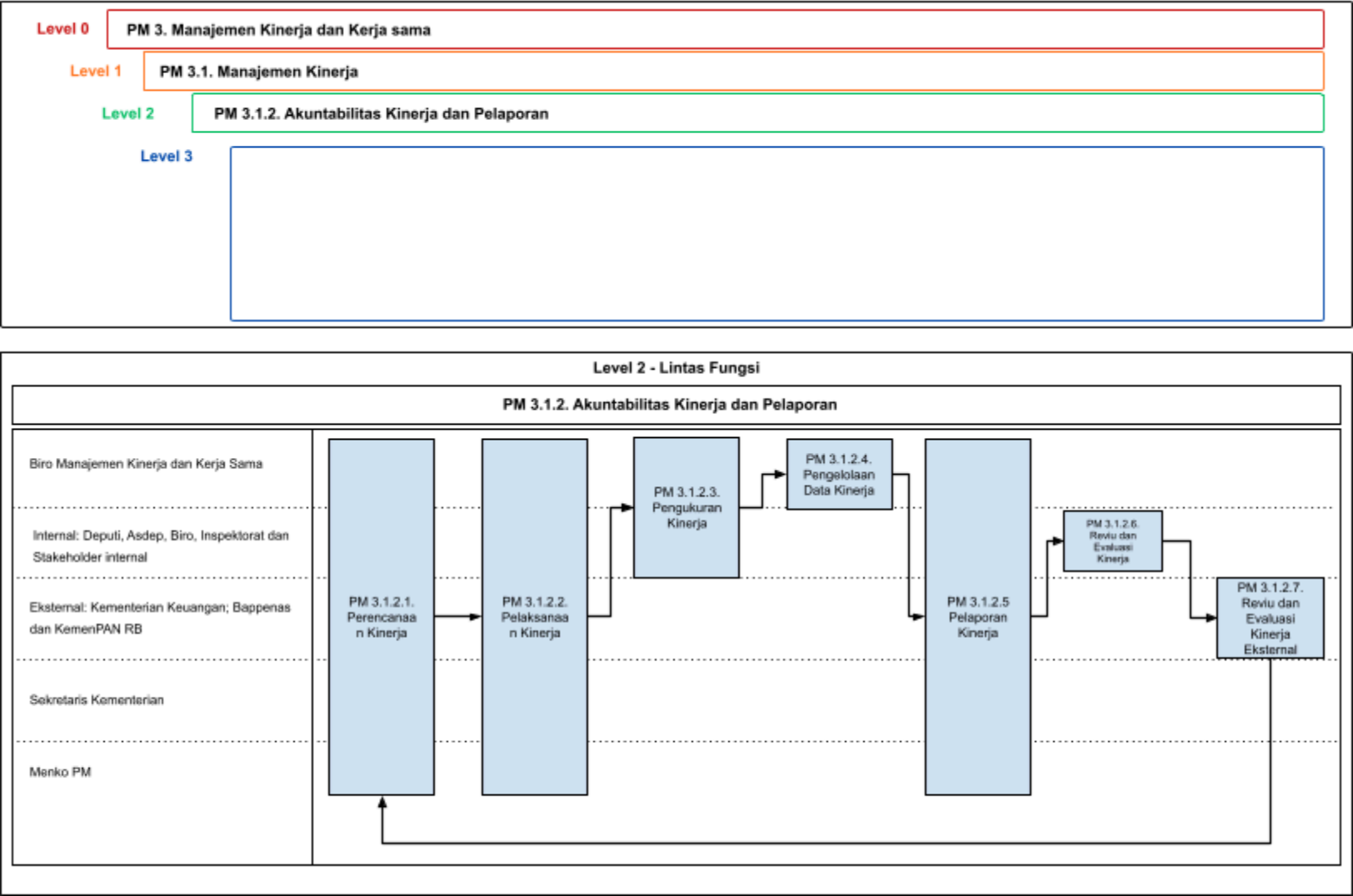
c) Level 3 . . .

c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1.3. Reformasi dan Birokrasi



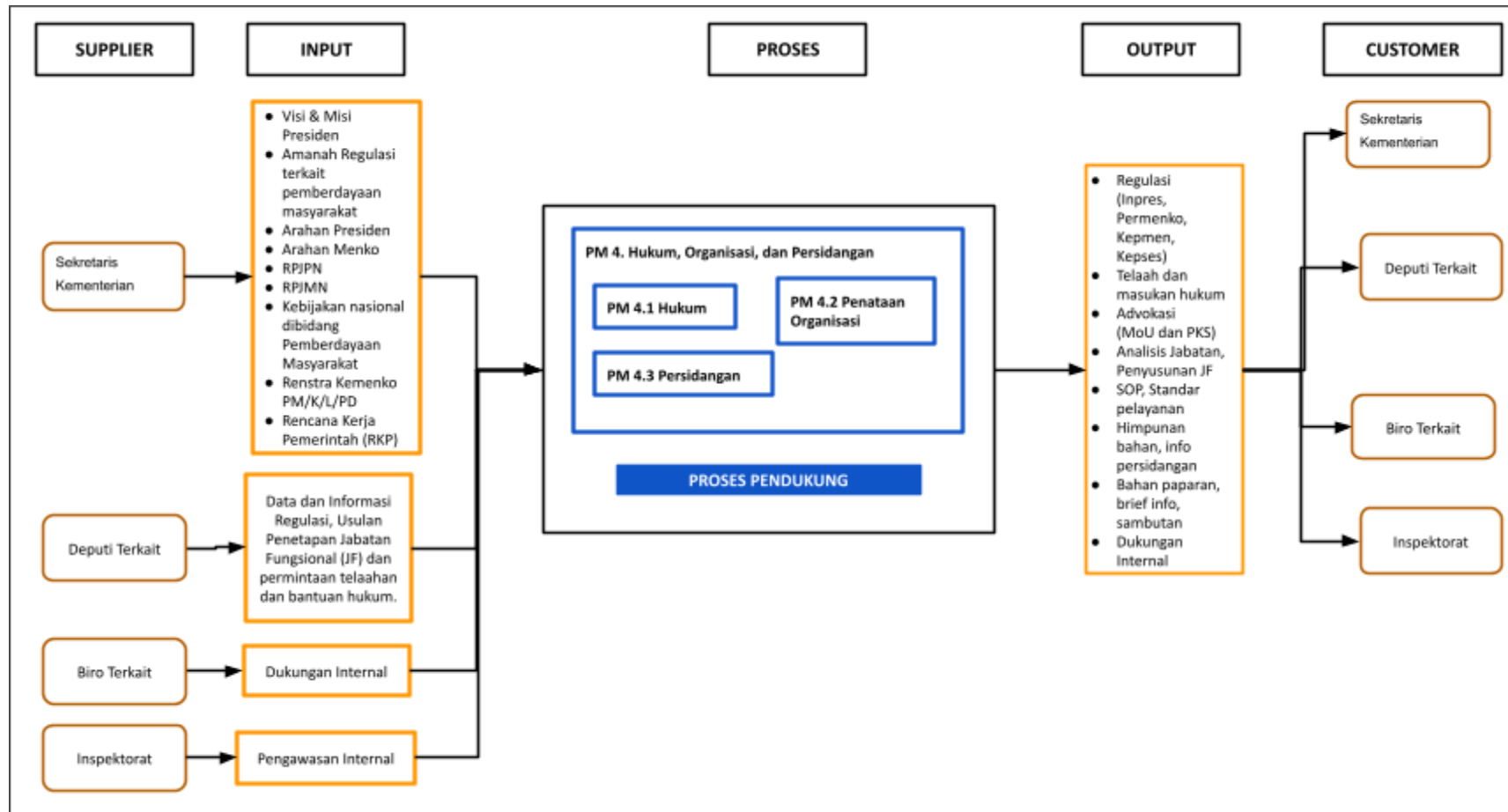
d) Level 3 . . .

d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1.4. Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan



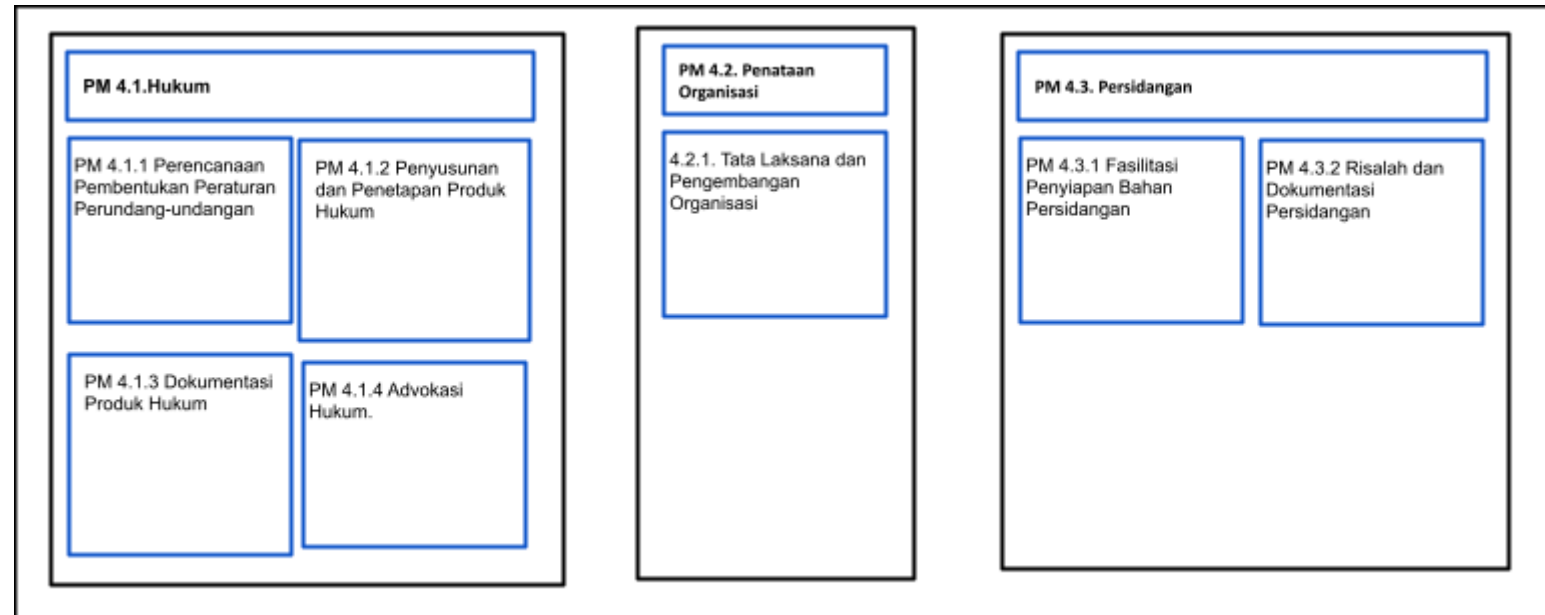
2. Level 1 . . .

2. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4. Hukum, Organisasi dan Persidangan



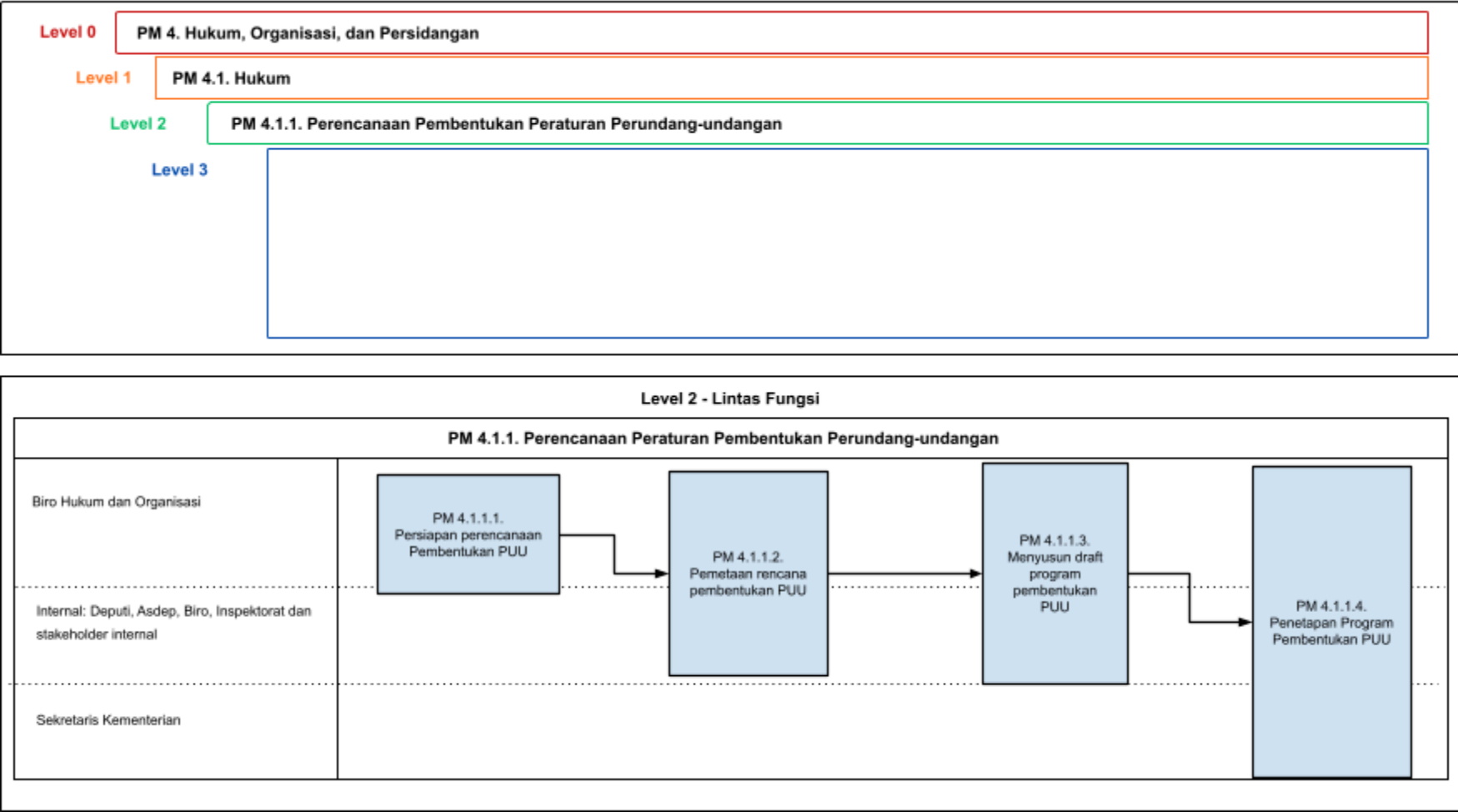
i. Level 2 . . .

i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1. Hukum, Organisasi dan Persidangan



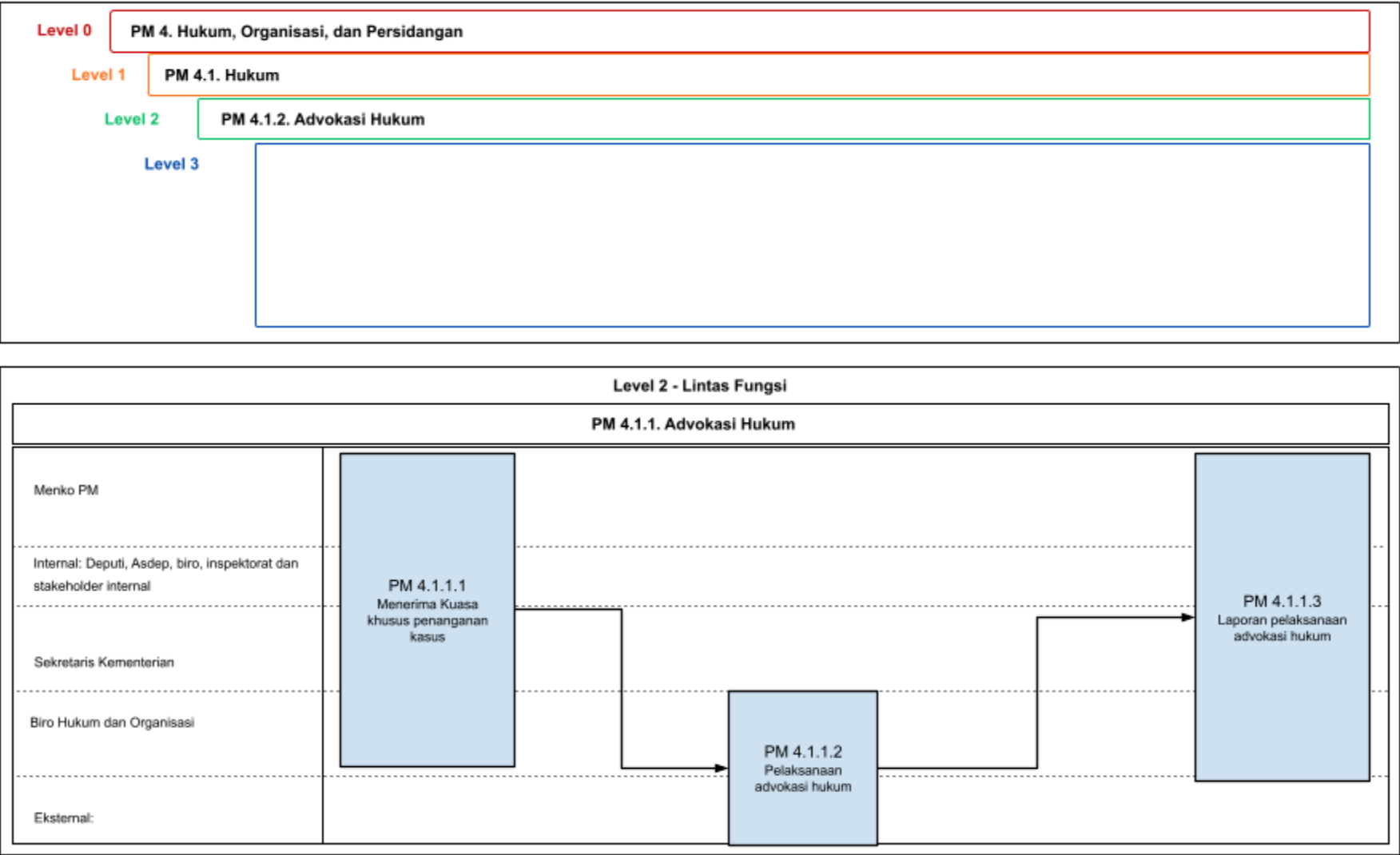
a) Level 3 . . .

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1.1. Perencanaan Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan



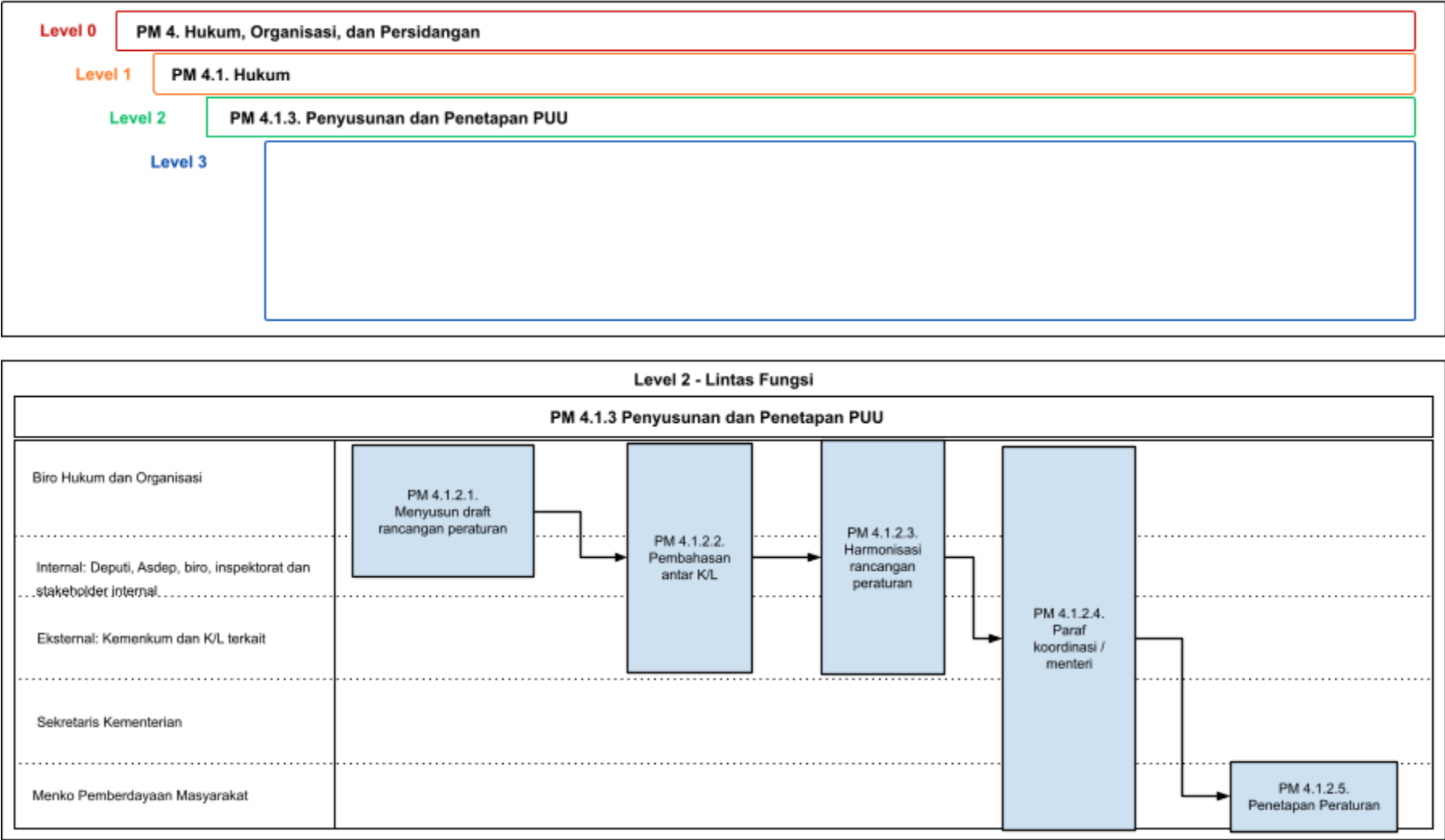
b) Level 3 . . .

b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1.2. Advokasi Hukum



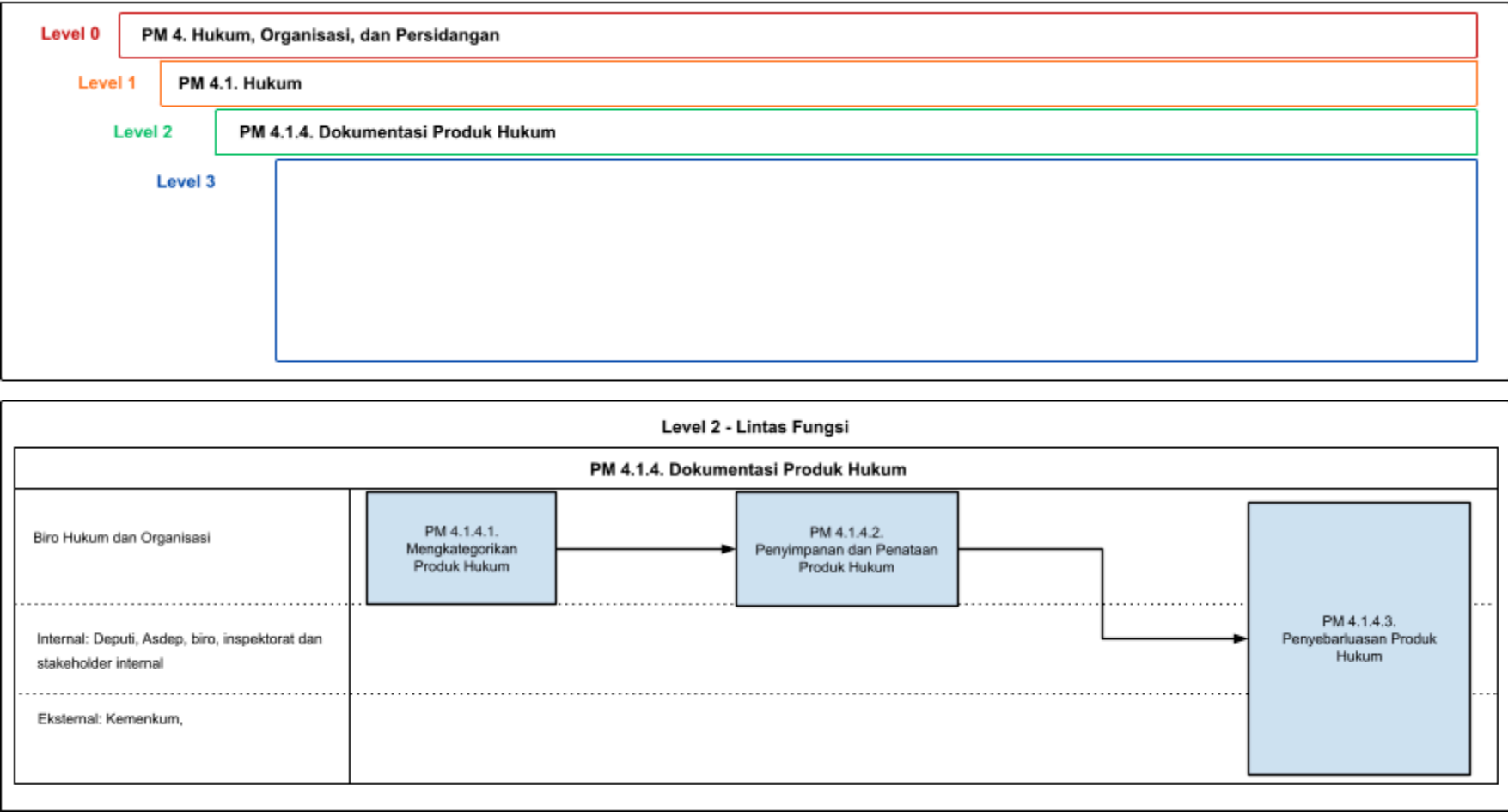
c) Level 3 . . .

c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1.3. Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum



d) Level 3 . . .

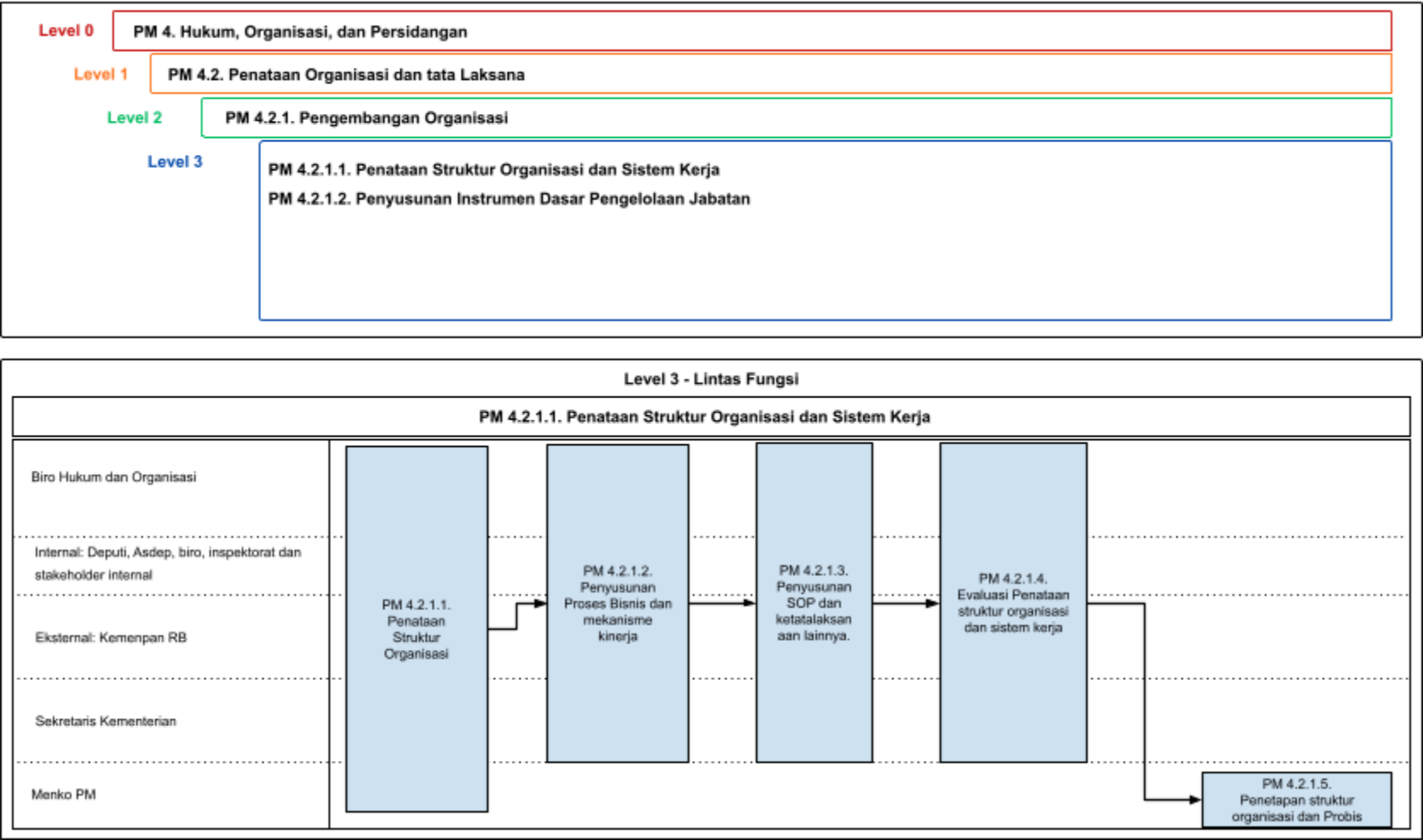
d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1.4. Dokumentasi Produk Hukum



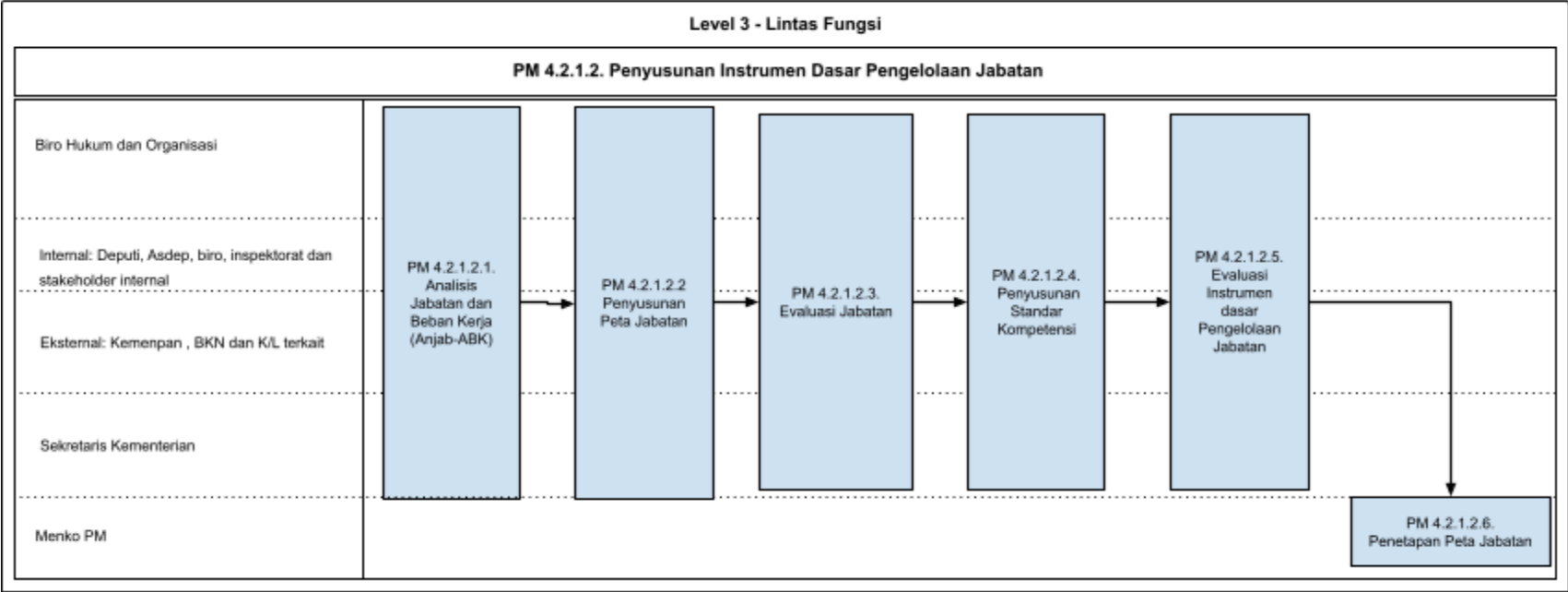
ii. Level 2 . . .

ii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.2. Organisasi

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.2.1. Tata Laksana dan Pengembangan Organisasi



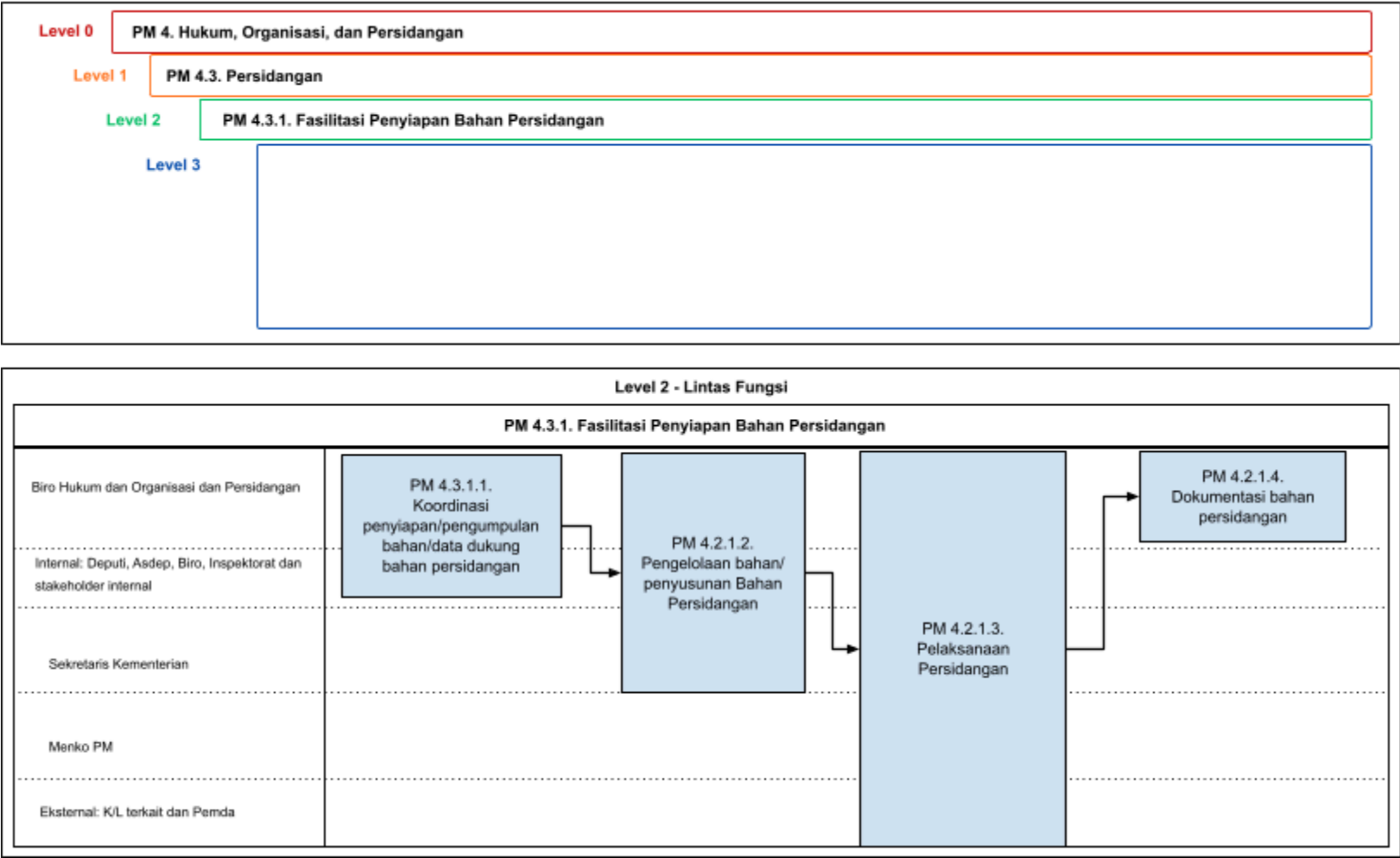
Level 3 . . .



iii. Level 2 . . .

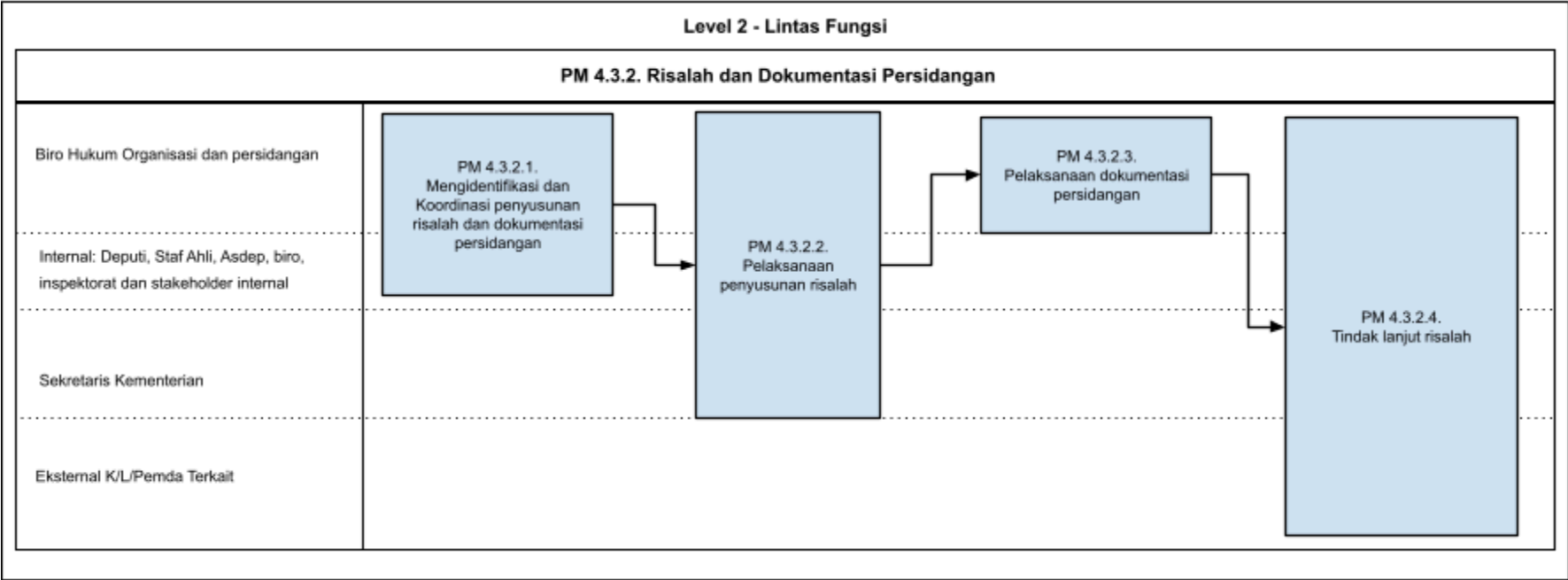
iii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.3. Persidangan

a) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.3.1. Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan



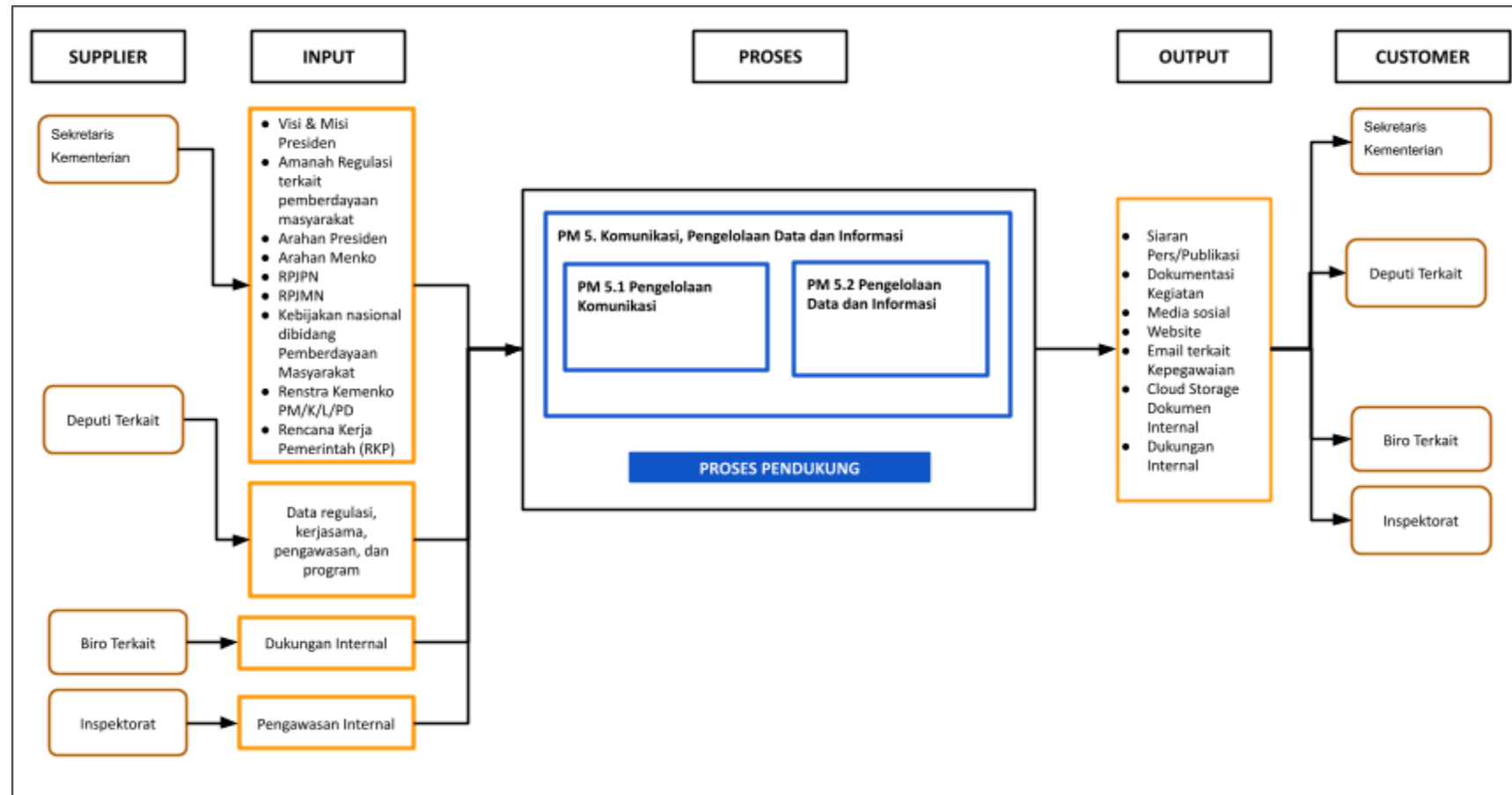
b) Level 2 . . .

b) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.3.2. Risalah dan Dokumentasi Persidangan



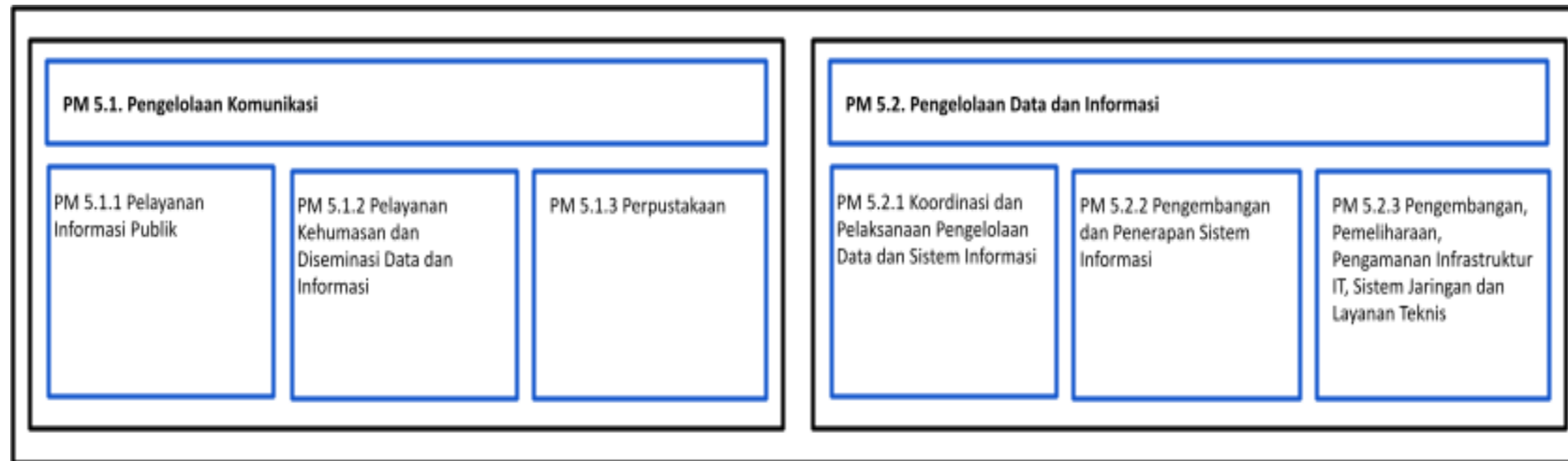
3. Level 1 . . .

3. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5. Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi



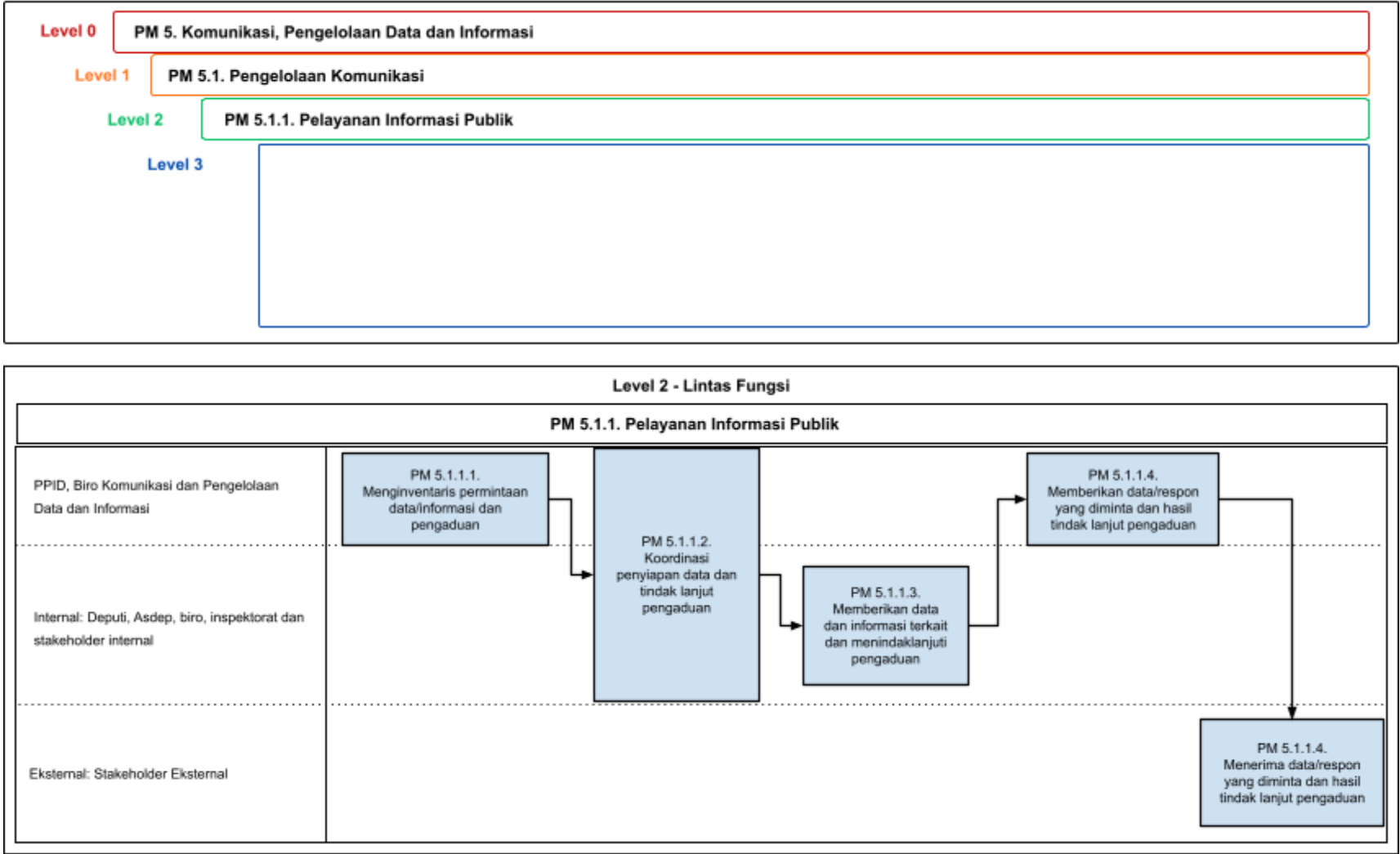
i. Level 2 . . .

i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.1. Komunikasi, Pengelolaan Data dan Informasi



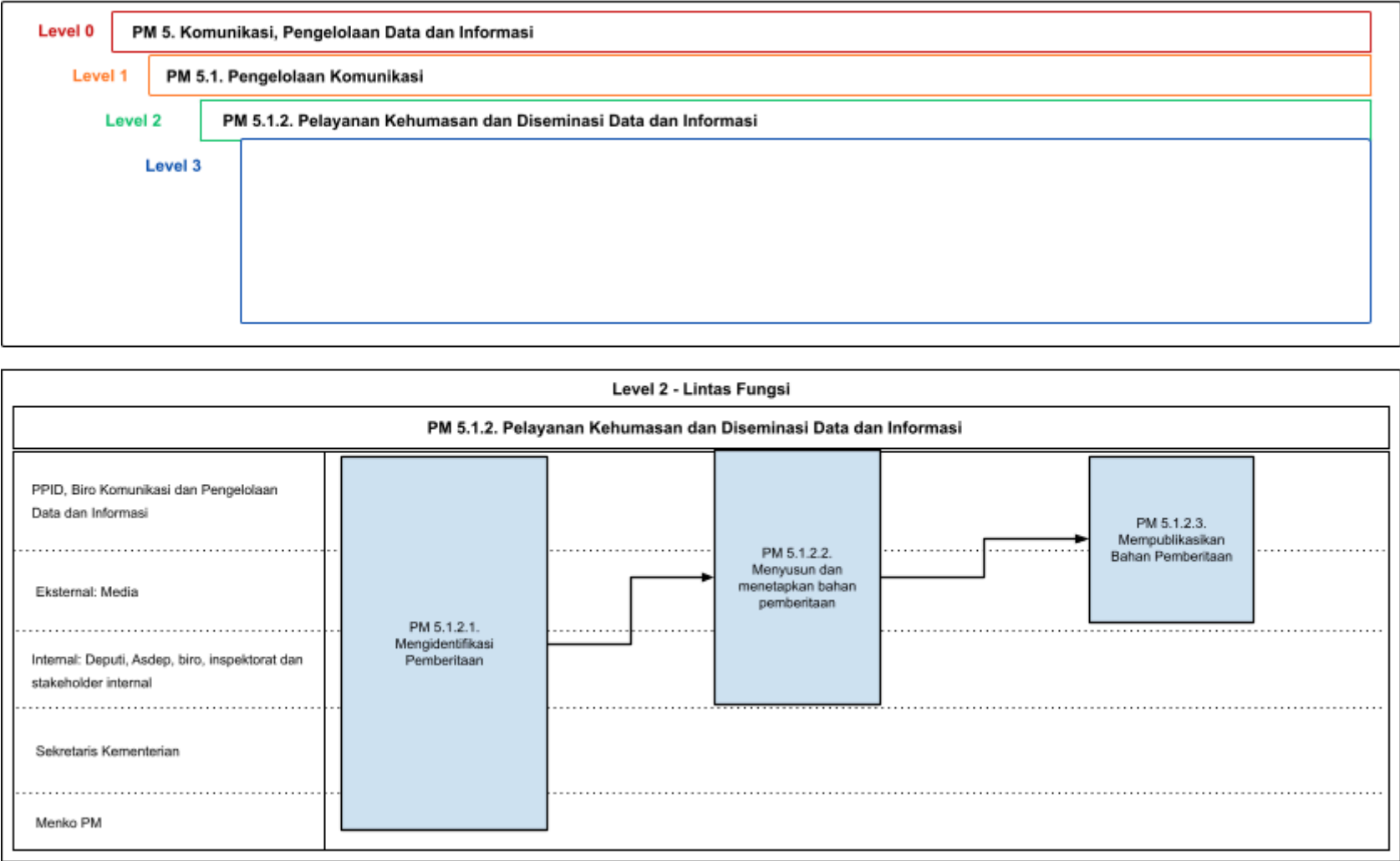
a) Level 2 . . .

a) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.1.1. Pelayanan Informasi Publik

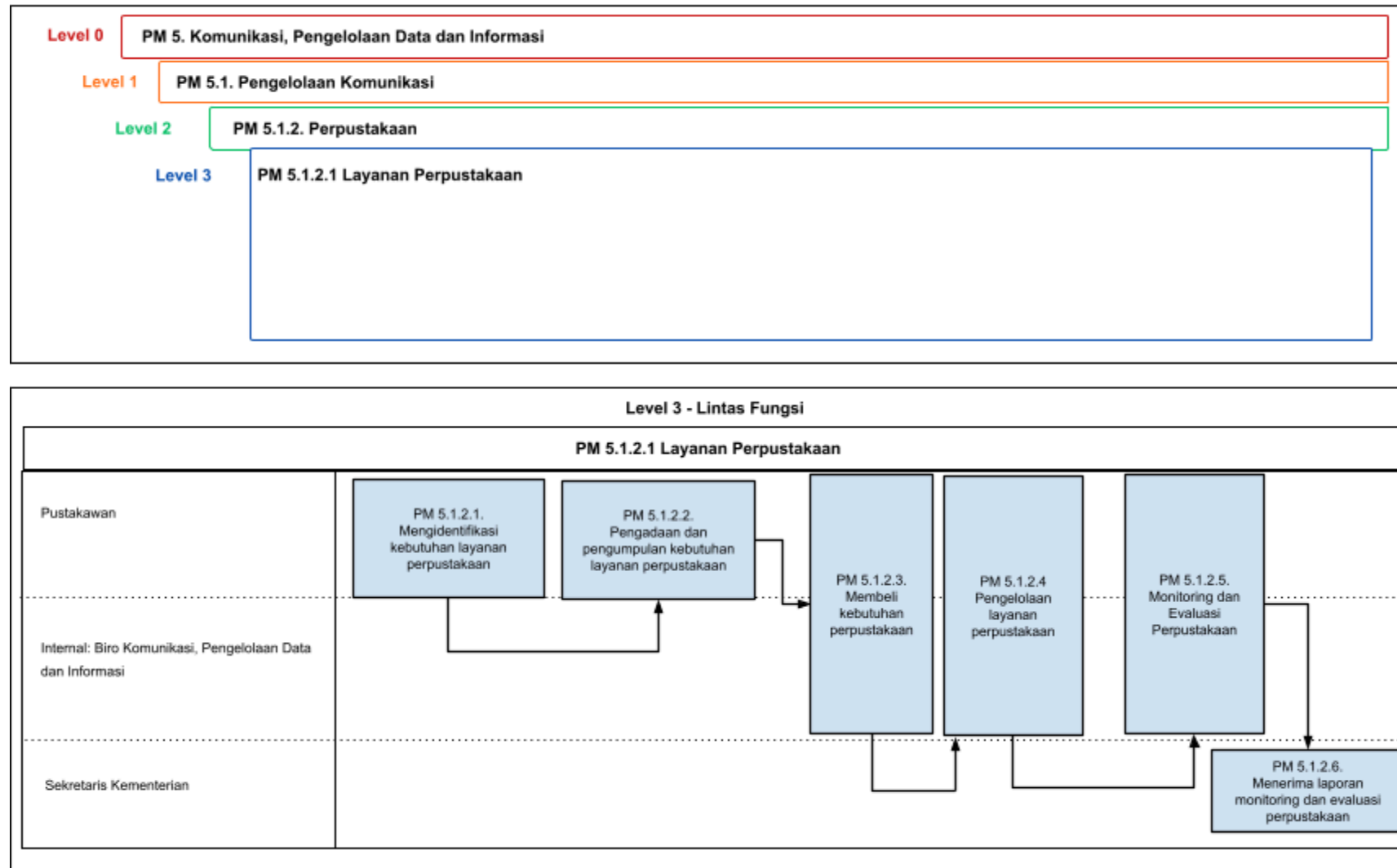


b) Level 2 . . .

b) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.1.2. Pelayanan Kehumasan dan Diseminasi Data dan Informasi



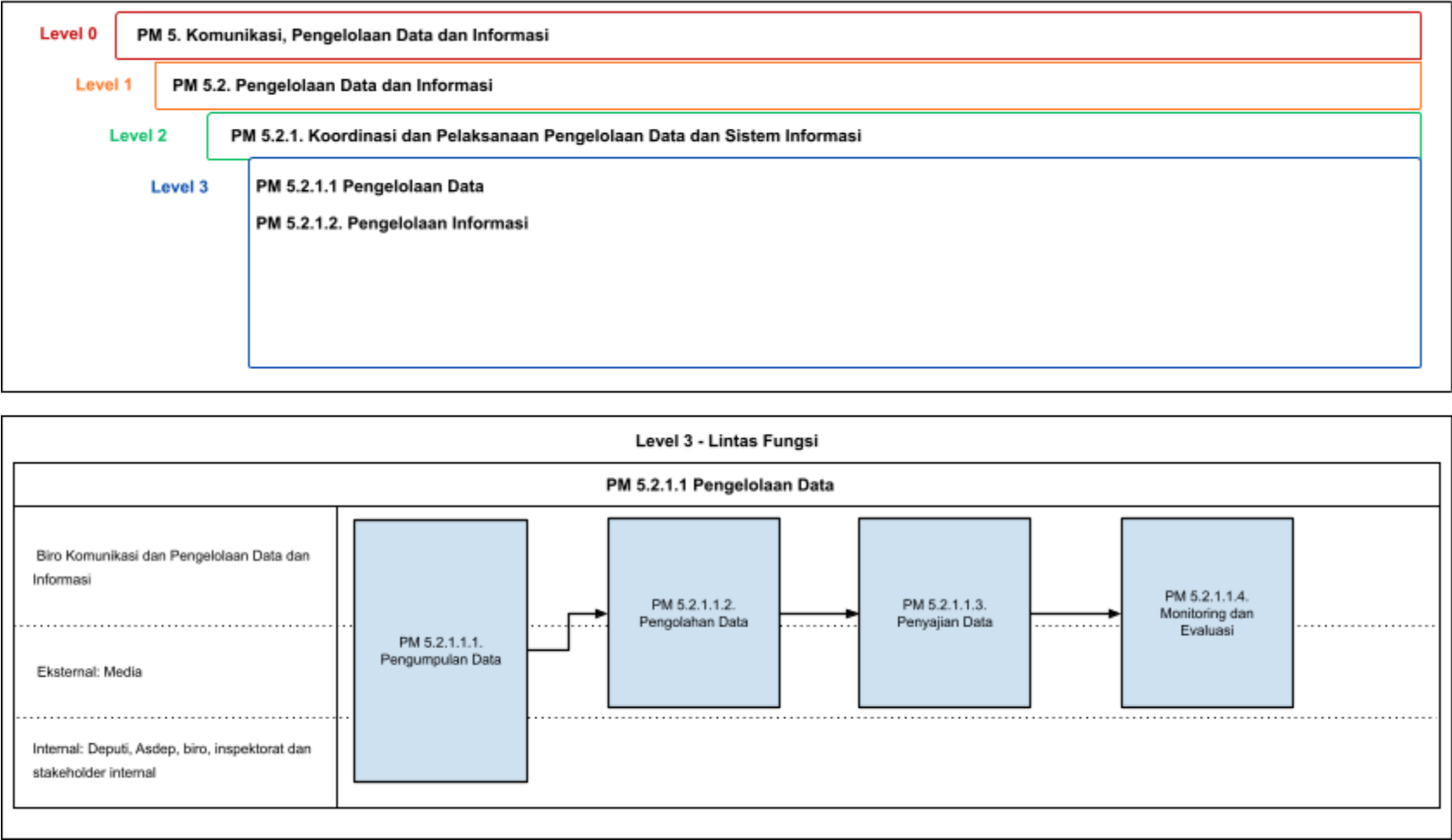
Level 0 . . .



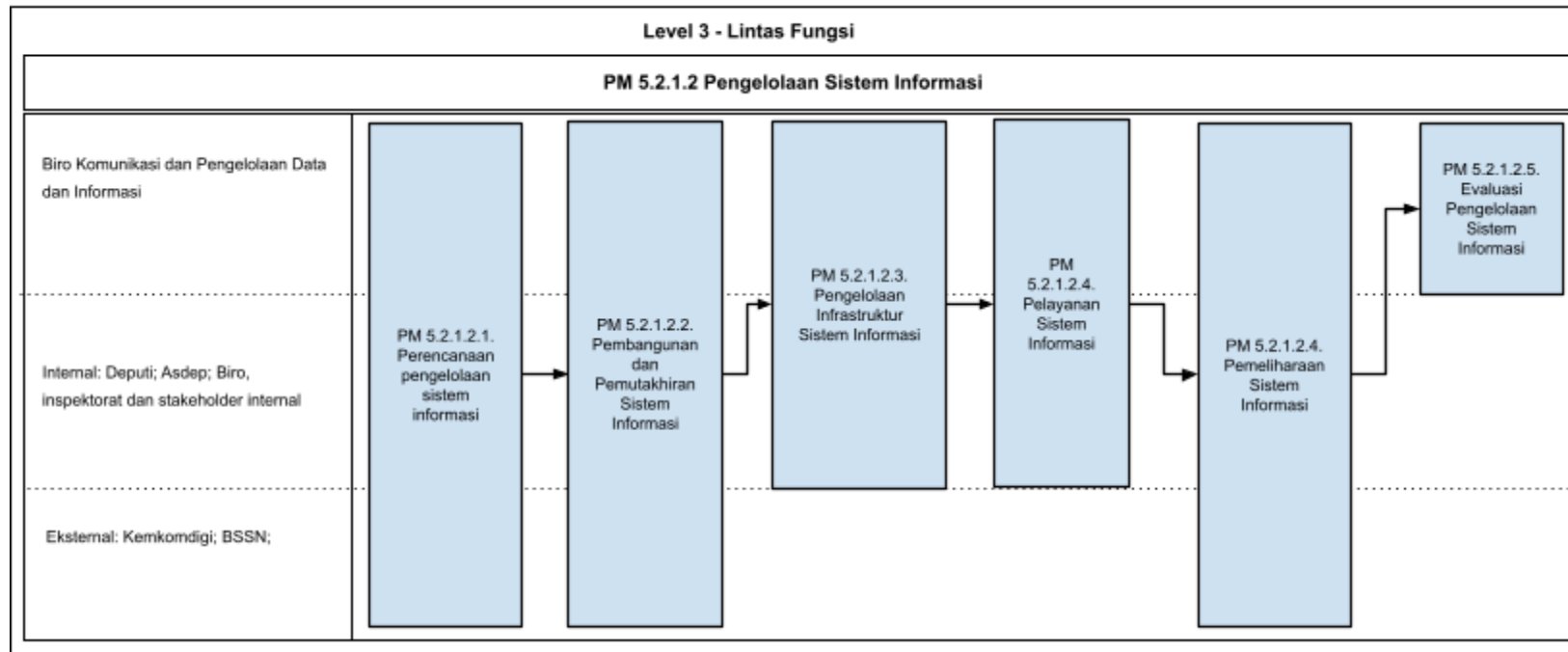
ii. Level 2 . . .

ii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.2. Pengelolaan Data dan Informasi

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.2.1. Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

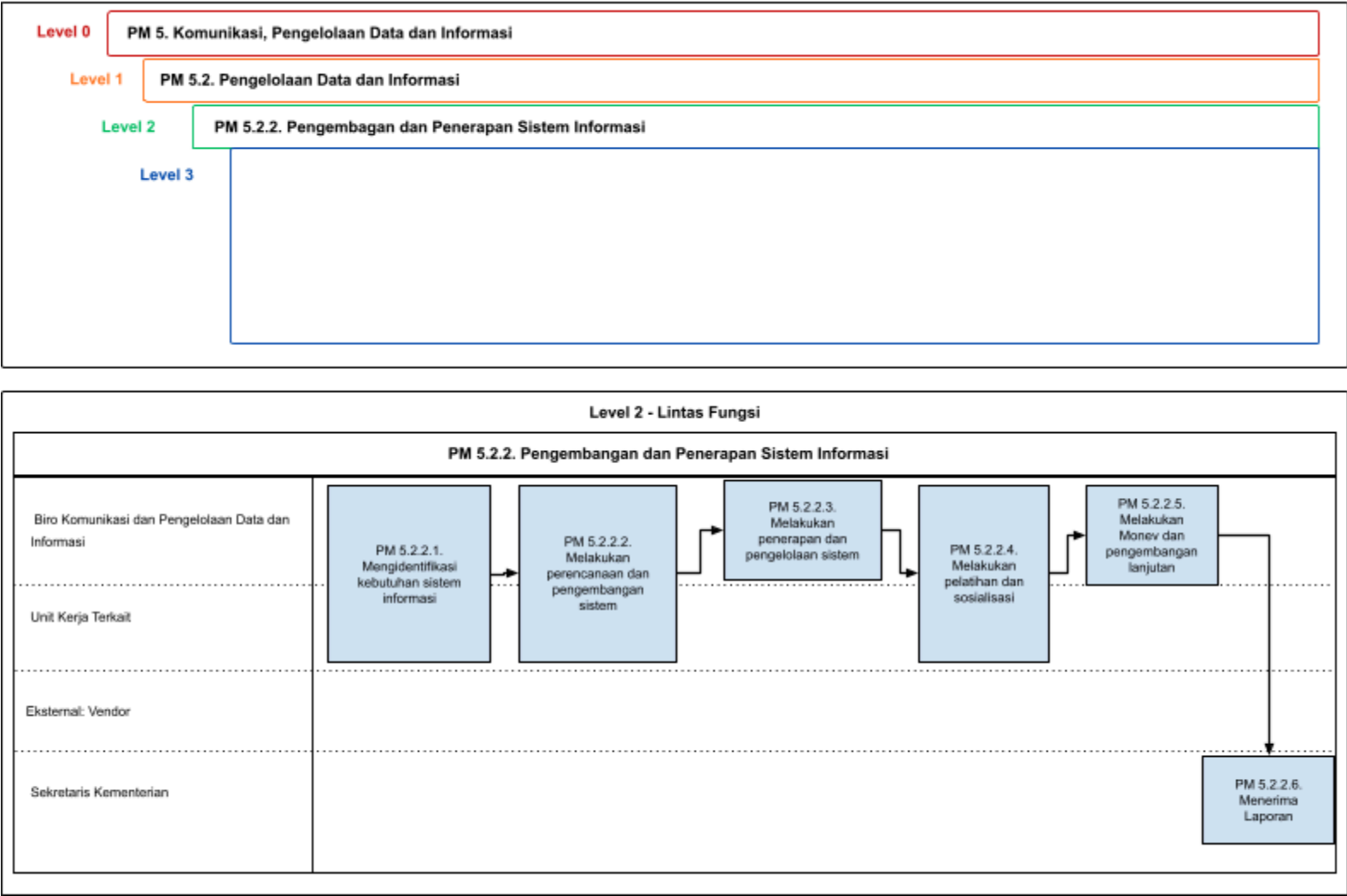


Level 3 . . .



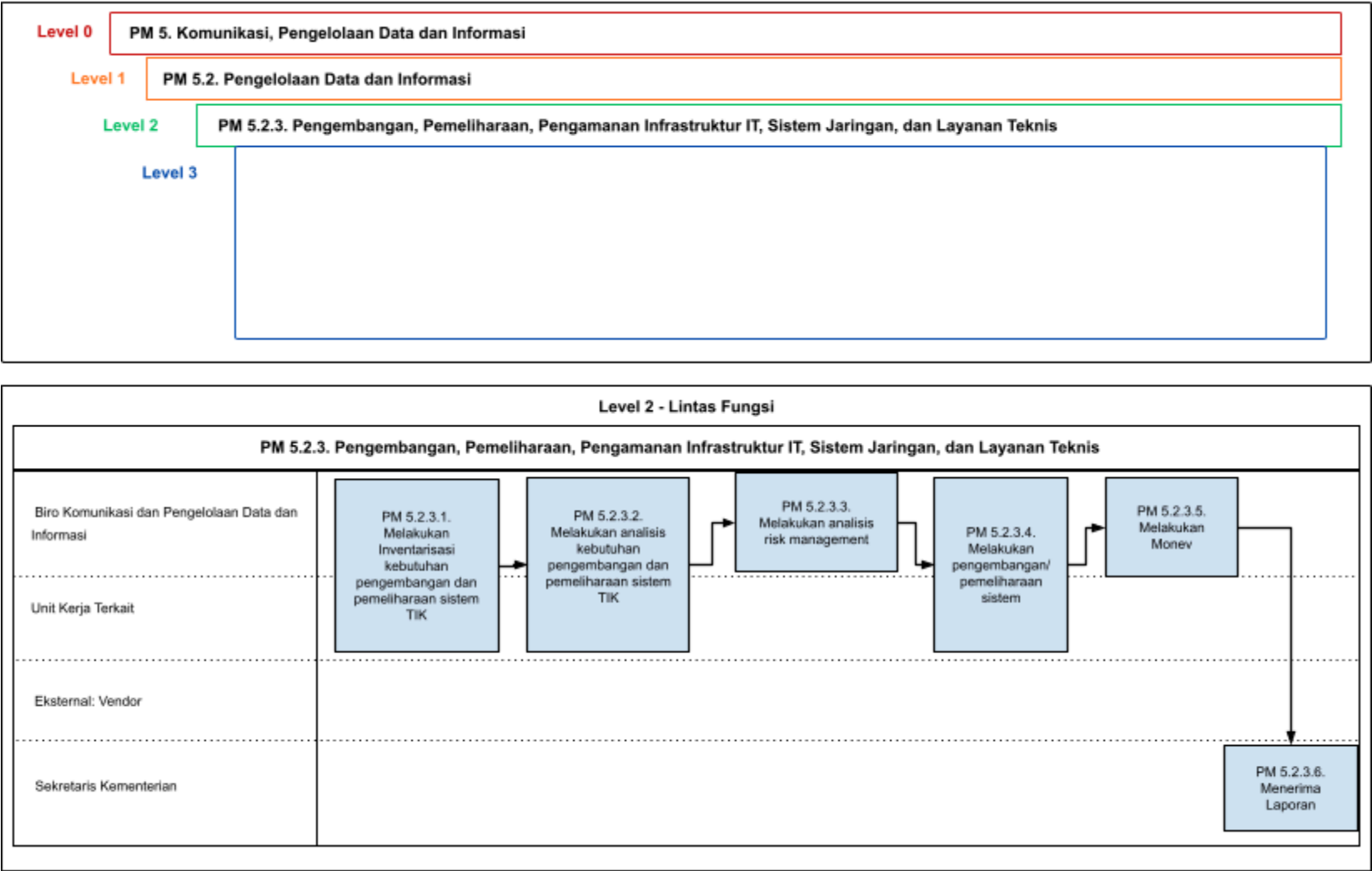
b) Level 2 . . .

b) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.2.2. Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi



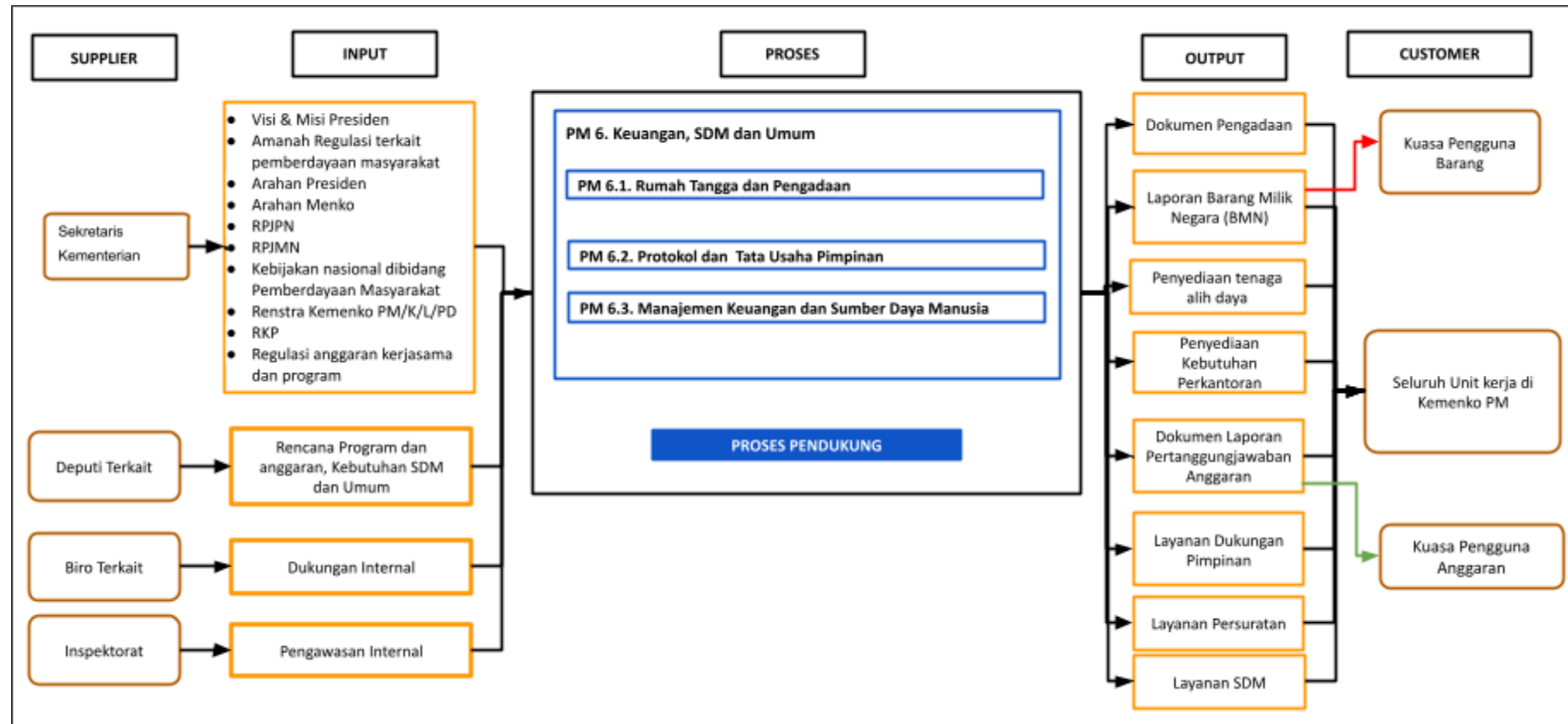
c) Level 2 . . .

c) **Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.2.3. Pengembangan, Pemeliharaan, Pengamanan Infrastruktur IT, Sistem Jaringan, dan Layanan Teknis.**



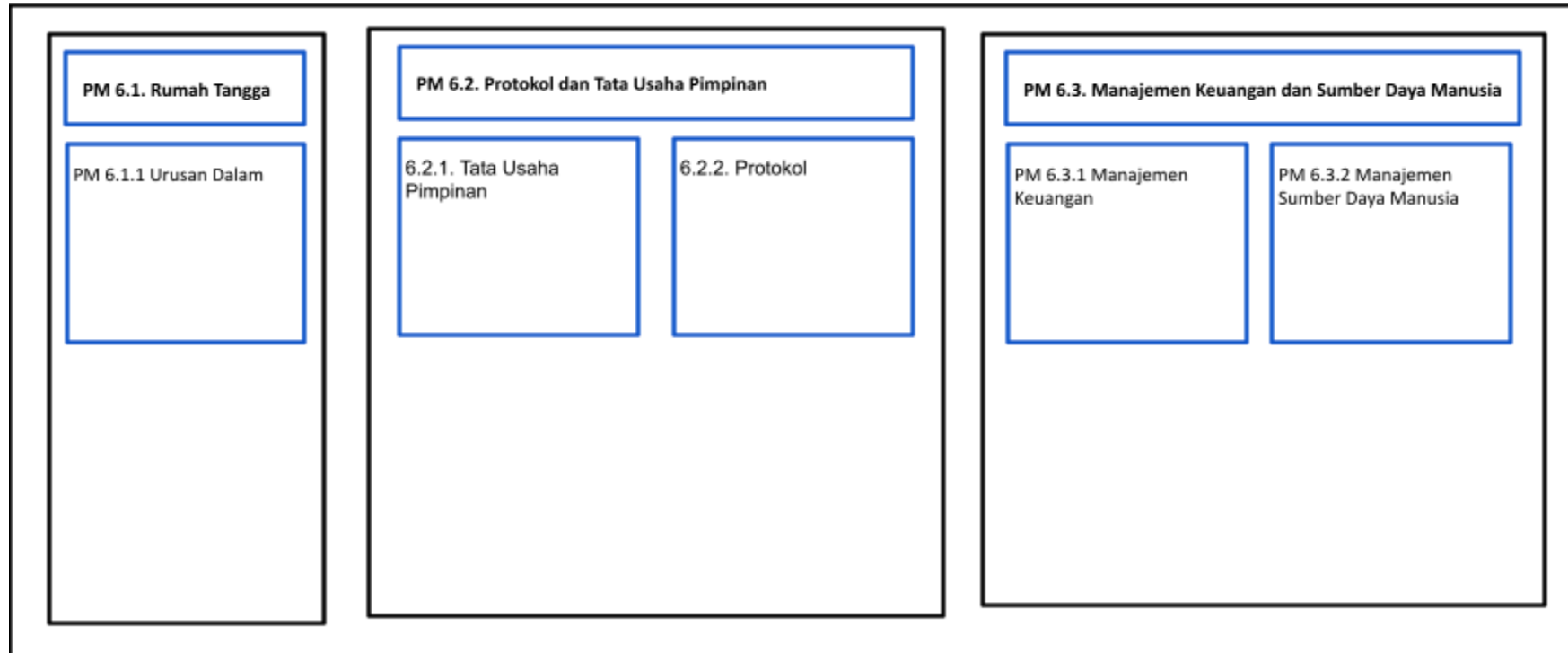
4. Level 1 . . .

4. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6. Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum



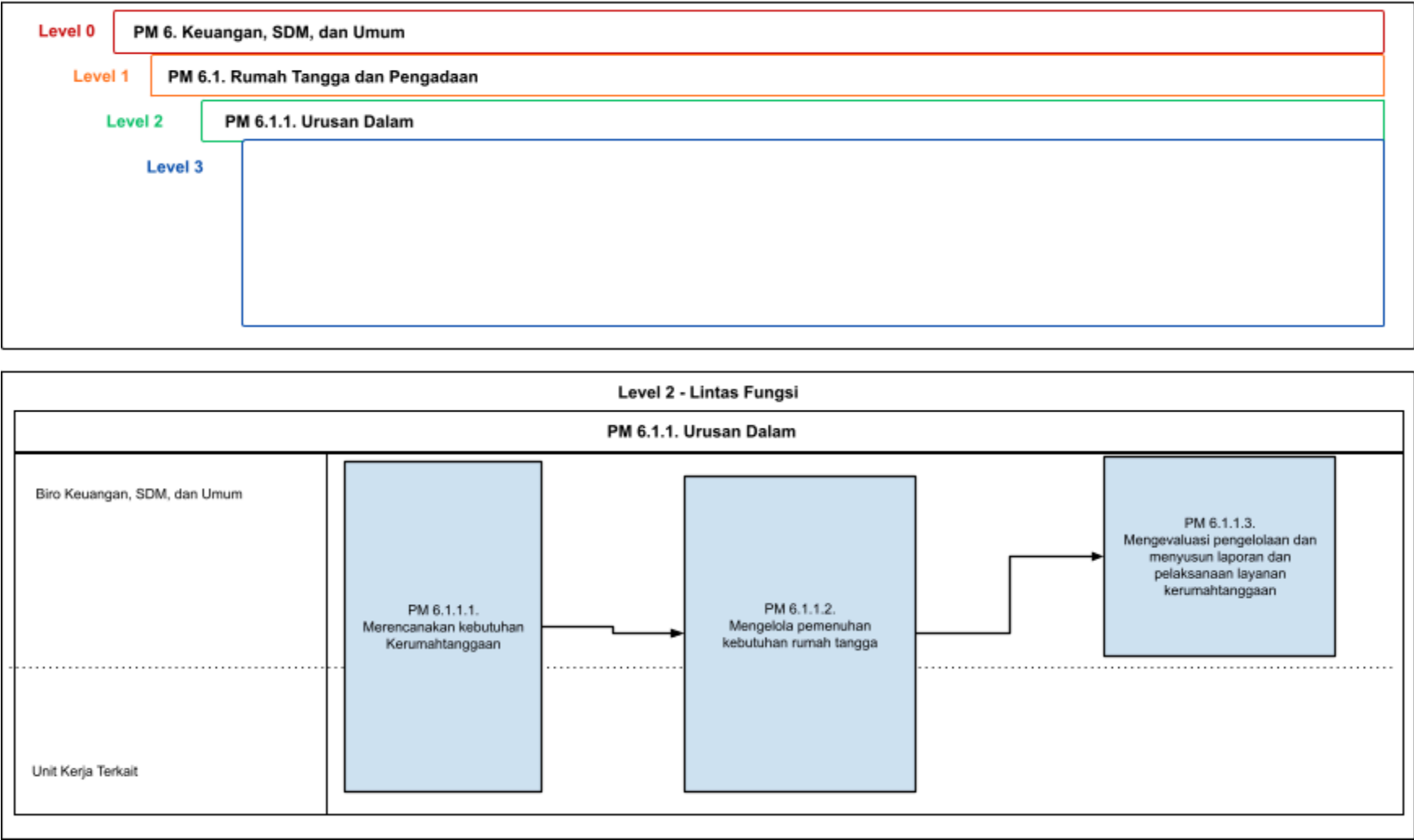
i. Level 2 . . .

i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.1. Rumah Tangga



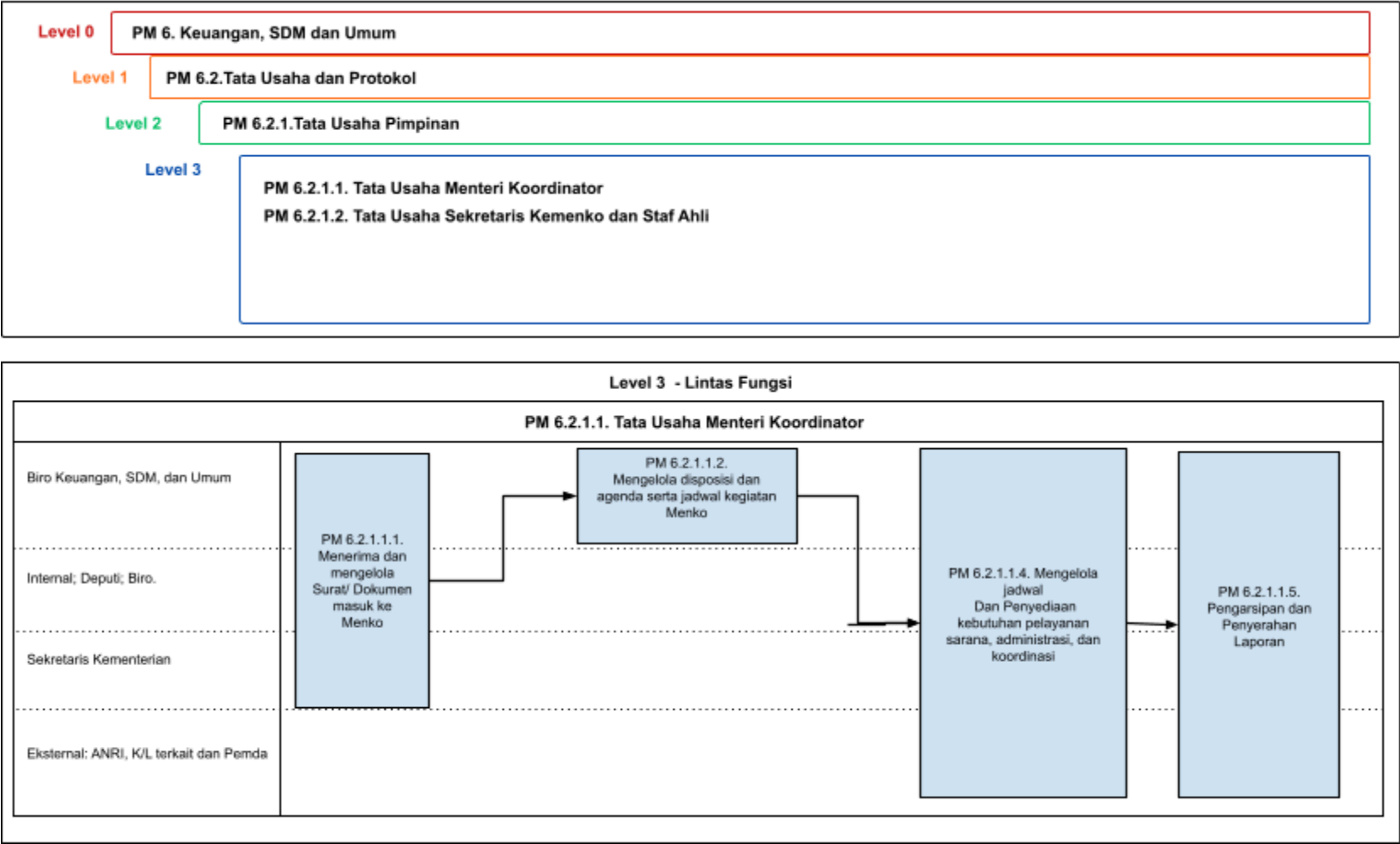
a) Level 2 . . .

a) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.1.1. Urusan Dalam

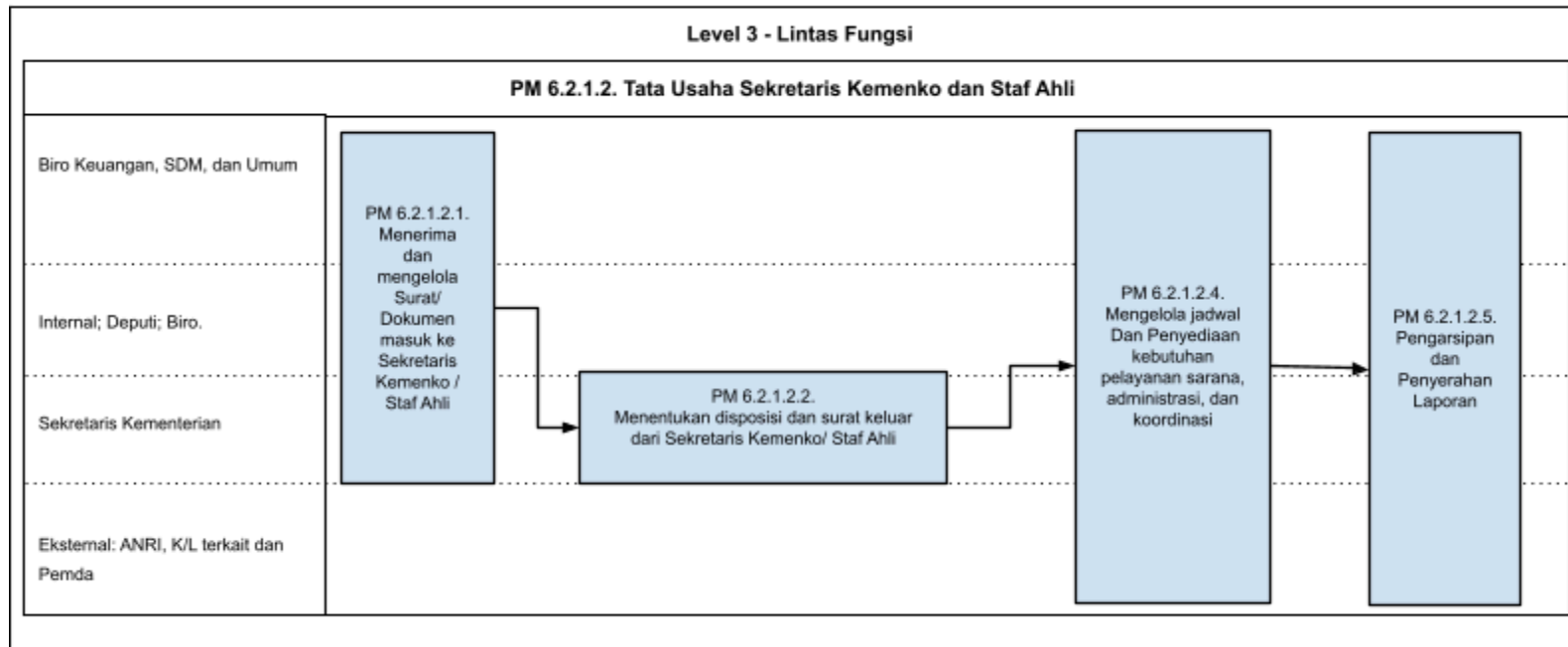


ii. Level 2 . . .

- ii. **Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.2. Tata Usaha dan Protokol**
 - a) **Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.2.1. Tata Usaha Pimpinan**

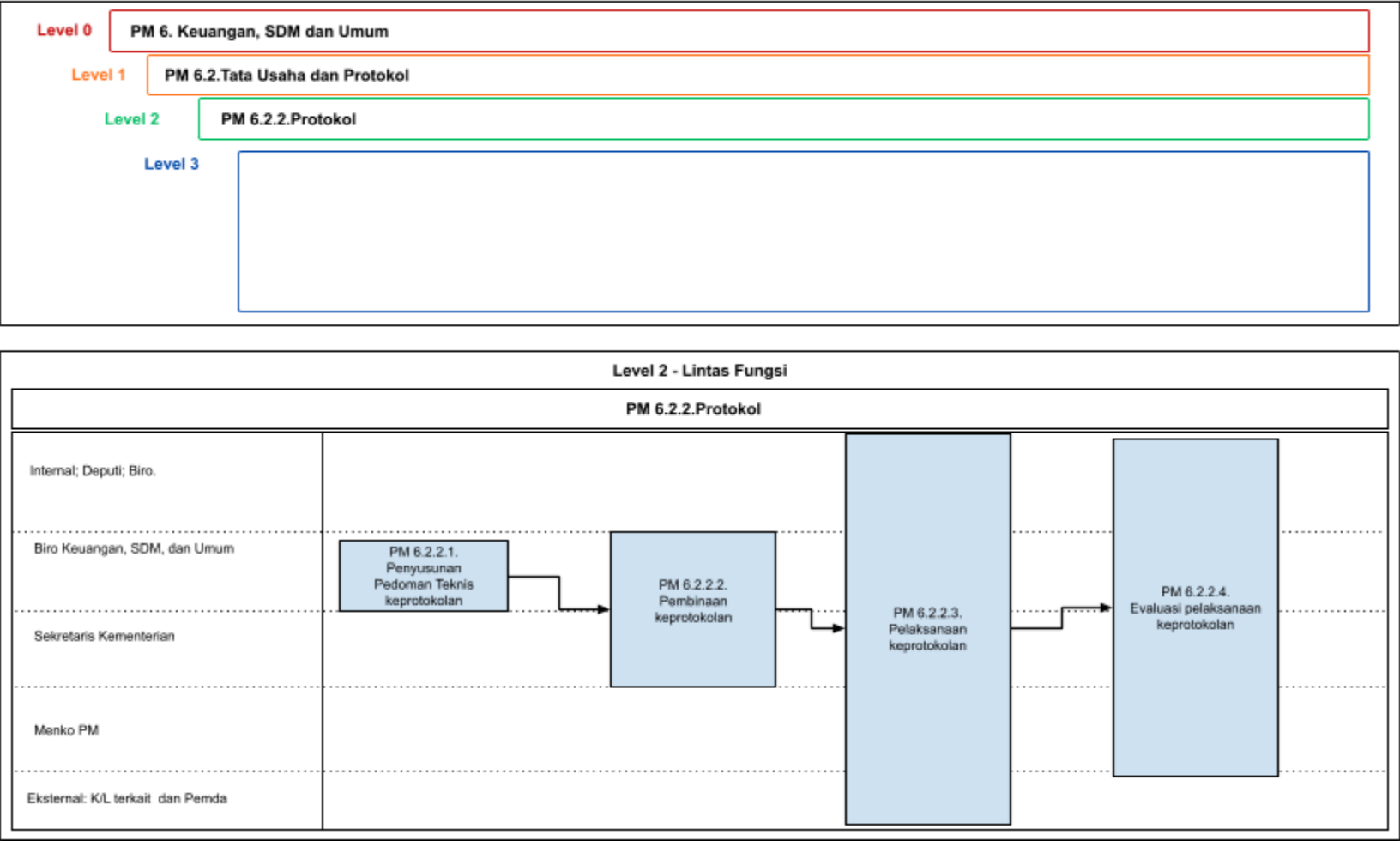


Level 3 . . .



b) Level 2 . . .

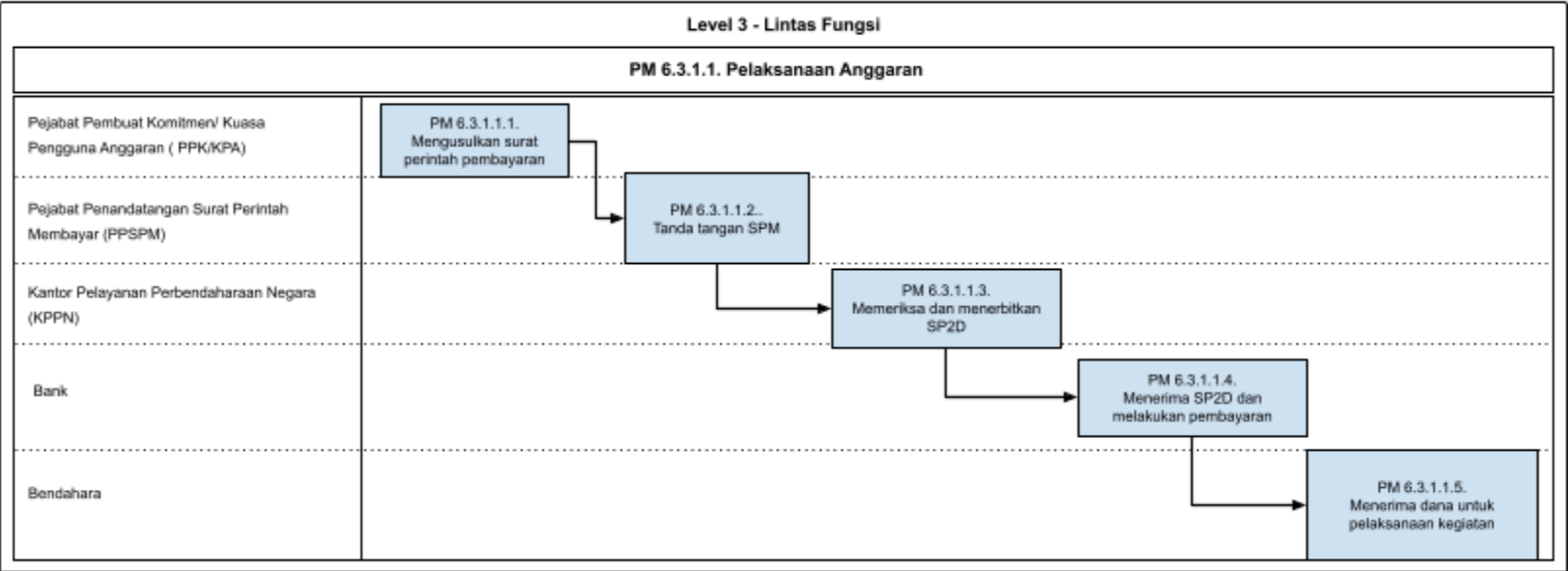
b) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.2.2. Protokol



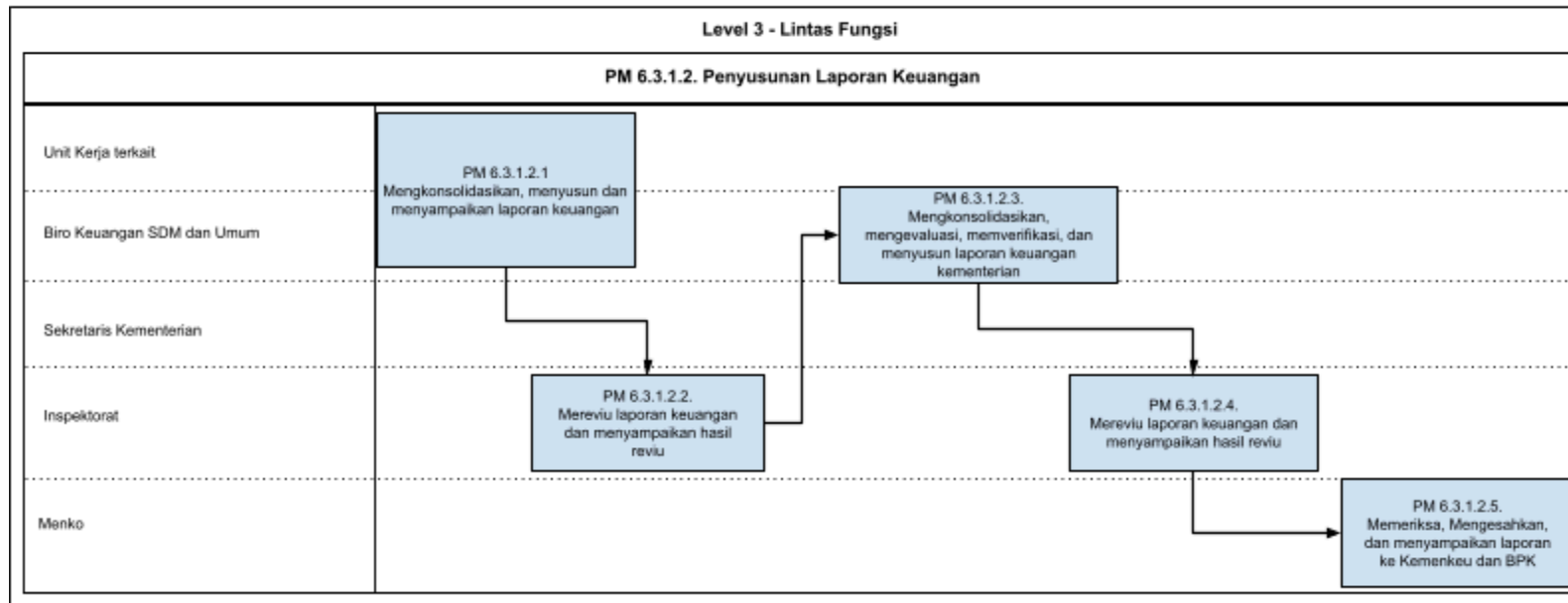
iii. Level 2 . . .

iii. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.3. Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.3.1. Manajemen Keuangan

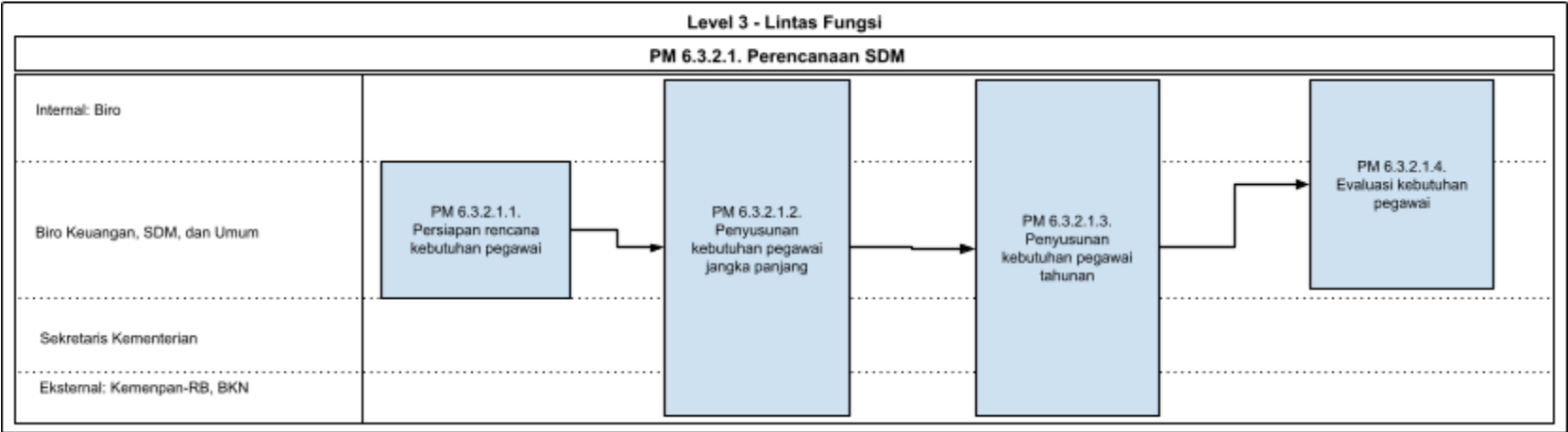
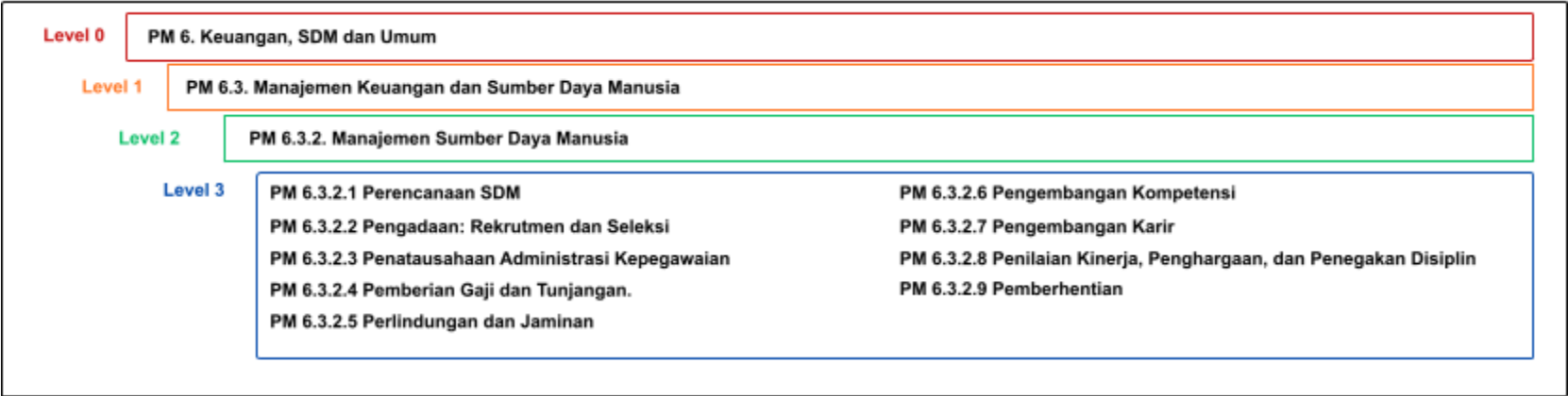


Level 3 . . .

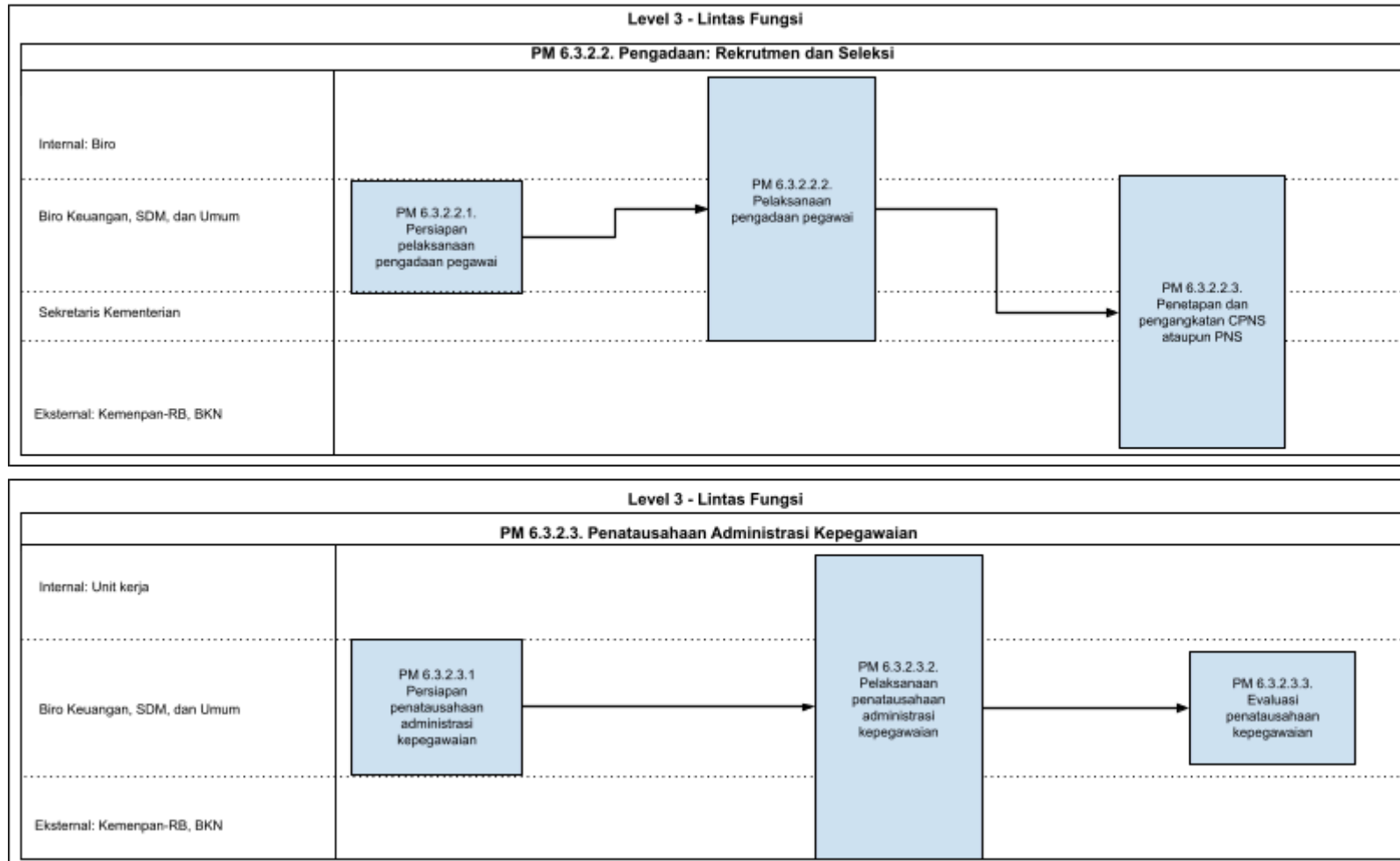


b) Level 3 . . .

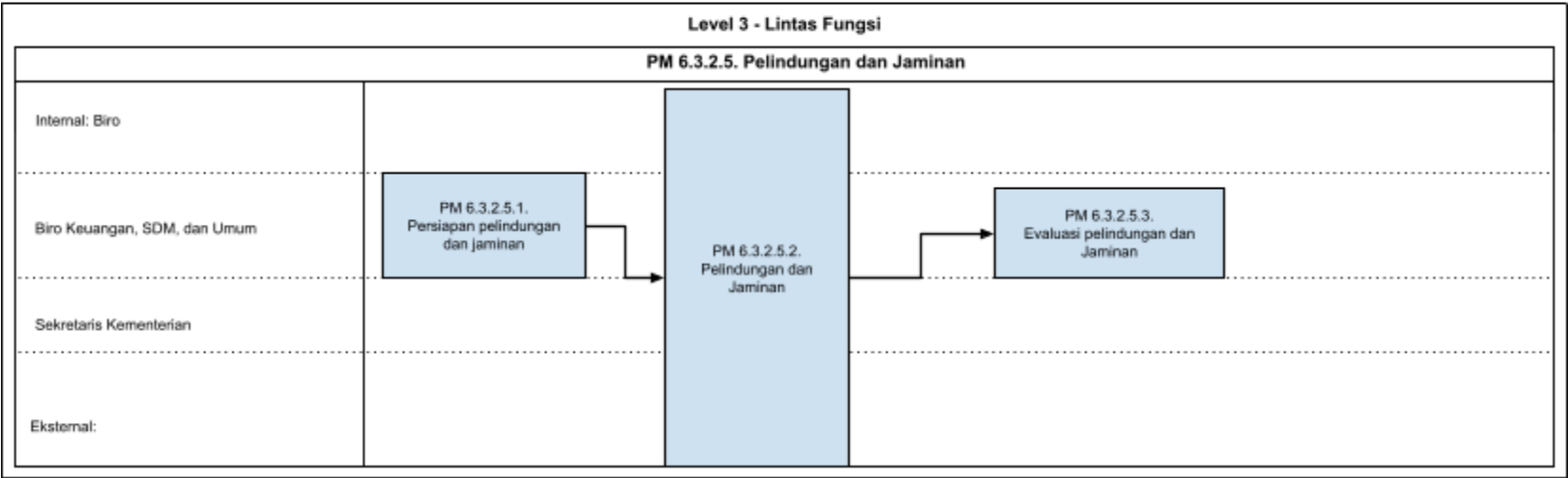
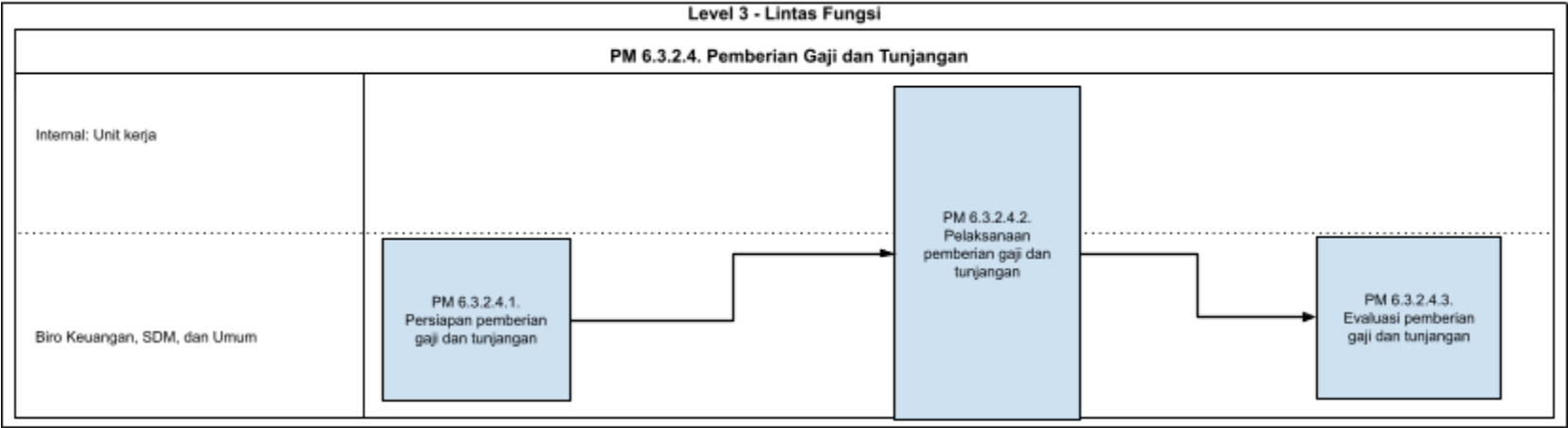
b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.3.2. Manajemen Sumber Daya Manusia



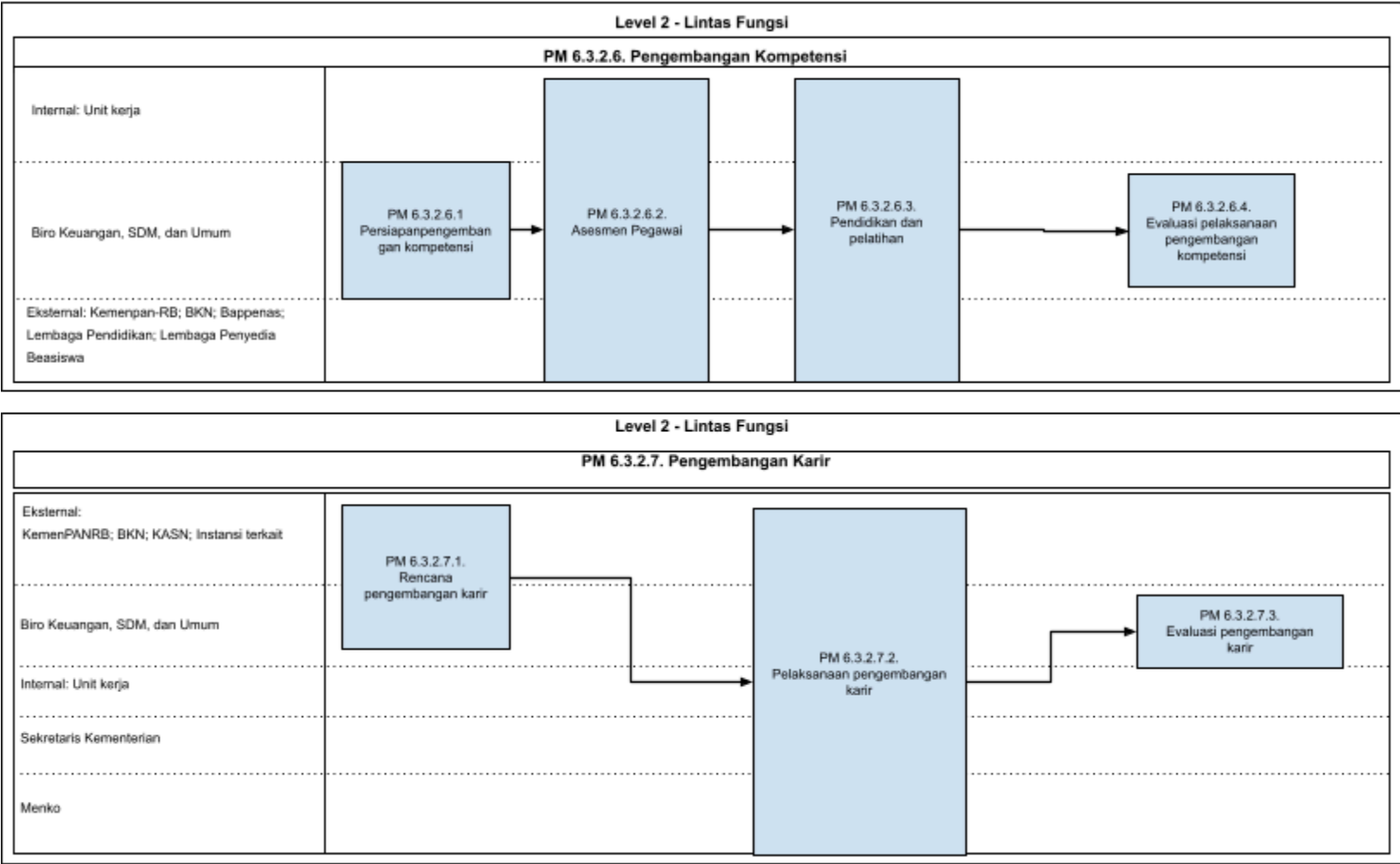
Level 3 . . .



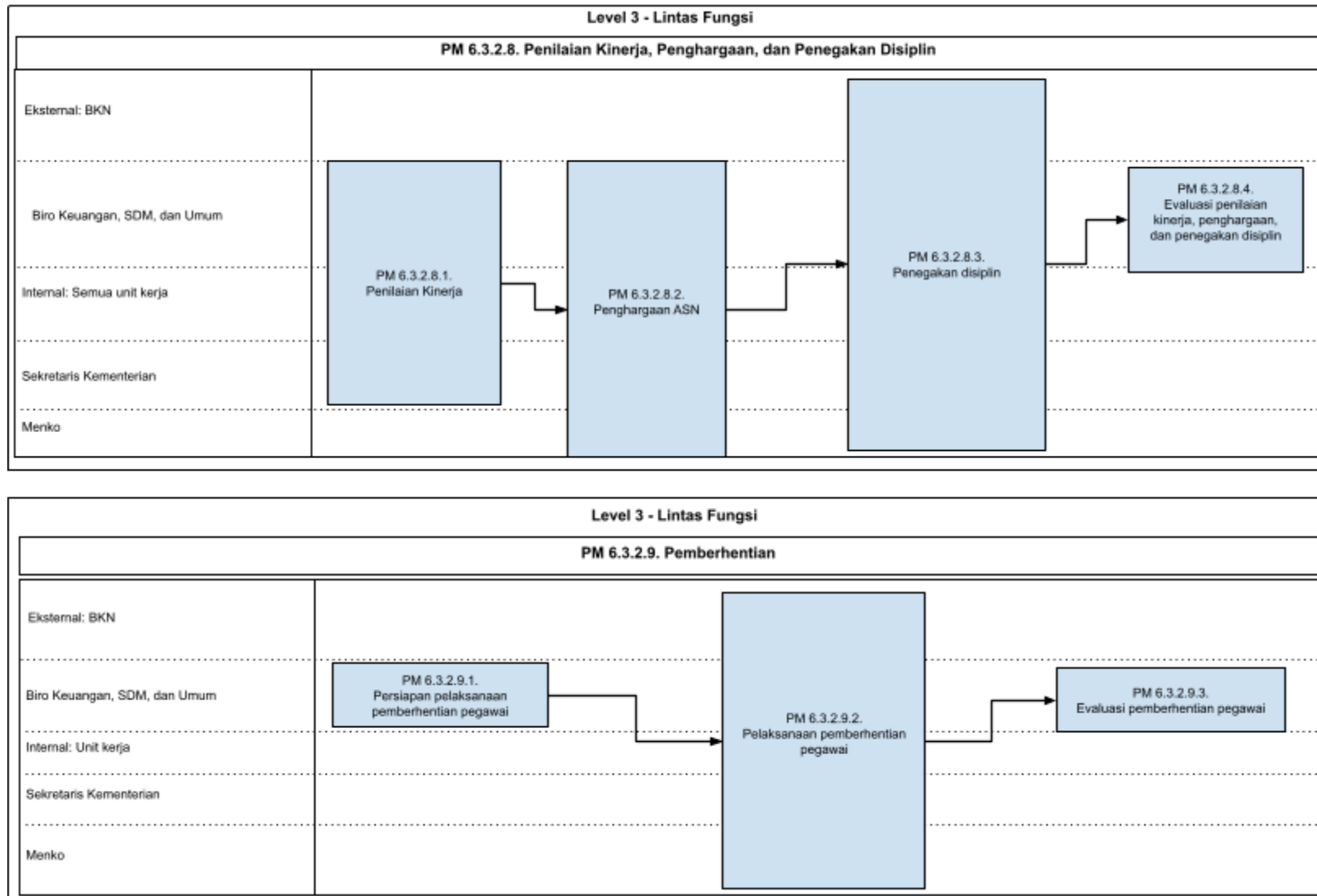
Level 3 . . .



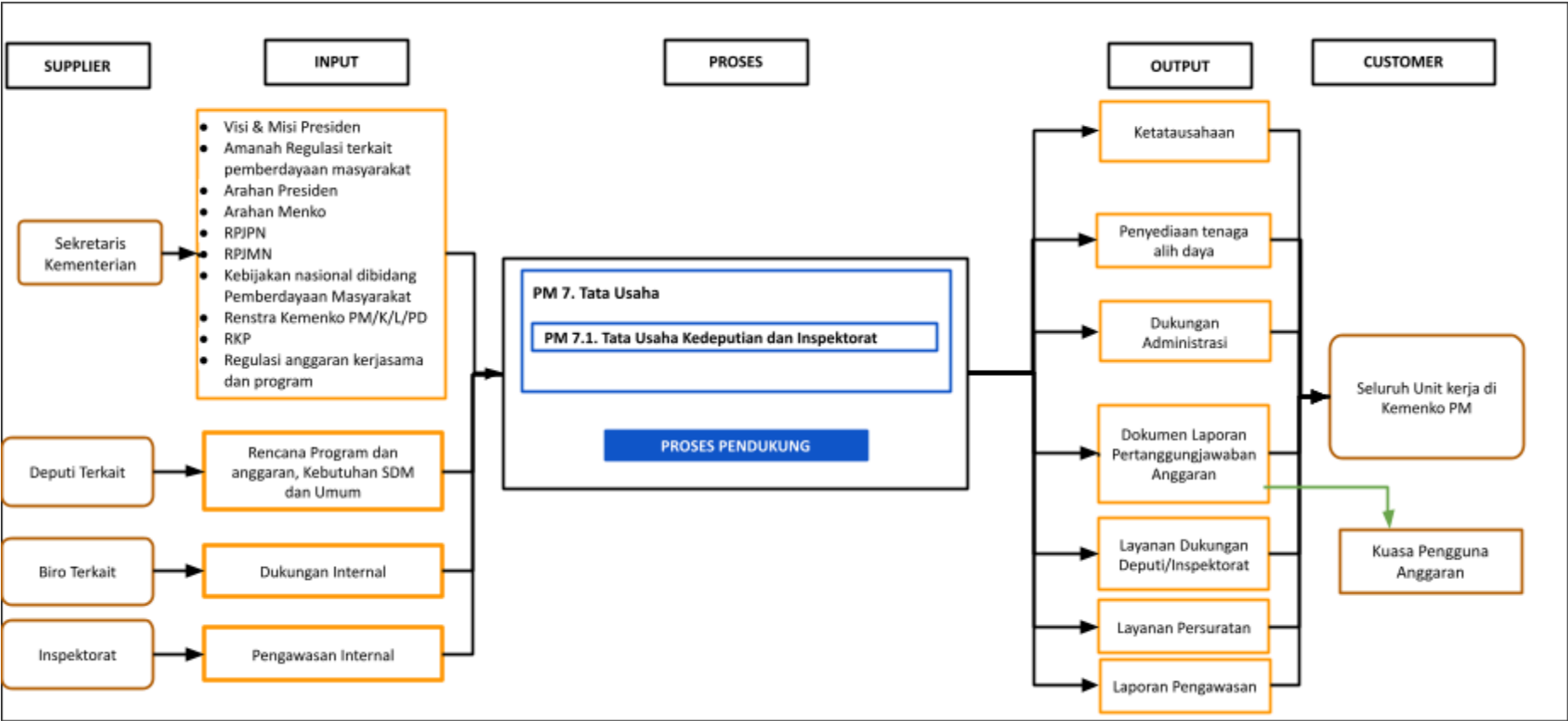
Level 3 . . .



Level 3 . . .

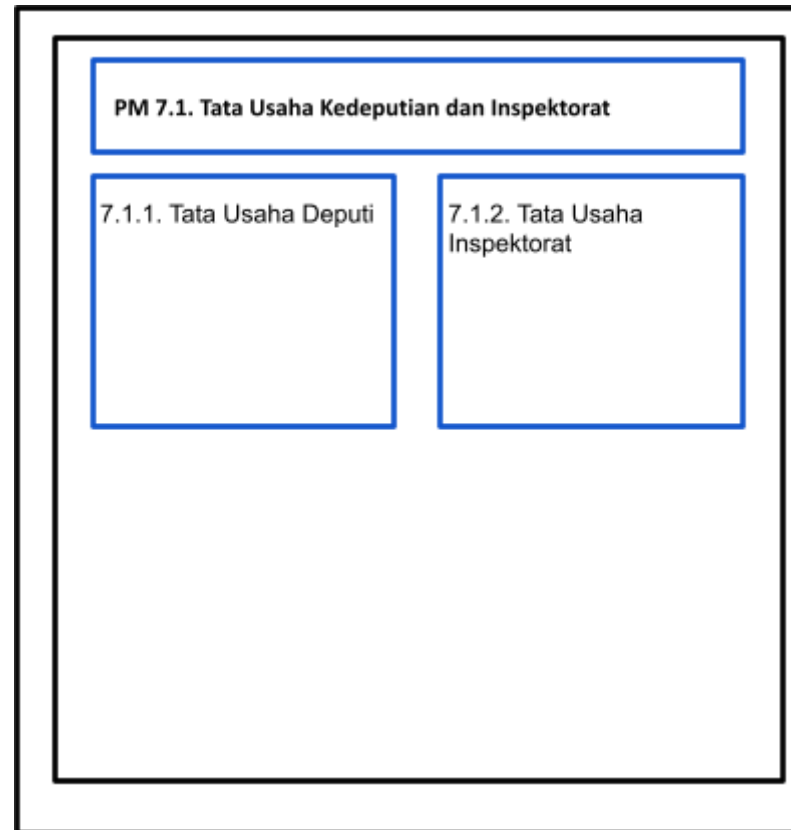


5. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7. Tata Usaha



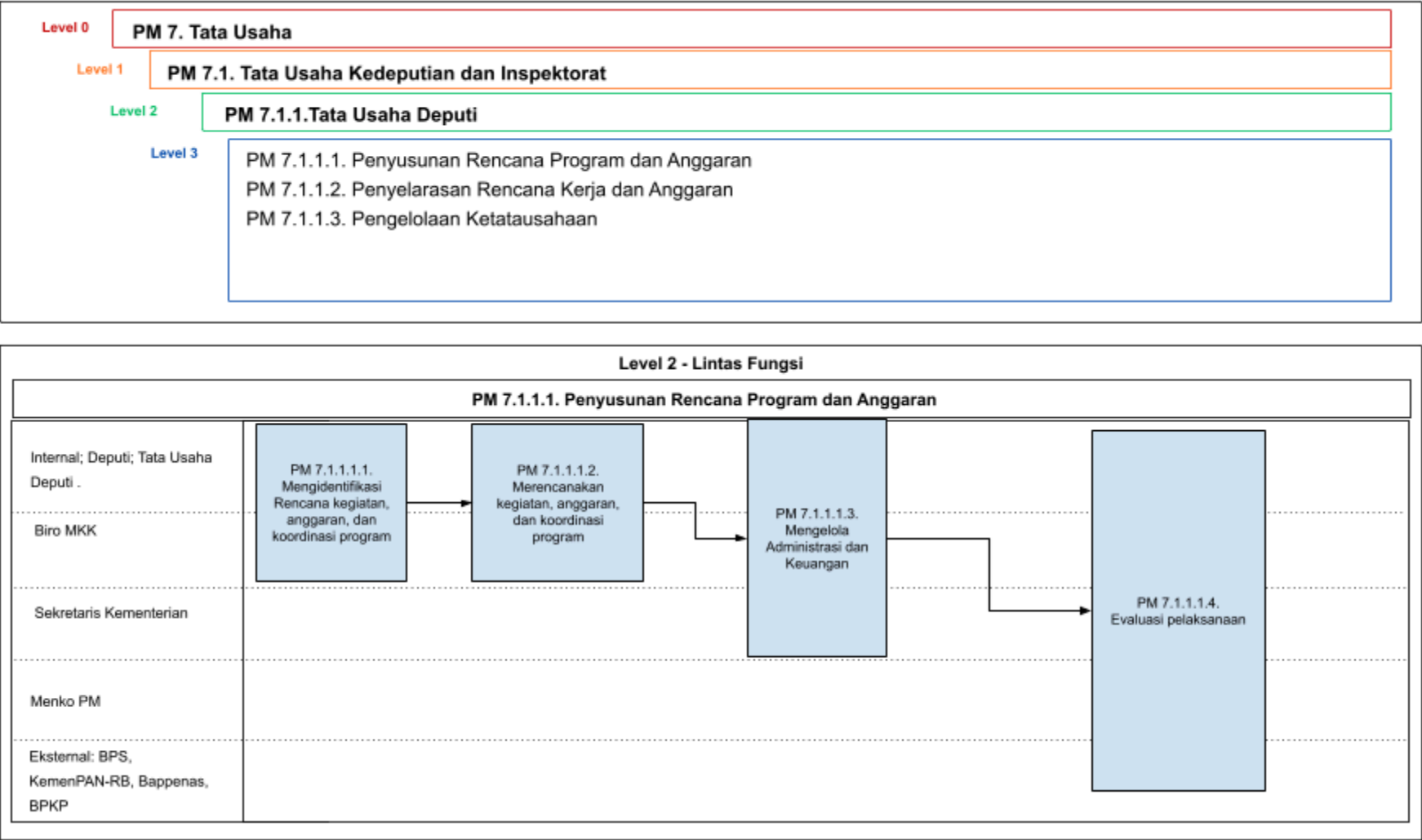
i. Level 2 . . .

i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7.1 Tata Usaha Kedeputian dan Inspektorat

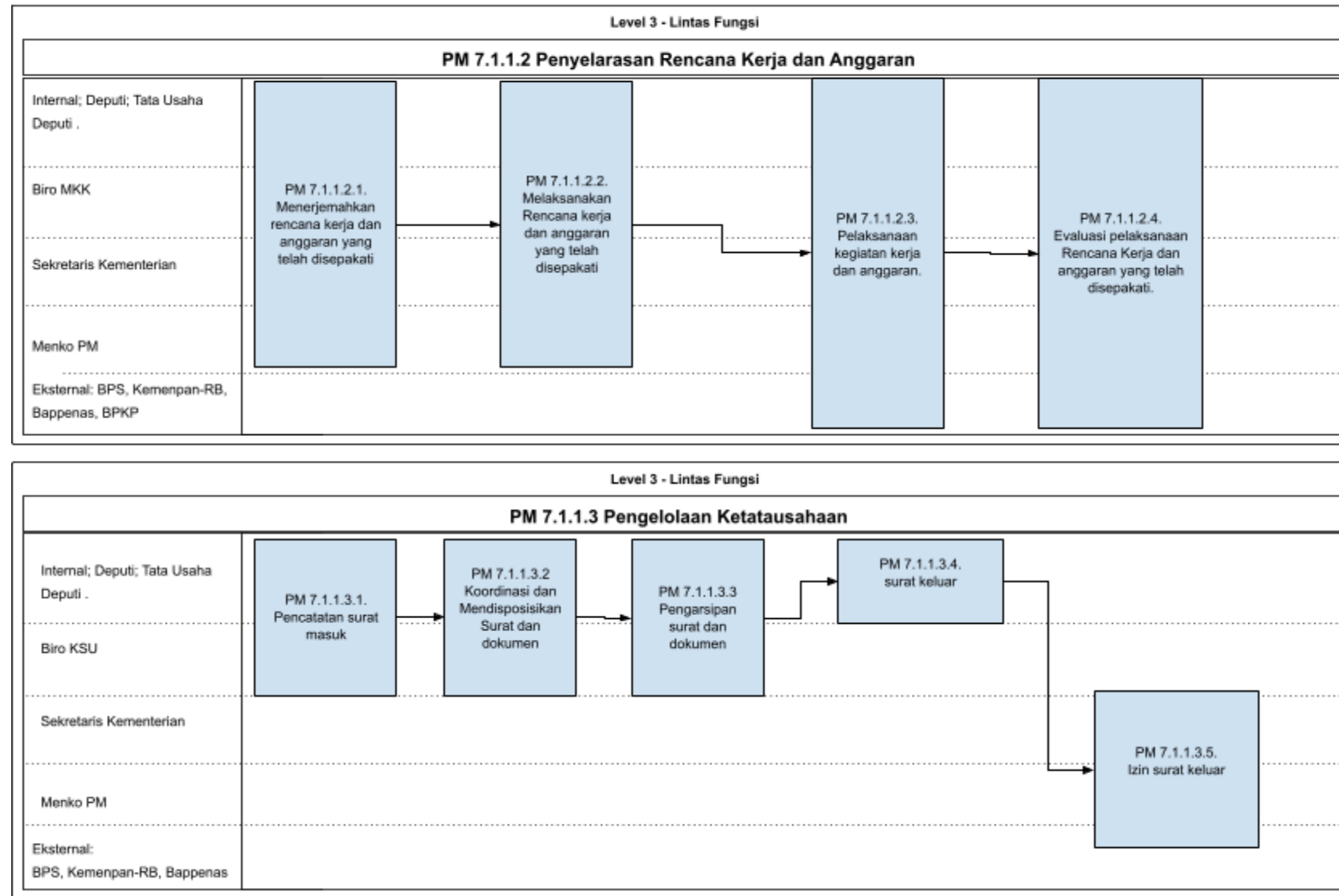


a) Level 3 . . .

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7.1.1. Tata Usaha Deputy

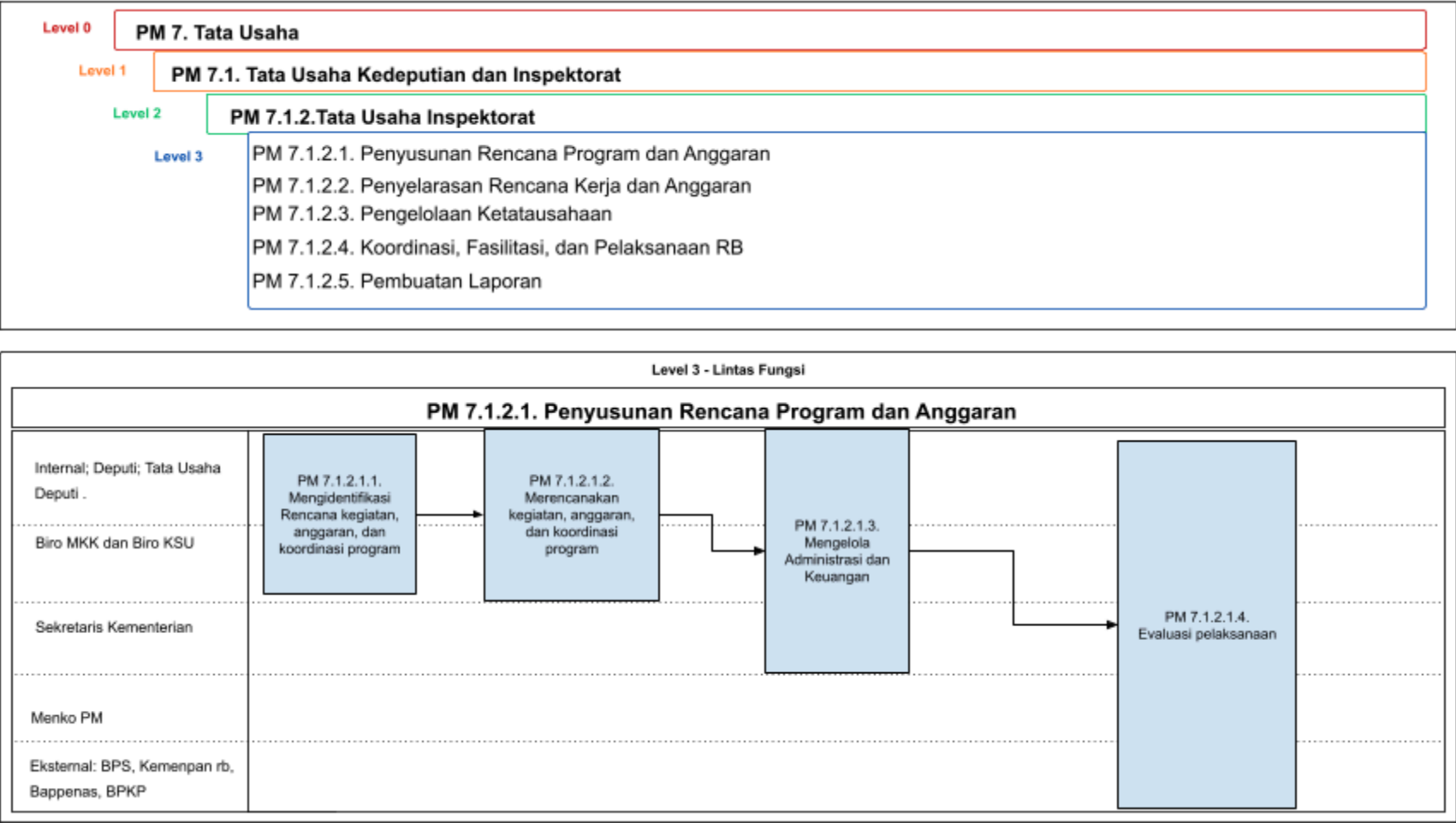


Level 3 . . .

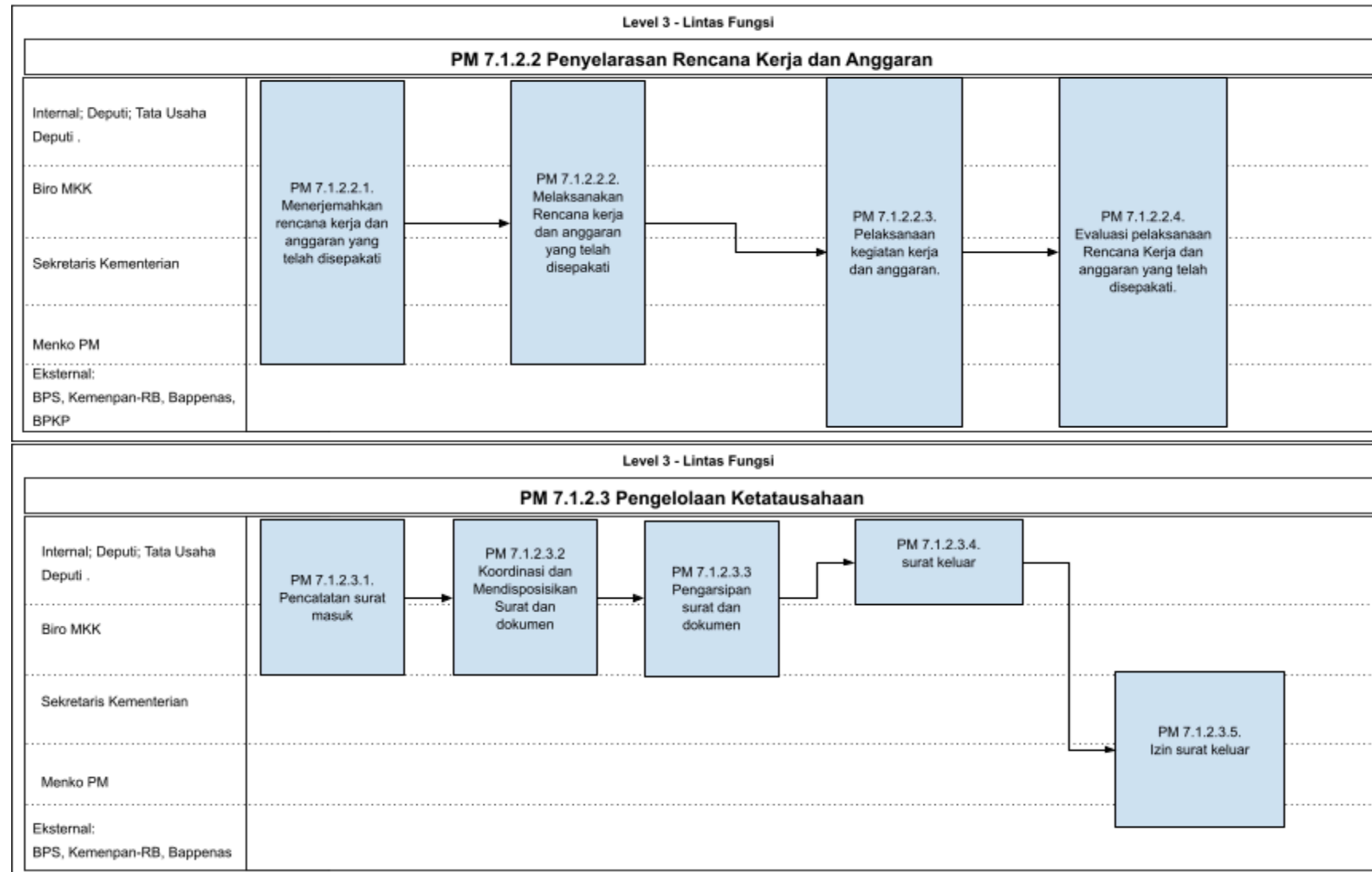


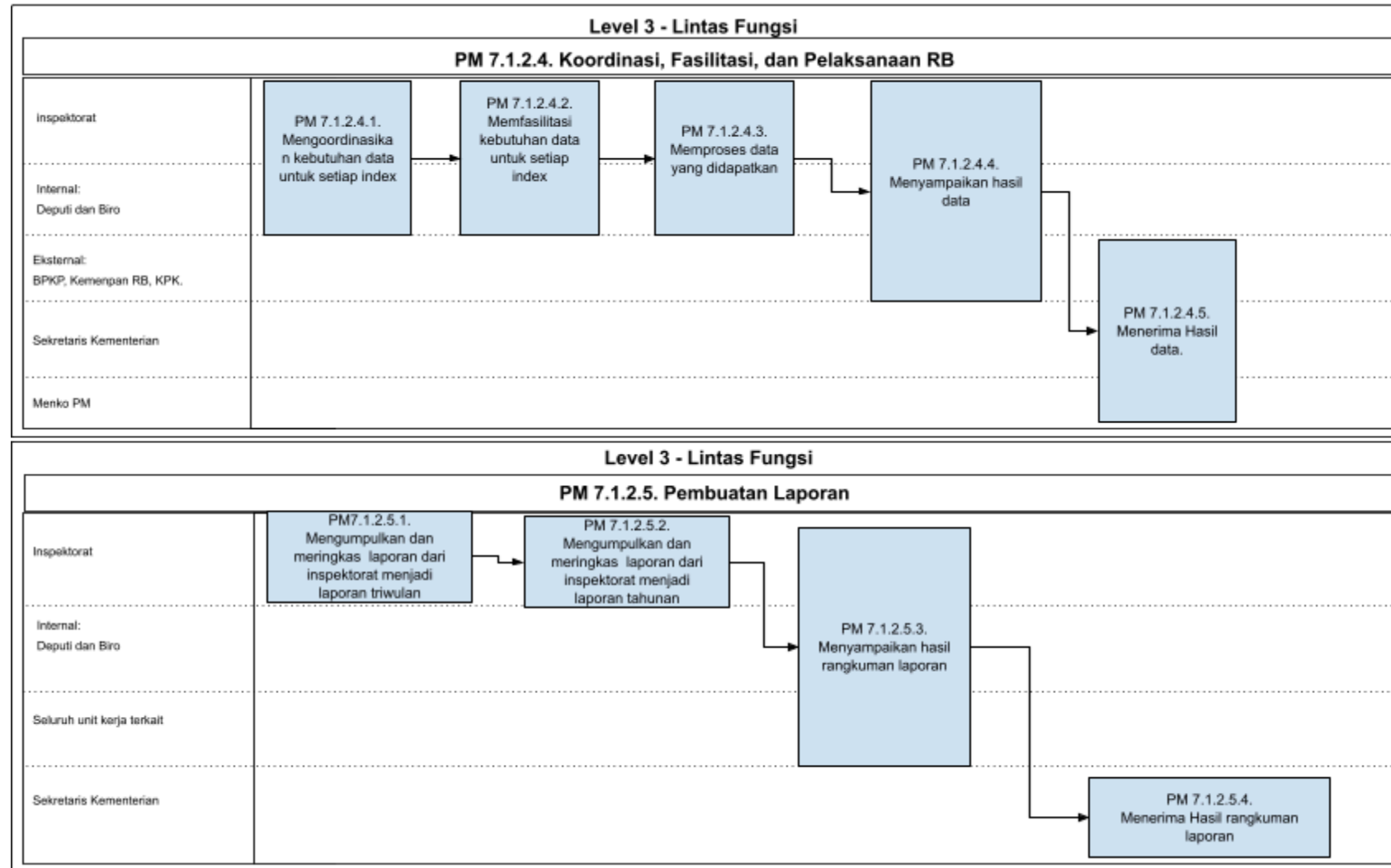
b) Level 3 . . .

b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7.1.2. Tata Usaha Inspektorat



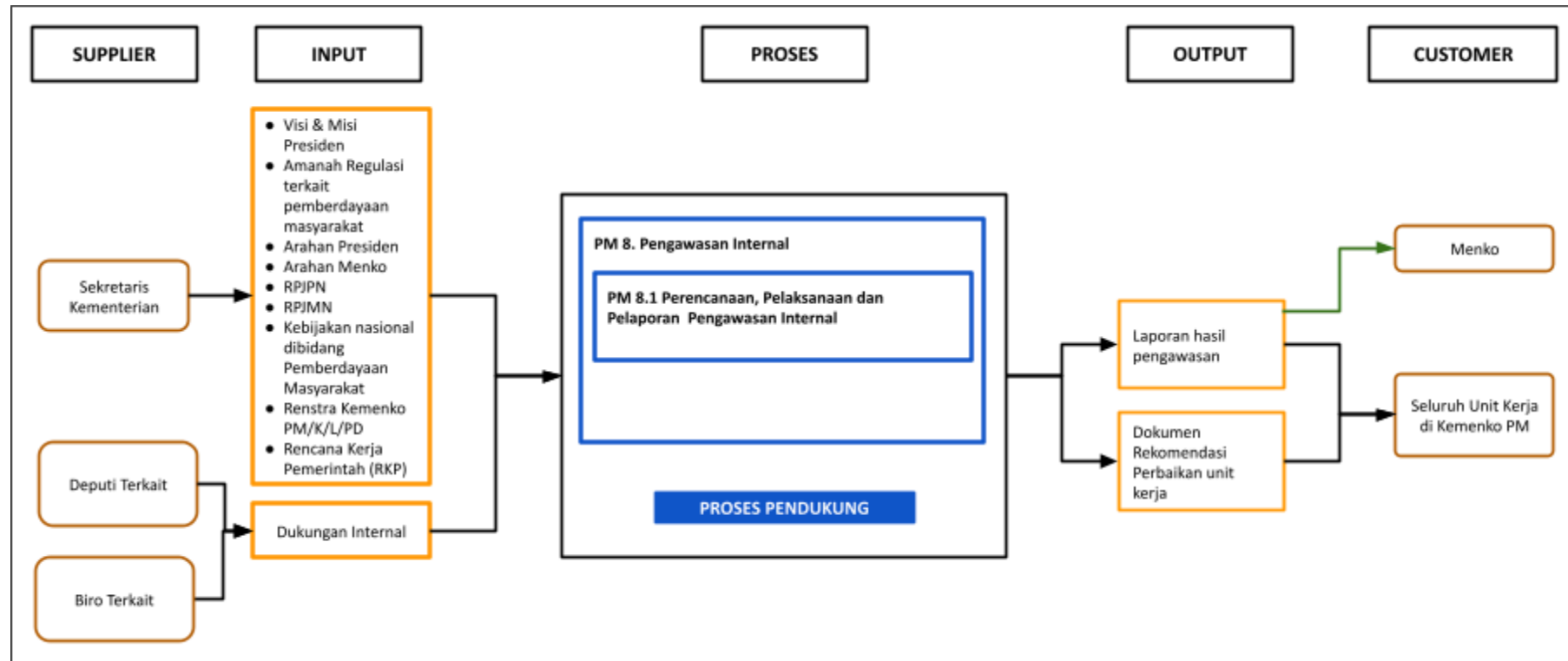
Level 3 . . .





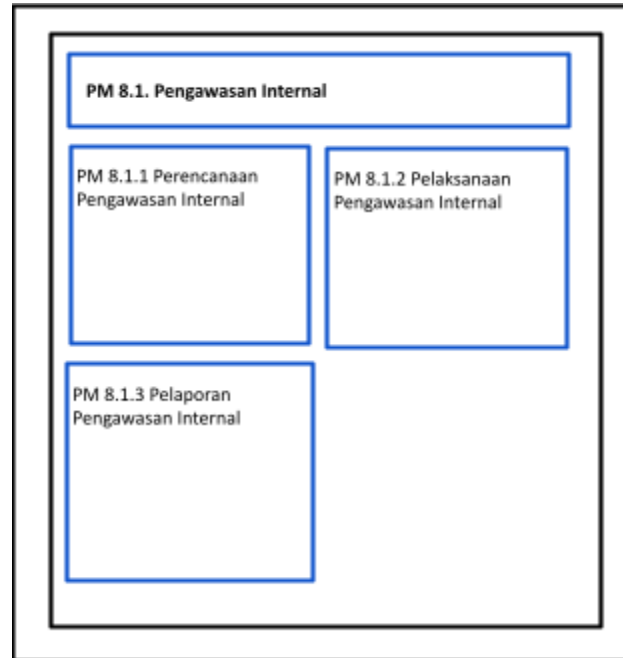
Level 3 . . .

6. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8 Pengawasan



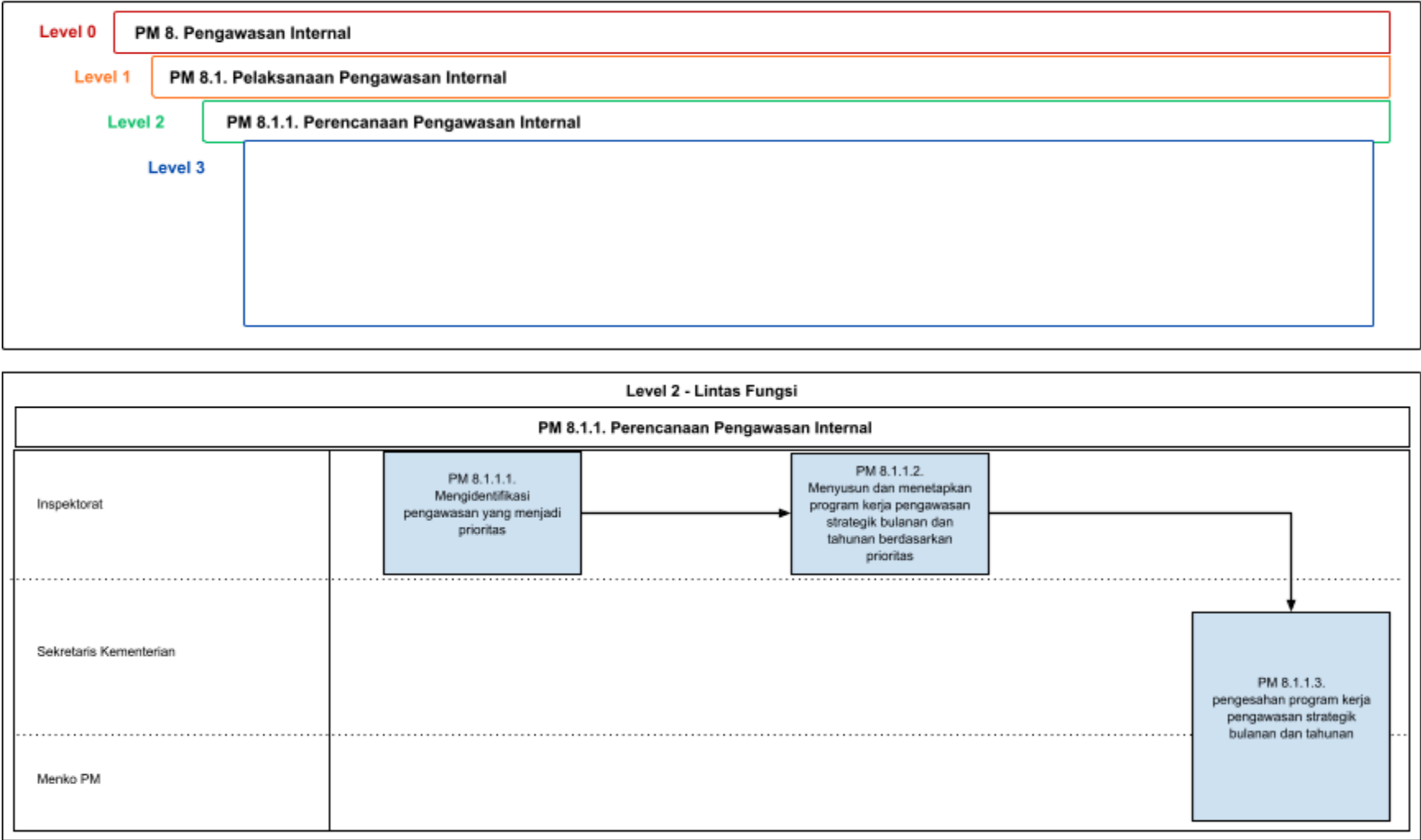
i. Level 2 . . .

i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pengawasan Internal



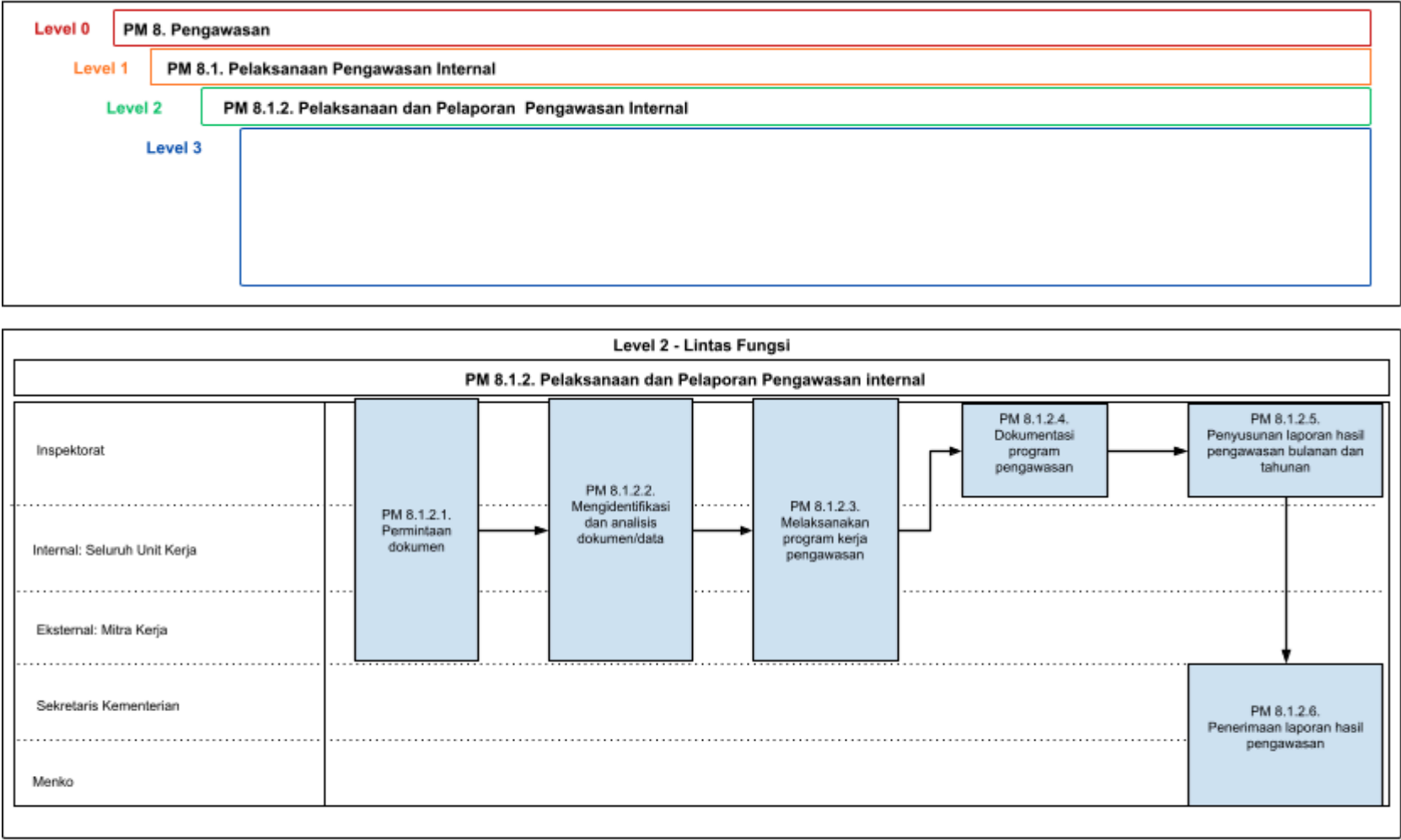
a) Level 2 . . .

a) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1.1. Perencanaan Pengawasan



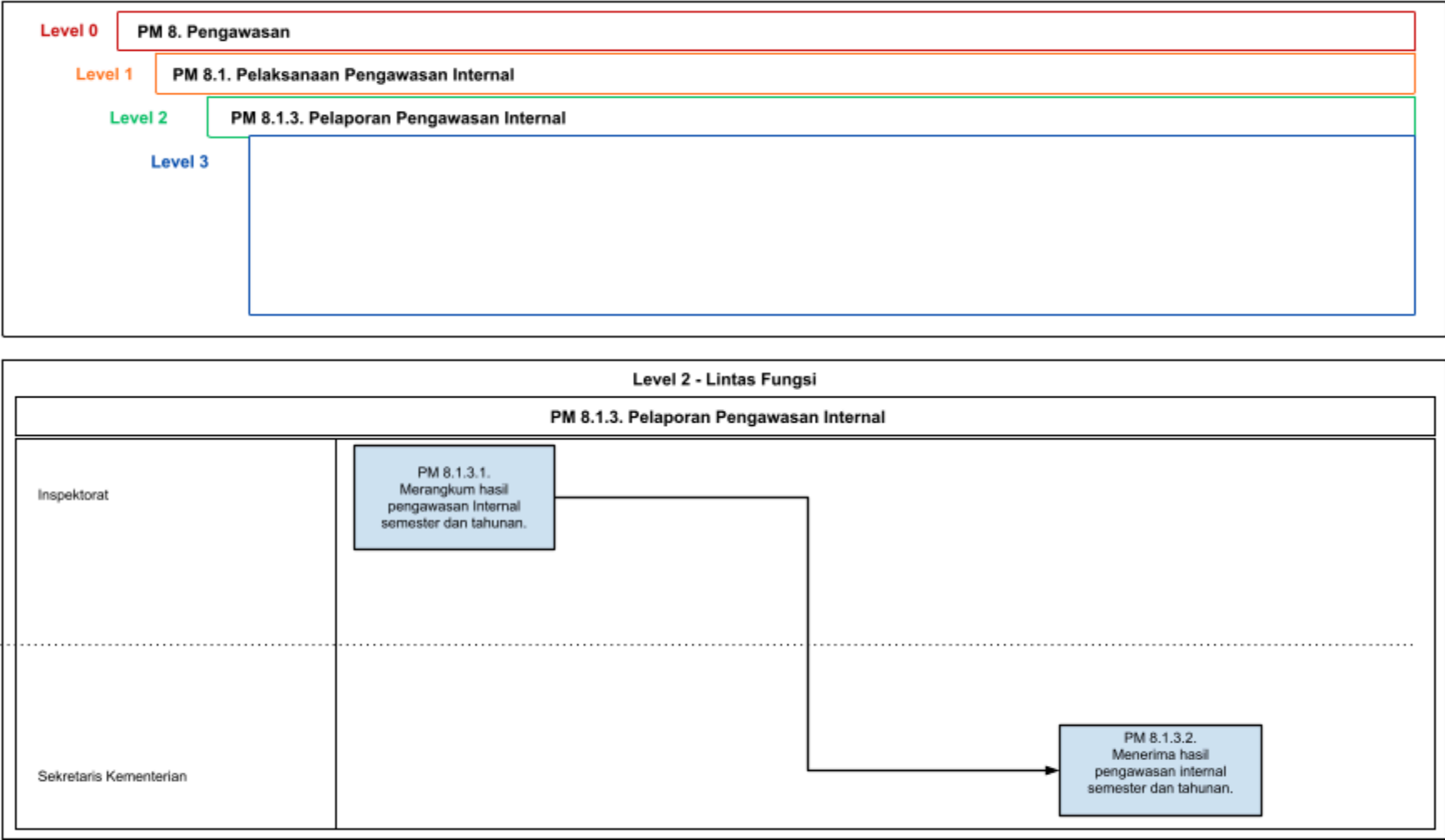
b) Level 2 . . .

c) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1.2. Pelaksanaan Pengawasan

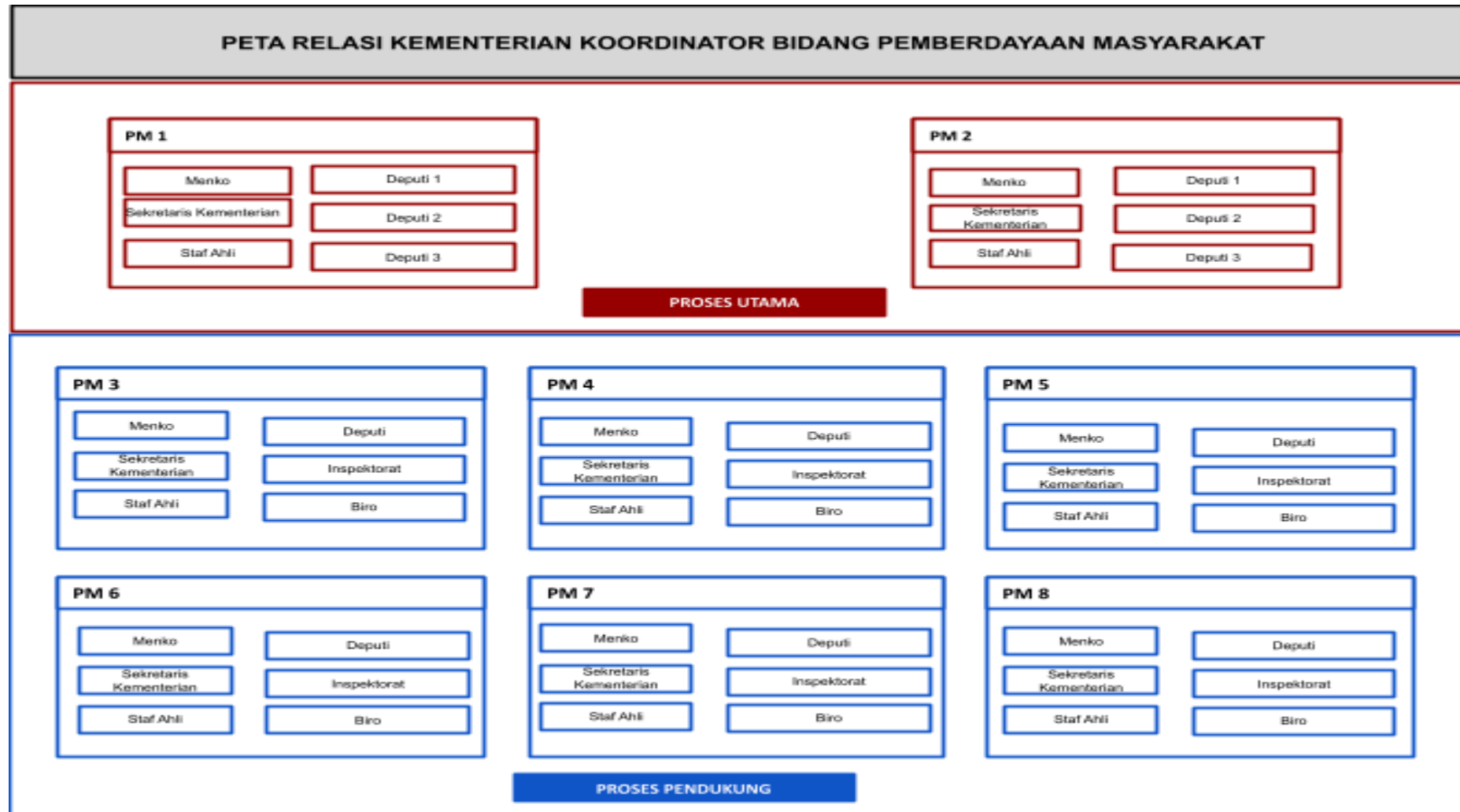


d) Level 2 . . .

d) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1.3. Pelaporan Pengawasan Internal



D. Peta Relasi



BAB IV PENUTUP

Peta Proses Bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PM menggunakan peta proses bisnis ini sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk pencapaian tujuan, sasaran, dan target kinerja yang ditetapkan.

Penyusunan peta proses bisnis ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Peta disajikan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem, alur kerja, dan keterkaitan fungsi utama di lingkungan Kemenko PM, baik pada tingkat makro (antar unit dan antar fungsi) maupun mikro (prosedur pelaksanaan di masing-masing unit kerja).

Sebagai bagian dari upaya penataan tata laksana, peta proses bisnis ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan terukur. Dokumen ini juga menjadi dasar bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pengembangan sistem kerja yang adaptif terhadap dinamika organisasi dan tantangan strategis pemberdayaan masyarakat di masa mendatang. Melalui peta proses bisnis ini, Kemenko PM menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan, dan berorientasi hasil, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ABDUL MUHAJMIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Persidangan



Niken Ariati